



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2016 – 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2021.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

20. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
21. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
- b. instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
 - h.BAB XI : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD;
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026) belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TTD

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan RPJMN, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra - PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-5
1.3. Hubungan Antar dokumen	I-8
1.4. Sistematika RPJMD	I-11
1.5. Maksud dan tujuan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Georafii dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek kesejahteraan Masyarakat.....	II-15
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-35
2.4. Aspek Daya saing Daerah	II-130
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015.....	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan masa lalu	III-30
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-37
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan.....	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-14

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	V-1
5.2 Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-5
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.....	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	VI-4
6.3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025	VI-8
6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan	VI-13
6.5. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.....	VI-22
6.6 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	VI-36
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII-1
7.1. Kebijakan Umum.....	VII-1
7.2. Program Pembangunan Daerah	VII-2
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VII-1
8.1. Program Prioritas	VIII-2
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....	X-1
10.1 Pedoman Transisi	X-1
10.2 Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI PENUTUP.....	XI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Kecamatan dan Penggunaan Lahan (Km ²).....	II-1
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Kecamatan (mdpl).....	II-3
Tabel 2.3	Curah Hujan di Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Dirinci berdasarkan Stasiun.....	II-8
Tabel 2.4	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2015 (jiwa/km ²).....	II-11
Tabel 2.5	Distribusi Persentase PDRB ADHK atas dasar tahun 2010 Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-17
Tabel 2.6.	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015	II-30
Tabel 2.7.	APM Jenjang Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-31
Tabel 2.8.	APK Jenjang Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-32
Tabel 2.9.	Capaian Indkator Program PAUD Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015	II-36
Tabel 2.10.	Capaian Kinerja Pendidikan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-37
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Pendidikan Program Pendidikan Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-39
Tabel 2.12.	Angka Melek Huruf Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-40
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015..	II-41
Tabel 2.14.	Perkembangan Capaian Indikator Manajemen Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2015..	II-42
Tabel 2.15.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Gizi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-43
Tabel 2.16.	Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2015	II-44
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terkait Angka Kesakitan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-46
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terkait Penyakit Tidak Menular Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-47

Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-48
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Cakupan Pelayanan terhadap Bayi dan Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-49
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Upaya Promotif Dan Preventif Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-50
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-53
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-55
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-56
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-58
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-60
Tabel 2.27.	IPG Kabupaten Pemalang Dibandingkan dengan Beberapa Kabupaten Sekitar Tahun 2010-2014	II-61
Tabel 2.28.	Tabel IDG Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Banjarnegara tahun 2010-2014.....	II-62
Tabel 2.29.	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya Tahun 2014	II-63
Tabel 2.30.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-64
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-66
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-68
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-70
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-72
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-74

Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-76
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-79
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-81
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Perkoperasian di Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-82
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-83
Tabel 2.41.	Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-85
Tabel 2.42.	Capaian indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-87
Tabel 2.43.	Capaian indikator Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015	II-88
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-88
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-90
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-91
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-94
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-95
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-98
Tabel 2.50.	Data Kunjungan Wisata Tahun 2015.....	II-100
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-102
Tabel 2.52.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-104
Tabel 2.53.	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-106
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-108
Tabel 2.55.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-110

Tabel 2.56.	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-111
Tabel 2.57.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-112
Tabel 2.58.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-113
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-114
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-115
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-116
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Hukum Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-118
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Humas Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-119
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Keuangan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-120
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-122
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Organisasi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-123
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-124
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.	II-126
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-127
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-130
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-134
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015	III-5
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015	III-13

Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015	III-19
Tabel 3.4	Neraca Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015	III-23
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Pemalang	III-30
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-31
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015.....	III-33
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015.....	III-34
Tabel 3.9	Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010-2015.....	III-36
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	III-39
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021.....	III-41
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	III-42
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021	III-47
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021	III-49
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021	V-8
Tabel 6.1	Penetapan Kawasan Strategis Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.....	VI-19
Tabel 6.2	Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.....	VI-29
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	VII-8
Tabel 8.1	Matriks Program Prioritas dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	VIII-13
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-11
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Pemalang.....	II-2
Gambar 2.2	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015 (jiwa)	II-9
Gambar 2.3	Grafik Perkembangan Dependency Ratio Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-10
Gambar 2.4	Grafik Perkembangan PDRB ADHK atas dasar Tahun 2010 Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-16
Gambar 2.5	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2014.....	II-18
Gambar 2.6	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang terhadap Beberapa Kabupaten Sekitar Tahun 2014	II-19
Gambar 2.7	Grafik Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (%)	II-21
Gambar 2.8	Grafik Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015	II-22
Gambar 2.9	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013.....	II-23
Gambar 2.10	Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 – 2014	II-24
Gambar 2.11	Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2014	II-24
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2014	II-25
Gambar 2.13	Grafik Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014	II-26
Gambar 2.14	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 – 2014	II-27
Gambar 2.15	Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pemalang dibandingkan Kabupaten Sekitar Tahun 2014	II-27
Gambar 2.16	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015	II-28
Gambar 2.17	Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kab.Pemalang Tahun 2011 -2015	II-33
Gambar 2.18	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Pemalang Tahun 2011 – 2015	II-34
Gambar 2.19	Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABa) Kab. Pemalang Tahun 2011-2015.....	II-34
Gambar 2.20	Grafik Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kab. Pemalang yang Disesuaikan Tahun 2011-2015	II-130

Gambar 2.21	Grafik Perbandingan Capaian Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Kab. Pemalang dengan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014	II-131
Gambar 3.1	Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015	III-3
Gambar 3.2	Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2010-2015	III-3
Gambar 3.3	Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015	III-7
Gambar 3.4	Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2010-2015	III-8
Gambar 3.5	Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015	III-9
Gambar 3.6	Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015	III-10
Gambar 3.7	Besarnya Belanja Daerah Tahun 2010-2015	III-12
Gambar 3.8	Besarnya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2010-2015	III-14
Gambar 3.9	Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2010-2015	III-15
Gambar 3.10	Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Daerah Tahun 2010-2015	III-16
Gambar 3.11	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan Terhadap Belanja Langsung Tahun 2010-2015	III-17
Gambar 3.12	Surplus/Defisit Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015	III-17
Gambar 3.13	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2010-2015	III-18
Gambar 3.14	Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010-2015.....	III-35
Gambar 6.1	Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	VI-3
Gambar 6.2	Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	VI-7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Tujuannya adalah mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah, serta memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mencakup kewenangan konkuren yang dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kecuali kewenangan absolut yang dijalankan oleh pemerintah.

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi dan meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 260 dan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Pasal 260 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Selanjutnya Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan disusun secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, dan ayat (2) yaitu rencana pembangunan daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut Pasal 263 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 265 (1) menyatakan RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah; (2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan (3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi satu titik balik dalam proses demokratisasi di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi salah satu dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) secara serentak yang terbagi kedalam dua tahap pada tahun 2015 dan tahun 2017. Sebagai salah satu daerah yang habis masa kepemimpinan kepala daerahnya pada tahun 2015 mengharuskan Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan kegiatan pilkada langsung pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Desember 2015 dengan kemenangan dari Pasangan Bapak Junaedi, SH, MM dan Bapak Drs. Martono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2016-2021. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada kepala daerah terpilih untuk menyusun RPJMD yang harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasal 14 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam

¹UU 23 Tahun 2014

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Sedangkan berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD memuat : visi, misi, dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan pada lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi: persiapan penyusunan RPJMD; penyusunan rancangan awal RPJMD; penyusunan rancangan RPJMD; pelaksanaan musrenbang RPJMD; perumusan rancangan akhir RPJMD; dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD berada pada tahapan ke-3 dari RPJPD. Arah kebijakan prioritas yang diamanatkan dalam RPJPD tersebut meliputi:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Dokumen RPJMD nantinya akan digunakan oleh seluruh elemen pemerintahan, yaitu jajaran perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD nantinya juga akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi DPRD dan masyarakat dalam mengawal berjalannya pemerintahan oleh Bupati pada Periode Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Amanat diatas memberikan gambaran bahwa keberadaan RPJMD merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan yang telah ada.

Menurut Pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan bahwa : (1) Daerah

melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah; (2) pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; dan (3) kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Selanjutnya Pasal 259 menyatakan bahwa : (1) untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah; (2) koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan (3) koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta (4) koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Untuk mencapai sinergitas dalam pembangunan daerah, maka penyusunan RPJMD selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengacu dan berpedoman terhadap RPJPD Tahun 2005-2025, Dokumen RPJMN Tahun 2014-2019, Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, serta Dokumen RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031. Selain dokumen perencanaan, RPJMD juga telah mengacu terhadap beberapa produk hukum daerah yang telah disusun, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan RPJMD berkaitan tentang kewilayahan akan memperhatikan dokumen RTRW yang didalamnya berisi tentang arah pengembangan zona kewilayahan dan pemanfaatan ruang. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan potensi wilayah.

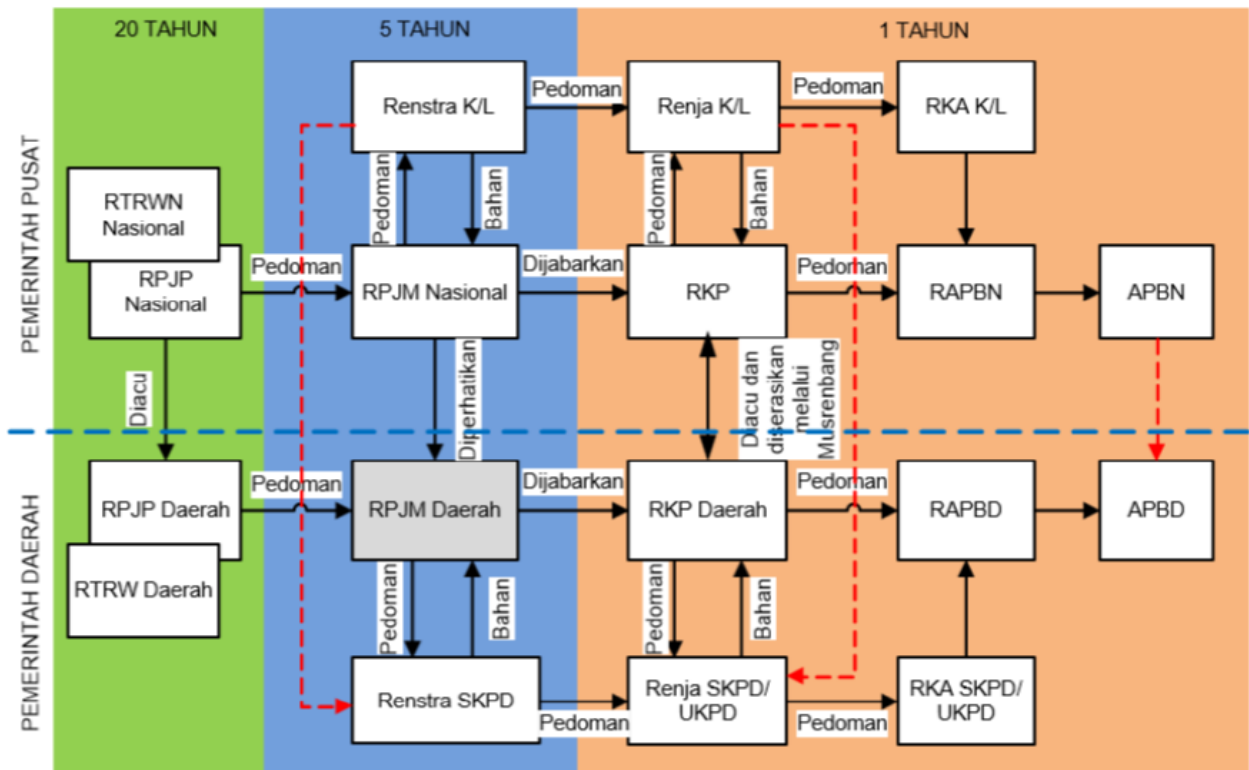
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran atas kebijakan pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 untuk tahapan perencanaan tahun 2016-2020. Pada tahap tersebut, RPJMD Tahun 2016-2021 diprioritaskan pada: 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah; 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur; 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat; dan 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Penyusunan RPJMD juga tidak terlepas dari prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk lima tahun yang akan datang dapat dilihat pada misi pembangunan dan target Kabupaten Pemalang setiap tahunnya. Target tersebut terserap dan diterjemahkan kedalam target tahunan RPJMD Kabupaten Pemalang, meliputi Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMN 2015-2019 dengan memperhatikan NAWACITA pembangunan yang merupakan agenda untuk mewujudkan kondisi berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renstra PD dan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen RKPD. Dokumen RKPD menjadi dasar untuk penyusunan KUA,

Renja PD serta PPA setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan, sebagaimana bagan dibawah ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

1.4. Sistematika RPJMD

Sistematika RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika RPJMD, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang kondisi dari aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis, berisi tentang permasalahan di masing-masing urusan dan isu strategis kewilayahan.

BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan; berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang kebijakan umum dan program yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, berisi tentang program, indikator program dan pendanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu urusan; baik wajib, pilihan dan urusan pendudung.
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah, berisi tentang indikator kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan kondisi ketercapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang.
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
BAB XI	Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan lima tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Tujuan dari penyusunan RPJMD adalah:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah.
2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2016-2021;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura). Secara administratif Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain, yaitu:

Sebelah Utara	:	Laut Jawa
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pekalongan
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
Sebelah Barat	:	Kabupaten Tegal

Kabupaten Pemalang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 222 kelurahan/desa. Keempat belas kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu mencapai 139,19 Km²(12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu seluas 26,31 Km² (2,36%). Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Pemalang
berdasarkan Kecamatan dan Penggunaan Lahan (Km²)

Kecamatan	Luas Lahan (Km ²)								Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah							
		Bangunan & Pekarangan	Tegalan/ Kebun	Hutan Rakyat	Tambak/ Kolam	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-Lain	
Moga	13.99	8.34	7.50	-	-	4.48	1.89	5.20	41,40
Warungpring	11.49	5.33	3.15	3.00	-	0.88	0.65	1.81	26,31
Pulosari	2.39	10.47	42.17	1.90	-	28.91	-	1.68	87,52
Belik	25.60	18.65	31.28	-	0.02	43.72	1.32	3.94	124,54
Watukumpul	54.51	6.84	18.91	10.45	0.03	33.67	-	4.61	129,02
Bodeh	21.60	9.69	7.64	1.67	-	36.84	1.82	6.72	85,98

Kecamatan	Luas Lahan (Km ²)								Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah							
		Bangunan & Pekarangan	Tegalan/ Kebun	Hutan Rakyat	Tambak/ Kolam	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-Lain	
Bantarbolang	26.95	12.80	21.06	-	-	73.54	-	4.84	139,19
Randudongkal	32.82	8.82	13.35	-	-	32.80	-	2.53	90,32
Pemalang	41.19	14.07	6.91	-	0.36	34.01	-	5.39	101,93
Taman	36.07	11.63	1.33	-	0.50	7.78	-	10.10	67,41
Petarukan	51.60	14.59	3.10	-	0.89	-	-	11.11	81,29
Ampelgading	26.05	8.33	2.23	-	-	1.30	-	15.39	53,30
Comal	11.15	10.80	1.02	-	-	-	-	3.58	26,54
Ulujami	21.73	10.46	7.65	-	14.06	-	3.15	3.49	60,55
Jumlah	377.14	150.83	167.30	17.02	15.86	297.93	8.83	80.39	1.115,30
					738.16				

Sumber : Pemalang Dalam Angka, 2015

2.1.1.2. Letak Astronomis dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pemalang terletak pada 109°17' 30"- 109°40' 30' Bujur Timur (BT) dan 8°52' 30' - 7°20' 11' Lintang Selatan (LS). Peta administratif Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2015.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Pemalang

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Secara topografis, Kabupaten Pemalang memiliki keunikan wilayah, yang dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kategori, yaitu daerah dataran pantai; daerah dataran rendah; daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan :

1. Daerah dataran pantai: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter diatas permukaan air laut (dpl); meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
2. Daerah dataran rendah: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter dpl yang meliputi 69 desa dan 10 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai.
3. Daerah dataran tinggi: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter dpl yang meliputi 76 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.
4. Daerah pegunungan: terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter diatas permukaan laut, meliputi 39 desa yang terletak dibagian selatan.
 - b. Daerah berketinggian 925 meter diatas permukaan laut yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

Secara rinci ketinggian wilayah di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Pemalang
berdasarkan Kecamatan (mdpl)

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah
1.	Moga	497
2.	Warungpring	213
3.	Pulosari	914
4.	Belik	738
5.	Watukumpul	559
6.	Bodeh	15
7.	Bantarbolang	34
8.	Randudongkal	212
9.	Pemalang	6
10.	Taman	6
11.	Petarukan	8
12.	Ampelgading	13
13.	Comal	9
14.	Ulujami	6

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2015.

Kenampakan bentang alam wilayah Kabupaten Pemalang merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan lereng beragam mulai 0 % sampai lebih dari 40 % dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Daerah dataran berada pada wilayah bagian utara yang meliputi: Kecamatan Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami serta wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Randudongkal dan Bodeh dengan prosentase kemiringan lereng 0 – 2 %.
2. Daerah dengan kemiringan lereng antara 2 – 15 % terdapat disebagian Kecamatan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, dan Belik. Daerah perbukitan yang cukup curam dengan kemiringan lereng antara 15– 45 % terdapat di Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Belik, dan Pulosari serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Bodeh. Daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % hanya terdapat di Kecamatan Moga dan Belik.

2.1.1.4. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Pemalang meliputi : jenis tanah, struktur geologi, dan gerakan tanah yang umumnya mempengaruhi lingkungan fisik di wilayah ini.

1. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik.

- a. Jenis aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Petarukan, Pemalang, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.
- b. Jenis tanah litosol dan kompleksnya terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- c. Jenis latosol dan sejenisnya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.

2. Struktur Geologi

Struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, tapak formasion, rambatan formasion, produk vulkanik, produk vulkanik lava dan halang formasi.

- a. Struktur aluvium terdapat di Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, bagian utara dan Bodeh.
- b. Formasi tapak terdapat di Kecamatan Pemalang bagian utara, Ampelgading, Bodeh dan bagian selatan Kecamatan Bantarbolang.
- c. Formasi rambatan terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik, Watukumpul, bagian utara Kecamatan Bodeh, dan sebagian Kecamatan Randudongkal.
- d. Struktur batuan produk gunung api – tak terpisahkan terdapat disebagian besar Kecamatan Randudongkal.
- e. Struktur batuan produk gunung api – lava terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik dan Pulosari.
- f. Formasi halang terdapat di sebagian besar Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Pulosari.

3. Gerakan Tanah

Kabupaten Pemalang mempunyai potensi bencana geologi berupa gerakan tanah antara lain : sesar di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Bantarbolang dan Randudongkal. Sesar naik di Kecamatan Watukumpul dan sesar geser di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi kedalam tiga kategori sumber air, yaitu:

1. Air Permukaan

Kabupaten Pemalang dialiri sungai yang memegang peranan penting yaitu Sungai Waluh yang terletak kurang lebih 4 km dari pusat kota dan sungai Comal yang terletak kurang lebih 14 km dari pusat kota. Sungai lainnya yang juga penting antara lain; Sungai

Layangan, Sungai Polaga, Sungai Rambut, Sungai Sodong, Sungai Rejasa, Sungai Torong dan Sungai Lumeneng.

2. Mata Air

Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber air berupa mata air yang tersebar di beberapa tempat. Beberapa sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan, antara lain:

- a. Mata air Gung Agung yang terletak di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang, dengan debit air kurang lebih 10 liter/detik, terletak pada ketinggian kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut.
- b. Mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur Kecamatan Belik.
- c. Mata air Asem yang terletak di Desa Bulakan, dengan debit air kurang lebih 160 meter/detik;
- d. Mata air yang lain diantaranya; Mata air Royom, Ketup, Batur, Setu, Suren, Banyumudal, Suci, Lungsir, Loning dan Gondang.

3. Air Tanah

Sumber air tanah di Kabupaten Pemalang dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

a. Daerah Dataran Rendah

Tanah terdiri dari endapan-endapan lepas yang mempunyai sifat lulus air. Pada daerah ini kandungan air tanahnya cukup besar hanya saja karena dekat pantai maka terjadi intrusi air laut.

b. Daerah Perbukitan

1) Daerah Perbukitan Tua

Daerah perbukitan tua ditempati oleh batu-batuan dari formasi *mioson* dan *floosen* yang mempunyai sifat kelulusan air yang sangat kecil, terutama serpih dan Nepal.

2) Daerah Perbukitan Muda

Daerah perbukitan muda ditempati batuan *tafaan* hasil gunung berapi, litologinya bersifat lulus air, tetapi morfologinya berupa perbukitan dengan lereng yang cukup terjal dimungkinkan air tanahnya baru mulai terbentuk. Pada satuan *tafaan* litologinya bersifat lulus air, maka kemungkinan sudah mengandung air tanah.

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun : yakni musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C sampai dengan 31°C. Curah hujan di Kabupaten Pemalang antara 2.000 sampai dengan 6.700 mm/tahun dengan rata-rata 267 mm/tahun. Curah hujan paling tinggi terjadi pada antara bulan januari hingga februari yaitu 593 mm dan 673 mm sedangkan curah hujan paling rendah terjadi pda bulan Agustus yang hanya mencapai 60 mm. Curah hujan di Kabupaten Pemalang dirinci berdasarkan masing-masing stasiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

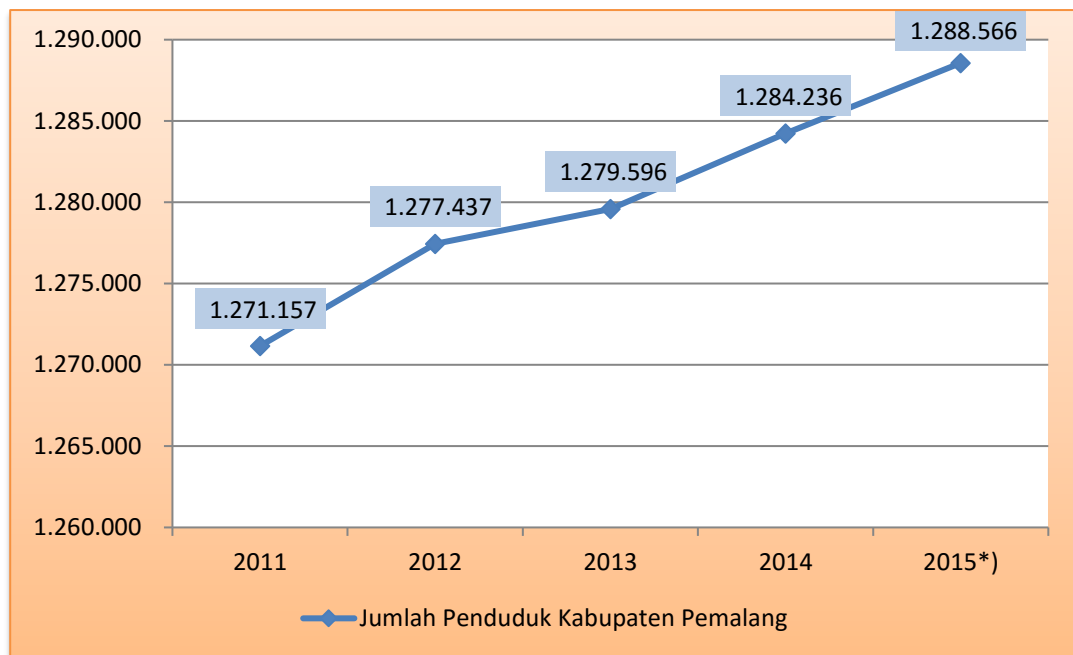
Tabel 2.3
Curah Hujan di Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Dirinci berdasarkan Stasiun

Stasiun	Curah Hujan (mm)												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Kejene	461	724	320	345	145	120	252	137	NA	49	354	252	3.159
Warungpring	671	708	504	367	222	182	393	71	NA	45	240	323	3.726
Kecepit	662	732	547	436	247	211	212	97	NA	86	251	327	3.808
Randudongkal	511	749	300	440	198	143	220	50	NA	67	291	269	3.238
Nambo	597	920	433	607	197	110	118	17	NA	57	356	200	3.612
Moga	1.003	1.091	447	920	467	583	397	218	NA	60	483	1.033	6.702
Pulosari	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Belik	622	995	523	689	450	288	426	109	NA	295	594	772	5.763
Banjardawa	516	475	306	207	77	182	144	13	NA	3	98	241	2.262
Sungapan	523	554	238	187	48	104	94	15	NA	13	82	242	2.100
Karangsuci	504	200	238	157	49	84	92	16	NA	7	51	247	1.645
Klareyan	740	399	125	100	53	57	75	66	NA	9	38	303	1.965
Karangtengah	699	538	267	149	77	126	100	59	NA	5	96	57	2.173
Sukowati	638	724	127	199	170	206	202	17	NA	50	177	227	2.737
Bantarbolang	736	630	380	484	155	111	96	22	NA	92	269	340	3.315
Pedagung	859	715	464	583	272	221	175	63	NA	154	370	477	4.353
Watukumpul	1044	702	192	328	206	204	179	137	NA	105	257	248	3.602
Sipedang	478	990	124	196	283	185	232	13	NA	50	231	517	3.299
Bongas		939	183	359	394	260	234	15	NA	49	311	471	3.215
Rata-rata	593	673	301	355	195	188	192	60		63	239	345	3.193

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2015.

2.1.1.7. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai 1.288.566 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:

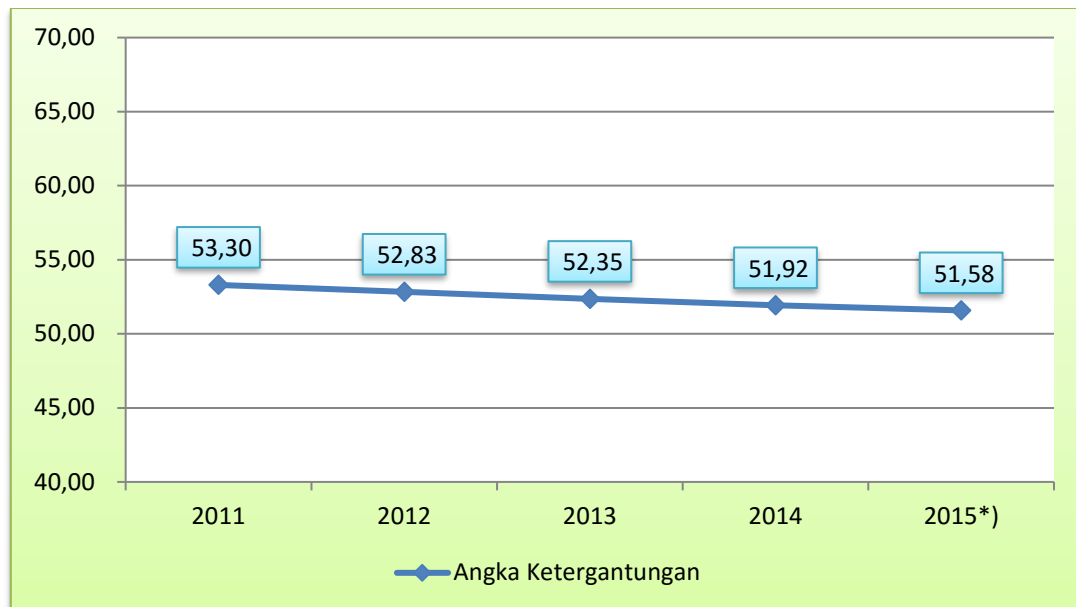


Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2015.

*) angka sementara

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015*) (jiwa)

Angka ketergantungan di Kabupaten Pemalang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Angka Ketergantungan pada tahun 2011 mencapai 53,30% menurun menjadi 51,58% pada tahun 2015. Perkembangan angka ketergantungan masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2015.

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan *Dependency Ratio* Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

Terdapat 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pemalang. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan. Jumlah penduduk yang bermukim pada ketiga kecamatan tersebut mencapai 484.711 jiwa, atau sebesar 37,62% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015. Penduduk Kabupaten Pemalang memiliki karakteristik bermukim di daerah sekitar pusat kota (daerah pantai); kondisi ini terlihat dari jumlah penduduk yang berada di daerah pantai mencapai 57,77% (739.252 jiwa) dari total seluruh penduduk yang ada, disusul dengan penduduk di wilayah pegunungan sebesar 25,51% (326.387 jiwa), dan di wilayah dataran rendah sebesar 17,42% (222.927 jiwa).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang paling besar berada di Kecamatan Comal, yaitu mencapai 3.336 jiwa per km² sedangkan tingkat kepadatan paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul yang mencapai 500 jiwa per km². Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang
per Kecamatan Tahun 2015*) (jiwa/km²)

Kecamatan	Luas Lahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Moga	41,40	63.300	1.529,00
Warungpring	26,31	38.708	1.471,21
Pulosari	87,52	55.666	636,04
Belik	124,54	104.132	836,12
Watukumpul	129,02	64.582	500,55
Bodeh	85,98	54.317	631,73
Bantarbolang	139,19	71.570	514,18
Randudongkal	90,32	97.041	1.074,41
Pemalang	101,93	177.118	1.737,64
Taman	67,41	161.301	2.392,83
Petarukan	81,29	146.293	1.799,64
Ampelgading	53,30	66.266	1.243,27
Comal	26,54	88.554	3.336,64
Ulujami	60,55	99.720	1.646,90
Rata-rata			1.382,16

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2015.

*) Angka Sementara

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui keterpaduan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2036. Ada dua pola ruang wilayah Kabupaten Pemalang yaitu : (1) kawasan lindung dan (2) kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia. Kawasan budidaya terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan,

kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dengan luas kurang lebih 27.513 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas) Hektar terdiri atas : (1) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) Hektar, (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 16.896 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) Hektar.
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat dengan luas kurang lebih 18.473 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hektar
3. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan yaitu :
 - 1) kawasan sawah irigasi dengan luas kurang lebih 30.299 (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektar;
 - 2) Kawasan sawah irigasi ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 3) Kawasan sawah bukan irigasi dengan luas kurang lebih 7.316 (tujuh ribu tiga ratus enam belas) Hektar. Kawasan sawah bukan irigasi ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun.
 - b. Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 9.329 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) Hektar. Kawasan hortikultura ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun.
4. Kawasan Peruntukan Perkebunan dengan luas area kurang lebih 15.713 (lima belas ribu tujuh ratus tiga belas) Hektar terdiri atas : kawasan perkebunan rakyat, dan kawasan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 13.850 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh) Hektar. Kawasan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dengan luas lahan kurang lebih 1.863 (seribu delapan ratus enam puluh tiga) Hektar.
5. Kawasan Peruntukan Perikanan terdiri atas : kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya tambak, kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar, dan kawasan peruntukan pengolahan perikanan.

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi : kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0 (nol) – 6 (enam) mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 6 (enam) -12 (dua belas) mil dari garis pantai, dan kawasan penangkapan ikan skala besar dengan area tangkapan lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Rencana untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap meliputi : 1) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Taman; 2) peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI .
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya tambak seluas 1.728 hektar meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulujami.
 - c. Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar berada di 12 Kecamatan.
 - d. Kawasan peruntukan pengolahan perikanan berada di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami.
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan terdiri atas : 1) kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; 2) kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan 3) kawasan pertambangan pertambangan panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berupa daerah terbuka meliputi wilayah daerah bagian tengah sampai bagian utara. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara berupa potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan. Potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan meliputi : pasir-batu (sirtu) dan tanah urug, tanah liat, batu gamping, batu sabak, Kaolin, Tras, Diorit, Andesit, marmer, oker; dan kalsit.
7. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas : pengembangan kegiatan industri besar, pengembangan kegiatan industri menengah, dan pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro. Rencana kawasan peruntukan industri di Daerah dengan luas kurang lebih 664 (enam ratus enam puluh empat) Hektar. Jenis kegiatan industri

besar yang dikembangkan di Daerah meliputi : industri manufaktur; dan pergudangan. Pengembangan kegiatan industri menengah dikembangkan di: a. Kecamatan Ampelgading; b. Kecamatan Ulujami; c. Kecamatan Petarukan; d. Kecamatan Belik; e. Kecamatan Randudongkal; dan f. Kecamatan Moga. Jenis kegiatan industri menengah yang dikembangkan di Daerah meliputi : a. industri pengolahan hasil pertanian; b. industri batik; c. industri konveksi; d. industri kerajinan kreatif; e. industri makanan; dan f. Industri pertambangan. Pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro dikembangkan di seluruh Daerah. Jenis kegiatan industri kecil dan/atau mikro yang dikembangkan di Daerah meliputi : a. industri pengolahan hasil pertanian; b. industri batik; c. industri konveksi; d. industri kerajinan kreatif; e. industri makanan; dan f. industri pertambangan rakyat.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata terdiri atas a. pariwisata alam; b. pariwisata budaya; dan c. pariwisata buatan. Pariwisata alam meliputi: a. Kawasan Wisata Pantai Widuri di Kecamatan Pemalang; b. Kawasan Wisata Pantai Joko Tingkir di Kecamatan Petarukan; c. Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami; d. Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantarbolang; e. Kawasan Wisata Gunung Gajah di Kecamatan Randudongkal; f. Kawasan Wisata Telaga Silating, sekitar Cagar Alam Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong, dan Curug Lawang di Kecamatan Belik; g. Kawasan Wisata Wanawisata Cempaka Wulung sekitar Cagar Alam Moga, Curug Sibedil, dan kolam renang di Kecamatan Moga; h. Kawasan Wisata Telaga Rengganis dan Bukit Banowati di Kecamatan Watukumpul; i. Jalur pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari; j. Kawasan pesisir, estuari dan hutan mangrove di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami; k. Sepanjang alur sungai tersebar di Daerah; dan l. Kawasan pariwisata alam lainnya. Pariwisata budaya meliputi : a. gelar prosesi hari jadi Kabupaten; b. upacara tradisi menjamas pusaka peninggalan Syeh Pandanjati; c. baritan; d. kerangkeng; e. sintren; f. jaran Kepang; g. kuntulan; dan h. atraksi budaya lainnya. Pariwisata buatan meliputi : a. Kawasan Wisata Gardu Pandang Gunung Slamet; b. Taman wisata air Pantai Widuri; c. Desa Wisata; dan d. Kawasan pariwisata buatan lainnya tersebar di Daerah.

9. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri atas : kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan meliputi : Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Belik, Kawasan Perkotaan Ulujami, Kawasan Perkotaan Petarukan, Kawasan Perkotaan Ampelgading, Kawasan Perkotaan Bantarbolang, Kawasan Perkotaan Bodeh, Kawasan Perkotaan Warungpring, Kawasan Perkotaan Mog, Kawasan Perkotaan Watukumpul dan Kawasan Perkotaan Pulosari. Kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh Daerah dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

Kawasan Peruntukan Lainnya terdiri atas : a. kawasan peternakan; b. kawasan agropolitan; c. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; d. kawasan pesisir; dan e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan peternakan terdiri atas : a. kawasan peruntukan ternak besar; b. kawasan peruntukan ternak kecil; dan c. kawasan peruntukan ternak unggas. Kawasan peruntukan ternak besar dan ternak kecil berada pada kawasan yang mempunyai sumberdaya tanaman makanan ternak. Kawasan peruntukan ternak unggas tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan agropolitan merupakan upaya mengembangkan produk dan nilai tambah hasil pertanian secara komprehensif maka dikembangkan pembangunan pertanian yang berbasis kewilayahan. (Wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan agropolitan meliputi : a. Kecamatan Watukumpul; b. Kecamatan Belik; c. Kecamatan Pulosari; d. Kecamatan Moga; e. Kecamatan Warungpring; dan f. Kecamatan Randudongkal).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

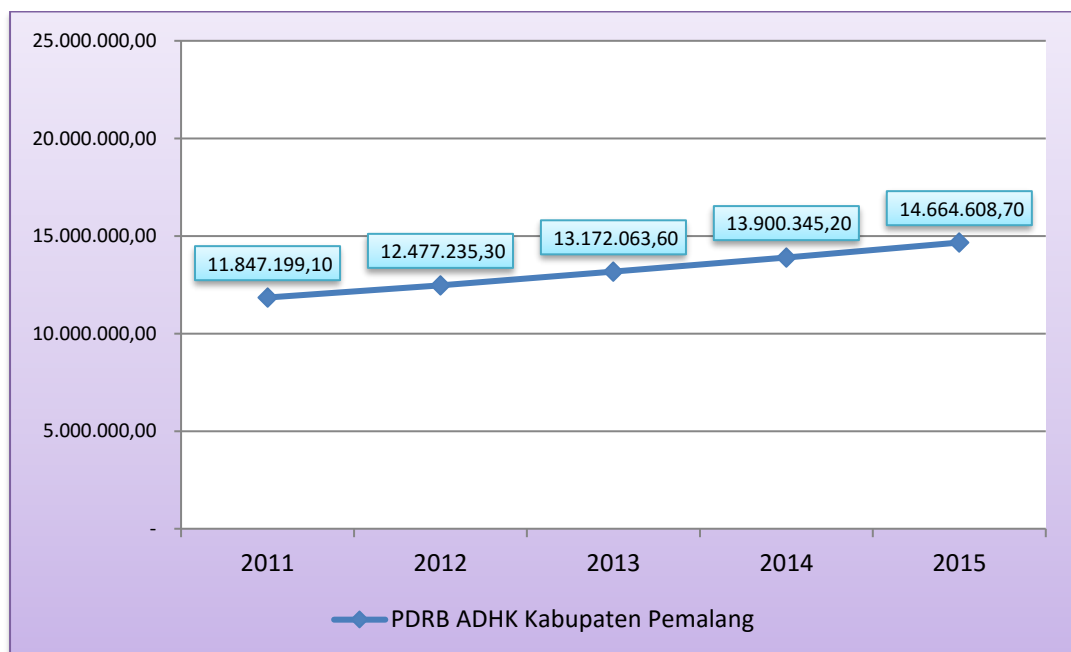
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB dihitung melalui penambahan nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Perhitungan

PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan; 1) pendekatan produksi; 2) pendekatan pengeluaran; 3) pendekatan pendapatan.

PDRB ADHB merupakan jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. PDRB ADHK digunakan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. PDRB ADHK atas dasar tahun 2010 Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut mencapai 23,78%; dari Rp 11.847.199,10 (dalam juta) pada tahun 2011 menjadi Rp 14.664.608,7 (dalam juta) pada tahun 2015. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2016.

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan PDRB ADHK atas dasar Tahun 2010 Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

Perhitungan PDRB pada tahun 2014 telah mengalami sebuah perubahan yang cukup mendasar dalam menghitung PDRB. Perubahan tersebut terletak pada perubahan tahun dasar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB, meliputi: konsep, cakupan dan metodologi yang tertuang dalam *System of National Accounts 2008* (SNA 2008). Perubahan tahun dasar perhitungan didasarkan pada

beberapa hal, antara lain perubahan ekonomi. Terjadi banyak perubahan pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional pada periode 10 tahun terakhir. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian agar perhitungan terkait dengan level dan struktur ekonomi dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Implikasi dari perubahan metode dan konsep perhitungan menyebabkan lapangan usaha yang menjadi dasar dalam perhitungan juga bertambah. Lapangan usaha pembentuk yang awalnya sebanyak 9 sektor bertambah menjadi 17 sektor. Pada tahun 2015, lapangan usaha yang paling dominan dalam pembentukan PDRB ADHK adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 27,97%. Capaian lapangan usaha tersebut kendati masih memiliki proporsi yang cukup besar akan tetapi cenderung mengalami penurunan. Sektor lain yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 adalah lapangan usaha pengolahan, yaitu mencapai 20,75%; meningkat sebesar 0,47 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Persentase terbesar ketiga adalah lapangan usaha perdagangan besar, eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 14,77% pada tahun 2015 atau menurun sebesar 0,47 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Pemalang pada tahun 2011-2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.

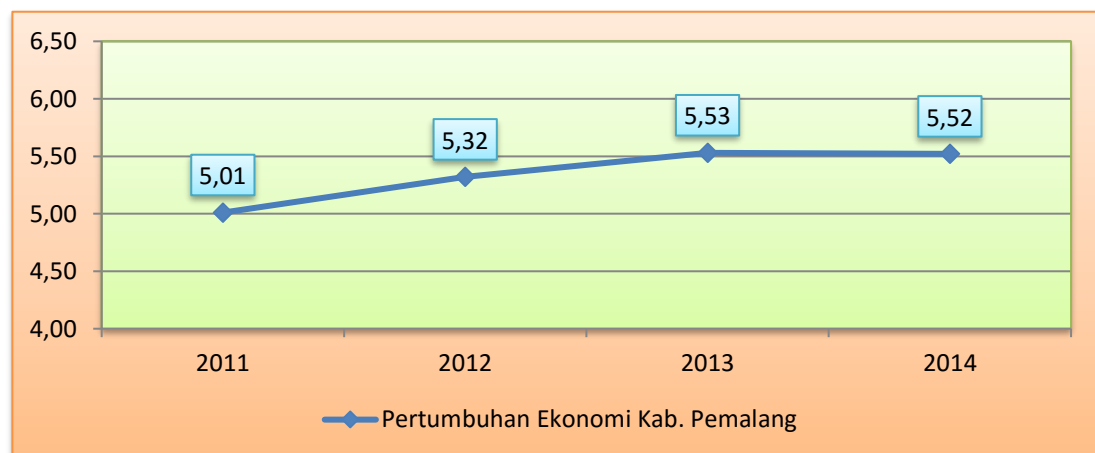
Tabel 2.5
Distribusi Persentase PDRB ADHK atas dasar tahun 2010
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,17	28,03	29,15	28,19	27,97
B	Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,37	4,34	4,65	4,93
C	Industri Pengolahan	18,83	19,22	19,00	20,28	20,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi	4,11	4,17	4,15	4,11	4,12
G	Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,96	16,39	15,75	15,24	14,77
H	Transportasi dan Perdagangan	2,73	2,75	2,68	2,67	2,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	5,25	5,04	5,02	5,07
J	Informasi dan Komunikasi	1,98	1,96	1,92	1,87	1,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	2,99	2,96	2,94	3,00

Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
L	Real Estate	1,71	1,67	1,63	1,61	1,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Perta-hanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	3,81	3,73	3,48	3,42
P	Jasa Pendidikan	4,55	5,24	5,50	5,71	5,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	1,00	1,01	1,01	1,01
RSTU	Jasa Lainnya	2,90	2,67	2,64	2,71	2,62
	PDRB ADHK Tahun 2010	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2015.

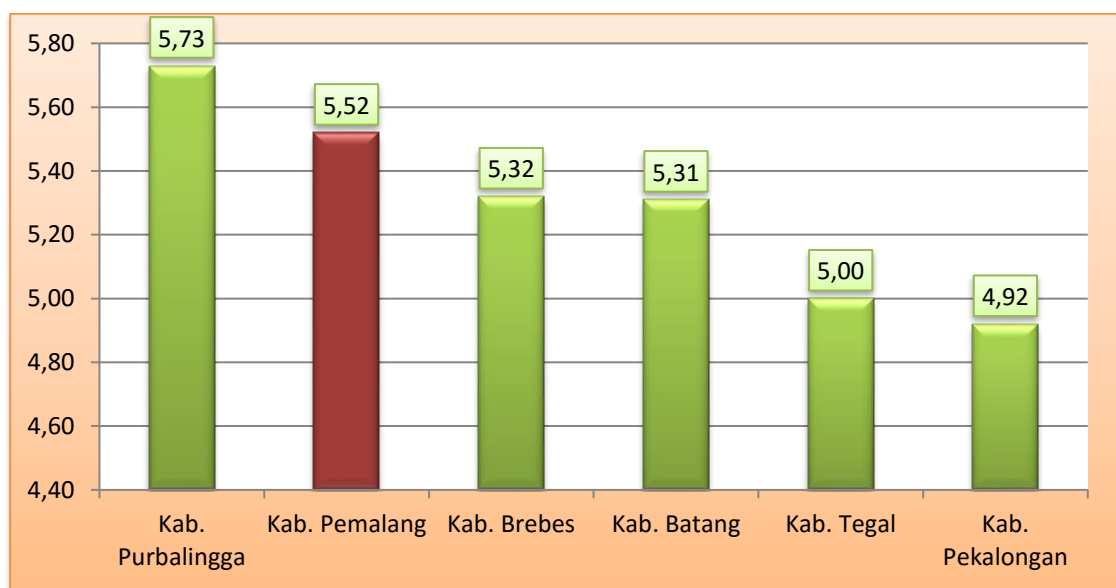
Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang pada kurun waktu tahun 2011-2014 cenderung mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 adalah sebesar 5,01% meningkat menjadi 5,53% pada tahun 2013 akan tetapi sedikit mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 5,52%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang disebabkan oleh kegagalan sektor pertanian dalam menghasilkan produksi pertanian pangan utama –yaitu padi- akibat dari kondisi cuaca. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2014

Diantara beberapa kabupaten lain disekitarnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Brebes (5,32%), Kabupaten Batang (5,31%), Kabupaten Tegal (5,00%) dan Kabupaten Pekalongan (4,92%). Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten Purbalingga yang pada tahun 2014 mencapai 5,73%. Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang terhadap beberapa kabupaten di sekitarnya secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.6 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang terhadap Beberapa Kabupaten Sekitar Tahun 2014

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi dapat digolongkan

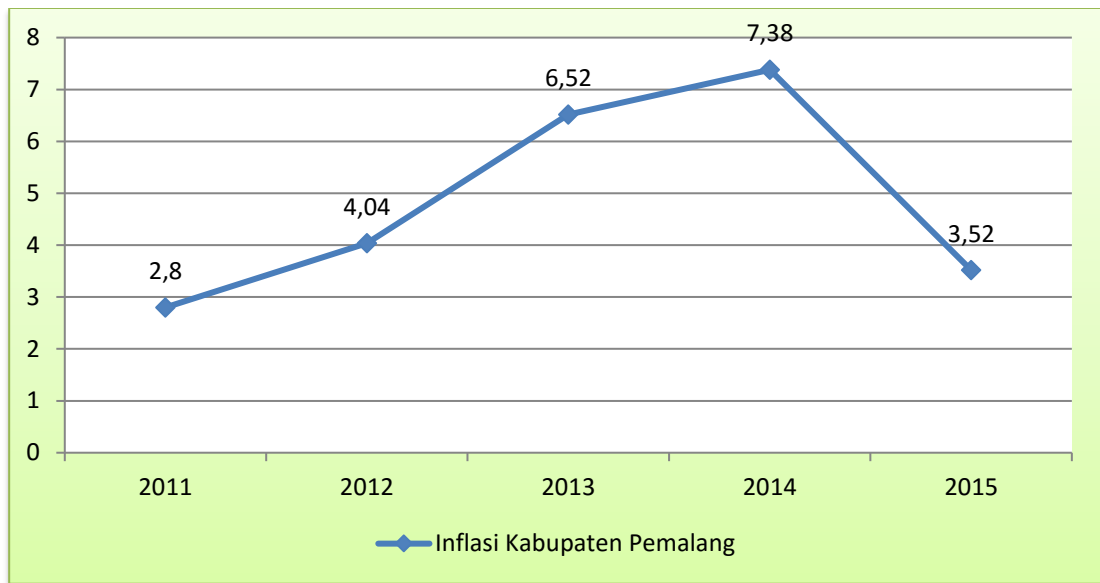
menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Inflasi di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2015. Inflasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai 3,52% cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan capaian inflasi pada tahun 2011 yang sebesar 2,8%. Tahun 2015 mengalami inflasi atau kenaikan indeks sebesar 0,97 persen (8,35%) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,86. Inflasi di Kabupaten Pemalang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 2,94 persen; kelompok sandang sebesar 1,40 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,63 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,49 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok komoditas yang menunjukkan penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen.¹

Capaian inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, yaitu 8,55%.² Dilihat dari relevansinya, perkembangan inflasi di Kabupaten Pemalang masih sejalan dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah. Kendati mengalami kenaikan, inflasi di Kabupaten Pemalang masih dalam kategori rendah karena masih berada dibawah 10%. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

¹ Berita Resmi Statistik, No.02/01/3327/2016. 5 Januari 2016

² Berita Statistik Jawa Tengah, No.83/12/33/Th.IX, 1 Desember 2015



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (%)

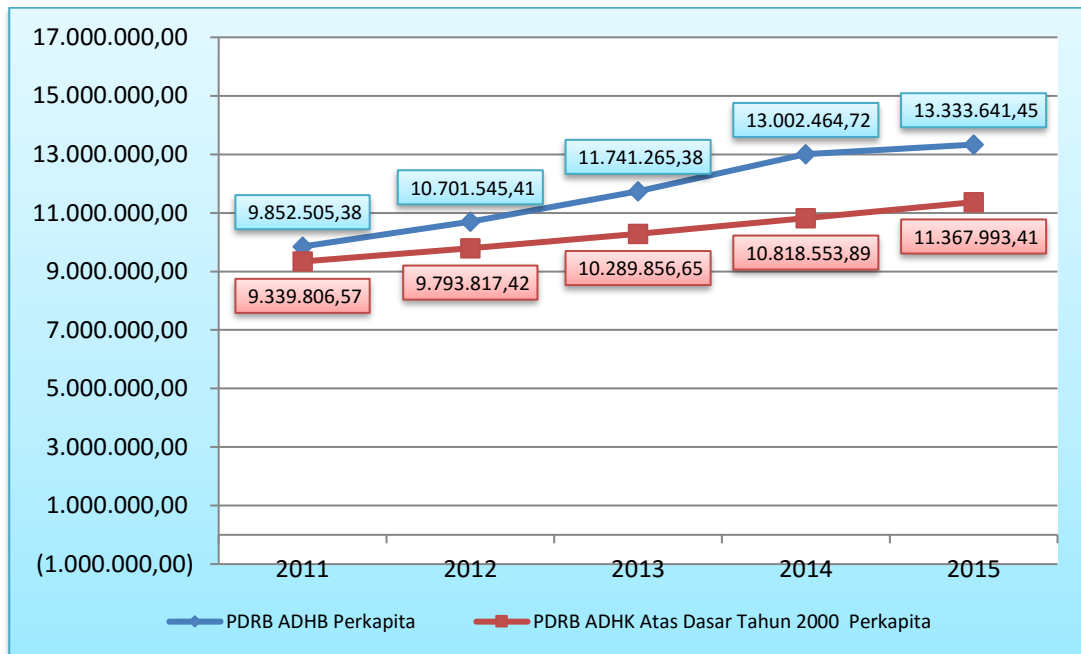
2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, belum sepenuhnya menunjukkan sebagai indikator kenaikan taraf hidup masyarakat.

Hal tersebut didasari, antara lain : (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi, dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata di kalangan penerima pendapatan, karena dalam prakteknya tidak semua faktor produksi, khususnya SDM, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi.

PDRB perkapita di Kabupaten Pemalang, baik PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK atas dasar tahun 2010, Tahun 2011-2015 mengalami kenaikan. PDRB Perkapita ADHB adalah Rp 13.333.641,45 pada tahun 2015 meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu Rp 13.002.464,72 dan Rp 10.701.545,41 pada tahun 2012. Kondisi

yang sama juga ditunjukkan oleh capaian PDRB ADHK atas dasar tahun 2010, yaitu sebesar Rp 11.367.993,41 pada tahun 2015 meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang hanya mencapai Rp 9.339.806,57. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2015.

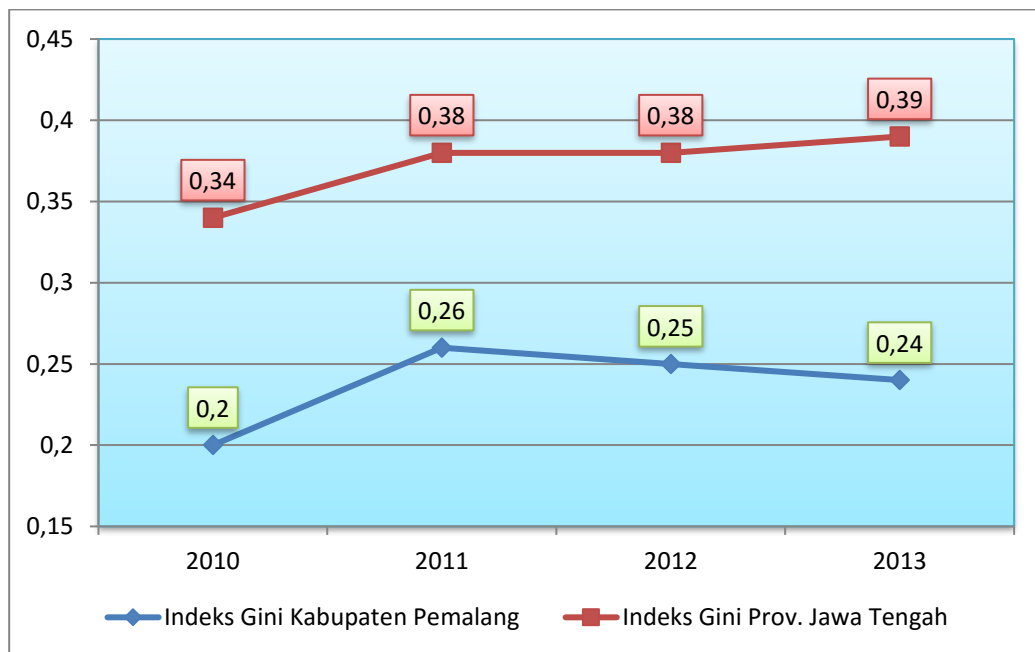
Gambar 2.8 Grafik Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah. Indeks Gini (IG) dihitung dengan menggunakan koefisien antara 0 hingga 1. Koefisien angka 0 berarti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan sedangkan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1. Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Capaian Indeks Gini Kabupaten Pemalang cenderung mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Indeks Gini Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 mencapai 0,2 meningkat menjadi 0,26 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Indeks Gini

menurun menjadi 0,25 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 0,23. Capaian Indeks Gini Kabupaten Pemalang pada tahun 2013 masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,39. Capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori sedang dengankan capaian Kabupaten Pemalang dalam kondisi rendah. Rendahnya capaian Indeks Gini di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Pemalang relatif rendah. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

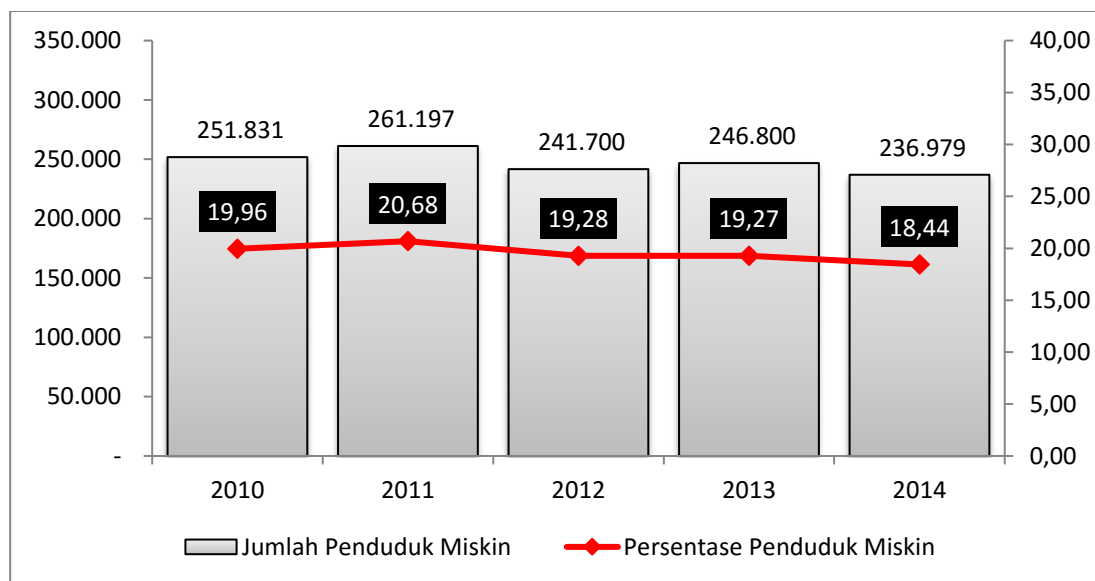


Sumber: Data Primer TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2015.

Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

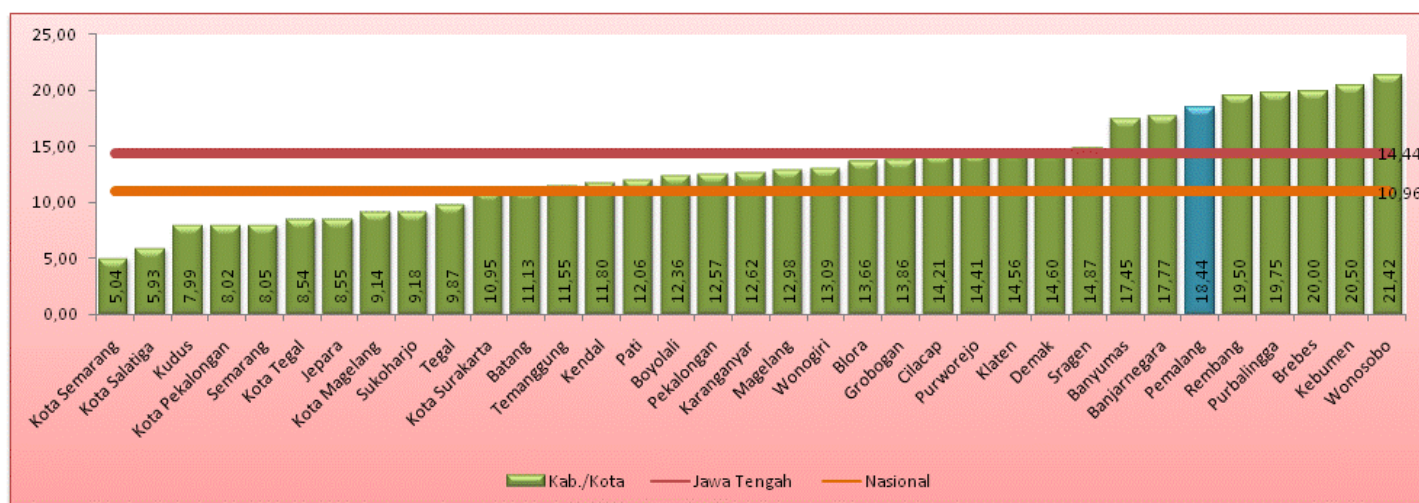
Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Pemalang cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2010-2014. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 adalah sebesar 19,96% meningkat pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,72% menjadi 20,68%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 mencapai 18,44% atau menurun sebesar 0,83 poin dibandingkan capaian tahun 2013. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Data Primer TKPK Pronvisi Jawa Tengah, 2015.

Gambar 2.10 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan posisi relatif, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang memiliki capaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Tengah; bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah (14,44%). Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang berada pada posisi ke-6 teratas setelah Kabupaten Purbalingga (20,53%), Kabupaten Brebes (20,82%), Kabupaten Rembang (20,97%), Kabupaten Kebumen (21,32%), dan Kabupaten Wonosobo (22,08%). Posisi relatif Kabupaten Pemalang dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

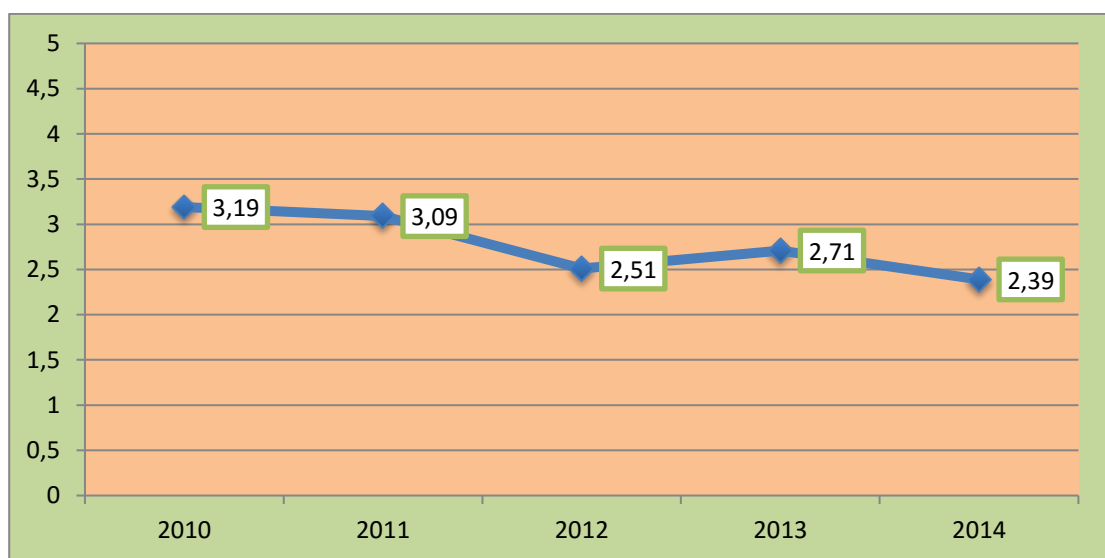


Sumber: Data Primer TKPK Pronvisi Jawa Tengah, 2015.

Gambar 2.11 Grafik Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten/Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2014.

2.2.1.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

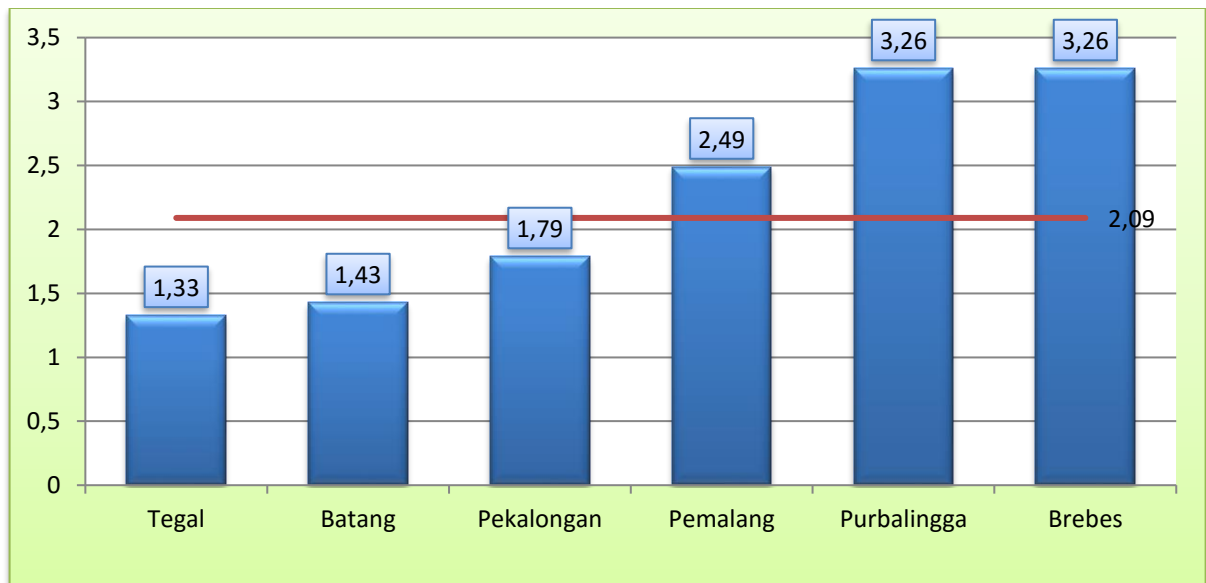
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dari 3,19 menjadi 2,39. Penurunan P1 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan. Perkembangan P1 di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Data Primer TKPK Pronwisi Jawa Tengah, 2015.

Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2014

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten sekitar berada pada posisi ketiga tertinggi diatas Kabupaten Purbalingga (3,26) dan Kabupaten Brebes (3,26). Kondisi ini menunjukkan bahwa kendati kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Pemalang telah menurun akan tetapi masih berada dibawah rata-rata kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

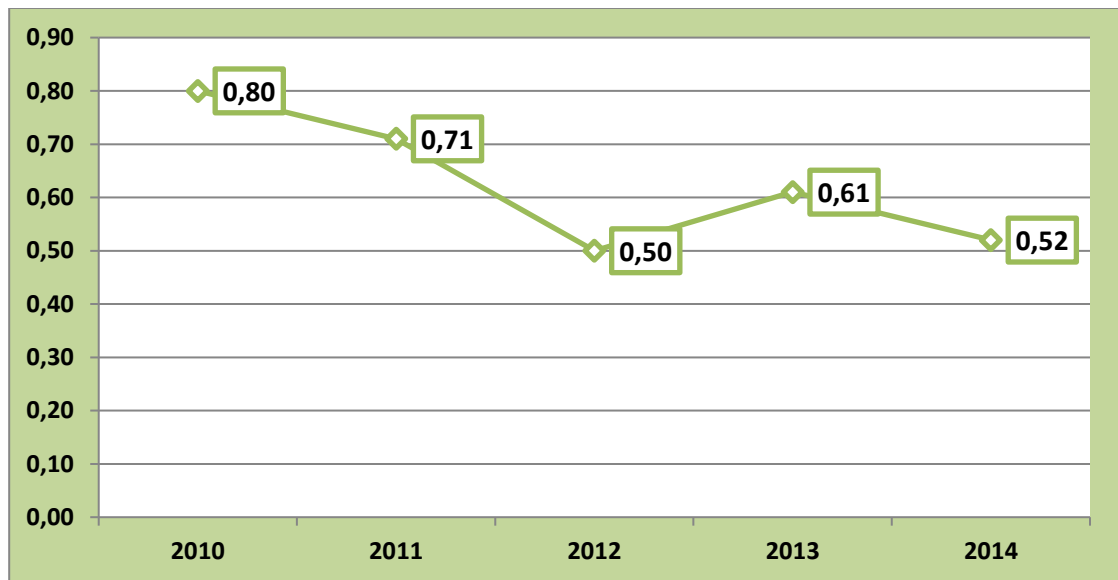


Sumber: Data Primer TKPK Provisi Jawa Tengah, 2015.

Gambar 2.13 Grafik Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014

2.2.1.7. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

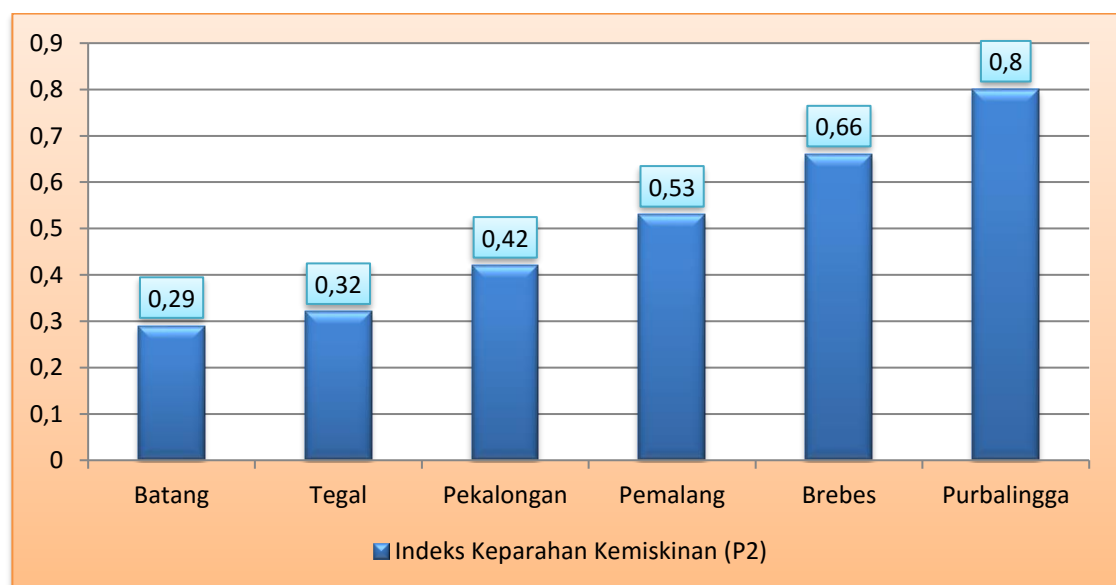
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. P2 di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan; meskipun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin dibandingkan dengan capaian pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sebuah pergeseran kenaikan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada tahun 2014; meskipun tidak terlalu besar. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan secara rinci dapat dilihat grafik dibawah ini.



Sumber: Data Primer TKPK Pronvisi Jawa Tengah, 2015.

Gambar 2.14 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pemalang Tahun 2010 – 2014

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pemalang apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain berada pada posisi ke-8 teratas; seteah Kabupaten Purbalingga (0,73), Kabupaten Brebes (0,76), Kabupaten Banjarnegara (0,77), Kabupaten Banyumas (0,83), Kabupaten Rembang (0,88), Kabupaten Kebumen (0,91) dan Kabupaten Wonosobo (1,25). Capaian P2 Kabupaten Pemalang masih berada sedikit dibawah capaian rata-rata Jawa Tengah (0,59). Perbandingan P2 Kabupaten Pemalang dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Data Primer TKPK Pronvisi Jawa Tengah, 2015.

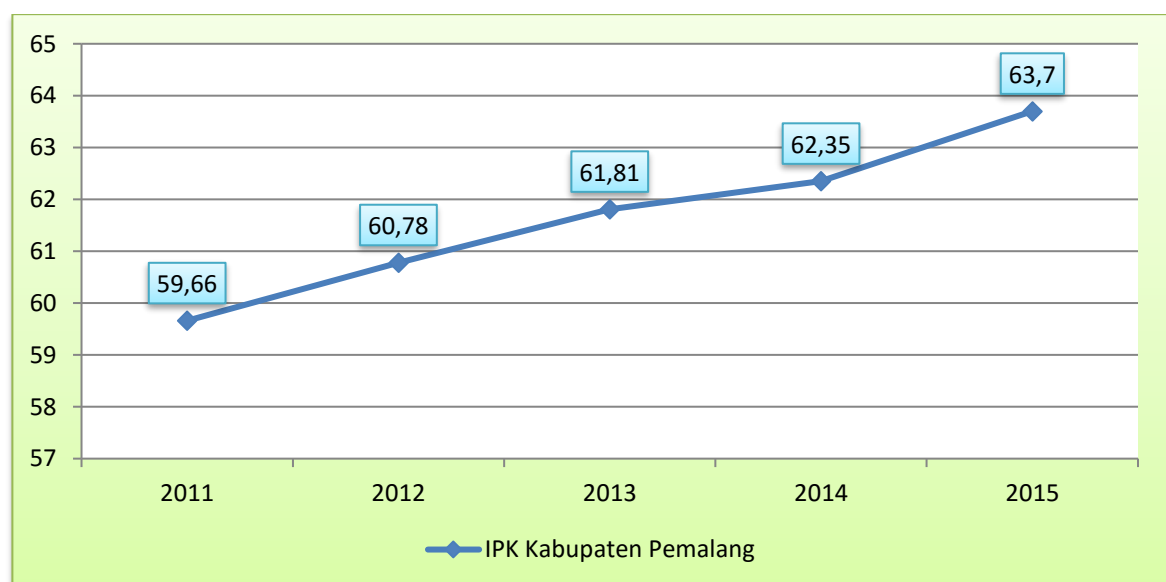
Gambar 2.15 Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pemalang dibandingkan Kabupaten Sekitar Tahun 2014.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan secara lebih luas di luar perhitungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu usia harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Pemalang mencapai 59,66 meningkat menjadi 60,78 pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 63,7 pada tahun 2015. Perkembangan IPM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini.



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/ Kota, 2015.

Gambar 2.16 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2015.

IPM merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan kepada 4 indikator pembentuk. Keempat indikator tersebut antara lain: 1) Angka Harapan Hidup saat Lahir, 2) Harapan Lama Sekolah, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Dari keempat indikator pembentuk IPM, kesemuanya mengalami kenaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pemalang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 angka harapan hidup saat lahir penduduk Kabupaten Pemalang mencapai 72,26 tahun, meningkat pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 72,37 dan 72,48 tahun. Pada tahun 2015 capaian usia harapan hidup kembali mengalami kenaikan menjadi 72,77 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. HLS merupakan indikator baru dalam penghitungan IPM sebagai pengganti Angka Melek Huruf yang dinilai sudah tidak tepat apabila digunakan untuk menghitung IPM.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 HLS Kabupaten Pemalang mencapai 10,45 tahun meningkat menjadi 10,64 tahun pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 menjadi 11,86 tahun.

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011 – 2015. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 5,51 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013; baru pada tahun 2014 capaian kembali meningkat menjadi 5,87 tahun dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 6,04 tahun. Kendati mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi capaian rata-rata lama sekolah ini

menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten Pemalang hanya mencapai lulus kelas 6 Sekolah Dasar atau mengenyam pendidikan kelas VII SLTP. Perkembangan indikator pembentuk IPM di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.6
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,37	72,48	72,59	72,64	72,77
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,45	10,64	11,05	11,26	11,86
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,19	5,51	5,72	5,87	6,04

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota, 2015.

2.2.2.2. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator dalam aspek pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan. Indikator ini lebih mendekati pada partisipasi yang sebenarnya karena formula yang digunakan adalah jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dibagi jumlah penduduk dengan kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dikalikan seratus persen. Perkembangan APM pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
APM Jenjang Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	96,24	98,88	99,74	99,96	107,19
2.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	77,12	78,11	79,06	79,78	81,63
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	48,5	50,5	52,5	53,3	56,51

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Data di atas menggambarkan bahwa APM SD/MI/Paket A/SDLB cukup tinggi yaitu mencapai 107,19% pada tahun 2105. APM SMP/MTs/Paket B/SMPLB masih relatif rendah yaitu sebesar 81,63%. Sedangkan APM SMA/SMK/MA/Paket C masih rendah yaitu sebesar 56,51% pda tahuun 2015. Sesuai dengan target MDGs dan pendidikan untuk semua, pada tahun 2015 APM SD/MI ditargetkan 100%, demikian juga APM SMP/MTs juga ditargetkan 100%, capaian APM SD/MI sudah di atas target MDGs namun capaian APM SMP/MTs masih di bawah target MDG's dan PUS. Masih perlu usaha dan komitmen dari semua pihak untuk dapat mencapai target MDG's dan PUS tersebut.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator dalam aspek pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan. Indikator ini merupakan partisipasi kasar karena rumus yang digunakan adalah jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dibagi jumlah penduduk dengan kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dikalikan seratus persen. Perkembangan APM pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.8
APK Jenjang Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

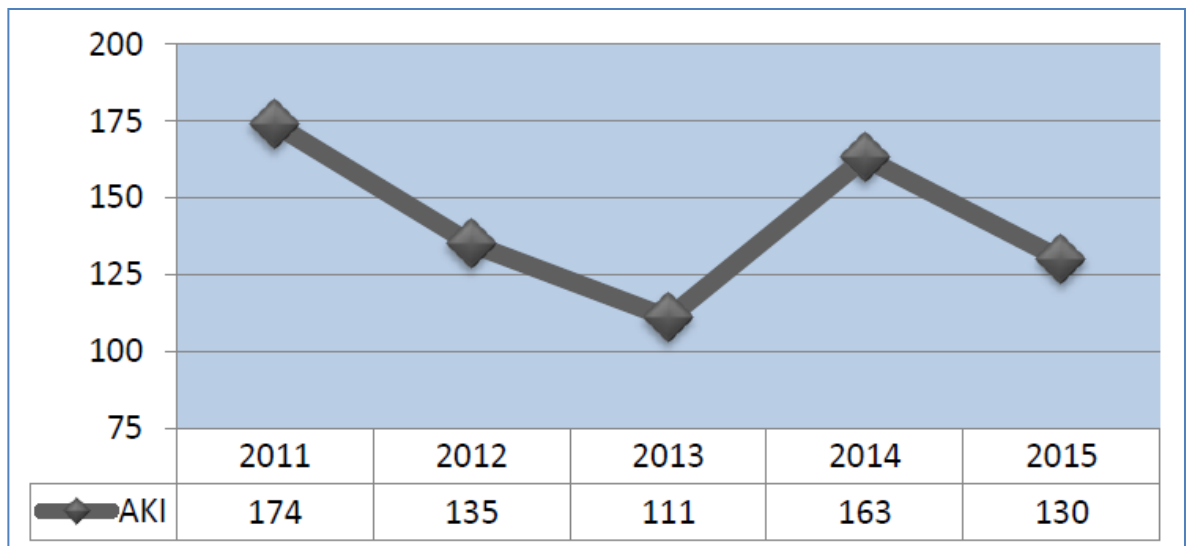
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	120,6	118,8	115,5	111,7	112,82
2.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	100	100	100	100	100,9
3.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	63,12	67,08	70,07	75	74,07

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Data di atas menggambarkan bahwa APK SD/MI/Paket A/SDLB sudah tinggi yaitu sebesar 112,82% pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/SMPLB juga cukup tinggi yaitu sebesar 100,9% pada tahun 2015. Untuk Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C APK sudah relatif tinggi yaitu mencapai 74,07% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pelayanan pendidikan relatif sudah baik.

2.2.2.3. Kesehatan

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2015 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2011 AKI sebesar 174 per 100.000 kelahiran hidup (45 kasus) mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013 menjadi 111 per 100.000 kelahiran hidup (27 kasus), sedang pada tahun 2014 meningkat menjadi 163 per 100.000 kelahiran hidup (40 kasus). Kondisi ini dibandingkan dengan target MDGs 2015 tidak mencapai target dan juga tidak mencapai target Akhir RPJMD tahun 2016, dikarenakan AKI pada tahun 2015 sebesar 130 per 100.000 Kelahiran Hidup (32 kasus) sedang target 2015 sebesar 116 per 100.000 kelahiran hidup (30 kasus).

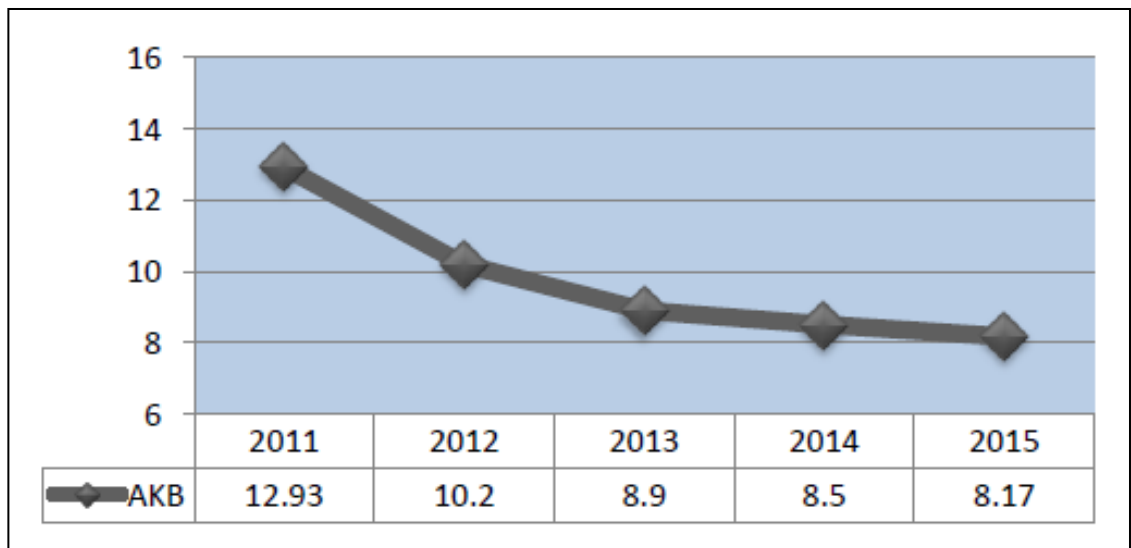


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.17 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kab.Pemalang Tahun 2011 -2015

Tidak tercapainya penurunan AKI, disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain penanganan perawatan kehamilan yang tidak kompeten, keterlambatan penanganan ibu hamil karena keluarga tidak siaga dan keterlambatan dalam melakukan rujukan ibu hamil resiko tinggi. Penyebab lain adalah kondisi ibu hamil itu sendiri (terlalu muda dan terlalu tua) dan keterlambatan mendapatkan penanganan di tempat rujukan. Penyebab langsung kematian ibu terbanyak adalah perdarahan, Pre Eklamsi Berat (PEB)/Eklamsi dan infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung disebabkan penyakit kronis yang diderita sebelum kehamilannya, sehingga mudah menimbulkan komplikasi.

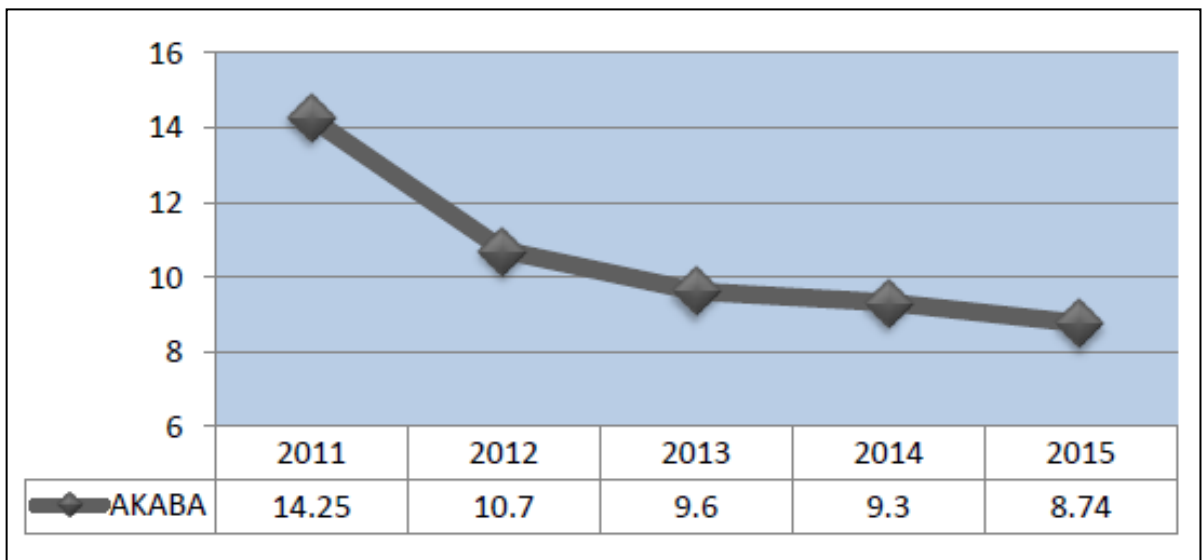
Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 AKB sebesar 12,97 per 1.000 kelahiran hidup (334 kasus) menurun pada tahun 2015 menjadi 8,17 per 1.000 kelahiran hidup (201 kasus). Hal tersebut sudah sesuai dengan target AKB MDGs. Kematian bayi paling banyak disebabkan oleh asfiksia, BBLR dan infeksi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.18 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Pemalang Tahun 2011 - 2015

Angka Kematian Balita (AKABa) dari tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 AKABa sebesar 14,25 per 1.000 kelahiran hidup (368 kasus) menurun pada tahun 2015 menjadi 8,74 per 1.000 kelahiran hidup (215 kasus). Hal tersebut sudah sesuai dengan target AKABa MDGs. AKABa dihitung pada anak usia 0 – 5 tahun yang meninggal. AKABa paling banyak terjadi pada anak usia 0 – 1 tahun.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.19 Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABa) Kab. Pemalang Tahun 2011-2015

Upaya penurunan AKI tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan AKB/AKABa. Beberapa upaya penurunan AKI/AKB/AKABa adalah pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan ibu hamil resiko tinggi, diantaranya oleh keluarga dan kader kesehatan. Selanjutnya upaya penurunan AKI/AKB/AKABa secara teknis melalui program manajemen terpadu Balita sakit dan Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR sebagai penyebab kematian bayi terbanyak.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Kewenangan urusan pendidikan mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pendidikan kabupaten/kota menurut undang-undang tersebut adalah: 1) Pengelolaan pendidikan dasar, 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, 3) Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, 4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/kota, 5) Perizinan Pendidikan, serta 6) Bahasa dan Sastra: Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pemalang harus memfokuskan pada urusan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran kondisi pendidikan Kabupaten Pemalang berdasarkan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Gambaran umum kinerja program PAUD diukur melalui empat indikator yaitu APK PAUD, Rasio PAUD terhadap Total Penduduk, persentase jumlah TK/RA layak dan Persentase matapelajaran PAUD muatan Lokal. Kondisi capaian Indikator PAUD terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Indikator Program PAUD Kabupaten Pemalang
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	28,5	32,5	36,6	39,6	56,68
2	Rasio lembaga PAUD terhadap Total Penduduk Usia 0 – 6 tahun	Rasio	1:40	1:35	1:35	1:58	1:50
3	Persentase jumlah TK/RA layak	%	34	34,5	35	35	55

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa APK PAUD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Demikian juga untuk rasio lembaga PAUD terhadap total penduduk semakin menurun artinya ketersediaan lembaga PAUD semakin berkurang. Semakin besarnya rasio PAUD terhadap jumlah penduduk disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah lembaga PAUD. TK/RA layak di kabupaten Pemalang mengalami peningkatan, artinya dari tahun 2011 – 2015 jumlah PAUD layak mengalami peningkatan yaitu dari 35% menjadi 55%.

2. Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berjalan cukup lama dan hasilnya sudah mulai tampak yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah yang cukup tajam. Walaupun dampak Program Pendidikan Dasar 9 Tahun terhadap rata-rata lama sekolah cukup lama, namun paling tidak perkembangan yang ada sudah menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian keberhasilan pembangunan pendidikan khususnya pada Program Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur melalui Angka Putus Sekolah, Angka kelulusan, rata-rata nilai Ujian Nasional, Angka Melanjutkan, Rata-rata ruang kelas dalam kondisi baik, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar pendidikan, Proporsi murid kelas 1 yang menyelesaikan pendidikan, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru murid dan rasio guru murid per kelas rata-rata. Gambaran capaian indikator tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Pendidikan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,11	0,08	0,06	0,04
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,56	0,45	0,35	0,25	0,25
3.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	93,5	95,5	97	97,5	100
4.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	93,5	95,5	97	97,5	100
5.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	Nilai	7	7,15	7,25	7,35	na
6.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	Nilai	7,45	7,55	7,65	7,75	na
7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95	95,5	96	97	98,65
8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	69,3	74,3	79,3	84,3	87,60
9.	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	84,35	87,5	90,5	93	75
10.	Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	98	98,35	98,65	98,8	84,87
11.	Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	15,63	16,13	16,63	17,13	59,36
12.	Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	46,17	46,27	46,47	46,47	70,12
13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	93,5	95,5	97	97,5	98
14.	Angka partisipasi sekolah SD/MI	%	76,2	77,12	78,11	80	81,63
15.	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	54,59	54,59	57,43	57,43	75,67
16.	Rasio guru/murid	Rasio	1:26	1:26	1:26	1:26	1:26
17.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:19

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Data di atas menggambarkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sudah cukup rendah karena berada dibawah ambang batas minimal target nasional sebesar 0,22% sedangkan APS SMP/MTs masih sedikit tinggi karena diatas batas target nasional 0,22%. APS SD/MI mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 0,14 pada tahun 2011 menurun menjadi 0,04 pada tahun 2015. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh capaian APS SMP/MTs yang kendati mengalami penurunan dari 0,56% pada tahun 2011 menjadi 0,25%, pada tahun 2015 akan tetapi masih berada diatas ambang batas target nasional. Angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan juga sudah menunjukkan capaian yang maksimal, angka lulus sebesar 100% untuk SD/MI dan untuk SMP/MTs. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan SD/MTs dan SMP/MTs sudah cukup baik.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK perlu mendapatkan perhatian karena belum mencapai 100%. Bahkan untuk AM ke SMA/SMK/MA masih relatif rendah yaitu hanya 87,60% lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2015. hal ini brarti masih ada kurang lebih 12,40% lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan secara keseluruhan terlihat bahwa perkembangan ruang kelas belum menunjukkan kondisi yang cukup baik selama kurun waktu 2011 -2015. Kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik pada tahun 2015 menurun menjadi 75% dari 84,35% pada tahun 2011. Kondisi ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik pada tahun 2015 juga mengalami penurunan. Ruang kelas dalam kondisi baik SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 98% menurun menjadi 84,87% pada tahun 2015. Menurunnya persentase bangunan kelas dalam kondisi baik disebabkan oleh usia bangunan yang sudah cukup tua dan perlu segera mendapatkan penanganan.

Sebaliknya kondisi sarana pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari standar nasional. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, persentase SD/MI dengan sarana sesuai dengan standar nasonal masih sebesar 59,36% pada tahun 2015. Walaupun selama kurun waktu 2011 – 2015 perkembangan capaian indikator tersebut cenderung meningkat, namun angka capaiannya masih

sangat rendah. Sarana pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami kondisi perbaikan karena mengalami peningkatan dari 46,17% pada tahun 2011 menjadi 70,12% pada tahun 2015.

Capaian indikator Proporsi Siswa Kelas I yang berhasil menamatkan studi di SD/MI cukup baik yaitu sebesar 98% pada tahun 2015. Angka tersebut menunjukkan bahwa selama menempuh pendidikan di sekolah dasar siswa kelas I pada tahun 2009 yang lalu, jumlah siswa kelas I berkurang sebesar 2% saja. Selama kurun waktu tersebut terdapat siswa yang tidak menamatkan sekolah atau tinggal kelas sebesar 2% saja. Kondisi ini sudah melampaui target nasional sebesar 96% pada tahun 2015.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah, rasio guru murid dan rasio guru murid per kelas sudah menunjukkan angka yang relatif baik yaitu 1:26 pada tahun 2015 dan 1:19 untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Standar nasional untuk rasio guru murid dan rasio guru murid per kelas adalah 1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs.

3. Pendidikan menengah

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan pendidikan menengah sama dengan indikator pada pelayanan pendidikan dasar 9 tahun. Perkembangan capaian indikator pendidikan menengah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,35	0,3	0,25	0,2	0,29
2.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,35	99,4	99,45	99,5	100
3.	Persentase Ruang kelas SMA/MA/SMK kondisi baik	%	97,9	98,35	98,65	98,8	99
4.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA/SMK	%	7,35	7,5	7,6	7,65	Na

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Data di atas menggambarkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK masih cukup tinggi karena berada diatas ambang batas target nasional untuk SMA/SMK sebesar 0,22. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015 mencapai 0,29%. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SMA/SMK juga sudah menunjukkan capaian yang optimal, angka lulus sudah mencapai angka 100%. Demikian juga untuk capaian indikator ruang kelas dalam kondisi baik dan capaian nilai rata-rata UN SMA/SMK/MA relatif baik.

4. Pendidikan Non Formal

Keberhasilan pembangunan pendidikan pada program pendidikan non formal diukur melalui indikator Rasio penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C. Data dibawah ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak sekolah atau yang tidak lulus yang mengikuti pendidikan paket A/B/C sudah relatif baik walaupun capaian dari tahu 2011 – 2015 cenderung turun. Capaian indikator tersebut selama kurun waktu 2011 – 2015 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Angka Melek Huruf Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C.	Rasio	0,86	0,84	0,83	0,81	0,00048

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pendidik dan tenaga kependidikan adalah jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan D IV atau yang telah memperoleh sertifikasi. Perkembangan capaian indikator pendidik dan tenaga kependidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	13,00	14,50	15,00	15,36	36
2	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	43,58	46,58	50,58	60,99	72
3	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	55,19	65,2	70,45	75,3	89

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Data di atas menggambarkan bahwa Kualifikasi guru TK/RA masih sangat rendah. Banyak Guru TK/RA yang hanya memiliki semangat pengabdian namun dari kualifikasi pendidikan belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Jumlah guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/DIV baru mencapai 36% pada tahun 2015. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh capaian kualifikasi guru SD/MI. Persentase guru SD/MI yang masih belum S1 atau D IV masih cukup besar yaitu 28% pada tahun 2015 karena yang memenuhi kualifikasi baru mencapai 72%. Untuk guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2015 sebesar 89%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualifikasi guru SMP/MTs sudah cukup baik. Kualifikasi guru dari jenjang pendidikan TK/RA sampai dengan SMP/MTs berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar atau pembelajaran. Pada gilirannya juga berpengaruh pada kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Pemalang.

6. Manajemen Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan adalah Persentase Satuan Pendidikan SD, SMP yang menerapkan MBS secara baik; Jumlah pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan per tahun dan Persentase Sekolah terakreditasi B dan A. Perkembangan capaian indikator pendidik dan tenaga kependidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Capaian Indikator Manajemen Pendidikan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Satuan Pendidikan SD, SMP yang menerapkan MBS secara baik.	%	15,63	16,13	16,63	17,13	30
2	Jumlah pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan per tahun	%	1,08	1,28	1,48	1,98	15
3	Persentase Sekolah terakreditasi B dan A.	%	84,64	84,84	85,14	90,14	90,14

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, 2016

Data di atas menggambarkan bahwa satuan pendidikan masih banyak yang belum melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik dan benar. Manajemen tingkat satuan pendidikan masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu untuk sekolah dengan akreditasi B dan A sudah relatif baik, karena angkanya mencapai 90,14% pada tahun 2015.

2.3.1.2. Kesehatan

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pemalang dari tahun 2011 – 2015 mengalami fluktuasi. Persentase Balita Gizi Buruk tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 0,07% sedang targetnya hanya 0,02%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan dan akhirnya pada tahun 2015 persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,09%. Walaupun kasus gizi buruk masih ditemukan pada periode tahun 2011–2015, namun seluruh balita gizi buruk telah mendapat perawatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Status gizi di masyarakat Kabupaten Pemalang yang lain dapat dilihat dari indikator Balita pendek (balita stunting), sampai dengan tahun 2015 kasus stuning masih relatif tinggi. Balita stunting pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014

yaitu menjadi 22,98%. Namun kondisi ini masih lebih besar daripada target nasional yaitu 17%.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Gizi
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Nama Indikator Gizi	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase balita gizi buruk	%	0,015	0,07	0,03	0,03	0,09
2	Persentase balita pendek (stunting)	%	-	25,75	25,28	24,75	22,98
3	Persentase balita gizi kurang	%	17,19	18,21	18,72	17,28	16,74
4	Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	%	75,8	81,50	82,40	90,70	88,90
5	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	41,7	100	100	100
6	Persentase ibu hamil mengalami KEK mendapat makanan tambahan	%	-	100	100	100	100
7	Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	85,81	86,63	86,2	87,21	91,87
8	Cakupan bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	42,62	54,6	34,1	52,6	56,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2016

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan menurut indikator Indonesia Sehat terbagi kedalam 11 kategori utama, meliputi: dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, tenaga gizi, perawat, bidang, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi, tenaga fisioterapi, dan tenaga teknisi medis. Berdasarkan target Indonesia Sehat, rasio tenaga medis di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 masih dibawah standar. Kondisi ini terlihat dari capaian ketersediaan nakes yang belum tersedia optimal. Kondisi capaian ketersediaan nakes di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan Tahun 2015

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes	Rasio / 100.000 Penduduk	
			Tahun 2015	Standar
1	Dokter Ahli / Spesialis	60	4,68	6
2	Dokter Umum	140	10,9	40
3	Dokter Gigi	24	1,87	11
4	Apoteker	120	9,34	10
5	Tenaga Gizi	45	3,5	22
6	Perawat	861	67,04	117,5
7	Bidan	586	90,36	100
8	Tenaga Kesehatan masyarakat	31	2,41	40
9	Tenaga Sanitasi	31	2,41	40
10	Tenaga Terapi Fisik	15	1,17	4
11	Tenaga Teknisi Medis	140	10,90	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Tahun 2016

Kabupaten Pemalang bukan merupakan daerah endemis Malaria, namun demikian kondisi ini masih perlu mendapat perhatian hal ini dikarenakan daerah disekitar Pemalang merupakan daerah endemis Malaria. Kasus malaria di Kabupaten Pemalang untuk periode tahun 2011 – 2015 paling banyak terjadi kasus pada tahun 2013 yaitu 13 kasus atau 0,01 per 1.000 penduduk dan tidak terjadi lagi hingga tahun 2014, kemudian terjadi lagi pada tahun 2015 sebesar 0,003 per 1000 penduduk (4 kasus). Kasus malaria bukan berasal dari penduduk Kabupaten Pemalang akan tetapi merupakan perpindahan dari daerah sekitar.

Penyakit Tuberculosis (Tb) Paru merupakan penyakit menular di Indonesia yang menyebabkan kematian. Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk) Kabupaten Pemalang tahun 2013 sebanyak 99 per 100.000 penduduk meningkat tahun 2015 menjadi 102,63 per 100.000 penduduk. Hampir sebagian besar kasus TB telah diobati dengan metode DOTs (*Directly Observed Treatment, Short-course*) yaitu pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. Angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Pemalang sangat bagus yaitu mencapai 98,1% pada tahun 2013 akan tetapi menurun pada tahun 2015 menjadi 92,33%.

Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada anak usia < 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio. Berdasarkan *surveillance* ini, penemuan semua kasus lumpuh layu, di Kabupaten Pemalang (AFP Rate) sebesar

1,33 per 100.000 penduduk pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2015 menjadi 1,41 per 100.000 penduduk. Kondisi ini sesuai target Kemenkes (<3 per 100.000 penduduk)

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan dianggap menurun ketika tidak dapat lagi menjalankan fungsinya untuk melawan infeksi penyakit-penyakit. Orang yang kekebalan tubuhnya menurun akan lebih rentan terhadap berbagai infeksi. Sedangkan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan suatu penyakit akibat infeksi HIV.

Secara kumulatif jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pemalang, sejak tahun 1993 hingga 2015 mencapai 209 orang. Sedangkan untuk tahun 2015, dalam rentang waktu Januari–Desember ada 73 orang penderita baru, dan dari jumlah tersebut 37 orang diantaranya meninggal dunia. Jumlah penderita HIV/AIDS tersebut merupakan jumlah yang terdata. Kemungkinan bisa bertambah lagi apabila terdapat temuan kasus baru. Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi rangking 6 (enam) se Indonesia dalam hal jumlah penderita. Hingga akhir 2015 jumlah penderita HIV 12.814 orang, AIDS 6.945 orang. Dari jumlah tersebut yang meninggal sebanyak 1.188 orang. Kasus di Jateng berkategori Epidemi Terkonsentrasi, yakni prevalensi HIV diatas 5 persen pada beberapa populasi kunci dan dibawah 1 persen pada populasi umum. Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten dengan status kuning yaitu temuan antara 100-200 penderita.

Upaya penanggulangan penyakit telah ditempuh secara terpadu bekerjasama dengan para pihak terkait berkepedulian. Seperti Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD); SSR (Sub Sub Recespien); Rumah sakit dan Puskesmas serta Fatayat NU. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui penyuluhan yang dilakukan secara periodik oleh petugas Puskesmas, penyuluhan di daerah berisiko (hotspot) oleh petugas Dinkes serta upaya anisipatif berupa pencegahan kemungkinan penularan melalui pemakaian kondom. Mengantisipasi berkembangnya penyakit HIV/AIDS Pemkab Pemalang

membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) di tingkat desa dan kelurahan. Hingga tahun 2015 WPA sudah mencapai 20 lembaga.

Apabila ditemukan suspek penderita HIV/AIDS saat penemuan secara pasif maupun aktif, maka petugas akan bertindak lebih lanjut. Bagi penderita yang berkategori reaktif akan ditindaklanjuti dengan mengirim ke *Voluntary Conseling and Testing (VCT)* di rumah sakit. Bagi penderita yang benar-benar positif HIV/AIDS, maka akan dirujuk ke *Care Support and Treatment (CST)* untuk mendapat perawatan dan pengobatan. Setelah ditangani di CST biasanya pasien dikomunikasikan ke Yayasan Peduli Kasih yang perwakilannya ada di rumah sakit untuk mendapatkan pembinaan dengan dukungan sebaya (*peer group*).

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terkait Angka Kesakitan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	%	3,57	5,3	11,9	6,8	18,53
2	Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	100	100	100	100	100
3	Angka kematian DBD	%	0	4,3	2,0	3,45	1,26
4	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	%	0,0038	0,009	0,01	0,005	0,003
5	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk	%	1,33	0,46	0,7	1,31	1,41
6	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
7	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
8	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,86	96,80	106,90	101,01	96,69
9	Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	%	110	110	99	96,20	102,63
10	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	94	92	98,1	99	92,33

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
11	Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	87,63	100	99,46	95,3	93,2
12	Cakupan penemuan dan penanganan balita penderita ISPA (Pneumonia)	%	100	100	100	100	96,61
13	Angka Prevalensi Kusta	%	1,29	1,7	1	1,16	1,36
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2016

Tidak hanya penyakit menular yang menjadi perhatian di Kabupaten Pemalang, tetapi juga penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian menurut Kementerian Kesehatan adalah Jantung, Kanker, dan Diabetes Mellitus. Cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara mengalami peningkatan dari 0,8% menjadi 1,5% pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit kanker. Sedangkan pemberdayaan masyarakat untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti jantung dan DM melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) semakin meningkat ditunjukkan dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terkait Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara (%0	0,28	0,17	0,07	0,14	0,17	0,32
2	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM (%)	0,9	0,9	0,9	1,8	2,7	4,5
3	Cakupan penemuan penyakit jantung	2,14	2,14	2,45	3,24	3,16	2,98
4	Cakupan penemuan penyakit DM	18,7	14,2	12,1	11	15,7	18,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu faktor yang berpengaruh adalah perilaku dan lingkungan (HL Bloom). Lingkungan yang bersih dan sehat akan menjadikan masyarakat yang sehat. Lingkungan yang sehat bisa dilihat dari rumah tangga yang memiliki akses Air Minum, rumah yang memenuhi sanitasi dasar, Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), serta pengelolaan TTU (Tempat-tempat Umum) dan TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memenuhi syarat kesehatan. Capaian indikator kesehatan lingkungan di Kabupaten Pemalang terkait dengan sanitasi dasar dan akses air minum yang berkelanjutan masih perlu pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perubahan perilaku terhadap lingkungan.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak	%	81,86	96	85,55	87,62	87,12
2	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	56,25	60,60	59,80	54,81	59,69
3	Persentase Desa melaksanakan STBM	%	25,12	31,98	36,93	49,55	88,29
4	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	-	-	-	85,24	84,23
5	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	%	-	-	-	57,17	57,38
6	Cakupan sarana pengolahan air limbah rumah tangga yang memenuhi syarat	%	71,31	64,40	64,30	65	74
7	Cakupan kepemilikan jamban keluarga yang sehat	%	80,44	76,30	70,90	61,16	62,43
8	Persentase pembinaan tatanan kawasan sehat	%	-	-	50	75	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2016

Penurunan AKI, AKB dan AKABa merupakan amanat baik dalam SDGS (Sustanaibility Development Goals) maupun dalam RPJMN

tahun 2014 – 2019. Indikator yang berhubungan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABa adalah penanganan neonatus komplikasi yang ditangani, kunjungan bayi, pelayanan anak balita, pelayanan ibu hamil antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas dan komplikasi kebidanan yang ditangani. Berdasarkan indikator tersebut, capaian Kabupaten Pemalang cukup bagus, hanya terdapat 1 indikator yang dibawah target Kemenkes yaitu Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) F (target Kabupaten/Kota 95%). Sampai dengan tahun 2015 capaian Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) hanya 90,25%.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Cakupan Pelayanan terhadap Bayi dan Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	23,62	76,5	80,21	92,97	93,97
2	Cakupan Kunjungan Neonatus lengkap (KN3)	%	90,80	97,1	97,8	94,99	96,89
3	Cakupan kunjungan bayi	%	87,42	94,1	93,29	93,86	97,54
4	Cakupan pelayanan anak balita	%	84,14	57,7	73,53	98,21	98,21
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	86,79	90,7	90,29	90,38	90,25
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,30	96,8	98,13	97,08	96,73
7	Cakupan pelayanan nifas	%	99,41	100	97,64	99,90	99,12
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	66,41	72,8	90,22	104,62	111,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2016

Upaya promotif dan preventif menjadi tujuan utama dalam pembangunan kesehatan. Dalam meningkatkan promotif dan preventif beberapa program pemberdayaan dan promosi telah dilakukan yaitu peningkatan rumah sehat, desa siaga dan pemeriksaan kesehatan.

Persentase rumah tangga sehat (utama dan paripurna) di Kabupaten Pemalang dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan dari 66,42% menjadi 59,69%. Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang telah menjadi Desa/Kelurahan siaga aktif, namun desa/kelurahan mandiri pada skala mandiri relatif kecil yaitu 1,80%.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terkait Upaya Promotif Dan Preventif Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase rumah tangga sehat (utama dan Paripurna)	%	66,42	80,54	78,93	74,42	74,18
2	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	67,22	91,2	72,44	87,77	93,25
3	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100
4	Persentase desa/kelurahan siaga aktif mandiri	%	-	-	0,95	1,35	1,80
5	Jumlah Puskesmas yang telah tersertifikasi						
	- ISO 9001:2008	bh	0	2	3	4	6
	- Akreditasi Nasional	bh	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2016

Upaya promotif dan preventif menjadi tujuan utama dalam pembangunan kesehatan. Dalam meningkatkan promotif dan preventif beberapa program pemberdayaan dan promosi telah dilakukan yaitu pembinaan rumah tangga sehat, pembinaan kualitas desa siaga dan penjangkaran kesehatan (deteksi dini) bagi siswa kelas 1 SD dan setingkat. Persentase rumah tangga sehat (utama dan paripurna) di Kabupaten Pemalang dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan dari 63,50% menjadi 74,18%. Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang telah menjadi Desa/Kelurahan siaga aktif, namun desa/kelurahan siaga pada strata mandiri relatif kecil yaitu 1,80%.

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 8 (delapan) buah baik milik pemerintah maupun swasta dengan rincian 7 (tujuh) rumah sakit umum dan 1 (satu) rumah sakit khusus dengan jumlah tempat tidur sebanyak 967 TT, untuk mengakses penduduk sebanyak 1.199.820 jiwa. Sedangkan

untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer tingkat pertama (puskesmas) yang ada sebanyak 22 (dua puluh dua) puskesmas dan dalam proses persiapan operasional sebanyak 3 (tiga) puskesmas, sehingga jumlah totalnya 25 (dua puluh lima) puskesmas yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Dengan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan baik rujukan maupun primer yang ada untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan mengacu rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk 1 : 1.000 dan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mengacu rasio sarana dengan jumlah penduduk 1 : 30.000 (Kemenkes RI Tahun 2014), sehingga akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum optimal dalam pemenuhan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pendukung.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan bidang pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumberdaya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

Panjang jalan Kabupaten Pemalang sepanjang 674 km. Kondisi jalan baik di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 masih belum optimal yaitu sebesar 86%. Kerusakan jalan di Kabupaten Pemalang antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Pemalang, khususnya terjadi di daerah Pemalang Tengah dan Selatan, yang disebabkan oleh tingkat pergerakan tanah yang cukup tinggi. Selain itu kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

Salah satu unsur penunjang kebinamargaan adalah ketersediaan jembatan. Jembatan di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2015 adalah sebanyak 186 unit. Dari sejumlah tersebut, masih terdapat sebesar 4,3% jembatan yang butuh penanganan. Kendati jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015 telah mencapai

95,70%, penyediaan anggaran terhadap pemeliharaan jembatan perlu untuk dialokasikan setiap tahunnya.

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Drainase di Kabupaten Pemalang juga perlu mendapatkan perhatian karena persentase salurah drainase dalam kondisi baik pada tahun 2015 baru mencapai 65%. Kerusakan drainase ini perlu segera ditangani karena drainase berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan. Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan serta bangunan yang ada. Pentingnya peningkatan kualitas saluran drainase salah satunya untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Kinerja pemerintah dalam rangka menyediakan sarana irigasi yang baik perlu untuk mendapatkan perhatian. Kondisi ini tercermin dari persentase saluran irigasi yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 55,22%.

Kondisi pelayanan air minum di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai 89,29%. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan capai tahun 2011 yang hanya mencapai 74%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki perhatian terhadap 10,71% penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum. 10,71% masyarakat yang belum mendapatkan air minum sebagian besar berada di wilayah Pemalang Selatan dan Tengah. Secara umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	40	45	66,53	76,98	86
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	91,94	93,01	93,55	95,16	95,70
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	45	50	47,18	59,42	65
4	Cakupan pembangunan dinding penahan diwilayah rawan longsor	%	60	65	61,6	51	60
5	Panjang saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	51	47	50	51,67	55,22
6	Pelayanan Air Minum	%	74	78	78	87,12	89,29
7	Ketaatan terhadap RTRW	%	80	80	80	80	80
8	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	2	2	2,03	2,3	2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang tahun 2016

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup: a) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota, b) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, c) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), e) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, f) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, g) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota, h) Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan

i) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka gambaran terkait dengan kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pemalang dapat diketahui dari 3 (tiga) indikator yaitu a) persentase rumah tinggal bersanitasi, b) persentase kawasan kumuh yang tertangani, c) cakupan ketersediaan rumah layak huni,

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik, dimana orang menggunakannya sebagai tempat berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sarana tersebut antara lain ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian, penerangan alami, konstruksi bangunan, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia, dan penyediaan air bersih. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Pemalang masih belum optimal. Pada tahun 2015, persentase rumah tinggal bersanitasi mencapai 65,33%; masih terdapat 34,67% rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi. Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh penanganan terhadap luas pemukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2011 persentase kawasan kumuh di kawasan pemukiman yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Pemalang sebesar 7,43 %, menurun pada tahun 2013 menjadi 6,3%. Pada tahun 2015 persentase kawasan kumuh mengalami penurunan menjadi 4,70 % termasuk diantaranya seluas 973,64 Hektar yang terdapat di lingkungan perumahan dan permukiman.

Berbeda dengan dua kondisi capaian indikator diatas, indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni yang dibangun di Kabupaten Pemalang dalam kurun 2011 – 2015 mengalami kenaikan dari 75,42 % pada tahun 2011 meningkat menjadi 77,02% pada tahun 2015, namun demikian angka cakupan ketersediaan ini masih rendah karena masih terdapat 70.277 RTLH (23,98%) yang belum tertangani. Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

diKabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tercantum pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70	75	70,3	68,7	65,33
2	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	7,43	6,55	6,3	5,10	4,70
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terbangun	%	75,42	75,58	76,10	76,56	77,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang 2016

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketertiban umum di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Sebagai salah satu daerah yang lokasinya cukup strategis dalam jalur transportasi Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, tentunya banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Pemalang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan ketertiban umum adalah dengan cara mengadakan patroli siaga ketertiban dan ketentraman. Pelayanan kegiatan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 3 kali dalam sehari di wilayah kecamatan-kecamatan masih belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan SDM dan prasarana yang tidak mencukupi dalam melaksanakan kegiatan patroli rutin perhari.

Patroli yang selama ini dilaksanakan oleh Satpol PP adalah patroli pemantauan dan penyelaesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam. Kegiatan patroli ini juga masih belum optimal karena hanya dilaksanakan 48 kali dalam setahun, sehingga rata-rata kegiatan patroli hanya 4 kali dalam sebulan. Jumlah patroli tersebut sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Terbatasnya kinerja patroli yang dilaksanakan tersebut salah satunya adalah karena masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP

yang dimiliki. Tahun 2015, Satpol PP Kabupaten Pemalang hanya memiliki 59 personil sedangkan jumlah penduduknya mencapai 1.279.596 jiwa dan luas wilayah 111.530 Ha yang terbagi dalam 14 kecamatan. Terbatasnya jumlah personil Satpol PP tersebut juga berdampak pada kurang optimalnya penegakan perda dan perkara yang ada. Cakupan penegakan perda dan perkara di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 baru mampu tercapai 90%, dengan kata lain ada 10% kasus pelanggaran perda maupun perkara yang tidak bisa tertangani oleh Satpol PP.

Capaian kinerja urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota (%)	%	45	42	39	90	90
2	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali/tahun)	Kali	10	10	14	48	48
3	Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	62	59	56	59	59

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pemalang 2016

2.3.1.6. Sosial

Penanganan PMKS di Kabupaten Pemalang mendasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS. Berdasarkan data pada tahun 2015, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani sebanyak 13,03%. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir jika dilihat dari kinerja pada tahun 2012 sebesar 1,1% dan tahun 2013 sebesar 8,52%. Sementara itu PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun 2015 menurun menjadi 0,71%, yang menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2011 yang sudah mencapai 2%.

Penyelenggaraan urusan sosial yang kedua ditunjukkan dengan besarnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Indikator

yang ditunjukkan untuk melihat pencapaian pada pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dilihat dari banyaknya korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Setiap tahun, di Kabupaten Pemalang terdapat kondisi kejadian bencana yang menyebabkan adanya korban yang harus ditangani. Pada tahun 2014, korban bencana yang ada di Kabupaten Pemalang secara umum dapat ditangani dengan baik, yaitu salah satunya adalah secara keseluruhan dari sisi urusan sosial seluruh korban bencana selalu mendapatkan bantuan sosial pada saat kondisi tanggap darurat.

Penyelenggaraan urusan sosial yang ketiga ditunjukkan melalui pembinaan para penyandang cacat dan trauma. Kinerja yang ditunjukkan adalah melalui besarnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Sampai dengan tahun 2015, penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan kinerja yang menurun. Pada tahun 2011, penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan bantuan sudah mencapai 1,71% pada tahun 2015 sedikit meningkat menjadi sebesar 2,03%

Penyelenggaraan urusan sosial keempat ditunjukkan melalui pembinaan panti asuhan/panti jompo. Kinerja pelayanan terhadap panti asuhan/panti jompo di Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial kepada seluruh panti yang ada di Kabupaten Pemalang.

Penyelenggaraan urusan sosial kelima ditunjukkan melalui pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya). Kinerja pada penanganan terhadap eks penyandang penyakit sosial menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 kinerja penanganan eks penyandang penyakit sosial mencapai sebesar 11,47% mengalami peningkatan jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 6%. Penyelenggaraan urusan sosial yang keenam ditunjukkan melalui pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Indikator kinerja yang dicapai adalah dengan besarnya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)

yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, yang mana pada tahun 2015 baru mencapai 7,66%.

Pencapaian indikator kinerja pada urusan sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	1,1	1,1	8,52	11,30	13,03
2	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	1,1	1,1	8,49	11,29	12,96
3	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	2	2,1	2,2	1,5	0,71
5	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,71	1,71	1,66	1,71	2,03
6	Persentase (%) panti sosial skala kabu-paten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial,	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	6	6	6,3	7,4	11,47
8	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana	%	1,30	1,30	1,35	1,35	7,66

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	prasarana pelayanan kesejahteraan sosial						

Sumber: Dinsosnakertrans, 2016.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang dilihat dari besarnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari besarnya pencari kerja yang ditempatkan, dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Pencari kerja yang ditempatkan yang menunjukkan perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang mendaftar di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai sebesar 95,2%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 91,5%. Kondisi tersebut menunjukkan angkatan kerja yang terserap setiap tahunnya selalu meningkat. Bagi tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2015 sudah mencapai sebanyak 545 tenaga kerja. Artinya sebanyak 545 tenaga kerja tersebut telah meningkat dalam penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Sementara itu, pada peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Pemalang ditunjukkan melalui indikator rasio penduduk yang bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio ketergantungan. Capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2015 meningkat menjadi 94,62% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 89,9%. Dengan semakin meningkatnya partisipasi angkatan kerja, tren pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 4,57%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 7,6%. Dalam lima tahun

terakhir, kinerja tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang menunjukkan menurun setiap tahunnya. Sementara itu rasio ketergantungan penduduk juga menunjukkan tren yang menurun dari 53,30% pada tahun 2011 menjadi 51,58% pada tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif mengalami perbaikan. Kondisi ini juga diperbaiki oleh kondisi persentase Upah Minimum Kabupaten terhadap Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Pemalang sudah mencapai lebih dari 100% pada tahun 2015. Kedua kondisi diatas dapat mendukung terhadap penciptaan iklim investasi di Kabupaten Pemalang ke depannya.

Adapun urusan ketenagakerjaan terhadap perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan indikator yang saat ini ditunjukkan adalah besaran pemeriksaan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan di Kabupaten Pemalang belum seluruhnya dilakukan. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja pada tahun 2015 yang baru mencapai 66,07% meningkatn jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yang baru sebesar 52%.

Perkembangan indikator kinerja ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	91,5	92,3	93,53	94,62	95,2
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	125	250	325	545
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,25	57,4	50,33	89,9	94,62
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,6	7,4	7,2	5,41	4,57
5	Rasio ketergantungan	%	53,30	52,83	52,35	51,92	51,58
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	52,00	53,00	55,1	60,96	66,07

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
7	Persentase UMK terhadap KHL	%	92	95,44	96,52	96,54	102
8	Penyelesaian Kasus Industrial	%	100	75	80	80	100

Sumber: Dinsosnakertrans, 2016.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan membedakan capaian antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPG Kabupaten Pemalang mencapai 80,08 meningkat menjadi 83,85 pada tahun 2014. Posisi capaian IPG Kabupaten Pemalang apabila dibandingkan dengan IPG beberapa kabupaten sekitar berada pada posisi paling rendah. Capaian IPG Kabupaten Pemalang juga berada dibawah capaian Jawa Tengah.

Tabel 2.27
IPG Kabupaten Pemalang Dibandingkan dengan Beberapa Kabupaten Sekitar Tahun 2010-2014

Kota / Kabupaten	IPG				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Pemalang	80,08	80,51	83,13	83,51	83,85
Kab. Brebes	84,17	84,43	84,59	85,58	85,60
Kab. Tegal	78,53	84,09	84,55	85,78	86,76
Kab. Purbalingga	87,61	88,51	88,93	89,12	90,12
Kab. Pekalongan	91,04	91,12	91,45	91,65	91,88
Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Kondisi yang berbeda terjadi pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG Kabupaten Pemalang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 capaian IDG 70,26 terus menurun hingga tahun 2014 mencapai 68,41. Variabel pembentuk IDG yang masih rendah adalah jumlah perempuan di Parlemen yaitu hanya 22 %. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar

posisi IDG Kabupaten Pemalang masih lebih baik. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Tabel IDG Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Banjarnegara tahun 2010-2014

Kabupaten Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Batang	62,29	64,74	64,48	65,62	66,61
Kab. Pekalongan	55,20	56,81	57,35	67,03	66,84
Kab. Pemalang	70,26	69,95	68,20	70,21	68,41
Kab. Tegal	49,07	51,7	51,16	51,91	68,02
Kab. Brebes	53,94	53,95	53,28	51,14	61,00

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Ada empat sub bidang yang menjadi tanggungjawab urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 yaitu (1) Pengarusutamaan Gender (PUG) ; (2) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; (3) Perlindungan Anak; (4) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dan : (5) Data dan Informasi Gender dan Anak.

Pengarusutamaan Gender sebagaimana tercantum dalam Inpres 9 tahun 2000 merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. PUG sebagai proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional).

Dalam mencapai PUG indikator yang harus dicapai adalah persentase lembaga PUG yang aktif. Kelembagaan PUG sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang perubahan Permendagri 15 tahun 2008 tentang PUG di Daerah, yaitu Pokja PUG, Focal Point PUG, Tim Teknis Pokja PUG dan Forum PUG berupa lembaga-lembaga di tingkat daerah yang mengembangkan PUG sebagai strategi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Hingga tahun 2014 semua kelembagaan telah ada namun fungsi dari lembaga-lembaga tersebut belum optimal.

Berkaitan dengan kewenangan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, indikator yang harus dipenuhi adalah, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dan partisipasi perempuan di lembaga swasta. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan. Tahun 2011 hanya 4,5 %, tidak ada peningkatan di tahun 2012, menurun di tahun 2012 dan 2013, dengan capaian akhir 1,26 %.

Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya Tahun 2014 berada pada posisi kedua terendah diantara kabupaten sekitar yaitu hanya 41,48%. Kondisi ini mencerminkan perempuan Kabupaten Pemalang lebih banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja yang termarginalkan. Data selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya Tahun 2014

Kabupaten	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
Kab. Batang	39,89
Kab. Pekalongan	58,35
Kab. Pemalang	41,48
Kab. Tegal	48,87
Kab. Banjarnegara	54,29

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Kabupaten Pemalang diketahui bahwa jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA lebih besar daripada pekerja yang berpendidikan rendah (SD dan SLTP) dan berpendidikan tinggi (Akademi/Sarjana). Selain itu, tenaga kerja yang berpendidikan SLTA lebih cepat terserap oleh lapangan kerja. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang berpendidikan SLTA lebih mau mengerjakan apa saja, sehingga pada kelompok ini lebih cepat memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tamatan SD dan SLTP memiliki tingkat pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpendidikan SLTA. Sedangkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana mengalami kesulitan dalam

mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tenaga kerja yang tidak terdidik sebagian besar ditempati perempuan.

Dalam hal melaksanakan urusan perlindungan anak, Kabupaten Pemalang telah melakukan banyak hal seperti telah tersusun Perda Perlindungan anak, penampungan anak-anak terlantar di panti sosial, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan yang mencapai 100%, bahkan sudah meraih award Kabupaten Layak anak di Tahun 2015. Hingga kini yang belum optimal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak adalah cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih 60%.

Untuk Data dan Informasi Gender dan Anak, kabupaten Pemalang telah memiliki Pedoman Data Pilah Gender, dan Sistem Data Base Data Gender. Selengkapnya capaian indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	4,5	4,5	2,91	1,26	3
3	Rasio KDRT	Rasio	0,014	0,013	0,019	0,010	0,009
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
6	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	Na	Na	42	50	60
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapermas KB Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.9. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan menjadi kebutuhan pokok penduduk yang harus diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sehingga dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein perkapita, penanganan daerah rawan pangan. Kabupaten Pemalang menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan energi per kapita pada tahun 2015 sudah melampaui standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 sebesar 2.200 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein per kapita capaian tahun 2011-2015 tergolong baik karena telah melebihi standar WNPG sebesar 57 gram/kap/hari.

Akses dan distribusi pangan dapat diketahui dari capaian indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, dan Stabilitas harga dan pasokan pangan. Pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan terhadap informasi pasokan, harga dan akses pangan di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Pemalang, dan melakukan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Capaian kedua indikator tergolong baik, telah sesuai dengan target SPM Ketahanan Pangan.

Tingkat konsumsi pangan dapat dilihat dari pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Pemalang telah mencapai Target SPM, yaitu sebesar 90 pada tahun 2015. Beberapa kelompok pangan yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, buah, sayur serta pangan hewani. Sementara itu terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah, terlihat dari capaian kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masih nol. Secara rinci perkembangan pembangunan pangan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan pangan utama						
	- Ketersediaan energi perkapita	%	108,62	108,62	108,61	117,57	119,92
	- Ketersediaan protein perkapita	%	98,02	98,51	99	99,5	99,99

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
2	Penguatan cadangan pangan	Ton	15	30	40	50	60
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	90	90	90	90	90
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Nilai	<25	<25	<25	<25	<25
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	84,3	85,7	86,2	89,2	90
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	32	44	56	68	80
7	Konsumsi energi dan protein per kapita						
	- energi (k.kal/hr)	k.kal/hari	1.827,1	1.886	1.893,5	2.386,8	2.387
	- protein (gr/hr)	Gr/hari	880,2	907,2	912,7	1205,7	1.206

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.10. Pertanian

Salah satu urusan yang diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Pemalang adalah urusan pertanian. Terdapat 3 (tiga) konflik bidang tanah TMKH yang terjadi di Kabupaten Pemalang, yaitu proses TMKH Bantarbolang sejak tahun 2008 sampai sekarang; proses TMKH Desa Kejene Kec. Randudongkal sejak tahun 1991 sampai sekarang; dan alur kawasan hutan Desa Surajaya Kec. Pemalang sejak tahun 2015. Ketiga permasalahan tersebut hingga saat ini belum dapat diselesaikan baik antara pemerintah dengan PT. Perhutani maupun antara pemerintah dengan masyarakat.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Terfasilitasinya konflik bidang tanah TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan).	Bidang	3	3	3	3	3

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang, 2015.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup: penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup; penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana dan/atau program kabupaten; Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kinerja berkaitan dengan perencanaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten melalui kantor lingkungan hidup menyusun dokumen Rencana Strategis dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pemalang. Penyusunan Kajian lingkungan hidup strategis disusun dalam rangka menyusun RPJMD dan RTRW. Berkaitan dengan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kinerja belum optimal, ditunjukkan dengan capaian indikator cakupan pemantauan status mutu air pada tahun 2015 baru mencapai 66% dari 3 sungai besar yang telah dilakukan pemantauan status mutu airnya; kedepannya jumlah sungai yang akan dijadikan sebagai target pengukuran akan meningkatn menjadi

17 sungai. Adapun cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebesar 39,53% pada tahun 2015. Sementara itu untuk indikator jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air telah mencapai 100%. Begitu pula dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara mencapai 100%. Untuk menunjang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang tersedia sebanyak satu Laboratorium Penelitian Lingkungan. Sementara itu Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dari 20% pada 2011 menjadi 40%. Kendati mengalami peningkatan, monitoring polusi masih cukup rendah capaiannya.

Berkaitan dengan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2015 telah mencapai sebesar 100%. Kegiatan penegakan hukum lingkungan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tidak ada kasus lingkungan yang terjadi.

Usaha preventif juga dilakukan dalam rangka perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Pada tahun 2015, Rasio cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air mencapai sebesar 34%. Begitu pula dengan persentase sumber mata air yang ter rehabilitasi capaiannya baru mencapai 43,89%. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya peningkatan aktivitas penghijuan agar debit mata air tidak berkurang dan kerawanan longsor dapat dikurangi. Persentase kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 36% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan agar melakukan konservasi pasca kegiatan pertambangan.

Secara rinci kinerja urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemantauan status mutu air	%	50	55	60	65	66
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	0	0	19,7 2	39,5 3	39,5 3
3.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	41,67	100	100	100	100
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
5.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1
6.	Rasio Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	25	27	28	29	34
7.	Banyaknya air hujan yang tertampung untuk kegiatan domestik	%	50	20	50	10	10
8.	Terpulihkannya sumber mata air	Titik	29	31	33	35	43,8 9
9.	Persentase kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan	%	29	31	34	36	36
10.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	0	19,81	65,19	100	100
11.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100
12.	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	20	30	30	40	40
13.	Luas RTHK Perkotaan Publik	%	40	50	67	70	70
14.	Luas RTHK Perkantoran Privat	%	30	40	50	60	60

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
15.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	Rasio	45	50	55	60	65

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2015.

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, Kartu Keluarga, dan Akte Kematian sangatlah penting. Akan tetapi sebagian masyarakat ada yang belum menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan tersebut. Sebagian kelompok masyarakat mengesampingkan kepemilikan dokumen tersebut. Untuk meningkatkan pencapaian yang baik dalam hal administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, dan penyusunan profil kependudukan. Kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase penduduk ber KTP, kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, dan kepemilikan akte kematian.

Di Kabupaten Pemalang, capaian indikator persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk Kabupaten Pemalang sampai pada tahun 2015 sudah cukup baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2015 yang mencapai 95%. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat ditemukan pada pencapaian indikator ini yaitu keberadaan wajib KTP elektronik yang masih berada di luar daerah karena sekolah/kuliah, boro kerja. Dari sisi kependudukan, terdapat masih adanya wajib KTP manula / lanjut usia di pelosok desa karena terkendala kondisi wilayah, letak dan kondisi geografis Kabupaten Pemalang juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil karena banyak daerah yang masih sulit dijangkau dan akses yang terbatas.

Capaian indikator persentase bayi berakte kelahiran sampai pada tahun 2015 masih belum optimal karena baru mencapai 80% kondisi tersebut menurun dibandingkan capaian pada tahun 2014

sebesar 94,72%. Sementara itu, capaian pada indikator persentase kepemilikan akta kelahiran masih belum optimal yaitu 70% pada tahun 2015; kondisi ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang telah mencapai 77,17%. Belum optimalnya capaian indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masyarakat selama ini masih kurang sadar akan pentingnya dokumen akta kelahiran dan masih malas untuk mengurus dokumen tersebut karena mungkin masih belum membutuhkan. Kinerja SKPD perlu untuk ini perlu dioptimalkan mengingat hampir semua dokumen administrasi kependudukan dibutuhkan dalam beberapa kepentingan.

Di Kabupaten Pemalang, masih banyak pasangan menikah yang belum memiliki akte nikah. Pada tahun 2015, pasangan yang mendaftar untuk mendapatkan akte nikah hanya sebesar 4,3%; meningkat dibandingkan capaian tahun 2014 yang mencapai 4,18%. Sementara itu, pada indikator persentase kepemilikan kartu keluarga sudah cukup baik karena telah mencapai 95,5% pada tahun 2015.

Capaian indikator kepemilikan akte kematian di Kabupaten Pemalang juga masih sangat rendah. Masyarakat belum menyadari bahwa kepemilikan akte kematian sangat penting. Dokumen seperti akte nikah dan akte kematian penting untuk menunjukkan status pernikahan dan penentuan hak waris. Persentase penduduk yang mengurus akta kematian pada tahun 2015 mencapai 0,71%.

Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Admindukcapil Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	87,5	90	91,43	95,99	95
2.	Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	87,24	82,09	86,78	94,72	80
3.	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	62,8	70,85	74,42	77,17	70
4.	Persentase pasangan berakte nikah	%	5,9	5,11	5,14	4,18	4,3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
5.	Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	89,3	85,5	89,9	95,38	95,5
6.	Persentase kepemilikan Akte Kematian	%	0,46	0,50	0,57	0,64	0,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa

Kinerja berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2011-2015 masih ada beberapa indikator yang masih rendah capaian kinerjanya yaitu persentase perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai 52%, persentase pengurus/ anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah mendapatkan pelatihan baru mencapai 5,38%. Capaian kinerja indikator persentase profil desa/kelurahan yang terbaharui pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 52,25% pada tahun 2014 menjadi 59,46%.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dapat diketahui persentase desa yang mendapatkan pembinaan administrasi desa pada tahun 2014 baru mencapai 28,44%, persentase desa yang dilakukan pemeriksaan akhir masa jabatan (AMJ) sebesar 6,64%, persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan/aset desa baru mencapai 28%. Adapun persentase pembinaan penggunaan alokasi dana desa (ADD)/dana desa (DD) hingga tahun 2015 telah mencapai mencapai 100%,

Capaian kinerja cakupan PKK dan Posyandu aktif masing-masing telah mencapai 100%. Berdasarkan dengan gambaran kondisi

kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tugas dan tanggungjawab urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu lima tahun kedepan cukup berat mengingat capaian kinerja masih belum optimal.

Secara rinci kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	PKK aktif	%	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		29,16	29,16	29,16	29,16	29,16
3.	Posyandu aktif	Unit	75	80	85	90	100
4.	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	Na	Na	Na	40,39	5,26
5.	Persentase Pasar desa yang aktif terhadap total pasar desa	%	Na	Na	Na	13,16	13,16
6.	Persentase UED-SP yang aktif terhadap total UED-SP	%	Na	Na	Na	36,73	36,84
7.	Jumlah Bumdes yang dibentuk	Unit	Na	Na	Na	18	21
8.	Persentase Bumdes yang aktif terhadap total Bumdes	%	Na	Na	Na	100	28
9.	Jumlah Bumdes yang difasilitasi manajemen pengelolaannya	Unit	Na	Na	Na	18	21
10.	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang aktif terhadap total Lumbung Pangan Masyarakat	%	Na	Na	Na	24,68	26,3
11.	Persentase UP2K yang aktif terhadap total UP2K	%	Na	Na	Na	37,91	37,91
12.	Persentase Kelompok TTG yang terlatih terhadap total desa	%	Na	Na	Na	2,37	2,8
13.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	5,00	5,50	5,60	6,00	6,00

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
14.	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang telah mengikuti pelatihan	%	Na	Na	Na	3,29	7,11
15.	Prosentase profil desa/kelurahan yang terbaharui	%	Na	Na	Na	52,25	59,46
16.	Persentase cakupan dokumen perencanaan pembangunan desa	%	Na	Na	Na	Na	19,91
17.	Persentase terselenggaranya musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa	%	Na	Na	Na	100	100
18.	Persentase pembinaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD)	%	Na	Na	45	100	100
19.	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan/aset desa	%	Na	Na	9	50	100
20.	Peresentase kepala desa yang telah mengikuti pelatihan	%	Na	100	85,31	14,22	30
21.	Persentase Perangkat Desa yang telah mengikuti pelatihan	%	Na	52,00	52,00	85,31	85,31
22.	Persentase Pengurus / anggota BPD yang telah mendapatkan pelatihan.	%	Na	5,38	0,00	52,00	52,00
23.	Persentase cakupan penyediaan dokumen pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa	%	Na	Na	100	5,38	5,38
24.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan administrasi desa	%	Na	Na	14,22	25,00	100
25.	Persentase desa yang mendapatkan pemeriksaan akhir masa jabatan (AMJ)	%	Na	Na	4,27	28,44	42,60

Sumber: Bapermas KB Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera terutama mengarah pada pengendalian pertumbuhan penduduk. Perhatian pemerintah terhadap Keluarga Berencana semakin berkurang seiring dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Anggaran keluarga berencana semakin berkurang, sehingga akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang murah juga rendah. Saat ini perempuan cenderung menggunakan alat kontrasepsi suntik yang bersifat hormonal, padahal sebetulnya ada metode kontrasepsi jangka panjang yang disarankan seperti IUD yang tidak bersifat hormonal.

Cakupan keikutsertaan KB aktif di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 cakupan peserta KB Aktif mencapai 81,33% meningkat menjadi 81,65% pada tahun 2012. Kondisi tersebut menurun semenjak tahun 2013-2015 dari 80,51% menjadi 79,54%. Penurunan cakupan KB aktif di Kabupaten Pemalang lebih banyak disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang juga ikut menurun. Perlu adanya metode yang bersifat stimulus dalam rangka meningkatkan cakupan peserta KB aktif, salah satunya melalui kegiatan UPPKS yang setiap tahunnya mampu untuk meningkatkan cakupan kepesertaan KB diantara anggotanya. Jumlah pasangan usia subur anggota UPPKS yang mengikuti KB pada tahun 2014 mencapai 88,29% meningkat sebesar 13,78 poin dalam kurun waktu 4 tahun.

Perkembangan kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rasio	21,9	2,77	2,67	2,46	2,35
2	Rasio akseptor KB	orang	819,26	763,97	804,33	807,51	807,51
3	Cakupan peserta KB aktif	%	81,33	81,65	80,51	80,75	79,54
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawahusia 20 tahun	%	2,56	2,62	2,92	3,32	2,5

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,14	10,36	10,72	10,22	10,85
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	Nilai	35	36	36	35	36
8	Angka Drop out KB	%	NA	NA	NA	51,97	51,97
9	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	NA	NA	NA	13,48	11,51
10	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	%	30	30	30	30	30
11	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	100	100	100	100	100
12	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Rasio	56,67	54,36	53,8	52,67	56,23
13	Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	3,42	2,67	2,52	2,47	2,47
15	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapermas KB Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.15. Perhubungan

Prasarana perhubungan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan memiliki peran penting dalam pengembangan suatu wilayah. Penyelenggaraan perhubungan, perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

Kabupaten Pemalang memiliki 1 terminal induk dan 7 sub-terminal, yang melayani transportasi massal baik dalam kota maupun luar kota. Ketersediaan terminal penumpang sudah memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum. Selain angkutan yang melayani jalur utama, telah tersedia juga angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang sebanyak 33 jaringan trayek. Kendati telah mencapai sebanyak 33 jaringan trayek, persentase ketersediaan sarana angkutan kota di Kabupaten Pemalang masih cukup rendah, yaitu sebesar 18,5% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat yang membutuhkan angkutan kota bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah angkutan umum akibat dari pergeseran model penggunaan transportasi oleh masyarakat.

Dalam rangka menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Pemalang melengkapi jalan dengan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Pemalang sampai tahun 2015 dalam kondisi baik sebanyak 90% dari total yang ada. Sementara itu untuk kebutuhan pemenuhan rambu-rambu lalu lintas (rambu, marka, dan guardrail) sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 35%.

Salah satu kegiatan yang berpotensi terhadap peningkatan PAD adalah pengujian KIR dan kendaraan bermotor. Kendaraan umum yang melakukan uji KIR pada tahun 2015 mencapai 11.882 unit meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2011 yang mencapai 9.677 unit. Uji kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan dari 8.727 unit pada tahun 2011 menjadi 10.604 pada tahun 2015.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Terminal Bis	Unit	8	8	8	8	8
2.	Jumlah Kasus Pelanggaran Lalu Lintas	Kasus	120	110	100	98	110
3.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	90	90	90	90	90
4.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Unit	1	1	1	1	1
5.	Persentase ketersediaan angkutan kota	%	8,1	4,77	8,13	8,08	18,5
6.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jaringan	30	30	33	33	33
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	Jaringan	30	30	33	33	33
8.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	700.295	616.250	1.289.374	1.203.000	2.265.400
9.	Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	Unit	8.727	9.000	9.400	10.240	10.604
10.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR	Unit	9.677	9.925	10.500	11.489	11.882
11.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	40	40	40	40
12.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	27	30	32	34	35

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan informasi untuk menjadi semakin baik meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai actor utama pelaksana pembangunan.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan keterbukaan informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (public). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa semua masyarakat mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan semua informasi public yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka pemerintah baik dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat membantu Komisi Informasi, namun sampai saat ini Komisi Informasi Daerah Kabupaten Pemalang belum terbentuk. Pemerintah Kabupaten Pemalang meskipun belum memiliki Komisi Informasi, namun informasi-informasi yang diperbolehkan untuk diketahui oleh masyarakat umum telah dapat dilihat dan diakses melalui website resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yakni di <http://www.pemalangkab.go.id>.

Selain website resmi tersebut, 80% SKPD yang ada di Kabupaten Pemalang telah memiliki website. Hal tersebut tentunya akan mempermudah bagi masyarakat untuk melihat atau mengakses informasi-informasi pembangunan yang ada di Kabupaten Pemalang. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan website adalah keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Sampai saat ini hanya ada 1 orang yang memiliki keahlian spesifik di bidang tersebut. Selain itu jaringan komunikasi di SKPD dan kelurahan juga belum bisa mencakup semua. Saat ini baru ada 40 titik jaringan komunikasi SKPD dan kelurahan.

Komunikasi dan informasi sebagai salah satu kebutuhan yang vital di era teknologi ini juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Penyebaran informasi salah satunya adalah melalui media elektronik radio. Dari tahun 2011-2015 terdapat 10 stasiun radio di Kabupaten Pemalang. Pelayanan telekomunikasi telepon seluler dilayani oleh 5 provider telepon seluler. Kendati telah memiliki terfasilitasi oleh 5 provider, akan tetapi cakupan pelayanan telepon sampai tahun 2014 baru mencapai 70% dari wilayah Kabupaten Pemalang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 30% wilayah di

Kabupaten Pemalang yang belum dapat mengakses jaringan komunikasi dengan baik. Perkembangan capaian urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Banyaknya jaringan komunikasi SKPD dan Kelurahan	Unit	10	25	40	40	40
2	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
3	Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah penga-wasan isi siaran Radio	Jumlah	10	10	10	10	10
4	Cakupan layanan BTS	Unit	55	60	65	70	70
5	Tersedianya SDM di bidang Teknologi Infor-masi dari Komunikasi	Orang	1	1	1	1	1
6	Persentase SKPD telah memiliki website	SKPD	40	60	80	80	80

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Pertumbuhan koperasi aktif di Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif karena angkanya naik

meskipun fluktuatif. Posisi tahun 2015 koperasi dengan kategori aktif mencapai 69,96% dari total 516 koperasi yang ada. Koperasi simpan pinjam (KSP/USP) yang masuk kategori sehat juga semakin meningkat. Pada tahun 2011 KSP/USP koperasi sehat hanya 20,3%. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 31,62%.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Perkoperasian di Kabupaten Pemalang
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase koperasi aktif	%	65,47	45,51	50,00	68,83	69,96
2	Persentase Koperasi Sehat	%	20,3	11,85	31,33	33,60	31.62
3	Persentase Koperasi Cukup Sehat	%	75	84,44	61,33	60	67.52
4	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	13	16	40	42	37
5	Jumlah Koperasi	Unit	446	468	482	488	516
6	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	292	213	241	309	361

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2016.

Salah satu sektor yang turut menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pemalang adalah sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Kabupaten Pemalang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi terakhir tahun 2015 terdapat 13.427 unit UMKM yang terdata. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah dari 10.936 unit. Rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Pemalang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah 5,36% per tahun.

Dalam rangka mengembangkan UMKM yang ada, pemerintah telah melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung keberlanjutan dan eksistensi UMKM yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya adalah fasilitasi keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran promosi, dan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Rata-rata UMKM yang difasilitasi untuk mengikuti pameran promosi adalah 5-10 UMKM per tahun. Sedangkan pelaku UMKM yang dibina selama tahun 2011-2015 sebanyak 75 orang.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM	10.936	11.512	12.118	12.756	13.427
2	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	UMKM	5	5	10	10	5
3	Cakupan bina UMKM	Orang	40	50	75	75	75

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang bahwa kewenangan pemerintah daerah pada urusan penanaman modal meliputi, a) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. b) Pembuatan peta potensi investasi; c) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. d) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. e) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. f) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintergrasi. Dengan demikian maka peninglatan pelayanan kepada masyarakat dan kelangan dunia usaha akan semakin baik, terutama peningkatan penanaman modal, baik dari dalam negeri dan penanaman modal asing (meskipun masih menjadi kewenangan Pusat).

Kabupaten Pemalang terletak di kawasan strategis di kawasan jalur perekonomian utama Jawa Tengah, yaitu kawasan Pantai Utara (Pantura) yang termasuk kawasan prioritas penanaman modal. Berdasarkan Pergub Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025 maka Kabupaten Pemalang termasuk pada kawasan pengembangan Bergasmalang. Pengembangan penanaman modal di Kawasan Bergasmalang meliputi empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten

Pemalang, dengan prioritas penanaman modal pada sektor basis perekonomian daerah meliputi : pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas), pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa perbankan dan jasa-jasa lainnya.

Peningkatan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2009 telah dilayani sebanyak 70 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pemalang. Dalam pengembangan peningkatan pelayanan perizinan dan pengembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pemalang semakin ditingkatkan yaitu pelayanan perizinan untuk usaha mikro dan kecil, dilayani di kecamatan. Hal ini mengacu Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil dilakukan melalui pelayanan terpadu (Paten) di masing-masing kecamatan yang telah menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu.

Amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 04/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tercermin dari pelaksanaan layanan IUJK yang mencapai 100% pada tahun 2015. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh capaian pelayanan informasi jasa konstruksi yang hingga tahun 2015 baru mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Pemalang kini telah membuka akses yang seluas-luasnya kepada investor. Kondisi ini terlihat dari semakin banyaknya investor yang menginvestasikan dana di Kabupaten Pemalang. Jumlah investor (baik PMA maupun PMDN) di Kabupaten Pemalang meningkat secara signifikan pada tahun 2015 menjadi 19 investor. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi yang ada, yaitu mencapai Rp 717.104.689.677. Pemerintah melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, serta penambahan pendapatan asli daerah. Tenaga kerja yang terserap dalam pembangunan usaha investasi ini mencapai 16.335 tenaga kerja. Gambaran capaian Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikemukakan sebagai berikut

Tabel 2.41
Capaian Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap dan benar.	%	100	100	100	100	100
2	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).	%	65	65	65	65	75
3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten	%	0,14	0,14	0,29	0,45	0,64
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	3	5	6	9	19
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	271,8 74,60 0,262	542,3 56,60 0,262	548,68 3,301,7 62	556,60 9,211,7 62	717.10 4.689.6 77
10	Pertumbuhan nilai investasi	%	1,25	0,99	0,01	0,01	0,29
11	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					
			2011	2012	2013	2014	2015	
	Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)							
12	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	30	100	100	100	100	
13	Jumlah tenaga terserap tenaga kerja	Orang	1.502	2.637	3.077	3.952	5.467	
14	Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani.	%	100	100	100	100	100	

Sumber: KPPT Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.19. Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah pada urusan pemuda dan olah raga meliputi : 1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah. Adapun kewenangan olahraga pada pemerintah daerah meliputi : 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, 2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota, 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi, dan 4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan tersebut capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut: Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang relatif stagnan selama kurun waktu 2011 – 2015, kegiatan kepemudaan hampir tidak mengalami peningkatan. Jumlah Organisasi pemuda pada tahun 2015 sebanyak 24 organisasi,

meningkat sebanyak dua organisasi dibandingkan tahun 2011 sebanyak 22 organisasi. Demikian juga kegiatan kepemudaan hampir tidak mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 20 kegiatan. Secara rinci perkembangan capaian indikator kepemudaan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian indikator Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	22	22	22	23	24
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kali	8	7	8	9	20
3	Gelanggang / balai remaja	Unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Orang	14	14	14	14	50
5	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Kasus	20	20	20	20	19

Sumber: Dindikpora Kabupaten Pemalang, 2016.

Tabel di atas terlihat pula bahwa jumlah pemuda yang mampu berwirausaha selama kurun waktu 2011-2015 meningkat, yaitu dari 14 orang pada tahun 2011 menjadi 50 orang pada tahun 2015. Penyalahgunaan narkoba juga selama kurun waktu 2011 - 2015 mengalami penurunan dari 20 kasus menjadi 19 kasus.

Pembangunan di bidang olahraga di Kabupaten Pemalang belum cukup berkembang dan capaian prestasi olahraga di Kabupaten Pemalang belum begitu menonjol. Pembinaan Cabang Olah Raga prestasi belum dilaksanakan secara maksimal. Jumlah organisasi olahraga relatif banyak, namun belum terlihat prestasi yang menonjol. Sementara itu ketersediaan prasarana olahraga seperti lapangan olahraga tersedia cukup banyak. Capaian indikator di bidang olahraga terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian indikator Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	22	23	23	23	24
2	Jumlah Klub Olahraga	Klub	322	322	322	322	350
3	Jumlah kegiatan olahraga	Keg	50	50	50	50	80
4	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	111	111	111	111	120
5	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	Cabang	6	6	6	6	9
6	Lapangan Gelanggang Olahraga	Lapangan	10	10	10	10	10

Sumber: Dindikpora Kabupaten Pemalang, 2016.

Data di atas menggambarkan bahwa perkembangan prasarana olahraga, jumlah organisasi olahraga, jumlah organisasi olahraga dan jumlah klub olahraga di Kabupaten Pemalang cenderung mengalami peningkatan dari kurun waktu 2011 – 2015.

2.3.1.20. Statistik

Capaian kinerja RPJMD pada urusan statistik dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator dibawah ini. Berdasarkan data capaian sampai pada tahun 2015, setiap tahun berhasil disusun dokumen statistik dasar untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersusunnya dokumen Kabupaten Pemalang Dalam Angka	%	100	100	100	100	100
2	Tersusunnya dokumen	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Kecamatan Dalam Angka						
3	Tersusunnya Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang	%	100	100	100	100	100
4	Tersusunnya Dokumen PDRB Kecamatan	%	100	100	100	100	100
5	Tersusunnya dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang	%	100	100	100	100	100
6	Tersusunnya dokumen statistik ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang	%	100	100	100	100	100
7	Tersusunnya dokumen statistik pertanian Kabupaten Pemalang	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.21. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah pada urusan persandian meliputi: (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi ; dan (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah. Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Pemalang telah berjalan secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Umum Setda Pemalang, 2016.

2.3.1.22. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah pada urusan kebudayaan meliputi: 1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota; 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, 4) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota, 6) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 7) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 8) Penerbitan izin membawa, 9) cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan 10) Pengelolaan museum kabupaten/kota

Berdasarkan kewenangan tersebut capaian indikator urusan kebudayaan adalah persentase benda situs dan kawasan budaya yang dilestarikan pada tahun 2015 mencapai 58%. Sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Pemalang belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan. Penyelenggaraan event festival seni dan budaya selama kurun waktu 2011-2015 fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 diselenggarakan event festival seni dan budaya sebanyak 14 kali. Kegiatan tersebut termasuk misi kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Jumlah Sarana seni dan budaya di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 sebanyak dua unit. Meningkat dibandingkan tahun 2011 sebanyak satu unit sarana budaya. Secara rinci perkembangan capaian indikator kepemudaan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	14,29	28	43	58	58
3	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	9	5	7	14
4	Jumlah Misi Kesenian	Kali	6	9	5	7	10
5	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	1	2	2
6	Jumlah grup kesenian	Kel	35	40	43	45	45
7	Jumlah gedung kesenian	Unit	0	0	0	0	0
8	Cakupan Kajian Seni	Kali	2	2	4	1	0
9	Cakupan Fasilitasi Seni						
	1. penyuluhan substansial maupun teknikal;	Kali	5	5	5	5	5
	2. pemberian bantuan;	Kali	0	1	3	1	1
	3. bimbingan organisasi;	Kali	4	4	4	4	4
	4. kaderisasi;	Kali	2	2	2	2	2
	5. promosi;	Kali	6	9	5	7	10
	6. penerbitan dan pendokumentasian; dan	Kali	0	0	0	0	0
	7. kritik seni.	Kali	0	0	0	0	0
10	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian						
	1. sarjana seni;	Orang	5	10	15	27	30
	2. pakar seni;	Orang	8	10	10	10	10
	3. pamong budaya-;	Orang	0	0	0	0	1
	4. seniman/budayawan-;	Orang	50	50	50	50	50
	5. kritikus;	Orang	0	0	0	0	0
	6. insan media massa;	Orang	10	10	10	10	10
	7. pengusaha; dan	Orang	0	0	0	2	1
	8. penyandang dana.	Orang	0	0	0	0	0
11	Cakupan Organisasi seni						
	1. Organisasi struktural yang menangani kesenian	Organisasi	2	2	2	2	2
	2. Lembaga/dewan kesenian	Organisasi	1	1	1	1	1
12	Cakupan Tempat umum						
	1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran; dan	Unit	1	1	1	2	2
	2. Tempat memasarkan karya seni untuk	Unit	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	mengembangkan industri budaya.						
13	Cakupan Gelar Seni						
	1. pertunjukan;	Kali	0	0	0	0	0
	2. pameran;	Kali	0	0	0	0	0
	3. festival; dan	Kali	1	1	1	1	1
	4.lomba.	Kali	0	0	1	1	2
14	Jumlah documenter tentang Pemalang	Kali	2	2	2	2	2
15	Jumlah tradisi kesenian yang telah mendapatkan sertifikasi HAKI	Unit	1	1	1	1	1
16	Penyusunan buku sejarah local	Unit	0	0	0	1	1

Sumber: Disbudpar Kabupaten Pemalang, 2016.

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Pemalang cukup banyak. Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 45 grup kesenian. Jumlah grup kesenian tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 35 grup kesenian. Kondisi ini menggambarkan bahwa minat masyarakat terhadap kesenian di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan. Cakupan kajian seni di Kabupaten Pemalang relatif kurang relatif terbatas, kegiatan yang ada antara lain sarasehan seni, diskusi seni. Pengalihan seni dan rekonstruksi seni. Kegiatan tersebut dilaksanakan hanya sekali dalam satu tahun.

Cakupan fasilitasi seni relatif tinggi karena fasiltasi berupa penyuluhan substansial maupun teknikal setiap tahun dilakukan 22 kali pada tahun 2015; penyuluhan, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, kritik seni, promosi dan penerbitan, serta pendokumentasian. Bimbingan organisasi sebanyak 4 kali dalam setahun dalam kurun waktu yang sama. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan kepada kelompok seni pada tahun 2015 dilakukan satu kali terhadap beberapa kelompok kesenian. Kegiatan promosi kesenian dilakukan sebanyak 10 kali pada tahun 2015. Kegiatan ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 5 kali kegiatan promosi kesenian.

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian juga relatif baik, di Kabupaten Pemalang terdapat 50 seniman atau budayawan, sarjana

seni sebanyak 30 orang pada tahun 2015. Jumlah sarjana seni tersebut selama kurun waktu 2011 – 2015 mengalami peningkatan.

Kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendaftarkan kegiatan dan tradisi kesenian untuk memperoleh sertifikat HAKI masih rendah. Perlu upaya dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten untuk mendaftarkan aktivitas kesenian untuk memperoleh sertifikat HAKI agar tidak dimanfaatkan oleh daerah lain atau bahkan negara lain.

2.3.1.23. Perpustakaan

Gambaran pelayanan urusan perpustakaan di Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 tahun (2011 – 2015) menunjukkan untuk jumlah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah (tingkat daerah, kecamatan dan perpustakaan keliling) sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk perpustakaan di tingkat desa mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 4 unit menjadi 142 unit di tahun 2015. Untuk perpustakaan yang dikelola masyarakat sampai dengan tahun 2015 tidak ada lagi penambahan jumlah perpustakaan yaitu sebanyak 25 unit.

Ketersediaan gedung perpustakaan yang layak sebagai upaya untuk meningkatkan pengunjung masih terbatas, dimana pada tahun 2011 kondisi prasarana/gedung perpustakaan yang ada dalam kondisi baik sebesar 10,20% dan kondisi terakhir di tahun 2015 jumlah gedung dalam kondisi baik baru mencapai 14,45%. Sedangkan untuk ketersediaan jenis (aneka ragam) koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan baik jumlah eksemplarnya ataupun judul. Di tahun 2011 koleksi buku yang tersedia sebanyak 24.014 eksemplar dengan jumlah judul sebanyak 14.535 meningkat menjadi 30.952 eksemplar dan judul sebanyak 18.297 di tahun 2015.

Upaya peningkatan pengelolaan perpustakaan telah dilakukan dengan memberikan sosialisasi pengelolaan perpustakaan bagi pengelola Perpustakaan Desa, Sekolah dan SKPD, pada tahun 2011 jumlah pengelola yang mendapat pembinaan kepustakwanan sebanyak 93 orang dan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 475 orang. Kendati telah banyak mendapatkan pembinaan, jumlah

pustakawan kategori ahli masih terbatas yaitu hanya sebanyak 1 orang hingga tahun 2015.

Angka kunjungan berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh pemustaka yang mengisi daftar kunjungan berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2011 angka kunjungan sebesar 2,57 % dalam kurun waktu 2011 – 2015 angka kunjungan cenderung meningkat pada tahun 2015 tercatat angka kunjungan sebesar 3,36%.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel beriku ini.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan :						
	- Daerah	Unit	1	1	1	1	1
	- Kecamatan	Unit	1	2	3	4	5
	- Desa / Kelurahan	Unit	71	71	90	121	142
	- Masyarakat	Unit	1	1	1	1	1
	- Keliling	Unit	1	2	3	4	5
2	Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	10,20	11,11	11,76	12,58	14,45
3	Jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan pembinaan kepustakawanan	Orang	93	145	185	425	475
4	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	%	2,57	3,51	3,74	3,77	3,36
5	Jumlah Pustakawan Ahli	Orang	1	1	1	1	1
6	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	Judul	14.535	14.919	16.239	17.568	18.297
7	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di	Eks	24.014	23.474	27.065	29.665	30.952

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	perpustakaan daerah (eksemplar)						

Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.1.24. Kearsipan

Gambaran pelayanan urusan kearsipan di Kabupaten pemalang Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan masih adanya beberapa pelayanan yang belum dilaksanakan secara optimal. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah duplikat dokumen/arsip daerah dalam bentuk multimedia dimana persentasenya sebesar 5,84% dari keseluruhan arsip. Untuk pemusnahan arsip dari tahun 2011 sampai dengan 2015 belum ada arsip yang dimusnahkan, sedangkan pengguna arsip sebagai salah satu dokumen penting didalam administrasi pemerintahan dari tahun 2011 hingga 2015 meningkat dari 2 orang di tahun 2011 menjadi 4 orang di tahun 2015.

Pengelolaan arsip secara baku untuk SKPD yang ada baru mencapai 15,58% di tahun 2015. Pengelolaan arsip secara baku pada tingkat desa/kelurahan menunjukkan peningkatan dari 22,52% di tahun 2011 menjadi 58,56% pada 2015. Dukungan sarana dan prasarana yang ada saat ini dari tahun 2011- 2015 semakin membaik, terlihat dari jumlah ruangan dan peralatan dalam kondisi baik meningkat secara signifikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase arsiparis yang memiliki kompetensi	%	100	100	100	100	100
2	Persentase arsiparis berdasarkan kategori jabatan:						
	- Terampil	Orang	1	1	1	1	1
3	Jumlah pengguna arsip	SKPD	2	2	4	4	4
4	Pengelolaan arsip secara baku	%	-	4,76	4,76	4,76	15,58

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
5	Persentase Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%	22,52	37,39	45,05	53,15	58,56
6	Jumlah sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik						
	- Gedung	Unit	90	90	90	90	90
	- Ruangan	Unit	30	35	35,50	37,50	37,50
	- Peralatan	Unit	30	30	33	33,33	33,33

Sumber: Kantor Perpusarda Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pemalang memiliki prospek pengembangan kelautan dan perikanan yang sangat besar karena wilayahnya di daerah Patai Utara (Pantura) dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Pemalang terdiri dari Kabupaten Pemalang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri sumberdaya laut, wisata bahari dan potensi mangrove. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rajungan, ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Pemalang yang paling prospektif adalah perikanan tangkap, dengan produksi yang terus meningkat dari tahun 2011 sebanyak 17.104.031 kg, menjadi sebesar 26.882.859 kg pada tahun 2015. Komoditas unggulan dari hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pemalang meliputi ikan tongkol, tenggiri, selar, kembung, tembang, udang putih, kepiting, rajungan serta cumi-cumi dan kerang-kerangan. Di sisi lain pengembangan perikanan budidaya terus ditingkatkan karena potensi wilayahnya yang sangat mendukung yang memiliki banyak areal pertambakan. Sementara itu produksi perikanan darat pada tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 4.293.776 kg, naik menjadi 12.008.780 kg pada tahun 2015.

Potensi perikanan budidaya khususnya bandeng, di Kabupaten Pemalang, sangat besar karena kondisi geografis alamnya yang cocok dan memiliki areal pertambakan yang produktif. Selain prospek pasar

yang sangat bagus di sisi lain perputaran modal juga bisa terjadi dengan cepat karena masa panen bisa dalam jangka waktu 4 bulan. Budidaya ikan bandeng ini sekarang menjadi salah satu unggulan dari pemerintah daerah setempat. Tercatat luas lahan tambak ikan bandeng yang ada mencapai 1.534 Hektar, dengan sentra produksi di Desa Limbangan, Desa Mojo, Desa Blendung, Desa Pesantren, Desa Kerstosari, Desa Kaliprau, Desa Tasikrejo, Desa Ketapang dan Desa Kendalrejo. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang, produksi terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, baseline produksi pada tahun 2011, mencapai 4.293.776 kg.

Adapun beberapa isu strategis yang perlu ditangani pada pembangunan yang akan datang diantaranya: (1) Over Fishing (Penangkapan ikan yang telah melebihi batas maksimal yang diperbolehkan) (2)Tingkat Konsumsi makan ikan masih rendah (3) Tingkat pendapatan Nelayan, Pembudidaya ikan masih dibawah UMR (Upah Minimal Regional) (4) Tingkat pendidikan masyarakat pesisir masih rendah, dan (5) Terjadi kerusakan pantai. Isu tersebut perlu mendapat prioritas dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2016-2021.

Tantangan yang dihadapi oleh nelayan di Kabupaten pemalang adalah adanya Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tentang penggunaan alat tangkap Ikan di laut sangat mempengaruhi upaya nelayan di Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan hasil tangkap perikanan dilaut. Pendapatan asli dari sektor perizinan usaha perikanan ke depan mengalami penurunan, karena adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Perl.12/MEN/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Peikanan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 /PERMEN-KP) 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik yang mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Produksi perikanan yang tinggi perlu didukung dengan usaha pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat. Pengelolaan dan pelestarian

sumber daya pesisir pantai tantangan tersendiri bagi Kabupaten Pemalang. Adanya masalah abrasi pantai menyadarkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan penanaman pohon mangrove di wilayah pantai. Jumlah pohon mangrove yang telah ditanam hingga tahun 2011 sebanyak 1.215.000 batang dan sampai tahun 2015 telah ditanami sebanyak 1.325.000 batang. Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	17.104.031	18.357.843	18.430.899	28.139.245	26.882.859
2	Rata-rata pendapatan nelayan	Rp/Bln	480 000	510 000	618 982	821 884	965.800
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Klp	27	50	61	63	65
4	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	4.293.776	5.004.520	8.015.015	9.954.600	12.008.780
5	Rata-rata pendapatan Pembudidaya	Rp/Bln	290.000	386.242	497.000	600.000	700.000
6	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Klp	50	65	75	90	104
8	Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	180	190	250	260	265
11	Jumlah pohon mangrove yang ditanam	Ha	121.5	123	125	132	136

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang, 2015.

2.3.2.2. Pariwisata

Kabupaten Pemalang dengan luas wilayah 111.530 ha berada diantara Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan. Serta bagian selatan terdapat kabupaten purbalingga. Melihat kondisi geografis Kabupaten Pemalang memiliki lokasi yang strategis karena dikelilingi oleh tempat-tempat wisata yang sebelumnya telah dikenal luas oleh wisatawan seperti Guci dari Kabupaten tegal, Dupan square dan museum batik dari Kota Pekalongan serta Owabong dari Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Pemalang memiliki peluang untuk dapat mengoptimalkan dalam pengembangan Pariwisata untuk dapat di kenal dan dapat setara dalam bersaing dengan pariwisata di wilayah disekitar Kabupaten Pemalang.

Selain lokasinya yang strategis, Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di utara Jawa Tengah yang juga memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Pemalang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu wisata alam, wisata buatan serta wisata budaya. Objek wisatanya yang bervariasi meliputi; daerah pegunungan, dataran tinggi, bukit hingga daerah pantai atau pesisir. Objek wisata yang berhubungan dengan spiritual dimiliki oleh Kabupaten Pemalang, namun demikian dari sekian potensi pengembangan wisata yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pariwisata yang baik.

Obyek wisata unggulan Kabupaten Pemalang adalah Pantai Widuri yang dilengkapi dengan keberadaan Widuri Water Park dengan luas area mencapai 6,5 ha. Wisata alam Pantai Widuri memiliki pemandangan indah nan elok dengan ditumbuhi pohon Angsana sepanjang bibir pantai. Pantai Widuri memiliki trotoar sepanjang 500 meter di pinggir pantai yang kerap digunakan untuk jogging, dan event-event tertentu. Obyek wisata alam yang potensial lainnya di Kabupaten Pemalang adalah: (1) Pantai Blendung di Desa Blendung Kecamatan Ulujami, (2) Pantai Raden Joko Tingkir di Desa Nyamplungsari Kecamatan Petarukan (3) Cempaka Wulung di dataran tinggi Moga (4) Arung jeram di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring (5) Pemandian Moga di desa Banyumudal, Kecamatan Moga (6) Curug Sibedil di Dusun Karangbulu, Desa Sima, Kecamatan Moga (7) Curug Bengkawah dan Telaga Silating di desa Sikasur, Kecamatan Belik (8) Gunung Gajah di desa Gongseng Kecamatan Randudongkal (9) Goa Gunung Wangi di Bantarbolang (10) Argo Wisata Kebun Teh Semugih di lereng kaki Gunung Slamet, Desa Banyumudal Kecamatan Moga (11) Telaga Rengganis di Kecamatan Watukumpul (12) Curug Sejajar di Desa Badak, Kecamatan Belik, Obyek Wisata Hutan Mangrove di Desa Mojo dan Obyek Wisata Susur Sungai Comal.

Secara keseluruhan data kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang baik mengunjungi obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun pihak swasta lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Data Kunjungan Wisata Tahun 2015

No	Nama Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan
1	Pantai Widuri	169.373
2	Kolam Renang Nyai Widuri	22
3	Ventura River	4.890
4	Widuri Water Park	112.905
5	Road Race	294.655
6	Makam Mbah Kramat/SMS	134.487
7	Zatobay	38.827
8	Pantai Nyamplungsari (Joko Tingkir)	9.900
9	Sumur Pandan	34.700
10	Agro Wisata Comal Baru	13.965
11	Pantai Blendung	15.712
12	Kolam Renang Bening	14.210
13	Makam Syeh Pandanjati	9.341
14	Makam Mbah Buyut Bantarbolang	7.347
15	Rainbow Rafting & Outbond (Comal River)	5.857
16	Kolam Renang Moga	1.664
17	Telaga Silating	4.917
18	Kebun Teh Semugih	7.653
19	Jambe Kembar	40.500
JUMLAH		960.925

Sumber: Disbudpar Kabupaten Pemalang, 2016.

Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Pemalang selama Tahun 2015 tercatat sebanyak 960.925 orang atau mengalami kenaikan sebesar 18,78% dibanding kunjungan Wisatawan Nusantara selama Tahun 2011 yang mencapai 503.711 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan ke Widuri Water Park (WWP) selama tahun 2015 adalah sebesar 169.373 orang.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB selama tahun 2011 mencapai 0,11% dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 yaitu 7,59 %. Kabupaten Pemalang mulai serius dalam mengembangkan sektor pariwisata mengingat salah satu tulang punggung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor inilah yang sangat potensial menghasilkan pendapatan yang besar karena sifatnya yang multi sektoral dan multi-effects. Dengan berkembangnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Pemalang maka akan mendukung

income generating dari berbagai sisi mulai dari retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel dan restoran, perijinan usaha pariwisata, di samping juga menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal.

Di Kabupaten Pemalang keberadaan hotel berbintang sebanyak 2 buah dan hotel non bintang sebanyak 19 buah. Adapun tingkat hunian pada tahun 2011 mencapai 30% dan terus meningkat pada tahun 2015 mencapai 48%. Tingkat hunian hotel juga sangat dipengaruhi oleh berkembangnya sektor pariwisata dan berbagai event yang diselenggarakan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memberikan perhatian lebih pada objek wisata yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan mengarahkan sektor ini sebagai investasi yang menguntungkan kedepannya dan memberikan kemudahan prosedur serta meningkatkan daya tarik setiap onjek wisata. Tujuannya, selain meningkatkan juga meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitar objek wisata. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan bersama sama baik pemerintah, swasta dan masyarakat karena keberhasilan pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata tergantung dari SDM nya. Terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis oleh seluruh pihak dalam mewujudkan sapta pesona juga harus dilaksanakan secara terus menerus. Selain itu, lokasi Kabupaten pemalang yang berbatasan dengan laut maka isu pentingnya sinergisitas antar desa pesisir dan perlunya pengembangan kawasan pesisir berbasis pariwisata perlu dikelola secara baik. Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Pemalang perlu dikelola dan diperhatikan lebih baik lagi yaitu dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan. Promosi dan pemasaran destinasi wisata sangat penting agar informasi setiap kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Pemalang dapat di ketahui oleh wisatawan baik itu wisatawan dari dalam Kabupaten Pemalang sendiri ataupun dari luar Kabupaten Pemalang.

Capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Pemalang bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan wisata	Orang	503.71 1	892.5 72	836.2 76	740.4 77	960.92 5
2	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	35	40	45	50	50
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,11	0,12	0,09	8,80	7,59
9	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	1	1	1	1	1
10	jumlah restoran	Unit	4	4	4	4	4
11	Jumlah hotel						
	- Berbintang	Unit	2	2	2	2	2
	- Non bintang	Unit	19	19	19	19	19
12	Tingkat occupancy hotel	%	30	35	40	45	48
13	Persentase pramuwisata bersertifikat	%	10	10	15	15	19

Sumber: Disbudpar Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.2.3. Pertanian

Lingkup urusan Pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Pemalang terdiri dari padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2011 produksi padi sebesar 389.827 ton meningkat menjadi 442.914 ton pada tahun 2012 dan 607.108 ton pada tahun 2013, sementara tahun 2014 mengalami penurunan produksi padi menjadi 582.912 ton dan kembali mengalami peningkatan menjadi 584.715 ton pada tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada produksi jagung dimana produksinya fluktuatif. Produksi tertinggi jagung terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 128.034 ton, sementara produksi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 28.461 ton. Sementara produksi kedelai hanya ada pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 38 ton pada tahun 2011 dan 11 ton pada tahun 2012.

Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Pemalang terdiri dari bawang merah, cabe besar, nanas, mangga, durian dan melati. Jumlah produksi tanaman hortikultura dalam kurun 2011-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Produksi bawang merah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 46.620 Kw dan terendah pada tahun

2013 sebesar 19.550 Kw. Produksi cabe besar tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 76.526 Kw dan produksi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 43.002 Kw. Produksi nanas juga mengalami fluktuatif dalam periode tahun 2011-2015. Produksi nanas tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 2.344.897 rumpun, sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 912.581 rumpun. Produksi mangga tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi mangga tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 167.320 Kw, sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 90.403 Kw. Produksi durian tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi durian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 16.030 Kw, sementara terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 3.787 Kw.

Produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Pemalang terdiri dari Cengkeh, Tebu, Teh, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Nilam, Tembakau Rakyat dan Kelapa. Jumlah produksi komoditas perkebunan dalam kurun 2011-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Produksi cengkeh tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 1.229,59 ton dan terendah pada tahun 2011 sebesar 1.062,03 ton . Produksi tebu tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 14.301,56 ton dan produksi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.986,50 ton. Produksi teh juga mengalami fluktuatif dalam periode tahun 2011-2015. Produksi teh tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 946,50 ton , sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 701,35 ton. Produksi kopi arabika tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi kopi arabika tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 219,30 ton, sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 158,61 ton. Produksi kopi robusta tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi kopi robusta tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 288,00 ton, sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 169,20 ton. Produksi nilam tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi nilam tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 4.272,02 ton, sementara terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2.692,45 ton. Produksi tembakau tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi tembakau tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 2.100,00 ton , sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 754,70 ton. Produksi kelapa tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Produksi kelapa tertinggi terjadi pada tahun

2015 sebesar 4.576,32 ton , sementara terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 4.404,76 ton.

Populasi ternak di Kabupaten Pemalang dalam periode 2011-2015 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meliputi kambing, domba, ayam petelur dan ayam buras. Sementara populasi ternak yang fluktuatif populasinya adalah sapi dan kerbau. Berikut perkembangan capaian kinerja urusan pertanian :

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kelompok Tani tanaman pangan/ perkebunan (kelompok)	Klp	190	600	2,640	2.624	2.158
2.	Kelompok Tani Peternakan (kelompok)	Klp	243	186	188	196	207
3.	Produktivitas padi	(kw/ha)	55,22	58,64	66,25	64,08	68,63
4.	Produksi pertanian tanaman pangan utama						
	- Padi	(ton)	389.827	442.914	607.108	582.912	584.715
	- Jagung	(ton)	46.145	28.461	128.034	42.683	64.992
	- Kedelai	Kw	38	11	6	9	14
5.	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama						
	- Bawang merah	(kw)	35.490	46.620	19.550	33.150	45.943
	- Cabe besar	(kw)	76.526	43.002	62.887	76.105	59.920
	- Nanas	(rumpun)	912.581	926.254	916.273	1.401.534	2.344.897
	- Mangga	(kw)	90.403	167.320	153.597	101.686	166.304
	- Durian	(kw)	8.602	12.448	3.787	16.030	14.646
6.	Produksi komoditas perkebunan utama						
	- Cengkeh	Ton	1.062,03	1.229,59	1.229,95	1.208	1.215,73
	- Tebu	Ton	14.301,56	10.711,60	13.070,03	11.348,30	5.986,50
	- Teh	Ton	701,35	932,85	935,16	925,6	946,50
	- Kopi Arabika	Ton	158,61	201,01	213	214,01	219,30
	- Kopi Robusta	Ton	169,2	283,41	284,671	284,99	288
	- Nilam	Ton	4.272,02	3.823,62	3.812,67	4.115,94	2.692,45
	- Tembakau rakyat	Ton	754,7	810,3	1.524,61	1.676,85	2.100
	- Kelapa	Ton	4.404,76	4.542,56	4.539,58	4.086,83	4.576,32

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
7.	Populasi komoditas peternakan utama						
	- Sapi potong	ekor	10.701	11.427	12.180	9.378	9.701
	- Kerbau	Ekor	7.878	8.887	9.498	8.035	8.255
	- Kambing	Ekor	145.558	148.854	156.296	166.270	171.123
	- Domba	Ekor	34.675	35.414	36.476	39.570	40.670
	- Ayam petelur	Ekor	151.500	117.800	117.800	165.300	165.300
	- Ayam Buras	Ekor	2.394.406	2.426.167	2.547.579	2.657.778	2.788.356
	- Itik	Ekor	241.318	309.930	317.678	310.950	322.987
8.	produksi daging (kg)						
	- Sapi	Kg	692.721	701.613	712.386	730.341	768.645
	- Kambing	Kg	424.016	429.792	447.024	465.024	485.792
	- Domba	Kg	178.830	193.515	201.284	209.515	221.497
	- Ayam petelur	Kg	1.133.576	1.069.041	881.421	165.300	1.236.833
	- Ayam buras	Kg	2.487.132	2.803.397	2.814.283	2.657.778	3.080.925
	- Itik	Kg	1.551.177	1.649.420	2.106.477	310.950	2.141.847
9.	Angka kesakitan / morbiditas ternak						
	- ternak besar	%	2,7	2,7	2,7	2,6	2,70
	- ternak kecil	%	4,6	4,45	4,3	3,95	3,91
	- ternak unggas	%	13	13	11,5	10,73	9,98

Sumber: *Dinperanhut Kabupaten Pemalang, 2016.*

2.3.2.4. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Pemalang terdiri dari tiga jenis yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan cagar alam. Luas hutan lindung sebesar 5.082,18 Ha , sementara luas hutan produksi sebesar 17.033,94 Ha dan luas hutan cagar alam sebesar 55,1734 Ha. Upaya melestarikan kondisi hutan dan lahan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, setiap tahun dilaksanakan kegiatan penanganan lahan kritis. Cakupan lahan kritis yang ditangani selama kurun waktu 5 tahun meningkat dari 38,26% pada tahun 2011 menjadi 88,42% pada tahun 2015. Selain kayu, hutan juga menghasilkan produk non kayu. Selama periode 2011-2015 produksinya fluktuatif. Produksi hasil hutan non kayu tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 3.485 ton dan terendah pada tahun 2013 sebesar 2.219 ton.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	38,26	50,5	63,46	83,65	88,42
2	Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3	Jumlah produksi hasil hutan non kayu	Ton	3.357	3.485	2.219	2.516	2.516
4	Luas Hutan:						
	- Lindung	Ha	5.082,18	5.082,18	5.082,18	5.082,18	5.082,18
	- Produksi	Ha	17.033,94	17.033,94	17.033,94	17.033,94	17.033,94
	- Cagar alam	Ha	55,1734	55,1734	55,1734	55,1734	55,1734

Sumber: Dipertanhut Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten Pemalang memiliki potensi hasil tambang yang cukup melimpah dan dapat digunakan sebagai komoditas pertambangan yang bernilai tinggi. Di wilayah Kabupaten Pemalang memiliki potensi bahan tambang berupa pasir, sirtu, batu pasir, lempung/tanah liat, batu gamping, batu sabak, kaolin, trass, diorit, andesit, marmer dan oker yang terdapat di wilayah bagian utara, tengah dan selatan. Kandungan sumber daya alam yang paling potensial di Kabupaten Pemalang khususnya Pemalang bagian selatan yang terletak di lereng gunung Slamet adalah berupa tambang Diorit, Kaolin, Batu Gamping dan Batu Marmer yang sampai dengan saat ini sama sekali belum tersentuh oleh investasi sehingga potensi pertambangan ini sama sekali belum bermanfaat Di daerah Pemalang bagian selatan paling banyak terdapat sumber mata air bersih yang sangat potensial untuk bahan baku air mineral.

Adapun luas lahan dan deposit/kandungan masing-masing potensi hasil tambang yang potensial adalah: (1) Batu Gamping (Kapur); dengan Lahan ± 150 Ha, dan memiliki Deposit 5,6 Juta Ton (2) Kaolin; dengan Luas Lahan 462,6 Ha, dan memiliki Deposit 704,53 (3) Diorit; dengan Luas Tambang 30 Ha, Kandungan Tambang 2.601,3

Juta Ton, dengan lokasi : Igir Penyawungan (Desa Kuta, Kecamatan Belik) 28.291.041 m³, yang merupakan area lereng Gunung Mas. Kabupaten Pemalang juga memiliki potensi Pasir Darat dan Pasir Laut yang memiliki potensi ekonomis tinggi apabila dimanfaatkan secara baik.

2.3.2.6. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurut lapangan usaha Kab Pemalang cenderung tetap dari tahun 2011-2015 (kecuali tahun 2015 yang mencapai 29%), yaitu 28% yang menjadikan sektor perdagangan sebagai sektor terbesar ke 3 terhadap PDRB Kab Pemalang. Penurunan sektor perdagangan ini antara lain disebabkan oleh menurunnya nilai realisasi ekspor. Nilai realisasi ekspor Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menurun sebesar US\$ 2.0878 US\$. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merek dagang produk lokal serta belum kuatnya jaringan eksportir. Terlebih dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang menyebabkan semakin ketatnya tingkat persaingan. Produk-produk import yang membanjiri pasar lokal dengan harga yang murah, dan kualitas yang lebih baik, mengakibatkan tersisihnya produk-produk lokal, yang tidak mampu bersaing dengan produk-produk import. Masih rendahnya kemampuan teknologi produksi, lemahnya standardisasi mutu produk dan masih rendahnya daya kreativitas dan inovasi produk juga menjadi faktor penyebab rendahnya daya saing produk-produk lokal.

Dari sisi sarana prasarana pendukung perdagangan, terlihat bahwa fasilitasnya masih kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dari belum adanya pasar daerah yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan nyaman. Pasar rakyat yang ada masih berkesan kumuh, becek sehingga belum mampu bersaing dengan pasar modern yang dikelola secara profesional, serta masih sedikitnya lokasi PKL yang tertata. Sementara itu perkembangan pasar modern yang begitu cepat dan dikelola secara profesional, menyebabkan pasar tradisional semakin tidak mampu bersaing dengan pasar modern. Pada tahun 2015 di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 16 unit pasar tradisional, yang terdiri dari 14 unit pasar umum, 1 pasar hewan dan 1 pasar grosir,

sedangkan toko modern berjumlah 36 unit, yang terdiri dari 2 unit departemen store, 33 unit pasar swalayan, dan 1 unit pusat perbelanjaan.

Capaian kinerja bidang perdagangan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sidang tera ulang (lokasi)	Lokasi	32	32	32	32	32
2	Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi	Unit	67	69	70	72	72
3	Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	-	-	-	-	60
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga sembako dan bahan penting lainnya.	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah promosi dagang yang diikuti	Kali	12	12	12	13	12
6	Nilai Ekspor (US dolar)	US\$	13.841	19.230	11.468	8.341	11.763
7	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	28	28	29	28	29
8	Jumlah kelompok/lokasi pedagang (formal dan informal) yang dibina	Klp	45	45	52	56	68
9	Jumlah pasar daerah	Unit	16	16	16	16	16
10	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	Unit	0	0	0	0	0
11	Lokasi PKL yang tertata	Titik	1	2	3	3	3

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.2.7. Perindustrian

Industri jika didasarkan atas jumlah tenaga kerja yang diserap dapat dibedakan menjadi empat jenis. Pertama adalah industri rumah tangga yaitu industri dengan jumlah pekerja antara 1 – 4 orang. Kedua adalah industri kecil, yaitu jumlah pekerja antara 5 – 19 orang. Ketiga

adalah industri sedang dengan tenaga kerja antara 20 – 99 orang. Dan yang keempat adalah industri besar yaitu industri yang mampu menyerap tenaga kerja 100 orang tenaga kerja atau lebih. Dari keempat kategori tersebut, yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Pemalang adalah industri kecil dan menengah (IKM). Sektor industri di Kabupaten Pemalang dalam struktur PDRB memberikan kontribusi sebesar 20,75% pada tahun 2015.

Peningkatan kualitas produk sektor industri dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Jumlah IKM yang mendominasi sektor industri di Kabupaten Pemalang pada umumnya memiliki kemampuan SDM dan modal yang terbatas sehingga perlu adanya fasilitasi, bimbingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya sehingga mampu/mengerti manajerial maupun teknis pengolahan industri, bantuan alat diberikan untuk meningkatkan kemampuan modal utamanya peralatan yang digunakan untuk produksi. Pelatihan dan bantuan alat juga membantu IKM untuk melaksanakan diversifikasi produk, sehingga desain makin bertambah.

Kabupaten Pemalang saat ini memiliki 2 kluster industri yang berkembang. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Jumlah IKM yang dibina dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mencapai 69 IKM dengan jumlah penerima bantuan mencapai 50% untuk IKAH dan 96,60% untuk Industri Aneka. Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan melakukan kegiatan promosi terhadap produk unggulan daerah. Hingga tahun 2015, jumlah IKM yang telah mengikuti kegiatan promosi mencapai 37 IKM. Sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah dalam bidang pengolahan makanan dan barang kebutuhan rumah tangga seperti tas, sapu, dan peralatan rumah tangga lainnya.

Secara rinci kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan kelompok IKM yang dibina	Klp	15	12	13	13	13
2	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	IKAH 92,11 Aneka 90,90	IKAH 30,23 Aneka 93,33	IKAH 68,57 Aneka 77,77	IKAH 74,45 Aneka 82,41	IKAH 50 Aneka 96,60
3	Persentase pertumbuhan IKM	%	9	5	5	5	5
4	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	22,83	21,11	22,77	20,81	20,75
5	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Klp	3	3	10	14	7
6	Jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	buah	-	1	-	-	-
7	Jumlah klaster industri yang berkembang	Klaster	2	2	2	2	2
8	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Klp	25	25	25	25	25

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2016

2.3.2.8. Transmigrasi

Pembangunan urusan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan pemerataan penduduk, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain kebijakan ini seringkali tidak sesuai dengan harapan, karena banyak kejadian penduduk yang sudah diberangkatkan ke daerah penempatan transmigrasi ternyata kembali ke daerahnya karena tidak mampu mengembangkan usahanya. Kerjasama antar pemerintah daerah dalam penempatan transmigrasi, dan kesiapan calon transmigran menjadi kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang salah satunya dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi merupakan penempatan penduduk secara merata yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Pemalang pada tahun 2012 hanya sebanyak 30 KK, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak

20KK dan pada tahun 2014 hanya sebanyak 8 KK. Sedikitnya jumlah transmigran yang diberangkatkan disebabkan keterbatasan alokasi yang diberikan pemerintah kepada Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	30	30	20	8	18

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.3. Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.3.1. Perencanaan

Urusan penunjang perencanaan merupakan salah satu urusan yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 membagi jenis perencanaan kedalam tiga kategori, yaitu perencanaan jangka panjang; perencanaan jangka menengah; dan perencanaan jangka pendek.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang telah tersedia. RPJPD telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah disusun pada tahun 2010 melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016. Adapun rencana pembangunan tahunan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya. Capaian kinerja urusan

penunjang perencanaan pembangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100	100	100	100	100
2.	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100
4.	Tingkat keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
5.	Nilai LkjIP	Nilai	C	C	C	C	C

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2016.

2.3.3.2. Kepegawaian

Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam

rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dengan peningkatan studi lanjut (melalui pendidikan diploma, sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi), pendidikan non formal (melalui pelatihan teknik, kursus, semiloka dan lain-lain) serta diklat fungsional dan diklat teknis. Sedangkan peningkatan reponsibilitas dan kuntabilitas adalah dalam rangka mewujudkan budaya organisasi, tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalangnya tahun 2015 sebanyak 12.351 orang yang terdistribusi kepada 54 unit SKPD (termasuk kecamatan). Perincian data aparatur pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan jabatan, diketahui jumlah aparatur yang menduduki jabatan struktural sebanyak 732 orang (5,93%); jabatan fungsional umum (JFU) sebanyak 4.176 orang (33,81%) dan jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 7.443 orang (60,26%). Dan berdasarkan pengelompokan golongan diketahui sebagian besar Golongan III sebesar 44,75%, Golongan IV sebanyak 32,05%, Golongan I dan Golongan II sebesar 24,21%.

Gambaran kinerja sumberdaya aparatur Kabupaten Pemalang Tahun 2011- 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ratio PNS terhadap penduduk	Rasio	0,010	0,010	0,009	0,010	0,010
2	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	91,90	92,63	93,60	93,2	95,3
3	Jumlah PNS Pensiun setiap tahun	Orang	363	374	377	259	254
4	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan assesment	%	0.04	0.00	0.00	2.39	3,23

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2016.

2.3.3.3. Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu mekanisme dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Implementasi pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan jenjang jabatan sebagaimana tabel 2.59 dibawah ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	1	4	2	3	-
2	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	7	7	12	7	5
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	14	40	23	29	15
4	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	Orang	154	346	326	352	135
5	Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	Orang	270	238	253	386	98
6	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	652	26	3	0	731

Sumber:Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, 2015.

2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari berbagai inovasi yang dilakukan oleh pelaksananya. Inovasi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Kajian penelitian yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pemalang dalam rangka menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sebanyak 42 kajian; terdiri dari kajian infrastruktur, kajian sosial budaya, kajian ekonomi, dan kajian pemerintahan. Kabupaten Pemalang masih belum memiliki invonasi daerah yang dikembangkan dalam kurun waktu 2011-2015. Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan	Kajian	10	12	10	11	9
2	Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan	Unit	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, 2015.

2.3.3.5. Fungsi Penunjang Lainnya

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang. Sekretariat daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari 9 (sembilan) bagian, meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Humas, 4) Bagian Administrasi Pembangunan, 5) Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 7) Bagian Organisasi, 8) Bagian Keuangan, dan 9) Bagian Umum. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang menjabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Koodinasi, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis, serta Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan. Penjabaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Bagian Administrasi Pembangunan

Kinerja bagian Administasi Pembangunan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan meliputi urusan Pekerjaan Umum dan urusan penunjang.

Kinerja bagian administasi pembangunan terkait dengan urusan pekerjaan umum adalah penyediaan layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi

(SIPJAKI) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dengan capaian mencapai 100%. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh capaian Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE dan Persentase paket pengadaan barang/jasa kepada publik melalui SIRUP.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi dan pengembangan kapasitas SDM, bagian administrasi pembangunan melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa. Jumlah PPKom dan PPHP yang dilatih mencapai 50%, menurun dari capaian tahun 2011 yang telah mencapai 100%. Jumlah penyedia barang yang dilatih mengenai sistem pengadaan secara online sebanyak 120 orang; yaitu sebanyak 20 orang setiap tahunnya.

Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan setiap bulan dan triwulan. Perkembangan capaian kinerja bagian administrasi pembangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Administrasi
Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Pemalang	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diumumkan kepada publik melalui SIRUP	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
4.	Persentase Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Kab. Pemalang yang dilatih	%	100	75	75	50	50
5.	Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Orang	20	20	20	20	20
6.	Persentase penyedia jasa kons-truksi yang mengikuti sosialisasi	%	75	75	75	75	75
7.	Persentase kegiatan/paket pengadaan yang dimonitoring dan evaluasi	%	0,74	3,96	4,99	4,91	4,99
8.	Tersusunnya data kinerja penyedia barang/jasa	%	100	100	100	100	100
9.	Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah (Bulanan dan Triwulanan)	Triwulan	4	4	4	4	4

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Administrasi Kabupaten Pemalang, 2016.

b. Bagian Hukum

Kinerja bagian Hukum dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Hukum meliputi urusan penunjang pemerintahan daerah. Fungsi Bagian Hukum menurut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang adalah fungsi koordiniasi, peyusunan pedoman teknis, pengkajian dan penelaahan produk hukum, penyuluhan hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan publikasi produk hukum.

Terdapat 9 (sembilan) indikator yang memiliki capaian 100%, antara lain tindaklanjut terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, pengusulan raperda kedalam

Promperda, pembinaan terhadap kelompok kadarkum, serta Persentase produk hukum yang terinput dalam database produk hukum di Kabupaten Pemalang. Seraca rinci capaian kinerja bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Hukum
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2.	Tersusunnya Propemperda	Kali	1	1	1	1	1
3.	Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda	%	100	100	100	100	100
4.	Jumlah sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	Produ k	671	969	705	680	-
5.	Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk	Klp	3	3	3	3	3
6.	Persentase kelompok kadarkum yang dibina	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase produk hukum daerah yang tersosialisasikan	%	100	100	100	100	100
8.	Tersusunnya dokumen laporan capaian indikator RANHAM di Kab. Pemalang	Dok	2	2	2	2	2
9.	Persentase pengelola jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Perpustakaan Hukum di Bagian Hukum yang mengikuti pelatihan	%	100	0	100	100	100
10.	Persentase produk Hukum Desa yang dikaji	%	189,9	131,7	107,7	102,9	-
11.	Persentase produk hukum yang terinput dalam database produk hukum di Kabupaten Pemalang	%	0	0	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Hukum Kabupaten Pemalang, 2016.

c. Bagian Humas

Kinerja bagian Humas dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Humas meliputi urusan penunjang pemerintahan daerah. Fungsi Bagian Humas menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang adalah fungsi koordinasi, penyusunan pedoman teknis, dan penyampaian informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Persentase dokumentasi kegiatan KDH dan WKDH telah mencapai 100%; kondisi yang juga dapat dilihat pada indikator informasi public dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan melalui melalui iklan layanan masyarakat; dan dialog interaktif yang disiarkan melalui media elektronik Radio Daerah pada tahun berjalan. Terdapat 1 sengketa informasi yang ditangani setiap tahunnya dan terdapat 1 Petugas PPID dan PPID Pembantu yang mengikuti pembinaan dibidang kehumasan setiap tahunnya. Kinerja bagian humas secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Humas
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH Pemerintah Kabupaten Pemalang	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase informasi public dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan melalui melalui iklan layanan masyarakat	%	100	100	100	100	100
3.	Jumlah dialog interaktif yang disiarkan melalui media elektronik Radio Daerah pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
4.	Terfasilitasinya sengketa informasi pada tahun berjalan	Kali	1	2	1	1	1
5.	Jumlah Petugas PPID dan PPID Pembantu yang mengikuti pembinaan dibidang kehumasan	Oran g	1	1	1	1	1

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Humas Kabupaten Pemalang, 2016.

d. Bagian Keuangan

Kinerja Bagian Keuangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Keuangan meliputi urusan penunjang pemerintahan daerah. Fungsi bagian Keuangan menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang adalah fungsi koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan. Kinerja bagian keuangan sepenuhnya telah terlaksana setiap tahunnya. Kinerja Bagian Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Keuangan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase terselesaikannya verifikasi bukti pengeluaran yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
2.	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010)	laporan	1	1	1	1	1
3.	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang seharusnya tersusun dibanding dengan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	jumlah dokumen yang tersusun berdasarkan peraturan perundang-undangan						

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Keuangan Kabupaten Pemalang, 2016.

e. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat meliputi urusan penunjang pemerintahan daerah, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Sosial, Urusan Penanaman Modal, dan Urusan Kesbangpoldagri. Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang adalah fungsi koordiasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan sosial.

Kinerja terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinilai melalui indikator pemberian bantuan kepada perempuan sebanyak 2 orang setiap tahunnya. Dari sisi kelembagaan PUG, bagian kesra melakukan pelatihan kepada aparatur dan vokal point tentang PUG dan Anak kepada 18 vocal point pada tahun 2015. Dari sisi penanganan korban kekerasan sebanyak 100% korban setiap tahunnya mendapatkan penanganan melalui fasilitasi rumah aman.

Usaha promotif dan preventif dilakukan oleh Bagian Kesra dalam rangka menunjang kinerja urusan kesehatan terkait dengan penularan penyakit seksual adalah melalui kegiatan penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Usaha penanganan terhadap PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan usaha dan keterampilan serta fasilitasi penanganan terhadap PMKS. Kinerja

Bagian Kesejahteraan Rakyat secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kelompok perempuan penerima bantuan yang mampu menjalankan usahanya	Klp	2	2	2	2	2
2.	Persentase Aparatur atau vokal point yang mendapatkan pelatihan tentang PUG dan Anak	Klp	40	40	18	18	18
3.	Persentase institusi jaringan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak yang terfasilitasi kegiatannya	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban KDrt yang terfasilitasi dalam rumah aman	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, eks psikotik dan masyarakat rawan sosial yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan berusaha	%	Na	Na	7,24	4,22	4,22
6.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, eks psikotik dan masyarakat rawan sosial yang terfasilitasi	%	Na	Na	4,58	8,44	8,44
7.	TPHD/TKHD yang diberangkatkan	Orang	4	4	4	4	4

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Kesra Kabupaten Pemalang, 2016.

f. Bagian Organisasi

Kinerja Bagian Organisasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Organisasi meliputi urusan penunjang pemerintahan daerah. Fungsi yang diamanatkan kepada bagian organisasi adalah fungsi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur daerah; serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur daerah. Kinerja bagian organisasi secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Organisasi
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersusunnya dokumen SOTK, uraian tugas, anjab dan ABK dan evaluasi jabatan	Dok	1	2	2	1	1
2.	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dok	3	4	3	3	3
3.	Persentase tersedianya layanan dan jaringan TNDE	%	Na	Na	Na	100	100
4.	Tersedianya data Kepegawaian yang dikelola di lingkungan	Orang	1	1	1	1	1
5.	Jumlah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang tersertifikasi iso/survelent	PD	2	2	3	6	6
6.	Jumlah PD yang menerapkan SOP	PD	7	7	7	7	7

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Organisasi Kabupaten Pemalang, 2016.

g. Bagian Perekonomian dan SDA

Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari 9 (sembilan) indikator yang mencakup terhadap kinerja urusan penunjang pemerintah daerah, urusan penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pekerjaan umum. Kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari indikator jumlah evaluasi dan pelaporan penghematan penggunaan energy dan air di SKPD yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun.

Program raskin merupakan salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan dari sisi penyediaan bahan makanan pokok berupa beras. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bagian Perekonomian dan SDA dengan tingkat ketepatan mencapai 37,84% pada tahun 2011. Kondisi tersebut semakin menurun pada tahun 2014 hingga hanya mencapai 18,02%. Ketidaktepatan penyaluran raskin disebabkan oleh adanya data dasar yang tidak update dan proses pembagian di tingkat masyarakat dengan sistem bagi rata atau *bagito*. Distribusi raskin secara merata dan tepat sasaran tidak berbanding lurus dengan upaya peningkatan kapasitas pengelola raskin di Kabupaten Pemalang. Sebanyak 20% pengelola raskin telah dilatih pada tahun 2014. Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Perekonomian dan SDA
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah evaluasi dan pelaporan penghematan penggunaan energy dan air SKPD	Dok	4	4	4	4	4
2.	Persentase pertambangan batuan yang mempunyai ijin	%	65	65	65	65	40
3.	Meningkatnya pengetahuan	Orang	23	8	19	18	20

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	pengelola Raskin sesuai dengan peraturan yang berlaku.						
4.	Persentase evaluasi pelaksanaan program raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat adminitrasi	%	37,84	37,84	22,97	18,02	18,02
5.	Jumlah kerjasama dibidang penanaman modal	MoU	59	59	31	18	28
6.	Persentase PMA/PMDN di Kab. Pemalang yang taat aturan	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase meningkatnya perkembangan laba Perusda	%	3	5	6	9	14
8.	Tersusunnya laporan pemantauan pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat.	Kali	4	4	4	4	4
9.	Jumlah kegiatan pemantauan harga, barang, dan jasa di Kab. Pemalang	Kali	4	4	4	4	4

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Ekonomi dan SDA Kabupaten Pemalang, 2016.

h. Bagian Tata Pemerintahan

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Urusan yang diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan meliputi urusan penunjang pemerintahan

daerah. Fungsi Bagian Tata Pemerintahan menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang adalah fungsi koordinasi penyusunan program kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pertanahan, pemerintahan desa dan kelurahan; penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, pertanahan, pemerintahan desa dan kelurahan.

Pada tahun 2015, sebanyak 100% dari total kecamatan di Kabupaten Pematang telah memiliki buku data monografi kecamatan dan seluruh desa telah menyusun buku data aparatur pemerintah desa. Bagian Tata Pemerintahan juga melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala desa. Hingga tahun 2014, sebanyak 209 desa telah mendapatkan fasilitasi pemilihan kepala desa. Capaian kinerja bagian Tata Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Tata Pemerintahan
Kabupaten Pematang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase buku data monografi seluruh kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Tersusunnya buku data aparatur pemerintah desa	%	100	100	100	100	100
3.	Tersusunnya buku data pembakuan nama rupa bumi Desa/Kelurahan di Kabupaten Pematang	Dok	1	-	-	1	-
4.	Tersusunnya dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pematang	%	100	100	100	100	100
5.	Tersedianya data di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
6.	Tersusunnya PRA RAPERDA dan PERBUB yang mengatur desa / kelurahan	%	100	100	100	100	100
7.	Terfasilitasnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Kali	5	170	20	9	-
8.	Banyaknya Kecamatan yang penyelenggaraan adm. Pemerintahannya sesuai dengan standar	Kec	14	14	14	14	14
9.	Banyaknya Kecamatan yang menjalankan kewenangan sesuai % dengan ketentuan	Kec	14	14	14	14	14

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang, 2016.

i. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan salah satu bagian yang bertugas untuk melakukan pelayanan terhadap lingkungan internal sekretariat daerah dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian umum adalah kegiatan rutin. Kinerja bagian umum secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Bagian Umum
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Terkirimnya surat dan paket di lingk. dalam 1 tahun	Bulan	12	12	12	12	12
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan telpon, air dan listrik di Lingk. , kantor KDH dan WKDH, rumah	Bulan	12	12	12	12	12

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	jabatan KDH dan WKDH, rumah dinas Sekda dan TV kabel KDH/WKDH						
3.	Persentase penyelesaian pengurusan perijinan kendaraan dinas operasional roda 2, roda 4 dan roda 6	%	100	100	100	100	100
4.	Tersedianya ATK di Lingk. Kab. Pemalang seperti kertas, bolpoint, tinta komputer, CDRW dan lain-lain.	Bulan	12	12	12	12	12
5.	Tersedianya barang cetakan dan layanan penggandaan di Lingkungan Kab. Pemalang seperti tas bingkisan dan kartu ucapan, A2, SSP dlm 1 tahun	Bulan	12	12	12	12	12
6.	Tingkat pemenuhan komponen instalasi listrik, BBM solar dan alat-alat listrik dan elektronik terhadap kebutuhan penerangan bangunan di Lingkungan Kab. Pemalang	Bulan	12	12	12	12	12
7.	Tersedianya layanan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelengkapan kegiatan upacara, rapat, penerimaan tamu dll	%	50	50	50	55	55
8.	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga pada	Paket	2	2	2	2	2

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	rumah Jabatan di Lingkungan Kabupaten Pemalang						
9.	Pemenuhan pakaian dinas, PNS di lingkungan dan KDH/ WKDH dan perlengkapannya	Paket	22	22	24	24	24
10.	Persentase sumber daya aparatur dibidang ketatausahaan/ persuratan dinas yang mengikuti sosialisasi	%	100	100	100	100	100
11.	Terupdatenya data aset dilingkungan Sekretariat Daerah setiap tahun	Kali	10	10	10	15	15
12.	Pemenuhan jaringan komunikasi dan persandian (central PABX, jaringan PABX, mesin fotocopy) yang dapat berfungsi dengan baik	Bulan	12	12	12	12	12

Sumber: Sekretariat Daerah Bag. Umum Kabupaten Pemalang, 2015.

2. Pengawasan

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat mencapai 224 temuan pada tahun 2014 dan kesemuanya telah ditindaklanjuti.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	192	216	224	224	224
2	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
3	Maturitas SPIP	Level	-	-	Level 1	Level 1	Level 1
4	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	-	-	Level 1	Level 1	Level 1

Sumber:Inspektorat Kabupaten Pemalang, 2015.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

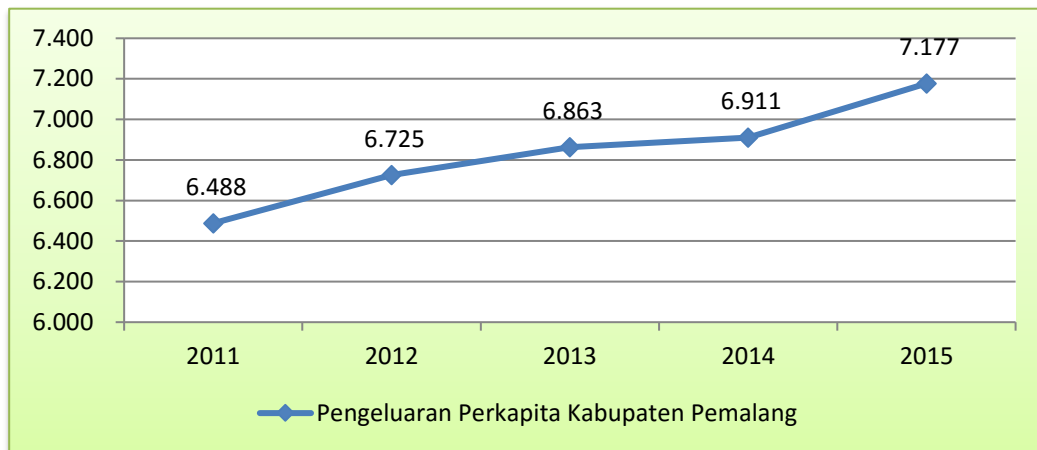
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2011 pengeluaran masyarakat baru mencapai

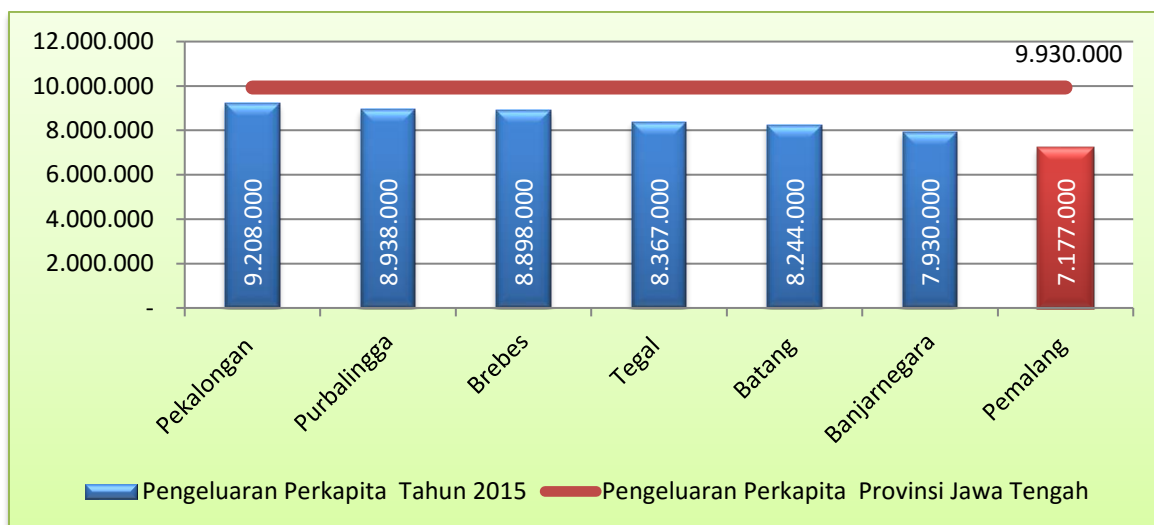
Rp 6.488.000 meningkat menjadi Rp 6.863.000 pada tahun 2013. Pada tahun 2015 pengeluaran perkapita masyarakat menjadi Rp 7.177.000.



Sumber: DPPKAD Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kab. Pemalang yang Disesuaikan Tahun 2011-2015

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Pemalang berada pada posisi terakhir diantara kabupaten sekitar dan capaian Jawa Tengah. Perbandingan capaian indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Pemalang dengan capaian kabupaten sekitar secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: DPPKAD Kabupaten Pemalang, 2015.

Gambar 2.21 Grafik Perbandingan Capaian Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Kab. Pemalang dengan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Perhubungan

1. Panjang Jalan

Panjang jalan Kabupaten Pemalang sepanjang 674 km. Kondisi jalan baik di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 masih belum optimal yaitu sebesar 86%. Sebesar 94,36 km jalan di Kabupaten Pemalang mengalami kerusakan antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Pemalang, khususnya terjadi di daerah Pemalang Tengah dan Selatan, yang labil dan memiliki tingkat pergerakan tanah yang cukup tinggi. Kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

2. Ketersediaan Terminal Angkutan

Kabupaten Pemalang memiliki 1 terminal induk dan 7 sub-terminal, yang melayani transportasi massal baik dalam kota maupun luar kota. Ketersediaan terminal penumpang sudah memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum. Selain angkutan yang melayani jalur utama, telah tersedia juga angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang sebanyak 33 jaringan trayek. Kendati telah mencapai sebanyak 33 jaringan trayek, persentase ketersediaan sarana angkutan kota di Kabupaten Pemalang masih cukup rendah, yaitu sebesar 18,5% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat yang membutuhkan angkutan kota bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah angkutan umum akibat dari pergeseran model penggunaan transportasi oleh masyarakat.

2.4.2.2. Penataan Ruang

1. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.909 hektar. Kawasan tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang. Jenis industri yang dikembangkan pada kawasan tersebut antara lain: 1) industri pangan; 2) industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; 4) industri alat

transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; 8) industri agro; 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan 10) industri kimia dasar.

2. Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Pemalang terdiri dari dua jenis kerawanan, yaitu kerawanan terhadap kondisi banjir dan kerawanan terhadap kondisi genangan. Kecamatan yang memiliki kerawanan terhadap banjir di Kabupaten Pemalang terdapat di Kecamatan Bodeh, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, Kecamatan Pemalang; Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik, dan Kecamatan Bantarbolang. Adapun wilayah yang memiliki kerawanan terhadap genangan terdapat di Kecamatan Kecamatan Pemalang; Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, dan Kecamatan Ulujami.
3. Kawasan Rawan Kekeringan di Kabupaten Pemalang terbagi kedalam dua kategori, yaitu kawasan rawan kekeringan air bersih dan kawasan rawan kekeringan pertanian. Kawasan rawan kekeringan air bersih terdapat di Kecamatan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik sedangkan kawasan rawan kekeringan pertanian terdapat di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Comal, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Ulujami, dan Kecamatan Bodeh.
4. Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Pemalang terdapat pada dua jenis topografi, yaitu daerah pegunungan dan daerah alur sungai. Daerah rawan longsor di wilayah pegunungan terdapat Kecamatan Watukumpul; Kecamatan Belik, Kecamatan Pulosari; Kecamatan Moga, dan Kecamatan Randudongkal. Adapun wilayah rawan longsor di sepanjang alur sungai terdapat pada aliran Sungai Comal, Sungai Waluh, Sungai Polaga, Sungai Lumeneng, Sungai Layangan, dan Sungai Rambut.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang memengaruhi investasi, yaitu kondusifitas daerah, mekanisme pengajuan perijinan usaha, daya

dukung kebijakan pemerintah dalam memajukan iklim perekonomian di Kabupaten Pemalang.

Angka kriminalitas di Kabupaten Pemalang –kendati menunjukkan kondisi menurun- masih cukup tinggi di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2015, jumlah kasus kriminalitas yang terjadi sebanyak 216 kasus; terdiri dari kasus pencurian, perampasan, dan beberapa tindak pidana lainnya.

Usaha promotif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi adalah melalui inovasi pemotongan jalur birokrasi pengurusan ijin usaha serta penyusunan perda yang mempermudah proses investasi. Hingga tahun 2015, tercatat sebanyak 5 perda yang mendukung terhadap pencapaian iklim investasi kondusif. Perkembangan capaian kinerja pemerintah dalam mendukung iklim investasi yang memadai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kriminalitas	Kasus	280	309	225	307	216
2	Jumlah demonstrasi	Kali	19	15	19	11	4
3	Lama proses perijinan (hari)	Hari	5	5	4	4	3
4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Buah	8	11	12	12	11
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	6	7	6	6	5

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2016.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2010-2015

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja keuangan daerah mencakup analisis terhadap pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Lain – lain pendapatan yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah menjadi sumber pendanaanaan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut menjadikan upaya peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah menjadi prioritas dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal yang akan berbanding lurus dengan keleluasaan ruang dalam pencapaian visi kepala daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2010-2015 diarahkan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, melalui upaya-upaya :

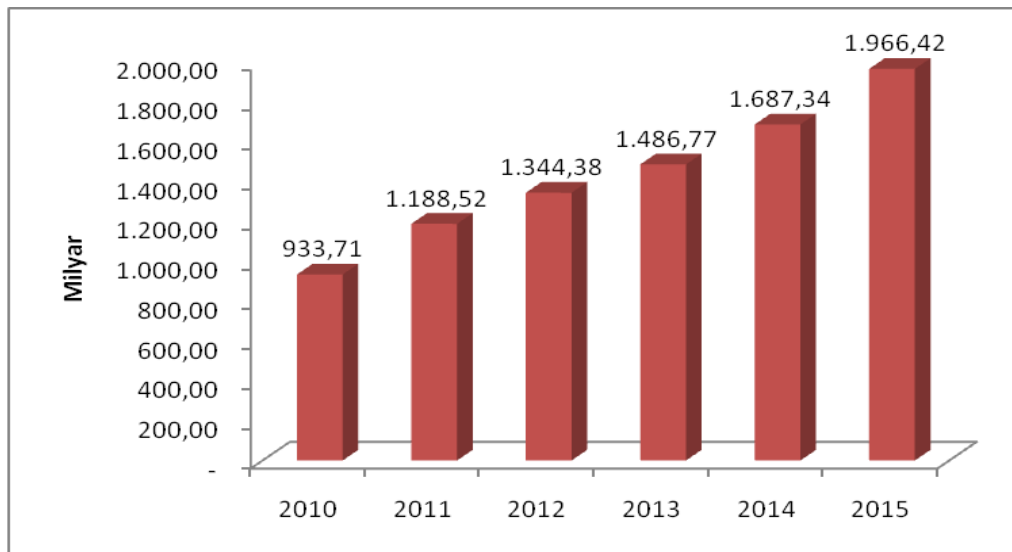
- 1) Pemantapan Regulasi dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya PBB dan BPHTB ;

- 2) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan;
- 3) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, melalui peningkatan validitas data aset, seperti luas sawah eks bondu desa yang akan dilelang melalui lelang garapan;
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil;
- 6) Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum dan perikanan) sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan;
- 3) Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP).

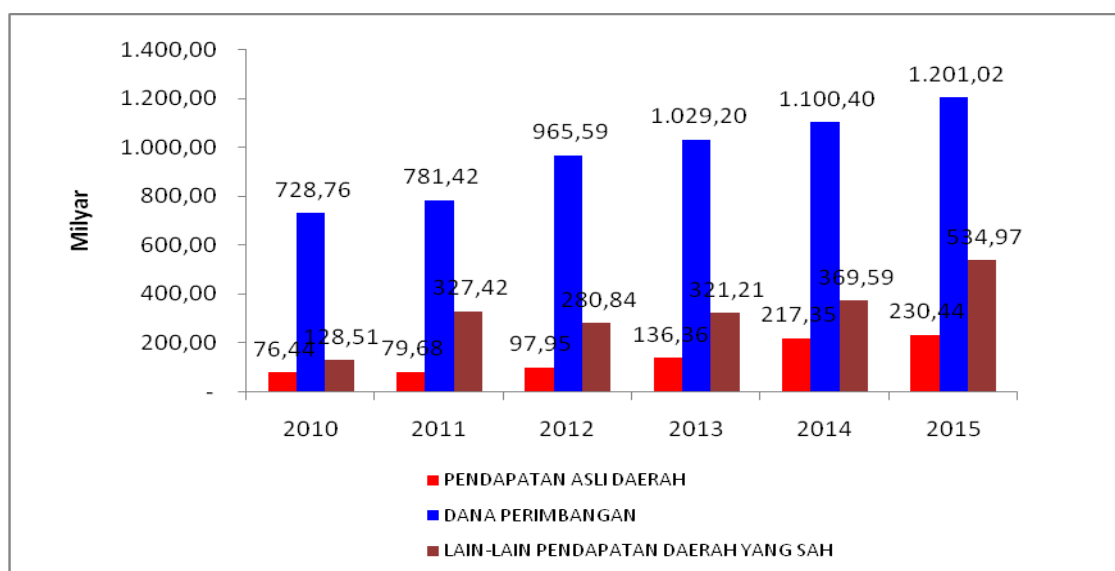
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang dari tahun anggaran 2010-2015 mengalami peningkatan dari sebesar 933,71 milyar rupiah menjadi sebesar 1.966,42 milyar rupiah. Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.1



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.1. Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

Dilihat dari masing-masing unsur pendapatan dalam APBD, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 seluruh unsur pendapatan daerah menunjukkan peningkatan. PAD meningkat dari sebesar 76,44 milyar menjadi 230,44 milyar; Dana Perimbangan meningkat dari sebesar 728,76 milyar menjadi 1.201,02 milyar; Lain-lain pendapatan yang sah meningkat dari sebesar 128,51 milyar menjadi 534,97 milyar. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa di Kabupaten Pemalang ada upaya untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi tersebut masih bisa ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Secara rinci perkembangan besarnya masing-masing unsur pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.2. Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2010-2015

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

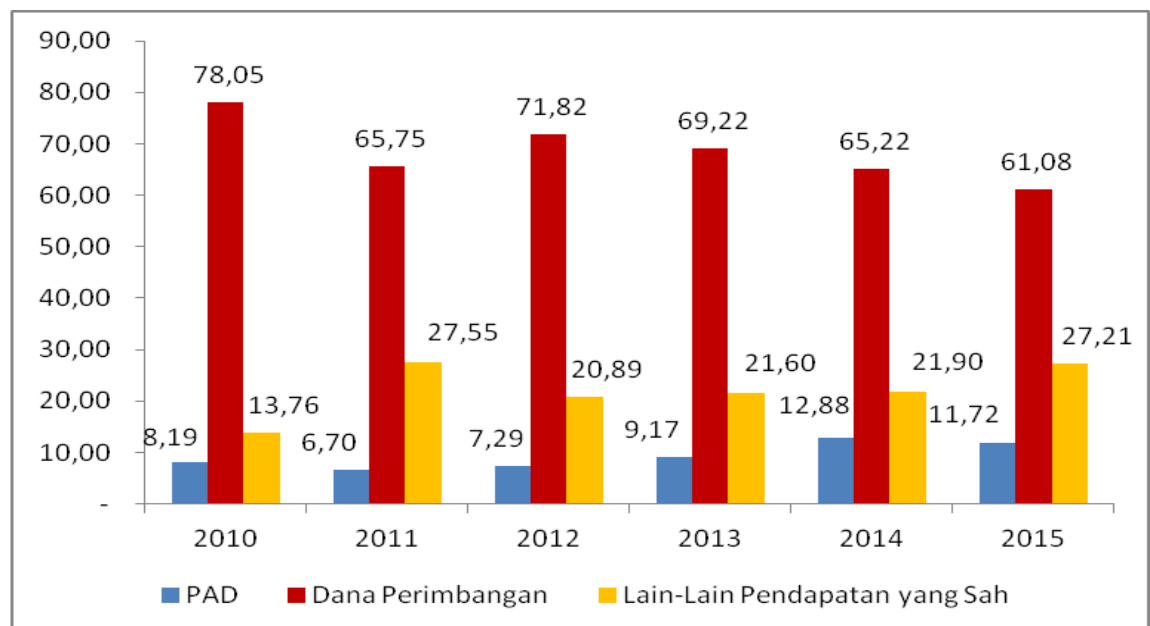
Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	PENDAPATAN	933.713.817.185	1.188.521.215.764	1.344.382.614.412	1.486.773.783.371	1.687.338.257.907	1.966.423.490.803
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.441.045.221	79.677.543.259	97.951.207.914	136.362.281.618	217.345.439.974	230.435.212.865
a	Pendapatan Pajak Daerah	12.969.956.160	15.848.285.530	18.171.988.828	34.447.511.931	37.315.308.607	40.594.774.039
b	Hasil Retribusi Daerah	44.575.329.393	42.209.502.954	20.128.359.440	24.072.977.122	21.419.433.463	21.685.600.023
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.305.677.515	8.780.070.155	9.716.177.698	9.903.250.709	12.265.204.487	13.746.971.117
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.590.082.153	12.839.684.620	49.934.681.948	67.938.541.856	146.345.493.417	154.407.867.686
2	DANA PERIMBANGAN	728.760.540.210	781.421.087.284	965.594.442.210	1.029.201.574.058	1.100.398.916.758	1.201.017.714.717
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.204.748.210	41.527.093.284	45.562.190.210	34.270.008.058	29.567.028.758	31.418.194.717
b	Dana Alokasi Umum	619.895.592.000	672.429.594.000	827.163.222.000	931.426.998.000	1.016.813.333.000	1.058.982.530.000
c	Dana Alokasi Khusus	61.660.200.000	67.464.400.000	92.869.030.000	63.504.568.000	54.018.555.000	110.616.990.000

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.512.231.754	327.422.585.221	280.836.964.288	321.209.927.695	369.593.901.175	534.970.563.221
a	Pendapatan Hibah	100.876.760	95.710.410	112.681.020	110.890.140	2.128.372.410	9.068.450.660
b	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.699.566.794	43.312.693.151	58.095.607.546	68.668.790.555	89.287.999.765	121.474.565.561
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.931.467.200	235.870.036.660	179.101.037.000	211.556.562.000	238.222.414.000	362.578.932.000
d	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.780.321.000	48.144.145.000	43.527.638.722	40.873.685.000	39.955.115.000	41.848.615.000

Proporsi Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan di Kabupaten Pemalang cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 8,19% pada tahun 2010 menjadi 11,72% pada tahun 2015. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan yang sah, Meskipun tidak selalu mengalami peningkatan, namun proporsi lain-lain pendapatan yang sah ini cenderung meningkat dari sebesar 13,76% menjadi 27,21%. Peningkatan proporsi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan ini menunjukkan bahwa ada geliat kondisi perekonomian yang baik di Kabupaten Pemalang. Sebaliknya, proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan selama tahun 2010-2015 menunjukkan kecenderungan ada penurunan proporsi dari sebesar 78,05% menjadi 61,08%.

Secara rinci perkembangan proporsi masing-masing unsur pendapatan selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

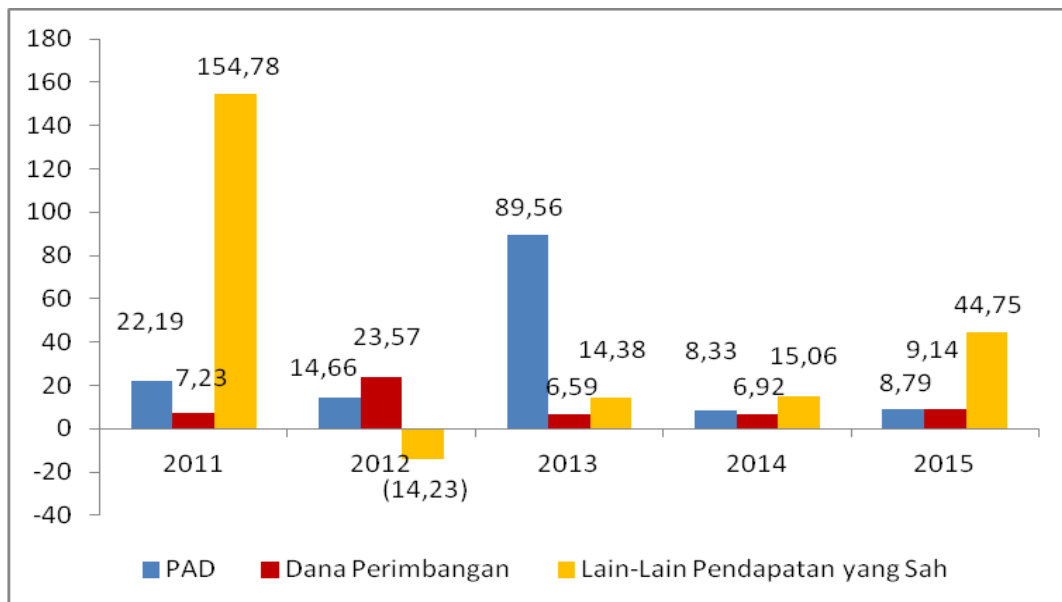


Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.3. Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

Pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan di Kabupaten Pemalang selama tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Secara rata-rata laju pertumbuhan PAD di

Kabupaten Pemalang sebesar 26,36%, sedangkan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 10,69%, dan rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 42,95%.



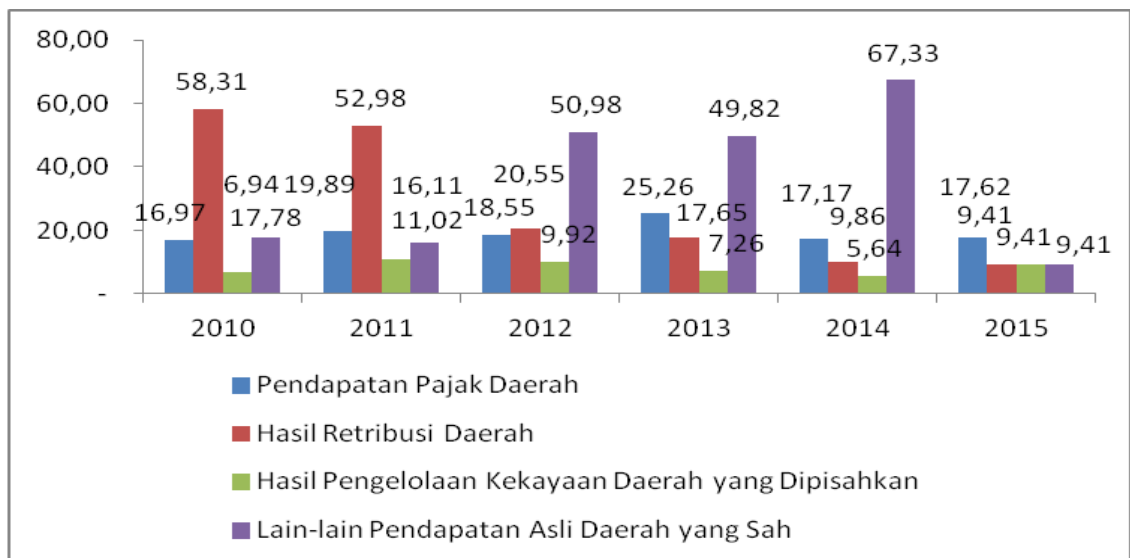
Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.4. Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2010-2015

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Pemalang sangat dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang sah. Proporsi Lain-lain PAD yang sah selama lima tahun sebesar 64,91% dari PAD. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pendapatan Pajak Daerah. Proporsi Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang selama lima tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun sebesar 27,96% dari PAD. Komponen ketiga yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah Retribusi Daerah.

Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 proporsi Retribusi Daerah sebesar 58,31% menurun menjadi 9,41% pada tahun 2015, sedangkan lain-lain PAD yang sah meningkat dari

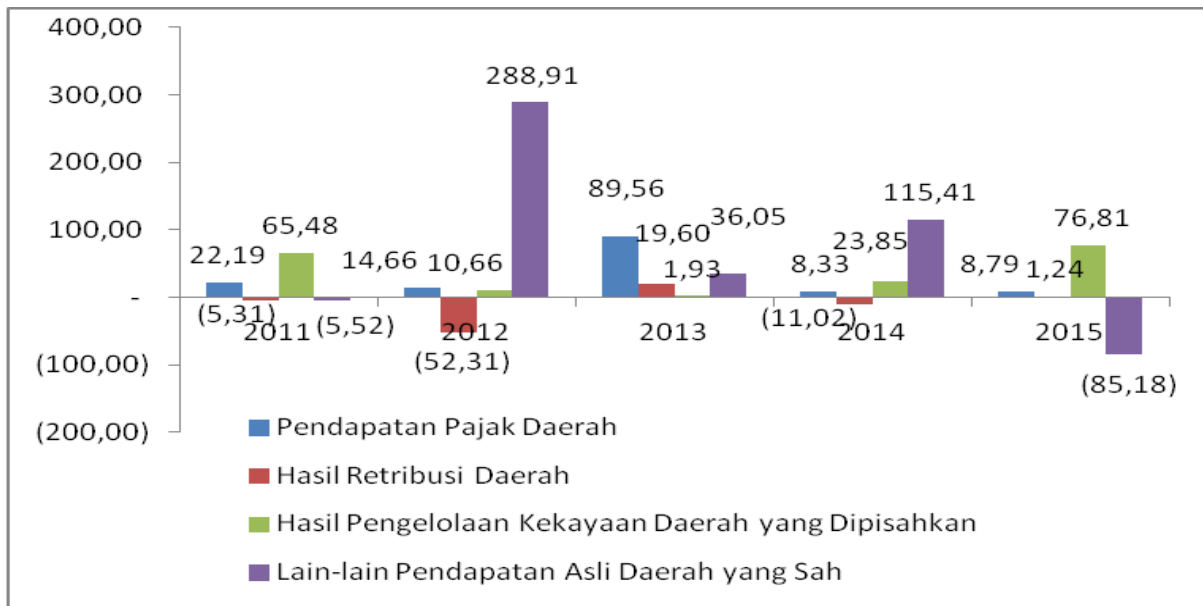
sebesar 17,78% menjadi 67,01%. Proporsi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2010-2011 tergolong sangat tinggi, namun mulai tahun 2012 proporsi terhadap total PAD yang tertinggi yaitu lain-lain PAD yang sah. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan status RSUD menjadi BLUD, sehingga pendapatan yang awalnya masuk retribusi daerah berubah menjadi lain-lain PAD yang sah. Selain itu, mulai tahun 2014 terdapat ada penambahan Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Proporsi pajak dalam kurun waktu tahun 2010-2015 relatif kecil, dengan kisaran antara 16,97% hingga 25,26%. Secara rinci proporsi masing-masing unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.5. Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015

Pertumbuhan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 relatif fluktuatif, sehingga tidak dapat diperoleh angka rata-rata yang ideal. Secara rinci perkembangan pertumbuhan masing-masing unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.6



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang
Gambar 3.6. Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015

2. Belanja Daerah

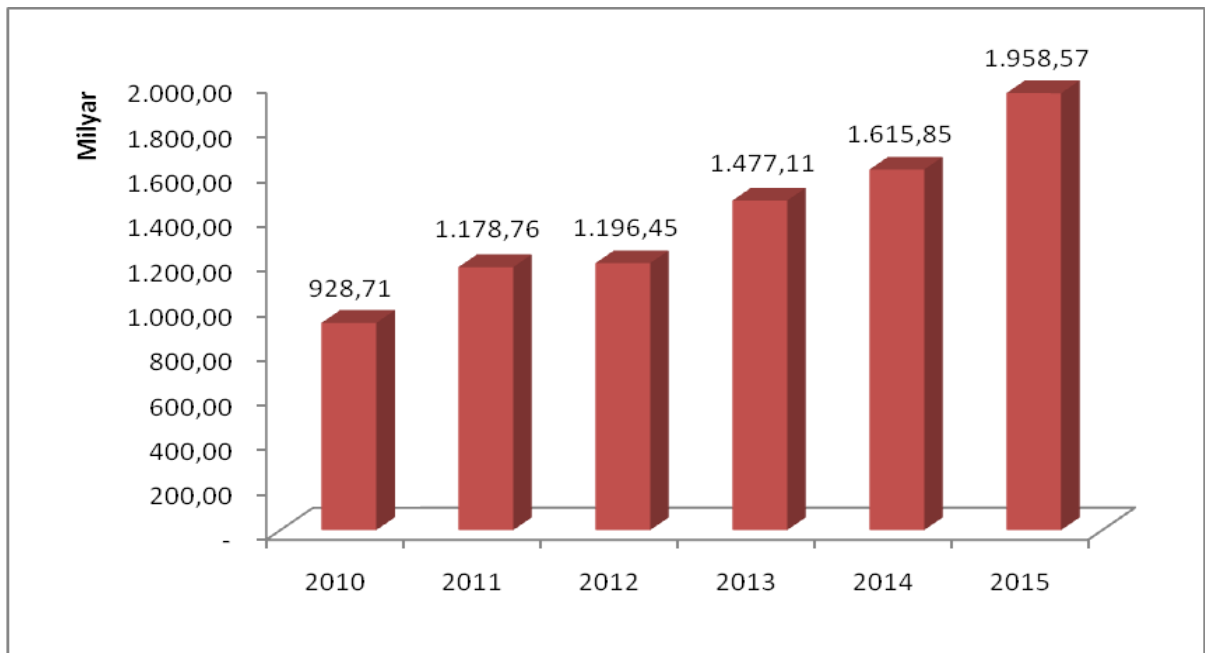
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Belanja daerah mengedepankan efisiensi anggaran, mempertahankan serta

pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 kebijakan belanja daerah Kabupaten Pemalang diarahkan pada:

1. Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : Bantuan Sosial untuk pendampingan PNPM baik mandiri perkotaan maupun mandiri perdesaan; Hibah pemugaran rumah tidak layak huni; Fasilitasi pendampingan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan Fasilitasi pendampingan koordinasi pengalokasian beras bagi masyarakat miskin.
3. Pembangunan yang mendukung pencapaian IPM dengan memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2010 besarnya belanja daerah sebesar 928,71 milyar, pada tahun 2015 menjadi sebesar 1.905,27 milyar rupiah. Perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang
Gambar 3.7. Besarnya Belanja Daerah Tahun 2010-2015

Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten Pemalang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

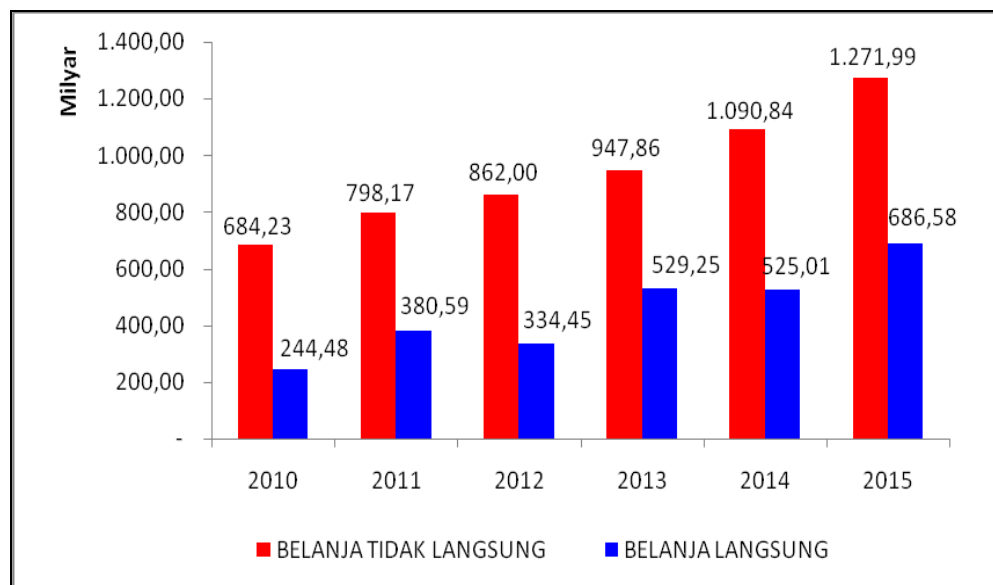
Tabel 3.2.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
B	BELANJA	928.713.828.281	1.178.756.054.644	1.196.452.995.116	1.477.106.031.341	1.615.850.550.570	1.958.568.738.065
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	684.233.134.350	798.170.121.712	862.001.112.794	947.855.203.276	1.090.836.361.163	1.271.988.666.346
a	Belanja Pegawai	588.737.311.496	699.880.254.313	765.649.129.168	820.751.058.381	909.882.937.546	977.052.576.164
b	Belanja Bunga	326.805.691	224.478.053	213.716.591	84.583.170	128.043.030	71.186.939
c	Belanja Subsidi	-	-				
d	Belanja Hibah	23.981.177.694	19.518.452.000	26.946.382.000	44.882.857.000	73.092.995.400	111.268.805.501
e	Belanja Bantuan Sosial	21.747.890.000	30.513.220.936	12.948.250.000	15.584.850.000	24.088.652.800	2.712.152.100
f	Belanja Bagi Hasil	1.882.677.792	869.999.874				3.684.035.643
g	Belanja Bantuan Keuangan	46.591.586.777	45.816.916.370	55.004.994.035	65.840.166.725	83.239.932.387	176.906.409.999
h	Belanja Tidak Terduga	965.684.900	1.346.800.166	1.238.641.000	711.688.000	403.800.000	293.500.000
2	BELANJA LANGSUNG	244.480.693.931	380.585.932.932	334.451.882.322	529.250.828.065	525.014.189.407	686.582.071.719
a	Belanja Pegawai	49.639.881.492	62.597.861.781	45.622.652.150	52.894.901.929	83.498.527.379	90.202.813.210
b	Belanja Barang dan Jasa	117.666.545.406	189.782.536.363	160.462.511.042	226.379.906.337	277.126.956.583	328.610.279.346
c	Belanja Modal	77.174.267.033	128.205.534.788	128.366.719.130	249.976.019.799	164.388.705.445	267.766.979.163
	SURPLUS / DEFISIT	4.999.988.904	9.765.161.120	147.929.619.296	9.667.752.030	71.487.707.337	7.854.752.738

Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Selama tahun 2010-2015, besarnya belanja tidak langsung dan belanja langsung selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari besarnya belanja, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Belanja tidak langsung meningkat dari 684,23 milyar pada tahun 2010 menjadi 1.271,99 milyar pada tahun 2015, sedangkan belanja langsung meningkat dari 244,48 milyar menjadi 686,58 milyar, seperti terlihat pada Gambar 3.8.

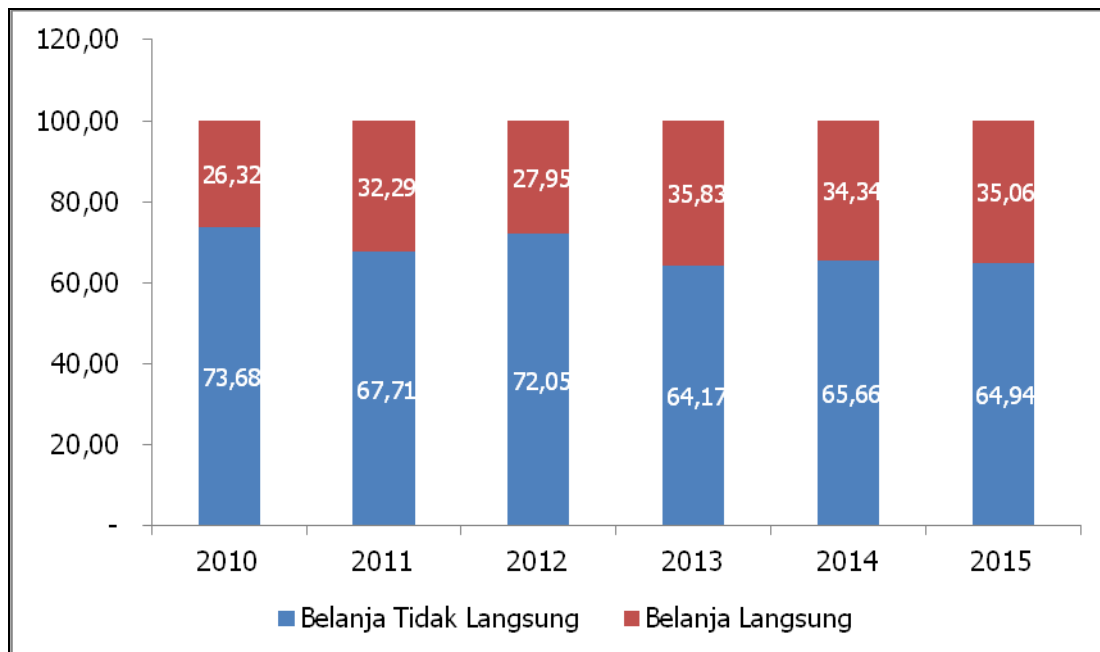


Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.8. Besarnya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2010-2015

Dilihat dari proporsinya, selama kurun waktu tahun 2010-2015 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah, dengan kecenderungan proporsi belanja langsung meningkat, sedangkan proporsi belanja tidak langsung semakin menurun. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah meningkat dari sebesar 26,32% menjadi sebesar 35,06%. Sebaliknya, proporsi belanja tidak langsung menurun dari sebesar 73,68% menjadi 64,94%. Kecenderungan peningkatan proporsi belanja langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Secara rinci proporsi masing-masing unsur belanja daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut.



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.9. Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2010-2015

Rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah memberikan gambaran mengenai beban belanja yang harus dikeluarkan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dalam APBD menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.

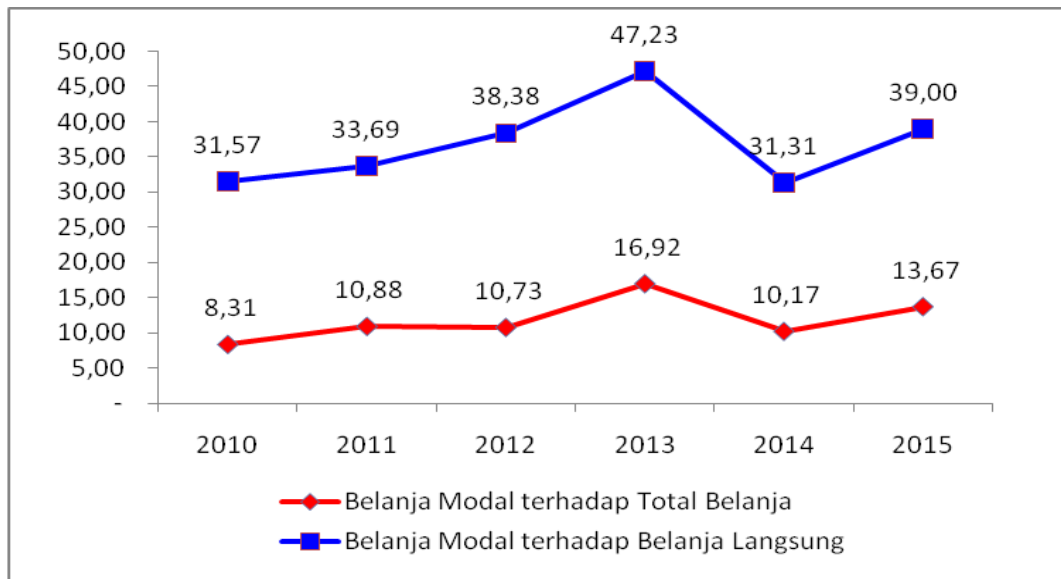
Kondisi yang terjadi di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio belanja pegawai pada belanja tidak langsung terhadap belanja daerah cenderung menurun dari sebesar 63,39% pada tahun 2010 menjadi 49,89% pada tahun 2015. Angka ini tergolong tinggi, sehingga ruang fiskal untuk membiayai pembangunan daerah kecil. Perkembangan rasio belanja pegawai pada belanja tidak langsung terhadap belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut.



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.10. Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Daerah Tahun 2010-2015

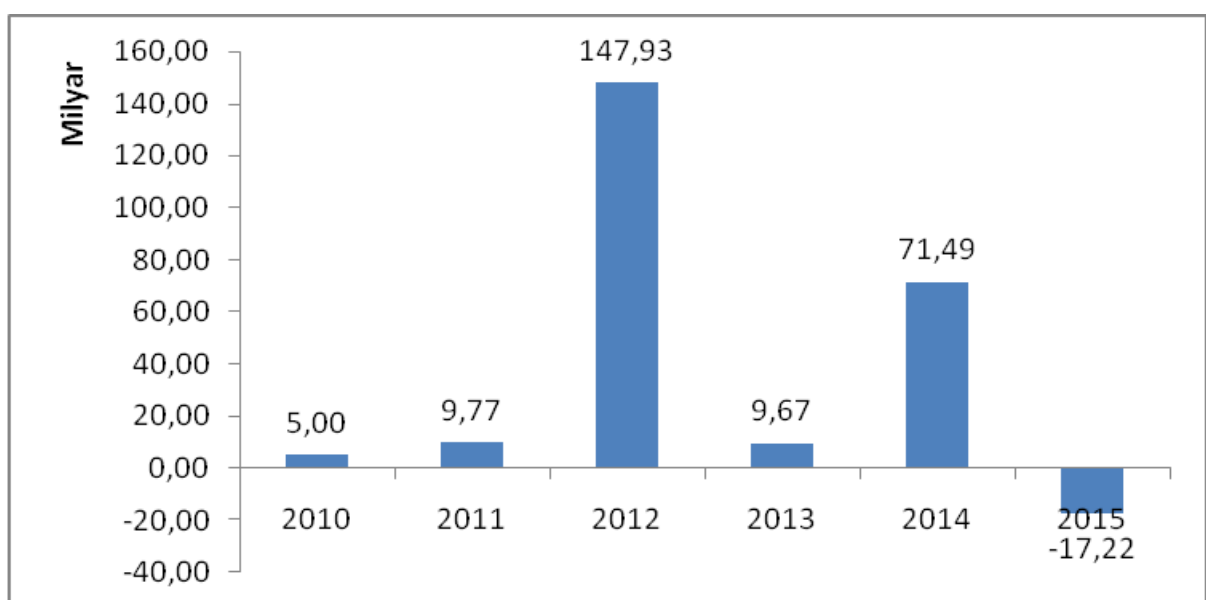
Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya porsi belanja modal terhadap belanja daerah. Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Belanja modal yang besar akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Selama tahun 2010-2015 proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja maupun proporsi belanja modal terhadap belanja langsung di Kabupaten Pemalang kondisinya fluktuatif. Proporsi belanja modal terhadap total belanja relatif kecil, hanya berkisar antara 8,31% hingga 16,92%. Proporsi belanja modal terhadap belanja langsung juga relatif kecil, hanya 36,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran untuk belanja modal belum optimal untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Perkembangan proporsi belanja modal terhadap belanja daerah dan belanja langsung dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.11. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan Terhadap Belanja Langsung Tahun 2010-2015

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2011-2015 defisit terjadi pada tahun 2015, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2010-2014. Ada kecenderungan peningkatan surplus APBD dari sebesar 5,00 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 71,49 milyar pada tahun 2014, seperti terlihat pada Gambar 3.12 berikut.



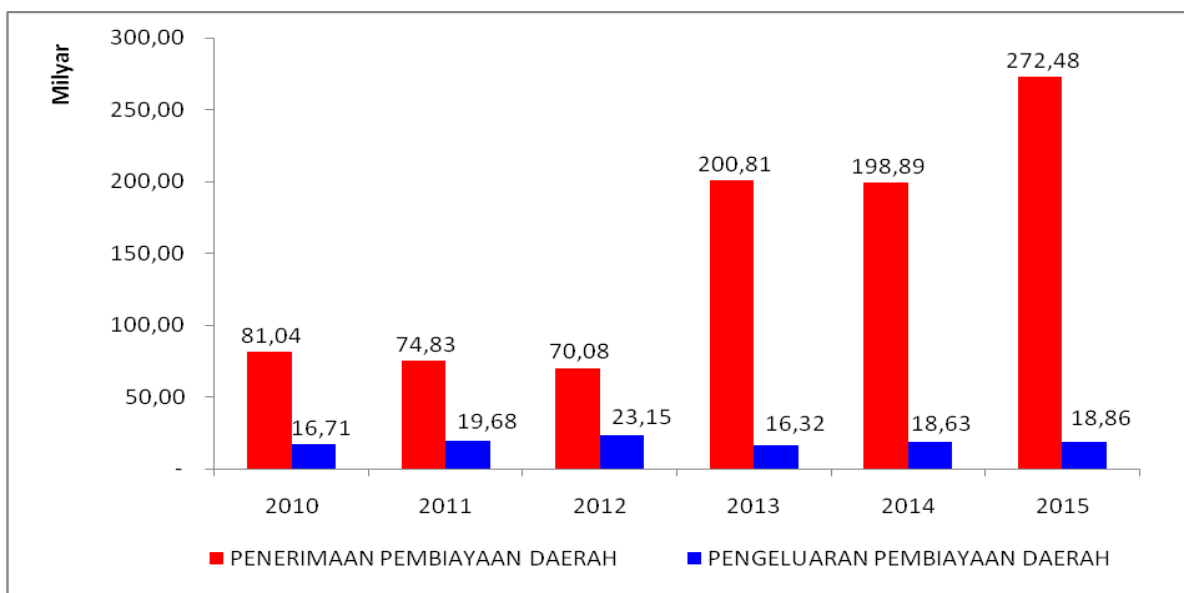
Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.12. Surplus/Defisit Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 81,04 milyar pada tahun 2010 menjadi 272,48 milyar pada tahun 2015. Perkembangan pengeluaran pembiayaan juga fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 16,71 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar 18,86 milyar pada tahun 2015, seperti terlihat pada Gambar 3.13 berikut.



Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Gambar 3.13. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2010-2015

Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	81.041.888.719,00	74.827.356.519,00	70.084.514.534,66	200.810.505.727,00	198.887.631.205,00	272.482.085.440
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.729.995.719,00	69.328.624.519,00	64.910.264.534,66	194.866.880.727,00	194.154.631.205,00	251.748.085.440,00
2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00					16.000.000.000,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.500.000.000,00	-	-			
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	8.811.893.000,00	5.498.732.000,00	5.174.250.000,00	5.943.625.000,00	4.733.000.000,00	4.734.000.000,00
5	Penerimaan Piutang Daerah	-					
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.713.253.104,00	19.682.253.104,00	23.147.253.104,00	16.323.626.552,00	18.627.253.102,00	18.862.253.102,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-		8.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	5.236.000.000,00	13.705.000.000,00	10.170.000.000,00	6.660.000.000,00	10.150.000.000,00	14.560.000.000,00

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Daerah						
3	Pembayaran Pokok Utang	3.977.253.104,00	477.253.104,00	477.253.104,00	238.626.552,00	477.253.102,00	477.253.102,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	7.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.500.000.000,00	5.425.000.000,00	4.000.000.000,00	3.825.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	64.328.635.615,00	55.145.103.415,00	46.937.261.431,00	184.486.879.175,00	180.260.378.103,00	253.619.832.338
	SILPA	69.328.624.519,00	64.910.264.534,66	194.866.880.726,66	194.154.631.205,00	251.748.085.440,00	261.474.585.076,00

Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang, ada beberapa permasalahan yang timbul, antara lain:

- 1) Terbatasnya ruang fiskal. Untuk bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dibutuhkan kapasitas fiskal yang mencukupi. Sampai dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, kapasitas fiskal masih menjadi faktor yang membatasi keleluasaan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- 2) Permasalahan regulasi. Beberapa program dan kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan persoalan regulasi diantaranya pada belanja yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) terutama DAK bidang Pendidikan yang penetapannya terlambat sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- 3) Masih terbatasnya alternatif sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali Pemerintah Daerah karena belum tersedianya perangkat regulasi maupun infrastruktur sistem dan kelembagaan yang memadai.
- 4) Masih belum optimalnya waktu pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dikarenakan baru bisa dimanfaatkan sepenuhnya pada saat perubahan APBD, sehingga pemanfaatannya untuk pembiayaan program dan kegiatan menjadi terbatas karena pertimbangan waktu.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan fokus dan prioritas dalam perhitungan alokasi anggaran sehingga dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan sebagai penjabaran pencapaian Pemalang yang sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia;
- 2) Mengupayakan semaksimal mungkin langkah-langkah koordinasi dengan Kementrian teknis terkait dan mengoptimalkan sisa waktu yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan DAK dengan tetap memperhatikan ketentuan;
- 3) Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia secara bijaksana dan berpijak pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- 4) Meningkatkan akurasi prognosis SILPA tahun berkenaan pada saat proses penyusunan APBD tahun berikutnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan jumlah aset Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 2.018,41 milyar pada tahun 2010 menjadi 2.984,12 milyar pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 menjadi 2.711,29 milyar. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari 5,14 milyar pada tahun 2010 menjadi 6,05 milyar pada tahun 2014 , dan sebesar 10,83 milyar pada tahun 2015. Adapun jumlah ekuitas dana/ekuitas meningkat dari 2.013,27 milyar pada tahun 2010 menjadi 2.978,07 milyar pada tahun 2014, dan 2.700,47 milyar pada tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Neraca Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
A	ASET						
1	ASET LANCAR						
	Kas di Bendahara Umum Daerah	69.307.059.684	64.516.959.160	187.842.681.301	183.829.429.577	202.174.238.581	208.311.467.121
	Kas di Bendahara Pengeluaran	46.120.757	30.794.981	228.363.598	37.948.830	15.108.000	20.366.000
	Kas di Bendahara Penerimaan	22.246.430	393.657.611	1.098.031	143.247.251	17.279.000	16.036.134
	Kas di Layanan Umum Daerah	-	-	7.024.199.426	10.325.201.628	27.444.141.748	18.734.930.186
	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP					22.129.104.620	34.409.727.370
	Kas Dana BOS	-	-	-	-	-	4.862.510.310
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Piutang Pajak	209.518.782	72.240.552	23.189.040	1.190.933.615	25.316.922.202	30.728.690.863
	Piutang Retribusi	985.668.443	1.204.839.063	133.772.675	29.288.375	201.382.475	184.619.575
	Piutang Dana Bagi Hasil		-	-	-	-	3.208.738.906
	Piutang Dana Alokasi Umum		-	-	-	-	-
	Piutang Dana Alokasi Khusus		-	-	-	-	-
	Piutang Lainnya	25.000.000	3.809.375.000	6.955.884.069	15.752.023.448	9.963.277.409	13.162.979.421
	Piutang Pengelolaan Dana	3.718.107.000	-	-	-	-	-

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	Bergulir/Bantuan Permodalan						
	Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	(13.493.069.144)
	Persediaan	17.598.418.050	25.091.050.655	20.369.727.138	33.926.693.924	55.099.773.704	53.760.765.563
	Beban dibayar dimuka						135.403.911
	Jumlah Aset Lancar	91.912.139.146	95.118.917.021	222.578.915.278	245.234.766.648	342.361.227.739	354.043.166.216
2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen	1.395.475.000	856.228.000	742.568.000	409.930.000	153.790.000	135.390.000
	Investasi Permanen'	52.074.247.732	67.440.398.733	77.610.398.733	105.159.864.668	120.000.790.644	138.133.190.382
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	53.469.722.732	68.296.626.733	78.352.966.733	105.569.794.668	120.154.580.644	138.268.580.382
3	ASET TETAP						
	Tanah	694.268.230.200	693.907.585.500	712.671.795.500	714.938.512.300	717.337.951.500	922.101.382.500
	Peralatan dan Mesin	150.504.607.050	175.648.766.720	196.443.521.205	218.278.316.404	246.673.087.039	289.723.864.734
	Gedung dan Bangunan	691.689.776.884	723.400.688.107	776.232.831.998	872.800.305.353	935.021.826.260	989.862.193.484
	Jalan, Irigasi, Jaringan	300.425.371.399	330.693.673.521	369.619.704.790	453.045.473.494	521.041.975.291	683.596.030.700

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	Aset Tetap Lainnya	29.053.489.308	41.684.296.295	44.880.871.304	45.356.439.514	48.225.111.390	48.666.875.562
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	278.500.000	451.786.000	9.073.977.806	18.084.760.491	8.714.689.991	13.391.853.176
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	(741.272.594.437)
	Jumlah Aset Tetap	1.866.219.974.841	1.965.786.796.143	2.108.922.702.603	2.322.503.807.556	2.477.014.641.471	2.206.069.605.719
4	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-	8.000.000.000	12.506.028.044	17.121.536.811	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	8.000.000.000	12.506.028.044	17.121.536.811	-
5	ASET LAINNYA						
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	738.265.000	705.929.000	646.220.000	613.650.000	591.019.000	691.150.000
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.168.975.000	10.698.475.000	10.698.475.000	10.698.475.000	10.698.475.000	10.432.209.000
	Aset Tak Berwujud	3.749.894.300	6.336.075.400	2.922.057.000	3.112.524.000	3.407.164.000	560.462.500
	Aset Lain-Lain	154.679.686	241.177.150	261.347.150	357.347.150	12.771.704.545	1.227.987.723
	Aset Rusak dan/atau dalam		1.103.195.997	1.742.389.997	2.417.557.747	-	-

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	Penghapusan						
	Jumlah Aset Lainnya	6.811.813.986	19.084.852.547	16.270.489.147	17.199.553.897	27.468.362.545	12.911.809.223
	JUMLAH ASET	2.018.413.650.705	2.148.287.192.444	2.434.125.073.761	2.703.013.950.812	2.984.120.349.210	2.711.293.161.540
B	KEWAJIBAN						
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	245.410	1.098.031	37.948.830	14.507.509	1.345.816.062
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	747.202.702	238.626.551	238.626.552	477.253.102	477.253.102	238.626.551
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	925.128.233
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.968.246.833	4.166.818.769	3.669.954.786	5.101.971.601	5.319.325.902	1.659.645.628
	Utang Beban	-	-	-	-	-	6.657.476.800
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.715.449.535	4.405.690.730	3.909.679.369	5.617.173.533	5.811.086.513	10.286.693.274

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri	2.420.872.987	1.670.385.858	1.193.132.754	715.879.653	238.626.551	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2.420.872.987	1.670.385.858	1.193.132.754	715.879.653	238.626.551	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.136.322.523	6.076.076.588	5.102.812.123	6.333.053.187	6.049.713.064	10.286.693.274
C	EKUITAS DANA						
1	EKUITAS DANA LANCAR						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	69.329.306.114	64.910.264.535	194.866.880.727	194.154.631.205	251.748.085.440	
	Cadangan Piutang	4.938.294.225	5.086.454.614	7.112.845.784	16.972.245.438	35.481.582.086	
	Cadangan Persediaan	17.598.418.050	25.091.050.655	20.369.727.138	33.926.693.924	55.099.773.704	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(2.715.449.535)	(4.405.445.320)	(3.908.581.338)	(5.579.224.703)	(5.796.579.004)	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	46.120.757	30.901.807	228.363.598	143.247.251	17.279.000	

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	Cadangan untuk Utang Beban						
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	89.196.689.610	90.713.226.291	218.669.235.909	239.617.593.115	336.550.141.226	
2	EKUITAS DANA INVESTASI						
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	53.469.722.732	68.296.626.733	78.352.966.733	105.569.794.668	120.154.580.644	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.866.219.974.841	1.965.786.796.143	2.108.922.702.603	2.322.503.807.556	2.477.014.641.471	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	6.811.813.986	19.084.852.547	16.270.489.147	17.199.553.897	27.468.362.545	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	(2.420.872.987)	(1.670.385.858)	(1.193.132.754)	(715.879.653)	(238.626.551)	
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.924.080.638.572	2.051.497.889.565	2.202.353.025.729	2.444.557.276.467	2.624.398.958.108	
3	EKUITAS DANA CADANGAN						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	8.000.000.000	12.506.028.044	17.121.536.811	-
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	8.000.000.000	12.506.028.044	17.121.536.811	-

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.013.277.328.1 82	2.142.211.115. 856	2.429.022.261. 638	2.696.680.897. 626	2.978.070.636. 146	2.700.466.468. 266
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.018.413.650.7 05	2.148.287.192. 444	2.434.125.073. 761	2.703.013.950. 812	2.984.120.349. 210	2.711.293.161. 540

Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

Secara umum kondisi keuangan daerah Kabupaten Pemalang tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 100, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat.

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Pemalang

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio lancar (current ratio)	743,31	487,62	622,59	481,21	513,52	250,43
2.	Rasio quick (quick ratio)	736,83	481,92	617,38	475,17	504,04	245,46
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0025	0,0028	0,0021	0,0023	0,0020	0,0040
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,0026	0,0028	0,0021	0,0023	0,0020	0,0040

Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan, dari sebesar 636.252.540.370 pada tahun 2010 menjadi Rp 871.064.514.320 pada tahun 2015, dengan kebutuhan tertinggi untuk belanja pegawai pada belanja langsung, dan sisanya untuk belanja aparatur pada belanja langsung, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	495.764.609.682	551.204.022.289	596.743.552.418	620.819.563.094	651.152.255.523	721.884.966.323
1	Belanja Gaji Pegawai	495.764.609.682	551.204.022.289	596.743.552.418	620.819.563.094	651.152.255.523	721.884.966.323
B	Belanja Langsung	140.487.930.688	191.364.235.202 ,34	181.676.790.594	313.270.520.299	238.480.033.350	149.179.547.997
1	Belanja Honorarium PNS	28.568.250.850	28.989.887.022	18.490.215.801	22.519.055.793	48.628.341.046	51.709.931.179
2	Belanja Uang Lembur	2.452.884.000	2.373.262.350	2.321.321.547	2.349.961.125	2.653.382.125	2.725.073.400
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	343.000.000	1.031.000.000	1.303.285.000	1.249.258.500	1.974.025.000	1.311.200.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.875.837.000	1.250.387.800	979.670.000	2.189.935.100	3.796.497.000	3.263.945.000
5	Belanja premi	709.651.323	682.653.990	931.866.500	1.037.981.480	1.032.801.900	354.951.154

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	asuransi kesehatan						
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	9.882.448.002	10.112.447.375	8.832.851.357	11.253.348.161	14.036.132.634	15.150.700.839
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	302.871.700	349.036.000	606.173.150	461.883.500	725.285.000	485.240.000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	701.412.290	392.277.500	354.042.000	402.011.300	1.244.863.200	1.032.735.000
9	Belanja perjalanan dinas	17.477.308.490	17.977.748.377	19.490.646.109	21.831.065.541		26.753.31.875
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	77.174.267.033	128.205.534.788, 34	128.366.719.130	249.976.019.799	164.388.705.445	46.392.639.550
	TOTAL	636.252.540.370	742.568.257.491 ,34	778.420.343.012	934.090.083.393	889.632.288.873	871.064.514.320

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pemalang, 2015

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang terjadi pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2015, sedangkan pada tahun 2012 dan 2014 terjadi surplus seperti terlihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Daerah	933.713.817.185	1.188.521.215.764	1.344.382.614.412	1.486.773.783.371	1.687.338.257.907	1.888.045.671.273
	Dikurangi:						
2.	Belanja Daerah	928.713.828.281	1.178.756.054.644	1.196.452.995.116	1.477.106.031.341	1.615.850.550.570	1.905.266.162.905
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.713.253.104	19.682.253.104	23.147.253.104	16.323.626.552	18.627.253.102	18.862.253.102
	Defisit/surplus riil	(11.713.264.200)	(9.917.091.984)	124.782.366.192	(6.655.874.522)	52.860.454.235	(36.082.744.734)

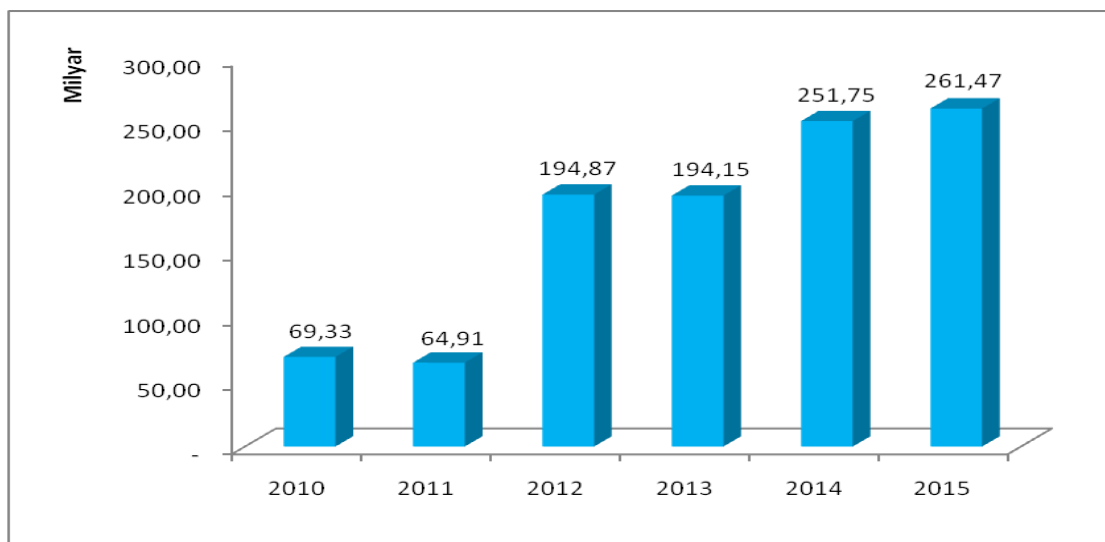
Komposisi penutup defisit riil pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2015 terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Sebagian kecil berasal dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, pencairan dana cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah, seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	58.729.995.719	69.328.624.519	64.910.264.535	194.866.880.727	194.154.631.205	252.933.812.504
2.	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.500.000.000	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.811.893.000	5.498.732.000	5.174.250.000	5.943.625.000	4.733.000.000	9.000.000
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang pada tahun berikutnya digunakan sebagai sumber penerimaan daerah. Semakin besar SILPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain, sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan angka SILPA dari tahun 2010 sebesar 69,33 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 261,47 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pemalang masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain, sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap, serta Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan dengan kontribusi yang relatif kecil. Perkembangan SiLPA Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Pemalang, 2015

Gambar 3.14. Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010-2015

Besarnya SILPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, komposisi SiLPA tahun sebelumnya didominasi oleh realisasi belanja yang kurang dari target, khususnya belanja pegawai dan belanja hibah. Penyumbang SiLPA selanjutnya yaitu Pelampauan Penerimaan PAD, dan Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini disajikan persentase kontribusi masing-masing unsur APBD terhadap SiLPA.

Tabel 3.9.
Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	20,34	8,41	2,82	8,28	9,88	8,16
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	8,88	10,40	2,62	1,54	(2,20)	(3,19)
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31,11	14,65	16,72	2,27	4,58	2,29
4.	Realisasi belanja yang Kurang / Sisa Penghematan Belanja	84,77	110,14	150,65	89,85	87,66	92,54
5.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	0,37	0,02	1,31	0,16	-
6.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-
7.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(45,34)	(43,98)	(72,82)	(3,25)	(0,08)	0,13

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,24	-	-	0,00	-	0,07
9.	Sisa Belanja DAK	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LKPD Kabupaten Pemalang

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Data Masa Lalu

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kabupaten Pemalang diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 2.220.309.538.000 pada tahun 2016 dan menjadi sebesar Rp 2.422.590.820.000 pada tahun 2021. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2015-2019 berada pada angka diatas 5%.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tumbuh sesuai dengan target RPJMD berada pada angka diatas 5%.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 10% per tahun.
4. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak menurun sebesar 2,1% per tahun.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017-2021 sama dengan DAU tahun 2016.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017-2021 sama dengan DAK tahun 2016.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan up to date.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 secara rinci ditampilkan pada Tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	2.220.309.538.000	2.246.298.597.000	2.284.500.150.000	2.326.374.334.000	2.372.272.485.000	2.422.590.820.000
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.482.621.000	233.730.885.000	257.103.975.000	282.814.374.000	311.095.813.000	342.205.397.000
a	Pendapatan Pajak Daerah	40.205.000.000	44.225.500.000	48.648.050.000	53.512.855.000	58.864.141.000	64.750.556.000
b	Hasil Retribusi Daerah	23.493.008.000	25.842.309.000	28.426.540.000	31.269.194.000	34.396.114.000	37.835.726.000
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.937.621.000	15.331.384.000	16.864.523.000	18.550.976.000	20.406.074.000	22.446.682.000
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.846.992.000	148.331.692.000	163.164.862.000	179.481.349.000	197.429.484.000	217.172.433.000
2	DANA PERIMBANGAN	1.677.224.795.000	1.676.379.755.000	1.675.552.462.000	1.674.742.542.000	1.673.949.630.000	1.673.173.369.000
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.239.964.000	39.394.924.000	38.567.631.000	37.757.711.000	36.964.799.000	36.188.538.000
b	Dana Alokasi Umum	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000
c	Dana Alokasi Khusus	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	330.602.122.000	336.187.957.000	351.843.713.000	368.817.418.000	387.227.042.000	407.212.054.000
a	Pendapatan Hibah	12.075.155.000	75.000.000	60.000.000	52.000.000	43.000.000	34.000.000
b	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.578.117.000	124.691.593.000	137.160.752.000	150.876.827.000	165.964.510.000	182.560.961.000
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
d	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000
e	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000	160.079.864.000	163.281.461.000	166.547.091.000	169.878.032.000	173.275.593.000

2. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp 1.183.641.993.299 pada tahun 2016 menjadi Rp 1.301.024.667.834 pada tahun 2021, dengan beberapa asumsi:

1. Belanja Pegawai dihitung dengan memperhitungkan acres sebesar 2,5%, dengan asumsi tidak adanya kebijakan kenaikan gaji PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Khusus TA.2017 terjadi penurunan gaji pegawai karena terdapat PNS yang pindah Provinsi karena perubahan kewenangan jenjang pendidikan menengah.
2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi, dengan penghitungan sebesar 10% dari pajak dan retribusi daerah.
3. Penyediaan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2020 melalui alokasi belanja hibah pada APBD tahun anggaran 2020.

Perincian Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pemalang tercantum pada Tabel 3.12.

Tabel 3.11.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	1.136.972.425.000	1.039.144.169.000	1.066.077.851.000	1.093.685.829.000	1.121.984.961.000	1.150.992.530.000
	Gaji Dan Tunjangan	1.136.972.425.000	1.039.144.169.000	1.066.077.851.000	1.093.685.829.000	1.121.984.961.000	1.150.992.530.000
2	Belanja langsung	233.852.321.000	241.533.926.000	249.571.209.000	257.981.105.000	206.108.074.000	275.990.601.000
a	BLUD RSUD	70.000.000.000	73.500.000.000	77.175.000.000	81.033.750.000	85.085.437.000	89.339.709.000
b	Kapitasi JKN Puskesmas	55.231.000.000	57.992.550.000	60.892.177.000	63.936.786.000	67.133.625.000	70.490.306.000
c	Program administarsi perkantoran	47.335.171.000	48.755.226.000	50.217.882.000	51.724.419.000	53.276.151.000	54.874.436.000
d	Program pendidikan (BL Dindidkpora - Program Administrasi Perkantoran Dindikpora) 50%	61.286.150.000	61.286.150.000	61.286.150.000	61.286.150.000	612.861.000	61.286.150.000
	Jumlah Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.370.824.746.000	1.280.678.095.000	1.315.649.060.000	1.351.666.934.000	1.328.093.035.000	1.426.983.131.000

3.3.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.12.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	2.220.309.538.000	2.246.298.597.000	2.284.500.150.000	2.326.374.334.000	2.372.272.485.000	2.422.590.820.000
2	Penerimaan Pembiayaan	265.874.585.000	49.799.490.000	50.827.090.000	52.319.661.000	54.891.924.000	55.687.813.000
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	261.474.585.000	45.399.490.000	46.827.090.000	48.319.661.000	50.891.924.000	51.687.813.000

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000	4.400.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	Total Penerimaan	2.486.184.123.000	2.296.098.087.000	2.335.327.240.000	2.378.693.995.000	2.427.164.409.000	2.478.278.633.000
	Dikurangi						
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Prioritas I)	1.370.824.746.000	1.280.678.095.000	1.315.649.060.000	1.351.666.934.000	1.328.093.035.000	1.426.983.131.000
	Kapasitas Kemampuan Keuangan	1.115.359.377.000	1.015.419.992.000	1.019.678.180.000	1.027.027.061.000	1.099.071.374.000	1.051.295.502.000

Pengalokasian belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pemalang menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp 2.462.472.123.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 2.455.235.369.000,00 pada tahun 2021.

Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut.

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja prioritas pembangunan, dan belanja tidak langsung diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur mendasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan menurun dari sebesar Rp 265.874.585.000 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 55.687.813.000,00 pada tahun 2021. Asumsi pembiayaan sebagai berikut:

1. SILPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Proyeksi SiLPA dihitung sebesar 2% dari belanja, dengan asumsi realisasi belanja sebesar 98%.
2. Penyertaan modal tahun 2017 turun karena tidak ada hibah pemerintah untuk PDAM, selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 7,3%.

Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pemalang diuraikan sebagai berikut.

1. Dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja.
2. Penerimaan kembali berasal dari pemberian pinjaman daerah berupa dana talangan pengadaan pangan, modal kerja kemitraan budidaya tebu dari kelompok tani tebu, serta modal kerja bergulir koperasi.

Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Pemalang diuraikan sebagai berikut.

1. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal dan memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Provinsi.
2. Pemberian pinjaman daerah, dianggarkan untuk dana talangan pengadaan pangan; serta pemberian pinjaman untuk kemitraan budidaya tebu.

Total pendapatan dan penerimaan daerah Kabupaten Pemalang menurun dari sebesar Rp 2.486.184.123.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.478.278.633.000,00 pada tahun 2021. Penggunaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu Prioritas I untuk Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama, Prioritas II untuk Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, dan Prioritas III yang merupakan Belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diluar Belanja Tidak Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Secara rinci besaran belanja pada Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III sebagaimana tercantum pada Tabel 3.13. Sementara itu perincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan struktur APBD tercantum pada Tabel 3.14.

Tabel 3.13.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.486.184.123.000	2.296.098.087.000	2.335.327.240.000	2.378.693.995.000	2.427.164.409.000	2.478.278.633.000
a	Pendapatan Daerah	2.220.309.538.000	2.246.298.597.000	2.284.500.150.000	2.326.374.334.000	2.372.272.485.000	2.422.590.820.000
b	Penerimaan Pembiayaan Daerah	265.874.585.000	49.799.490.000	50.827.090.000	52.319.661.000	54.891.924.000	55.687.813.000
B	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan						
1	Prioritas I (Wajib dan mengikat)	1.370.824.746.000	1.280.678.095.000	1.315.649.060.000	1.351.666.934.000	1.328.093.035.000	1.426.983.131.000
1.1.	Belanja tidak langsung	1.136.972.425.000	1.039.144.169.000	1.066.077.851.000	1.093.685.829.000	1.121.984.961.000	1.150.992.530.000
1.2.	Belanja langsung	233.852.321.000	241.533.926.000	249.571.209.000	257.981.105.000	206.108.074.000	275.990.601.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.115.359.377.000	1.015.419.992.000	1.019.678.180.000	1.027.027.061.000	1.099.071.374.000	1.051.295.502.000
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	709.128.519.000	609.009.912.000	603.279.953.000	600.157.315.000	621.210.184.000	604.389.784.000
2.1.	Belanja Program Prioritas Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi KDH	600.309.655.000	494.750.105.000	483.307.156.000	474.185.878.000	488.940.175.000	465.506.275.000

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.2.	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya	108.818.864.000	114.259.807.000	119.972.797.000	125.971.437.000	132.270.009.000	138.883.509.000
3	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	406.230.858.000	406.410.080.000	416.398.227.000	426.869.746.000	477.861.190.000	446.905.718.000
3.1	Tambahan Penghasilan PNS	39.755.100.000	39.794.855.000	39.834.649.000	39.874.484.000	39.914.359.000	39.954.273.000
3.2	Bunga	71.187.000	-	-	-	-	-
3.3.	Hibah	10.047.515.000	11.253.216.000	12.603.602.000	14.116.035.000	55.809.959.000	15.200.197.000
3.4	Bantuan Sosial	5.280.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000	2.700.000.000	2.800.000.000	2.900.000.000
3.5	Belanja Bagi Hasil	6.503.188.000	7.006.781.000	7.707.459.000	8.478.204.000	9.326.026.000	10.258.629.000
3.6.	Bantuan Keuangan	318.361.868.000	324.989.008.000	331.737.563.000	338.660.778.000	345.763.163.000	353.049.355.000
3.7.	Belanja tidak terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.8.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.712.000.000	18.366.220.000	19.414.954.000	20.540.245.000	21.747.683.000	23.043.264.000
4	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.14.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	2.220.309.538.000	2.246.298.597.000	2.284.500.150.000	2.326.374.334.000	2.372.272.485.000	2.422.590.820.000
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.482.621.000	233.730.885.000	257.103.975.000	282.814.374.000	311.095.813.000	342.205.397.000
a	Pendapatan Pajak Daerah	40.205.000.000	44.225.500.000	48.648.050.000	53.512.855.000	58.864.141.000	64.750.556.000
b	Hasil Retribusi Daerah	23.493.008.000	25.842.309.000	28.426.540.000	31.269.194.000	34.396.114.000	37.835.726.000
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.937.621.000	15.331.384.000	16.864.523.000	18.550.976.000	20.406.074.000	22.446.682.000
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.846.992.000	148.331.692.000	163.164.862.000	179.481.349.000	197.429.484.000	217.172.433.000
2	DANA PERIMBANGAN	1.677.224.795.000	1.676.379.755.000	1.675.552.462.000	1.674.742.542.000	1.673.949.630.000	1.673.173.369.000
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.239.964.000	39.394.924.000	38.567.631.000	37.757.711.000	36.964.799.000	36.188.538.000
b	Dana Alokasi Umum	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000	1.197.916.501.000
c	Dana Alokasi Khusus	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000	439.068.330.000

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	330.602.122.000	336.187.957.000	351.843.713.000	368.817.418.000	387.227.042.000	407.212.054.000
a	Pendapatan Hibah	12.075.155.000	75.000.000	60.000.000	52.000.000	43.000.000	34.000.000
b	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.578.117.000	124.691.593.000	137.160.752.000	150.876.827.000	165.964.510.000	182.560.961.000
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
d	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000	51.341.500.000
e	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000	160.079.864.000	163.281.461.000	166.547.091.000	169.878.032.000	173.275.593.000
B	BELANJA	2.462.472.123.000	2.277.731.867.000	2.315.912.286.000	2.358.153.750.000	2.405.416.726.000	2.455.235.369.000
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.519.491.283.000	1.427.188.029.000	1.463.061.124.000	1.500.015.330.000	1.578.098.468.000	1.574.854.984.000
a	Belanja Pegawai	1.176.727.525.000	1.078.939.024.000	1.105.912.500.000	1.133.560.313.000	1.161.899.320.000	1.190.946.803.000
b	Belanja Bunga	71.187.000	-	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	10.047.515.000	11.253.216.000	12.603.602.000	14.116.035.000	55.809.959.000	15.200.197.000
e	Belanja Bantuan Sosial	5.280.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000	2.700.000.000	2.800.000.000	2.900.000.000
f	Belanja Bagi Hasil	6.503.188.000	7.006.781.000	7.707.459.000	8.478.204.000	9.326.026.000	10.258.629.000
	Belanja Bantuan	318.361.868.000	324.989.008.000	331.737.563.000	338.660.778.000	345.763.163.000	353.049.355.000

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Keuangan						
g	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2	BELANJA LANGSUNG	942.980.840.000	850.543.838.000	852.851.162.000	858.138.420.000	827.318.258.000	880.380.385.000
	SURPLUS / DEFISIT	(242.162.585.000)	(31.433.270.000)	(31.412.136.000)	(31.779.416.000)	(33.144.241.000)	(32.644.549.000)
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	265.874.585.000	49.799.490.000	50.827.090.000	52.319.661.000	54.891.924.000	55.687.813.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	261.474.585.000	45.399.490.000	46.827.090.000	48.319.661.000	50.891.924.000	51.687.813.000
2	Pencairan Dana Cadangan (untuk Pilkada Tahun 2020)	-	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000	4.400.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
6	Penerimaan Piutang Daerah		-				

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.712.000.000	18.366.220.000	19.414.954.000	20.540.245.000	21.747.683.000	23.043.264.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.712.000.000	14.366.220.000	15.414.954.000	16.540.245.000	17.747.683.000	19.043.264.000
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5	Pemberian kembali pinjaman daerah						
6	Pengembalian kelebihan dana transfer TPP guru						
7	Pembayaran kekurangan pajak penghasilan						
8	Pembayaran hutang pihak ketiga						
	PEMBIAYAAN NETTO	242.162.585.000	31.433.270.000	31.412.136.000	31.779.416.000	33.144.241.000	32.644.549.000
	SILPA	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pemalang, 2016

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan

4.1.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

4.1.1.1 Pendidikan

1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini, APK PAUD masih relatif rendah yaitu 56,68% pada tahun 2015. Jumlah PAUD sesuai standar masih belum optimal yaitu sebesar 55% dan masih rendahnya kualitas guru PAUD dan TK. Guru TK yang memenuhi kualifikasi DIV / S1 sebanyak 36,00% pada tahun 2015.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran SD dan SMP terutama Ruang Kelas dalam kondisi baik, Laboratorium dan perpustakaan sesuai standar. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sarana pendidikan standar masih rendah (sebesar 59,36% untuk SD dan 70,12% untuk SMP pada tahun 2015)
3. Masih kurangnya kualifikasi guru berpendidikan D4/S1 untuk jenjang pendidikan dasar. Persentase guru yang memiliki kualifikasi DIV/S1 untuk jenjang SD/MI sebesar 72,00% dan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 89% pada tahun 2015.
4. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal, dibuktikan dengan angka rasio penduduk tidak sekolah dan putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A/B/C sebesar 0,00048. . Angka ketidakhadiran warga belajar peserta UN masih cukup tinggi, karena faktor jarak tempuh (bekerja diluar kota, melaut dan lain-lain)
5. Belum semua sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pada tahun 2015 baru mencapai 30% pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

4.1.1.2 Kesehatan

1. Tingginya AKI di Kabupaten Pemalang sehingga masuk dalam zona merah. Pada tahun 2015 Angka Kemastian Ibu sebesar 130 per 100.000 kelahiran hidup (32 kasus). Angka kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama

kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi serta keadaan kesehatan yang tidak bisa diprediksi baik saat hamil, bersalin maupun nifas.

2. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (ber PHBS). Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tangga sehat baru mencapai 59,69%. Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) baru mencapai 88,29%. Program sanitasi total berbasis masyarakat yang mencakup 5 Pilar (Stop buang air besar sembarangan, Cuci tangan pakai sabun, pengelolaan makanan dan air minum dalam rumah tangga, pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan sampah rumah tangga) belum menjadi prioritas dalam RPJMDes/Kel, sehingga masih banyak masyarakat yang BAB (Buang Air Besar) di sembarang tempat serta buruknya kondisi kesehatan lingkungan.
3. Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan di masyarakat seperti : DBD, malaria, AFP, TB, ISPA/Pneumonia, Kusta dan HIV AIDS. Salah satu penanganan penyakit berbasis lingkungan seperti DBD, saat ini masih “*fogging*” bukan preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
4. Masih tingginya kasus HIV/AIDS, Pada tahun 2014 ditemukan HIV/AIDS sebanyak 42 kasus. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pemalang dilaporkan terjadi pada daerah resiko tinggi terjadinya transaksi seks bebas seperti tempat-tempat hiburan malam. Di samping itu Pemalang merupakan perlintasan jalur utama pantura yang menjadi titik lelah bagi pengemudi dalam mencapai tujuan perjalanannya, sehingga Kabupaten Pemalang merupakan daerah dengan resiko penularan penyakit HIV/AIDS lebih besar.
5. Masih tingginya kasus kematian akibat penyakit tidak menular seperti kanker serviks dan payudara, jantung, hipertensi dan diabetes mellitus, serta penyakit lainnya.
6. Masih kurangnya jumlah tempat tidur pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sehingga akses pelayanan kesehatan rujukan belum terpenuhi dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang.

7. Masih kurangnya jumlah sarana pelayanan kesehatan primer dibandingkan dengan jumlah penduduk sehingga akses pelayanan kesehatan dasar belum terpenuhi.
8. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, hal ini masih dilihat dari masih kurangnya sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pendukung di 22 puskesmas yang belum tersertifikasi.
9. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia kesehatan antara lain tenaga medis dan mitra medis. Hal ini dapat dilihat dari Rasio dokter ahli/spesialis di Kabupaten Pemalang Tahun 2014 sebesar 3,83 dokter per 100.000 penduduk belum memenuhi target rasio Indonesia Sehat sebesar 6 dokter per 100.000 penduduk. Rasio tenaga dokter umum di Kabupaten Pemalang Tahun 2014 sebesar 8,44 masih jauh di bawah target rasio Indonesia Sehat sebesar 40 per 100.000 penduduk, rasio tenaga keperawatan Tahun 2014 di Kabupaten Pemalang sebesar 57,60 masih jauh di bawah target rasio Indonesia Sehat sebesar 117,5 per 100.000 penduduk dan rasio Bidan di Kabupaten Pemalang Tahun 2014 sebesar 83,12 masih jauh di bawah target rasio Indonesia Sehat sebesar 100 per 100.000 penduduk.

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih banyaknya jalan yang rusak di beberapa lokasi karena keterbatasan anggaran dan tingginya frekuensi lalu lintas dengan tonase yang tidak sesuai kelas jalan. Masih terdapat sebesar 14% jalan yang berada dalam kondisi rusak.
2. Masih belum optimalnya fungsi drainase di Kabupaten Pemalang, khususnya di Ibukota Kecamatan. Persentase drainase yang berfungsi baik hanya sebesar 65%.
3. Masih terdapat sebesar 4,30% jembatan yang berada dalam kondisi rusak.
4. Masih belum optimalnya kinerja pengairan di Kabupaten Pemalang, terlihat dari persentase irigasi dalam kondisi baik mencapai 55,22%.

5. Masih banyaknya titik longsor di kawasan aliran sungai yang belum terbangun. Persentase titik longsor yang terbangun dinding penahan baru mencapai 60%.
6. Ketaatan terhadap RTRW masih rendah, hingga tahun 2015 ketaatan masyarakat terhadap RTRW baru mencapai 80%

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh di beberapa lokasi khususnya di kawasan perkotaan di Kabupaten Pemalang. Hingga tahun 2015, kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang masih berkisar 4,70%. Adapun kawasan kumuh di wilayah perkotaan mencapai 25% dari total wilayah kumuh di Kabupaten Pemalang.
2. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pemalang masih cukup besar. Berdasarkan data BBDT, jumlah RTLH di Kabupaten Pemalang mencapai 70.277 RTLH.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi baru mencapai 65,33%.

4.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi. Tahun 2014 hanya 90% dari pelanggaran yang mampu diselesaikan padahal target SPM untuk cakupan penegakan perda dan perkada adalah 100%. Hal tersebut salah satunya dikarenakan banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Perda maupun Perkada. Selain itu juga karena belum terbentuknya sekretariat PPNS sehingga dalam rangka penyelesaian tugas-tugas penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah belum dapat dilakukan dengan optimal
2. Kurangnya kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satpol PP, setahun hanya 48 kali patroli yang dilaksanakan, atau rata-rata hanya 4 kali dalam satu bulan, atau 1 kali dalam 1 minggu, sedangkan target SPM untuk patroli adalah 3 kali dalam sehari.

3. Terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang ada yaitu 59 personil, dibandingkan jumlah penduduknya yang mencapai 1.279.596 jiwa dan luas wilayah 111.530 Ha yang terbagi dalam 14 kecamatan.
4. Minimnya sosialisasi tentang kesadaran penyeenggaraan keamanan dan ketertiban di masyarakat

4.1.1.6 Sosial

1. Rendahnya tingkat penanganan PMKS di Kabupaten Pemalang, tercatat pada tahun 2015 baru sebesar 13,03%.
2. Rendahnya tingkat pemberdayaan PMKS di Kabupaten Pemalang yang ditunjukkan dengan kondisi pada tahun 2015 baru sebesar 0,71% PMKS yang diberdayakan.
3. Masih kurangnya pemberdayaan terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial pada tahun 2015 baru mencapai 2,03%
4. Masih rendahnya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial yang ditunjukkan pada tahun 2015 baru sebesar 11,47%.
5. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yaitu sebesar 7,66% pada tahun 2015.

4.1.1.7 Tenaga Kerja

1. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu 4,57% pada tahun 2015.
2. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK mengalami peningkatan namun masih belum mencapai 100%, tahun 2015 TPAK Sebesar 94,62%
3. Masih lemahnya pengawasan terhadap perusahaan dalam menerapkan jaminan sosial dan keselamatan tenaga kerja. Pada taun 2015 Perusahaan yang diawasi baru mencapai 66,07%
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada Balai Latihan Kerja sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) guna peningkatan kualitas dan pengakuan tenaga kerja.

4.1.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum meratanya hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya IPG yaitu sebesar 83,85 jauh lebih rendah dibandingkan dengan IPG Jawa Tengah
2. Capaian keterwakilan perempuan di pemerintah dan posisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi masih rendah IDG tahun 2014 sebesar 68,41 turun dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 70,21.
3. Belum optimal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak adalah cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya pemanfaatan data gender dan anak sebagai bahan dalam PPRG, meskipun telah memiliki Sistem Data Pilah.

4.1.1.9 Pangan

1. Belum optimalnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pemalang, hingga tahun 2015 skor PPH baru mencapai 90.
2. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Pemalang. Ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2015 baru mencapai 60%.
3. Masih belum stabilnya harga dan pasokan pangan di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2015 stabilitas harga dan pasokan mencapai <25 masih diatas target yaitu <10.

4.1.1.10 Pertanahan

1. Masih belum terselesaikannya kasus konflik tukar menukar kawasan hutan di 3 lokasi, yaitu TMKH Bantarbolang, TMKH Desa Kejene, dan alur kawasan hutan Desa Surajaya.

4.1.1.11 Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas air, tanah dan udara yang belum diikuti dengan upaya pencegahan yang optimal, ditandai dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL pada tahun 2015 mencapai 39,53%.

2. Rendahnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan pemulihan sumber mata air, pada tahun 2015 mencapai 43,89%.
3. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang pada tahun 2015 meningkat mencapai 36%.

4.1.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih tingginyabayi yang tidak memiliki akta kelahiran, persentase bayi yang belum memiliki akta kelahiran mencapai 20%.
2. Masih tingginya pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah, persentase pasangan yang berakte nikah baru mencapai 4,3%;
3. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pemalang. Kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 20% pada tahun 2015.

4.1.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rendahnya keberdayaan masyarakat desa, hal ini dapat diketahui rata-rata jumlah kelompok yang mendapat pembinaan dari PKK sebesar 29,16 kelompok dan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai 7,11 %.
2. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan lembaga ekonomi desa, hal dapat dilihat persentase UED-SP pada tahun 2014 yang aktif baru mencapai 36,73%, persentase Bumdes yang aktif sebesar 27,27% dan persentase UP2K yang aktif terhadap total UP2K sebesar 37,91%,
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, hal ini dapat diketahui dari tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2015 masih rendah yaitu 6%
4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat diketahui dari persentase pembinaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD) pada tahun 2015 baru mencapai 50% dan persentase desa yang mendapatkan

pembinaan administrasi desa pada tahun 2014 baru mencapai 28,44%

5. Kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah, hal ini dapat dilihat dari capaian aspek peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan yang masih rendah, Data tahun 2015 menunjukkan persentase Perangkat Desa yang telah mengikuti pelatihan sebesar 52% dan Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan/aset desa sebesar 28%.

4.1.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya partisipasi peserta KB Aktif di Kabupaten Pemalang, hingga tahun 2015 peserta KB aktif baru mencapai 79,54%.
2. Masih tingginya angka kelahiran remaja, pada tahun 2014 angka kelahiran remaja mencapai 35 kelahiran.
3. Masih tingginya unmeet-need dan DO dalam ber-KB di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2015 persentase PUS yang Unmeet-need mencapai 10,85% dan DO mencapai 13,48 pada tahun 2014.

4.1.1.15 Perhubungan

1. Masih tingginya kasus pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2015 kasus pelanggaran lalu lintas sebesar 110 kasus.
2. Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Pemalang. Total rambu-rambu yang terpasang baru 35% dari kebutuhan seluruhnya pada tahun 2015.
3. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, pada tahun 2015 sebesar baru mencapai 33 trayek wilayah terlayani angkutan umum

4.1.1.16 Komunikasi dan Informatika

1. Belum semua SKPD dan kelurahan serta desa terjangkau jaringan komunikasi, saat ini baru 40 SKPD yang terjangkau

2. Belum semua SKPD memiliki website sendiri yakni baru 80% saja. Sedangkan SKPD yang telah memiliki website juga belum dapat mengelola dengan baik karena ketidaan SDM yang memiliki kompetensi dibidang TI
3. Belum semua wilayah di Kabupaten Pemalang dapat terjangkau jaringan komunikasi karena masih terbatasnya jangkauan BTS baru 70%

4.1.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih tingginya koperasi yang berada dalam kondisi tidak aktif, hingga tahun 2015 jumlah koperasi tidak aktif mencapai 30,04%
2. Jumlah koperasi cukup sehat di Kabupaten Pemalang mencapai 71% pada tahun 2015.
3. Semakin meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Pemalang, namun pembinaan dan fasilitasi pengembangannya terhadap pelaku dan produk UMKM masih sangat terbatas. Cakupan pembinaan terhadap UMKM baru mencapai 75% pada tahun 2015.

4.1.1.18 Penanaman Modal

1. Upaya peningkatan Promosi Investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Pemalang. Perkembangan investasi di Kabupaten Pemalang kendati mengalami peningkatan secara jumlah akan tetapi mengalami penurunan dari segi kenaikan per tahunnya. Pertumbuhan nilai investasi menurun dari 1,25% menjadi 0,29%.

4.1.1.19 Pemuda dan Olahraga

1. Perlunya membangkitkan kesadaran pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan wawasan kebangsaan.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan peran kepemudaan dan pengembangan prestasi olah raga di Kabupaten Pemalang. Jumlah gelanggang pemuda hanya 1 unit dan sarana dan prasarana kepemudaan lain belum ada.

3. Belum optimalnya pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Pemalang.

4.1.1.20 Statistik

1. Keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan

4.1.1.21 Persandian

1. Jumlah SDM dan Sarana Prasarana Penunjang pelayanan kriptografi masih terbatas.

4.1.1.22 Kebudayaan

1. Belum optimalnya Pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pemalang menjadi wisata Budaya. Cagar budaya yang dilestarikan hingga tahun 2015 baru mencapai 58%.
2. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya; kegiatan kajian seni di Kabupaten Pemalang masih terbatas.
3. Belum optimalnya pembinaan sumberdaya manusia kesenian termasuk fasilitasi untuk memperoleh sertifikat HAKI, jumlah tradisi budaya yang telah mendapatkan sertifikasi HAKI baru 1 tradisi.
4. Masih terbatasnya ruang publik sebagai sarana mengekspresikan seni dan budaya lokal; hingga tahun 2015 jumlah sarana pertunjukan seni sebanyak 2 unit.

4.1.1.23 Perpustakaan

1. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana perpustakaan di Kabupaten Pemalang. Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik baru mencapai 14,45%.
2. Masih terbatasnya Kompetensi SDM Pustakawan di Kabupaten Pemalang. Hingga tahun 2015 hanya terdapat 1 pustakawan ahli.

4.1.1.24 Kearsipan

1. Belum Optimalnya manajemen Arsip secara baku, yaitu baru mencapai 15,58% SKPD yang telah mengelola arsip secara baku.
2. Masih belum optimalnya kompetensi arsiparis di Kabupaten Pemalang, ditunjukkan dari persentase pengelola arsip baru sebanyak 1 orang.
3. Masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana penunjang pengelolaan arsip di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2015 persentase ruangan pengelolaan arsip dalam kondisi baik baru mencapai 37,50% dan peralatan mencapai 33,33%.

4.1.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

4.1.2.1 Kelautan dan Perikanan

1. Over Fishing (Penangkapan ikan yang telah melebihi batas maksimal yang diperbolehkan). Kondisi ini diperlihatkan melalui jarak tempuh dan durasi nelayan ketika melaut menjadi semakin jauh dan lama.
2. Belum optimalnya produktivitas usaha budidaya perikanan disebabkan keterbatasan keterampilan, akses modal dan sarana prasarana budidaya.
3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan SDM nelayan, pembudidaya, pengolah ikan maupun masyarakat pesisir;
4. Masih rendahnya nilai produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya usaha pengolahan ikan modern dan pemasaran produk perikanan;
5. Adanya kerusakan pantai / ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap dan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan;

4.1.2.2 Pariwisata

1. Masih belum optimalnya pengembangan potensi wisata, kondisi ini terlihat dari masih rendahnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang yang hanya mencapai 960.925 pengunjung pada tahun 2015.
2. Masih belum optimalnya kualitas SDM pengelola kepariwisataan, jumlah pramuwisata bersertifikat baru mencapai 19 orang.

3. Masih belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dan investor dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Pemalang. Wisata unggulan di Kabupaten Pemalang masih belum bertambah, yaitu 1 unit (Pantai Widuri)

4.1.2.3 Pertanian

1. Menurunnya produksi pertanian utama di Kabupaten Pemalang, komoditas padi mengalami penurunan jumlah produksi sebesar 22.939 ton pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2013.
2. Menurunnya produksi beberapa produk tanaman perkebunan utama di Kabupaten Pemalang seperti Tebu dan Nilam.
3. Masih tingginya angka morbiditas ternak di Kabupaten Pemalang. Angka morbiditas ternak masih mencapai 5,53%.

4.1.2.4 Kehutanan

1. Belum seluruh hutan dan lahan kritis direhabilitasi, pada tahun 2015 masih terdapat 11,58% lahan yang belum terehabilitasi.
2. Belum tersusunnya perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

4.1.2.5 Perdagangan

1. Menurunnya nilai ekspor di Kabupaten Pemalang, terjadi penurunan sebesar 0,32% pada tahun 2015 dibandingkan dengan capaian tahun 2010.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan pasar tradisional, jumlah pasar yang memenuhi kriteria pasar sehat masih belum tersedia.
3. Masih terbatasnya pembinaan terhadap pelaku perdagangan di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2015, pembinaan pedagang baru mencapai 68%; penataan lokasi PKL baru mencapai 3 titik; dan promosi dagang baru menyentuh 12 pelaku usaha.
4. Masih belum optimalnya peran BPSK dalam menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen, pada tahun 2015 penyelesaian sengketa konsumen baru mencapai 60%.

4.1.2.6 Perindustrian

1. Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain)
2. Masih rendahnya klaster industri yang berkembang
3. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki izin usaha, dan terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.
4. Kurang berkembangnya sentra-sentra industri di daerah yang disebabkan kurangnya daya kreativitas SDM dalam inovasi produk industri

4.1.2.7 Transmigrasi

1. Terbatasnya penentuan lokasi dan kuota transmigran dari pemerintah pusat sehingga target penempatan transmigran yang telah ditetapkan oleh daerah tidak tercapai

4.1.3 Fokus Pelayanan Unsur Penunjang

4.1.3.1 Perencanaan

1. Masih belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Kondisi ini diperlihatkan dari capaian nilai LkjIP yang hanya mencapai nilai C.

4.1.3.2 Kepegawaian

1. Masih belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih banyaknya pejabat struktural yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang teknis.

4.1.3.4 Penelitian dan Pengembangan

1. Belum adanya kebijakan daerah yang menunjang peningkatan kinerja bidang penelitian dan pengembangan
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

4.1.3.5 Sekretariat Daerah

1. Masih belum meratanya peningkatan kapasitas bagi PPKom dan PPHP di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Persentase PPKom dan PPHP yang telah mendapatkan pelatihan baru mencapai 50%.
2. Belum seluruh SKPD memiliki SOP. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh belum sepenuhnya PD pelayanan publik yang menyusun dan mengimplementasikan SPP dan Maklumat Pelayanan.
3. Pembagian beras bagi masyarakat miskin (raskin) masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini diperlihatkan dari capaian hasil monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin yang hanya mencapai 18,02%.

4.1.3.6 Pengawasan

1. Masih belum optimalnya akuntabilitas pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Masih belum optimalnya kualitas APIP di Kabupaten Pemalang

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil analisis data dan permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pembangunan daerah, dapat dirumuskan isu strategis daerah yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

4.2.1. Kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi, pada tahun 2014 angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang mencapai 18,44%. Persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang berada pada posisi ke-6 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah (14,44%). Penurunan persentase penduduk miskin di Kab. Pemalang tidak signifikan (0,01 poin).

4.2.2. Pengangguran di Kabupaten Pemalang masih tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pemalang masih cukup tinggi yaitu sebesar 4,57%.

4.2.3. Kualitas pembangunan manusia masih rendah

Kualitas pembangunan manusia –yang diwakili oleh IPM- masih rendah. IPM Kabupaten Pemalang adalah 62,35; berada pada posisi terbawah diantara kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Capaian IPM Kabupaten Pemalang bahkan berada dibawah capaian IPM Jawa Tengah yaitu sebesar 68,78.

Dilihat dari aspek pembentuknya –yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi- kinerja pembangunan manusia juga masih belum berjalan secara optimal:

1) Sektor Kesehatan

Usia harapan hidup Kabupaten Pemalang –kendati mengalami peningkatan- masih berada pada posisi ke-4 terbawah di Jawa Tengah. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Pemalang adalah sebesar 72,64 tahun atau berada dibawah rata-rata capaian Jawa Tengah sebesar 73,88 tahun.

2) Sektor Pendidikan

Harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Pemalang masih kurang optimal. HLS Kabupaten Pemalang kendati telah mencapai 11,26 tahun atau setara dengan kelas XI SMA menuju kelas XII SMA akan tetapi masih berada pada posisi ke-4 terbawah diantara kabupaten/kota lain di Jawa Tengah; capaian HLS Kabupaten Pemalang bahkan dibawah capaian Jawa Tengah yang telah mencapai 12,17 tahun.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pemalang masih rendah. RLS Kabupaten Pemalang sebesar 6,56 tahun; atau setara dengan pendidikan kelas VI SD menuju kelas VII SMP. Capaian RLS Kabupaten Pemalang berada pada posisi ke-2 terbawah, bahkan dibawah capaian Jawa Tengah.

3) Sektor Pendapatan Masyarakat

Rendahnya pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Pemalang. Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Pemalang paling rendah diantara kabupaten/kota lain yaitu mencapai Rp 6.911.000 ; berada dibawah capaian Jawa Tengah Rp 9.639.740.

4.2.4. Pertumbuhan Ekonomi masih belum optimal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang masih cukup rendah, yaitu sebesar 5,24% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan tahun 2013 (5,41%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang juga lebih rendah dibandingkan capaian Jawa Tengah pada tahun yang sama; yaitu 5,4%.

4.2.5. Kesetaraan Gender masih rendah

Kesetaraan gender di Kabupaten Pemalang masih rendah, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang -kendati mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin- yang mencapai 83,85 pada tahun 2014.

4.2.6. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pemalang masih rendah

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang secara umum masih belum baik. Kondisi ini tercermin dari AKI yang mencapai 163/ 100.000 KH atau lebih tinggi dibandingkan capaian target MDG's 102/ 100.000 KH. Kondisi ini juga dapat dilihat dari masih adanya AKB dan AKABa di Kabupaten Pemalang yang masing-masing mencapai 8,5 dan 9,3; kendati telah berada dibawah target nasional yaitu masing-masing 23/ 1.000 KH.

4.2.7. Infrastruktur

Persentase jalan dalam kondisi baik baik di Kabupaten Pemalang masih belum optimal. Terdapat sebesar 94,36 km atau 14% dari total jalan yang masih berada dalam kategori rusak; baik rusak sedang maupun rusak parah. Sebagian besar jalan rusak berada di wilayah Pemalang bagian Selatan.

4.2.8. Bencana Daerah

Kabupaten Pemalang merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana; khususnya bencana angin ribut, tanah longsor, banjir, dan abrasi.

1) Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan kondisi banjir di Kabupaten Pemalang terdiri dari dua jenis kerawanan, yaitu kerawanan terhadap kondisi banjir dan kerawanan terhadap kondisi genangan. Kecamatan yang memiliki kerawanan terhadap banjir di Kabupaten Pemalang terdapat di Kecamatan Bodeh; Kecamatan Ampelgading; Kecamatan Comal; Kecamatan Ulujami; Kecamatan Petarukan; Kecamatan Taman; Kecamatan Pemalang; Kecamatan Watukumpul; Kecamatan Belik; dan Kecamatan Bantarbolang.

Adapun wilayah yang memiliki kerawanan terhadap genangan terdapat di Kecamatan Kecamatan Pemalang; Kecamatan Taman; Kecamatan Petarukan; Kecamatan Ampelgading; Kecamatan Comal; dan Kecamatan Ulujami.

2) Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Pemalang terdapat pada dua jenis topografi, yaitu daerah pegunungan dan daerah alur sungai. Daerah rawan longsor di wilayah pegunungan terdapat Kecamatan Watukumpul; Kecamatan Belik; Kecamatan Pulosari; Kecamatan Moga; dan Kecamatan Randudongkal. Adapun wilayah rawan longsor di sepanjang alur sungai terdapat pada aliran Sungai Comal; Sungai Waluh; Sungai Polaga; Sungai Lumeneng; Sungai Layangan; dan Sungai Rambut.

3) Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Pemalang terbagi kedalam dua kategori, yaitu kawasan rawan kekeringan air bersih dan kawasan rawan kekeringan pertanian. Kawasan rawan kekeringan air bersih terdapat di Kecamatan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik sedangkan kawasan rawan kekeringan pertanian terdapat di Kecamatan Pemalang; Kecamatan Taman; Kecamatan Petarukan; Kecamatan Comal; Kecamatan Ampelgading; Kecamatan Ulujami; dan Kecamatan Bodeh.

4.2.9. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang masih belum optimal. Nilai LKjIP Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 adalah C.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berkaitan dengan hal tersebut maka rumusan visi dan misi Kepala Daerah terpilih akan menjadi “anchor” yang harus dijabarkan dalam dokumen RPJMD.

Demikian halnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pengertian visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan yang disebut misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi,

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD, namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Rumusan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT,
BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemalang Hebat

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

2. Berdaulat

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan

tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

3. Berjati diri

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

4. Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

5. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Visi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Capaian Kinerja	
		Capaian Awal Tahun	Capaian Akhir Tahun
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,43	5,48
2.	Laju Inflasi	3,52	5,6 - 6,0
3.	PDRB Per Kapita	11.367.993,38	15.156.018,76
4.	Indeks Gini	0,24 (Tahun 2014)	0,20
5.	Persentase penduduk miskin	18,44 (Tahun 2014)	15,4
6.	Indeks Pembangunan Manusia	63,70	66,7

7.	Indeks Pembangunan Gender	83,85 (Tahun 2014)	85,89
8.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,41 (Tahun 2014)	71,17
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,13	6,87

5.2 Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran dari masing masing misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	
Misi 1: Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong		
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	a.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak		
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	a.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal
	b.	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	c.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	d.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

Tujuan	Sasaran	
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	e.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	h.	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
	i.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran		
Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	a.	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas
	b.	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	c.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang
Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran	d.	Menurunnya tingkat pengangguran
Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	e.	Menurunnya penduduk miskin
Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah		
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	a.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	b.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	c.	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tujuan	Sasaran	
Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati		
Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	a.	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai
Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah		
Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	a.	Meningkatnya nilai realisasi investasi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	b.	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	c.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	g.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
Misi 7: Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat		
Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	a.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang

Persandingan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	70	78	81	83	85	87	90	90	
			Nilai LkjIP	Nilai	C	C	CC	CC	B	B	B	B	
			Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	85	90	90	90	90	95	95	95	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga	Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,87 (Tahun 2014)	5,87	5,88	5,89	5,90	5,91	5,92	5,92	
			Harapan lama sekolah	Tahun	11,26	11,66	12,06	12,46	12,86	13,66	14	14	
			Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Kelulusan SMP/Mts	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak		pendidikan non formal	Angka Melanjutkan SD/MI	%	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	98,90	98,90	98,90
			Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	87,6	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	88,10	88,10
		Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Angka kunjungan ke perpustakaan	%	3,36	5,26	7,14	6,67	6,25	5,88	5,56	5,56
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,77	72,86	72,96	73,06	73,15	73,25	73,35	73,35
			Angka Kematian Ibu	Kasus	32	30	28	26	24	22	20	20
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,17	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7,5
			Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	8,74	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8,5
			Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,03	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,025
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,49	2,48	2,47	2,46	2,45	2,44	2,43	2,43

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	83,85 (Tahun 2014)	84,19	84,53	84,87	85,21	85,55	85,89	85,89	
		Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	68,41 (Tahun 2014)	68,87	69,33	69,79	70,25	70,71	71,17	71,17	
	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	13,03	18,75	24,46	30,17	35,89	41,60	47,32	47,32	
		Meningkatnya cakupan kepemilikan KTP	%	95	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	99,50	
		Persentase Anak memiliki Akta Kelahiran	%	80	95,00	95,60	96,00	96,50	97,00	98,00	98,00	
		Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil										
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis	Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	Produktivitas padi	kw/ha	68,63	57,61	57,63	57,65	57,67	57,69	57,91	57,91	
		produktivitas jagung	kw/ha	Na	54,72	55,13	55,54	55,96	56,38	56,80	56,80	
		produktivitas Kedelai	kw/ha	Na	15,00	15,56	16,00	16,60	17,20	17,80	17,80	
		Produksi Komoditas	kg	Na	18.19.3	18.349.428	18.430.056	18.511.453	18.593.630	18.676.590	18.676.590	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran			peternakan utama			45						
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	90	72	75	78	81	85	88	88
			Ketersediaan cadangan pangan	%	60	5	15	30	40	50	60	60
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,43	5,43	5,44	5,45	5,46	5,47	5,48	5,48
			PDRB Per Kapita	Rp	11.367.993,38	11.926.161,85	12.511.736,40	13.126.062,66	13.770.552,34	14.446.686,46	15.156.018,76	15.156.018,76
			Laju Inflasi	%	3,52	6,53 - 7,38	6,32 - 7	6,1 - 6,9	5,9 - 6,5	5,8 - 6,3	5,6 - 6,0	5,6 - 6,0
			Indeks Gini	Indeks	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
			Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp	7.177.000	7.453.315	7.740.267	8.038.267	8.347.741	8.669.129	9.002.890	9.002.890
			produksi perikanan tangkap	kg	26.882.859	15.573.552	15.885.023	16.202.724	16.526.778	16.857.314	17.194.460	17.194.460

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Produksi perikanan budidaya	kg	12.008.780	13.081.112	14.459.000	15.529.000	16.698.000	17.638.000	18.652.000	18.652.000
		Meningkatnya kualitas serta produktivitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	29,9	29,9	30	30	30	30	30	30
		Meningkatnya kualitas serta produktivitas koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan IKM	%	5,47	5,80	6,1	6,40	6,7	7	7,3	7,3
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Na	4,43	4,45	4,5	4,55	4,60	4,65	4,65
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan wisatawan	%	2,04	2,04	2,04	2,08	2,13	2,15	2,17	2,17
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,13	7,11	7,03	7	6,93	6,87	6,87	6,87
	Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	18,44	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	15,4

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	86	87	88	90	91	92	93	93
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95,70	96	97	98	99	100	100	100
			Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	55,22	60	63	65	70	73	75	75
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	89,29	87,12	90	95	100	100	100	100
			Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	65	66	67	68	69	70	71	71
			Persentase RTLH	%	Na	4,17	8,33	12,50	16,67	20,83	25	25
			Cakupan wilayah kumuh	%	4,70	4	3	2	0	0	0	0

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	35	36	40	44	49	55	60	60
	Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati	Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai	Persentase penurunan konflik sosial	%	NA	5	5	5	5	5	5	5

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah	Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	717.104.689.677	724.604.689.677	729.604.689.677	734.604.689.677	739.604.689.677	744.604.689.677	749.604.689.677	749.604.689.677
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	Skor	80	80	80	85	85	90	90	90	
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hots pot	Na	3	6	9	12	14	14	14	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target						Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat	Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang	Cakupan kelompok seni yang dibina	%	30	40	50	55	60	65	70	70
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	58	61	64	67	70	73	73	73

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

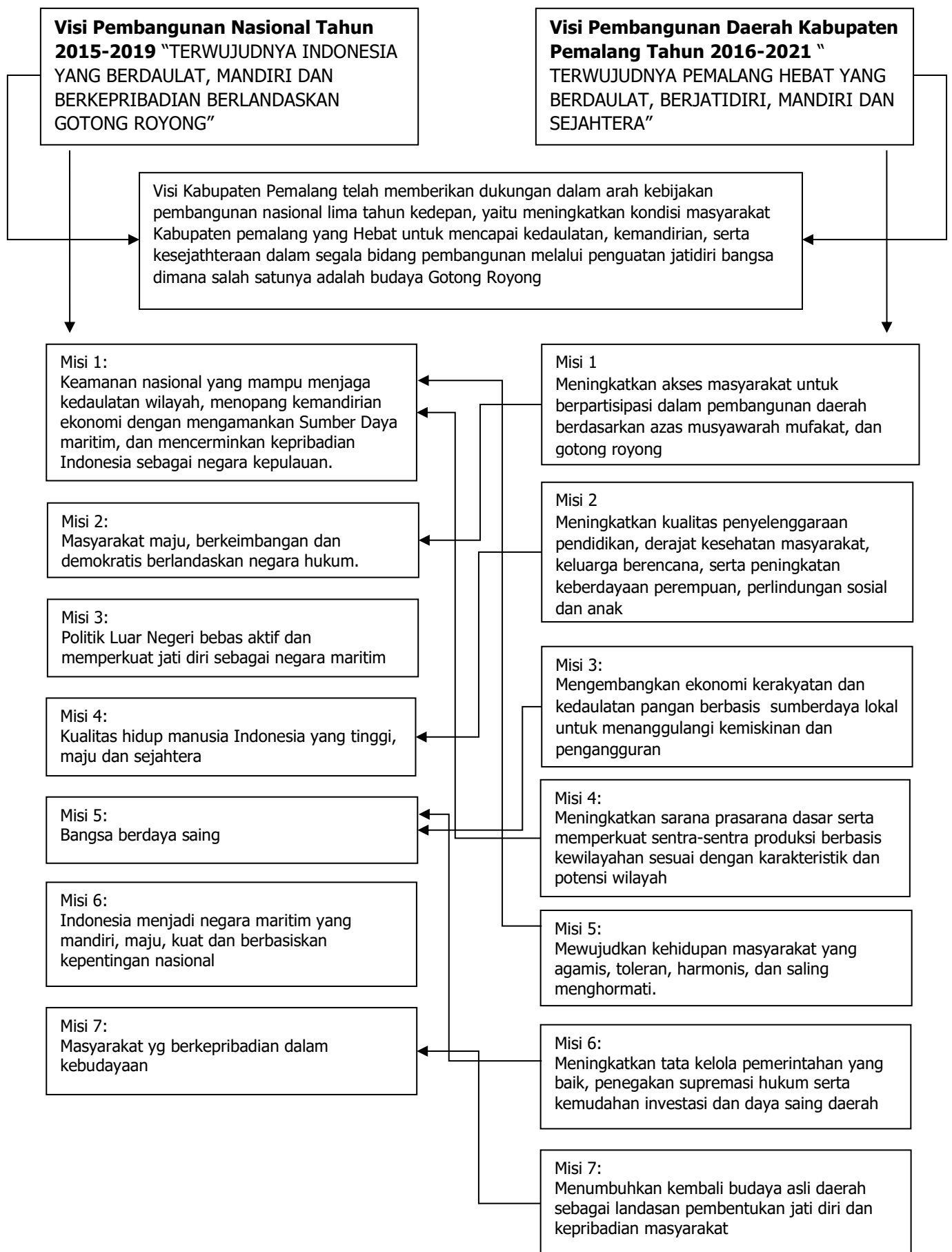
Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. (Nawa Cita) yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan

kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun keterkaitan antara arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 6.1.
Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

6.2 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Unsur yang perlu diperhatikan antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapust”

Terdapat 7 (tujuh) Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi diatas, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa.

Kedaulatan pangan dan energi sebagai *pengejawantahan* bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan

pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya dan olah raga.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

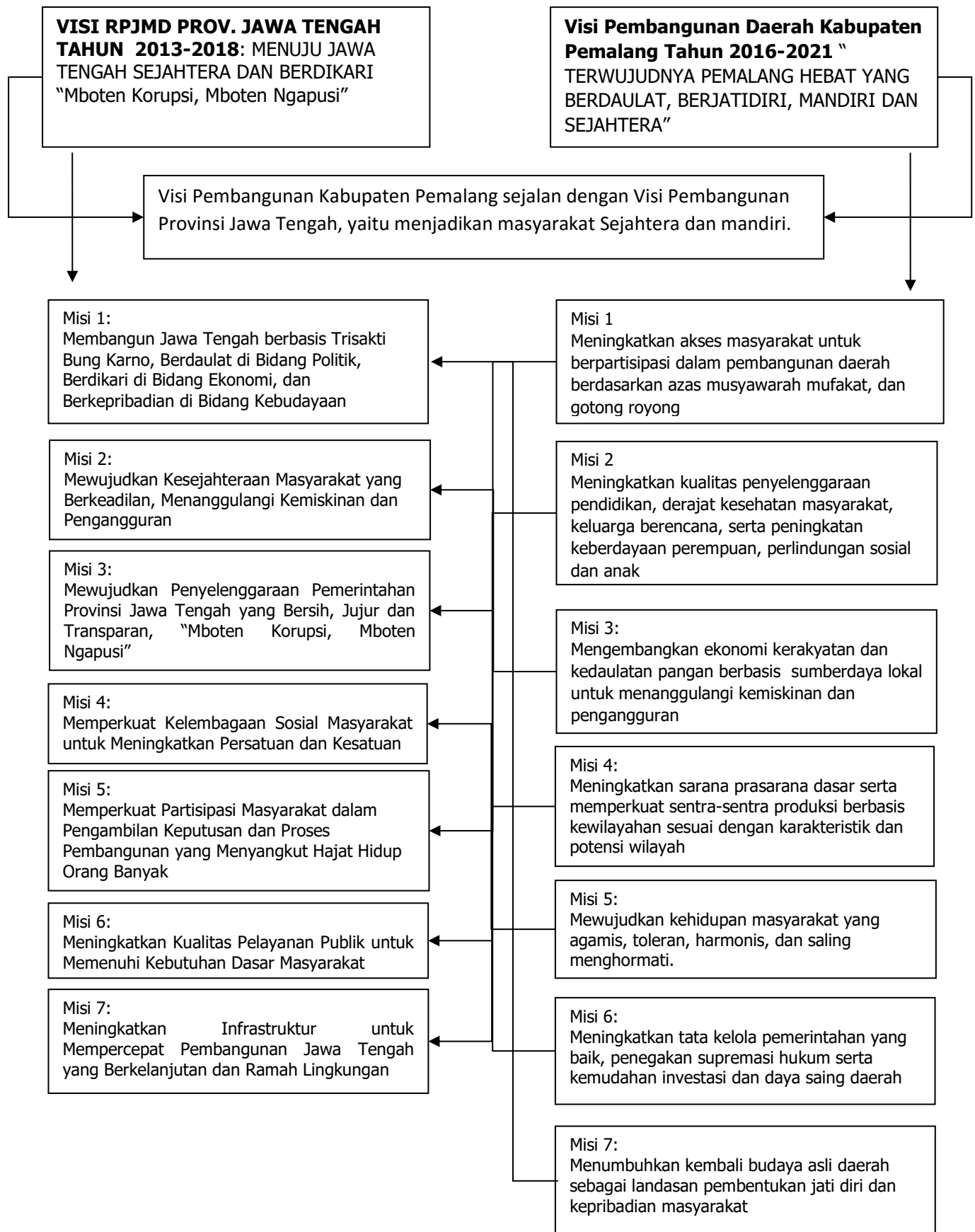
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Adapun keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD adalah sebagai berikut:



Gambar 6.2.
Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

6.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera sebagai landasan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera tersebut, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagaimana diuraikan berikut.

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah.
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.
4. Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal secara berkelanjutan untuk menopang kehidupan masyarakat.
6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Dalam rangka untuk mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, maka dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu duapuluh tahun kedepan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang saat ini telah berada pada periode ke-3. Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah pada tahap ke-3 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah, melalui:

- 1) Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
- 2) Peningkatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja
- 3) Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional.
- 4) Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang.
- 5) Penguatan kualitas SDM dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, melalui:

- 1) Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- 2) Penguatan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan Iptek dan produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas
- 3) Pengembangan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor
- 4) Penguatan pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan pembangunan daerah.
- 5) Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi. –

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, melalui:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Peningkatkan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

- 4) Penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran berpolitik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM
- 5) Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumberdaya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
- 6) Peningkatan eksistensi kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pembangunan daerah.
- 7) Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui:

- 1) Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi.
- 2) Penciptaan rintisan pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang yang berorientasi ekspor.
- 3) Pengembangan kualitas dan kuantitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah sehat yang terjangkau oleh rumah tangga miskin, serta peningkatan pengelolaan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih, sanitasi dan pengelolaan persampahan
- 4) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan.
- 5) Pengembangan system pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan kualitas manajemen pertanahan.
- 6) Pemantapan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan

strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan

- 7) Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan system yang ada, melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistim operasi serta pemeliharaan jaringan sistim distribusi yang sesuai dengan standar nasional

5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat, melalui:

- 1) Peningkatan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air
- 2) Pengembangan manfaat kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
- 4) Pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi bencana.

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum, melalui :

- 1) Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.
- 2) Peningkatan akses pasar baik domestik maupun internasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan kesetaraan gender.
- 3) Pengembangan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

- 4) Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar HAM.

6.4 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan

Kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Pemalang disusun dengan didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031, kebijakan penataan ruang Kabupaten Pemalang adalah :

- (1) Kebijakan pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah dengan strategi:
 - a. membagi wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Daerah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKLp; dan
 - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK.
- (2) Kebijakan peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan dengan strategi:
 - a. mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa; dan
 - b. mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian.
- (3) Kebijakan pengembangan prasarana Daerah dengan strategi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan.
- (4) Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dengan strategi:
 - a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung;

- c. melakukan penghijauan lereng Gunung Slamet;
 - d. meningkatkan perlindungan kawasan yang memiliki skor di atas 175 (seratus tujuh puluh lima); dan
 - e. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi.
- (5) Kebijakan pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung dengan strategi:
- a. mengendalikan secara ketat pemanfaatan kawasan lindung; dan
 - b. mengembangkan pertanian yang diimbangi dengan penanaman tanaman keras pada lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
- (6) Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dengan strategi:
- a. menetapkan sebagian besar lahan sawah beririgasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan bukan sawah;
 - c. mendorong petani membudidayakan tanaman pangan;
 - d. merevitalisasi dan mengembangkan jaringan irigasi; dan
 - e. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (7) Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan strategi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan permukiman perdesaan pada kawasan pertanian lahan pangan;
 - c. mengarahkan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan secara efisien; dan
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (8) Kebijakan pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah dengan strategi:
- a. mengembangkan peran PKL, PKLp dan PPK sebagai kawasan perkotaan tempat pemasaran komoditas perdagangan dan mampu memasarkan komoditas lokal ke luar Daerah; dan

- b. meningkatkan peran PPL sebagai pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan.

(9) Kebijakan pengembangan industri dengan strategi:

- a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri besar dan menengah di kawasan peruntukan industri;
- b. mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
- c. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal; dan
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.

(10) Kebijakan pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dengan strategi:

- a. mengembangkan pelabuhan perikanan;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata;
- e. mengembangkan kawasan perlindungan setempat; dan
- f. melakukan penghijauan kawasan pantai.

(11) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan strategi:

- a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI).

(12) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Daerah dengan strategi:

- a. mengarahkan dan memantapkan perkembangan koridor jalan arteri pantai utara (pantura);
- b. mengembangkan pusat pemuda dan olahraga;

- c. mengembangkan kawasan pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan;
- d. memantapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
- e. mengembangkan kawasan perbatasan;
- f. mengembangkan potensi panas bumi;
- g. mengembangkan pos pengamatan gunung berapi;
- h. meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan DAS; dan
- i. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan pendukung keseimbangan iklim makro di kawasan pesisir.

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang dalam rangka perwujudan pola ruang ditetapkan kawasan-kawasan strategis daerah yang meliputi :

A. Kawasan Strategis Bidang Ekonomi

(1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana meliputi :

- a. kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Pemalang - Kecamatan Taman - Kecamatan Petarukan - Kecamatan Ampelgading - Kecamatan Comal - Kecamatan Ulujami.
- b. kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan meliputi :
 - 1. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 - 2. Kawasan Perkotaan Belik; dan
 - 3. Kawasan Perkotaan Moga.
- c. Kawasan agropolitan PEKAN TAMAN GADING dengan komoditas unggulan buah Mangga meliputi:
 - 1. Kecamatan Pemalang;
 - 2. Kecamatan Petarukan;
 - 3. Kecamatan Taman; dan
 - 4. Kecamatan Ampelgading.
- d. Kawasan agropolitan WALIKSARIMADU dengan komoditas unggulan sayur-sayuran meliputi:
 - 1. Kecamatan Watukumpul;
 - 2. Kecamatan Belik;

3. Kecamatan Pulosari;
 4. Kecamatan Moga;
 5. Kecamatan Warungpring; dan
 6. Kecamatan Randudongkal.
- e. Kawasan strategis minapolitan PETA IKAN meliputi:
1. Kecamatan Pemalang;
 2. Kecamatan Taman;
 3. Kecamatan Ulujami; dan
 4. Kecamatan Petarukan.
- f. Kawasan strategis perkotaan Bantarbolang dan Bodeh; dan
- g. Kawasan strategis peruntukan industri Randudongkal.
- (2) Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) berperan mengoptimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi.
- (3) Kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan berperan mendorong pertumbuhan wilayah bagian tengah dan selatan Daerah.
- (4) Kawasan strategis agropolitan PEKAN TAMAN GADING berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas buah mangga.
- (5) Kawasan strategis agropolitan WALIKSARIMADU berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas sayur sayuran.
- (6) Kawasan strategis minapolitan PETA IKAN berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.
- (7) Kawasan strategis perkotaan Bantarbolang dan Bodeh berperan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah bagian tengah.
- (8) Kawasan strategis peruntukan industri Randudongkal berperan mendorong perkembangan industri wilayah Daerah bagian tengah.
- B. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya;
- (1) Kawasan perbatasan, pengembangan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan prasarana kawasan dalam rangka mengurangi dampak sosial ekonomi, kawasan tersebut meliputi:
- a. Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal;
 - b. Desa Rowosari dan Desa Tasikrejo di Kecamatan Ulujami;
 - c. Desa Tumbal di Kecamatan Comal;

- d. Desa Jatiroyom, Desa Muncang, dan Desa Kesesirejo di Kecamatan Bodeh;
 - e. Desa Tambakrejo dan Desa Lawangrejo di Kecamatan Pemalang;
 - f. Desa Plakaran di Kecamatan Moga;
 - g. Desa Mereng di Kecamatan Warungpring;
 - h. Desa Clekatakan dan Desa Gambuhan di Kecamatan Pulosari;
 - i. Desa Belik di Kecamatan Belik; dan
 - j. Desa Tambi, Desa Tlagasana, Desa Tundagan, dan Desa Medayu di Kecamatan Watukumpul.
- (2) Kawasan pemuda dan olahraga yang berada di Kecamatan Pemalang, pengembangan kawasan ini bertujuan untuk, menampung minat, bakat, dan kreasi pemuda; dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan.
- C. Kawasan Strategis Bidang bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi berupa kawasan gardu pandang dan pos pengamat Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari
- D. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air meliputi :
- a. kawasan resapan mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan
 - b. kawasan resapan mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro meliputi :
- a. kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai Comal di Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
 - b. kawasan pelestarian mangrove di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan; dan
 - c. kawasan pelestarian mangrove di muara sungai Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.

Tabel 6.1
Penetapan Kawasan Strategis Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang

No	Kawasan Strategis	Fungsi Kawasan	Wilayah
1	Kawasan Strategis Bidang Ekonomi		
	a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi	mengotimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi	Wilayah koridor Jalan Pantura meliputi Kecamatan Pemalang - Kecamatan Taman - Kecamatan Petarukan - Kecamatan Ampelgading - Kecamatan Comal - Kecamatan Ulujami
	b. kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan	mendorong pertumbuhan wilayah bagian tengah dan selatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Randudongkal; • Kawasan Perkotaan Belik; dan • Kawasan Perkotaan Moga
	c. Kawasan agropolitan PEKAN TAMAN GADING dengan komoditas unggulan buah Mangga	meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas buah mangga	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pemalang; • Kecamatan Petarukan; • Kecamatan Taman; dan • Kecamatan Ampelgading.
	d. Kawasan agropolitan WALIK SARI MADU dengan komoditas unggulan sayur-sayuran	meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Watukumpul; • Kecamatan Belik; • Kecamatan Pulosari; • Kecamatan Moga; • Kecamatan Warungpring; dan • Kecamatan Randudongkal

No	Kawasan Strategis	Fungsi Kawasan	Wilayah
	e. Kawasan strategis minapolitan PETA IKAN	meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pemalang; • Kecamatan Taman; • Kecamatan Ulujami • Kecamatan Petarukan
	f. Kawasan Perkotaan bantarbolang dan Bodeh	mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah bagian tengah	Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh
	g. Kawasan Industri Randudongkal	mendorong perkembangan industri wilayah Daerah bagian tengah	Kecamatan Randudongkal
2	Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya		
	a. Kawasan Perbatasan	meningkatkan prasarana kawasan dalam rangka mengurangi dampak sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal; • Desa Rowosari dan Desa Tasikrejo di Kecamatan Ulujami; • Desa Tumbal di Kecamatan Comal; • Desa Jatirojom, Desa Muncang, dan Desa Kesesirejo di Kecamatan Bodeh; • Desa Tambakrejo dan Desa Lawangrejo di Kecamatan Pemalang; • Desa Plakaran di Kecamatan Moga; • Desa Mereng di Kecamatan Warungpring;

No	Kawasan Strategis	Fungsi Kawasan	Wilayah
			<ul style="list-style-type: none"> • Desa Clekatakan dan Desa Gambuhan di Kecamatan Pulosari; • Desa Belik di Kecamatan Belik; dan • Desa Tambi, Desa Tlagasana, Desa Tundagan, dan Desa Medayu di Kecamatan Watukumpul.
	b. Kawasan pemuda dan olahraga	menampung minat, bakat, dan kreasi pemuda; dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	Pemalang dan Taman
3	Kawasan Strategis Bidang bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi	Pemanfaatan sumberdaya Alam atau teknologi Tinggi	kawasan gardu pandang dan pos pengamat Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari
4	Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	perlindungan keseimbangan tata guna air	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan resapan mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan • kawasan resapan mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga
		perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai Comal di Desa Mojo dan Desa

No	Kawasan Strategis	Fungsi Kawasan	Wilayah
			Pesantren Kecamatan Ulujami; • kawasan pelestarian mangrove di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan; dan • kawasan pelestarian mangrove di muara sungai Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.

6.5 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Daerah Berdasarkan Azas Musyawarah Mufakat, Dan Gotong Royong.

Strategi:

- 1) Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencanaan mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan:

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta

penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Derajat Kesehatan Masyarakat, Keluarga Berencana, Serta Peningkatan Keberdayaan Perempuan, Perlindungan Sosial Dan Anak.

Strategi:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan perpustakaan masyarakat, penyediaan buku bacaan berkualitas, serta fasilitas penunjang perpustakaan
- 3) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, penanganan kesehatan ibu dan anak, dan penanganan manajemen kesehatan
- 4) Menurunkan kematian ibu, bayi dan balita melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; peningkatan sarana dan prasarana; peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dalam deteksi resiko tinggi
- 5) Menurunkan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pendapatan, pemanfaatan pekarangan, dan keanekaragaman pangan
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui pemberdayaan PLKB dan kader di masyarakat
- 7) Meningkatkan kapasitas, koordinasi dalam penguatan kelembagaan gender dan anak; Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta pengembangan Kabupaten Layak Anak

- 8) Memberikan jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, penyandang cacat dan anak terlantar.

Kebijakan:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas sarana perpustakaan daerah difokuskan pada pembangunan perpustakaan desa dan penggunaan TI
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik promotif maupun preventif
- 4) Perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada kelangsungan hidup bayi usia 1000 hari, penanganan gizi buruk, gizi kurang, balita stunting, dan gizi lebih
- 5) Peningkatan pelayanan KB terutama pada wilayah pedesaan dan wilayah dengan tingkat unmeet-need tinggi
- 6) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif;
- 7) Peningkatan penanganan PMKS secara komprehensif

3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Kedaulatan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Serta Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran.

Strategi:

- 1) Megoptimisasikan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alsintan tepat guna; melakukan pengembangan pola dan sistem pertanian terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal
- 2) Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok masyarakat; penanganan wilayah rawan pangan; dan penyediaan cadangan pangan
- 3) Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan nelayan serta penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap; intensifikasi perikanan budidaya dengan cara budidaya ikan yang benar (CBIB)

- 4) Peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberian bantuan peralatan bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif
- 5) Penguatan jejaring pelaku industri melalui sistem kluster; Standarisasi mutu produk industri; Peningkatan akses informasi pasar bagi pelaku industri; serta fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi
- 6) Fasilitasi permodalan diprioritaskan kepada pedagang kecil dan menengah
- 7) Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada serta pembangunan destinasi wisata baru di wilayah Pemalang bagian selatan serta peningkatkan promosi melalui berbagai media
- 8) Pembangunan potensi wisata, khususnya wisata alam yang terdapat di wilayah Pemalang Selatan
- 9) Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peluang pasar kerja
- 10) Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan usaha produktif, dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan

Kebijakan:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- 2) Peningkatan penyediaan pangan secara adil dan merata
- 3) Peningkatan sarpas perikanan tangkap dan budiaya, serta peningkatan kapasitas SDM perikanan tangkap dan budidaya.
- 4) Peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis masyarakat
- 5) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku industri kecil dan menengah dalam hal produksi maupun pemasaran
- 6) Peningkatan hasil perdagangan berbasis potensi lokal.
- 7) Peningkatan potensi pariwisata
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana pada obyek wisata potensial
- 9) Peningkatan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja
- 10) Penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan

4. Meningkatkan Sarana Prasarana Dasar Serta Memperkuat Sentra-Sentra Produksi Berbasis Kewilayahan Sesuai Dengan Karakteristik Dan Potensi Wilayah.

Strategi:

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan;
- 2) Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku;
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi, permukiman kumuh);
- 4) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- 5) Peningkatan RTH;
- 6) Peningkatan jaringan energi dan pemanfaatan EBT;
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi
- 8) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup

Kebijakan:

- 1) Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas
- 3) Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Toleran, Harmonis, Dan Saling Menghormati.

Strategi:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai melalui peningkatan peran masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menjaga dan mempertahankan kondusivitas daerah.

Kebijakan:

- 1) Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum Serta Kemudahan Investasi Dan Daya Saing Daerah.

Strategi:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan peningkatan jaringan dengan investor
- 2) Peningkatan kemudahana pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana penunjang dan promosi peluang investasi
- 3) Pengembangan kapasitas, kualitas dan etos kerja Aparatur
- 4) Pengembangan dan penerapatan regulasi secara konsisten dan menyeluruh
- 5) Penerapan SPP, Maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan kepada SKPD yang melakukan pelayanan publik
- 6) Pembangunan titik hotspot di kawasan fasilitas umum kecamatan

Kebijakan:

- 1) Peningkatan iklim investasi yang kondusif
- 2) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih
- 3) Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik
- 4) Peningkatan akses TI kepada masyarakat

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Strategi:

- 1) Pengintegrasian materi pembelajaran seni dan budaya asli Pemalang ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah;
- 2) Penyelenggaraan event-event seni budaya daerah yang hampir punah;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni;
- 4) Inventarisasi, ekskavasi, dan pelestarian benda cagar budaya

Kebijakan:

- 1) Menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya asli Pemalang melalui jalur pendidikan dan mengembangkan kesenian daerah.

Keterkaitan antara Misi, Strategi dan Kebijakan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.2
Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat
	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan perpustakaan masyarakat, penyediaan buku bacaan berkualitas, serta fasilitas penunjang perpustakaan	Peningkatan kualitas sarana perpustakaan daerah difokuskan pada pembangunan perpustakaan desa dan penggunaan TI

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, penanganan kesehatan ibu dan anak, dan penanganan manajemen kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik promotif maupun preventif
		Menurunkan kematian ibu, bayi dan balita melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; peningkatan sarana dan prasarana; penignaktan peran serta masyarakat dan keluarga dalam deteksi resiko tinggi	
		Menurunkan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan,peningkatakan pendapatan, pemanfaatan pekarangan, dan keanekaragaman pangan	Perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada kelangsungan hidup bayi usia 1000 hari, penanganan gizi buruk, gizi kurang, balita stunting, dan gizi lebih
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui pemberdayaan PLKB dan kader di masyarakat	Peningkatkan pelayanan KB terutama pada wilayah pedesaan dan wilayah dengan tingkat <i>unmeet-need</i> tinggi

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Meningkatkan kapasitas, koordinasi dalam penguatan kelembagaan gender dan anak; Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta pengembangan Kabupaten Layak Anak	Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif;
	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Memberikan jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, penyandang cacat dan anak terlantar.	Peningkatan penanganan PMKS secara komprehensif
	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas SDM; penambahan sarana dan prasarana penunjang; penyederhanaan prosedur pelayanan serta memperpendek jarak antara masyarakat dengan tempat pelayanan	Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan admindukcapil; Peningkatan kapasitas SDM pelayanan admindukcapil; Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keliling
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas	Megoptimalisasikan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alsintan tepat guna; melakukan pengembangan pola dan sistem pertanian terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok masyarakat; penanganan wilayah rawan pangan; dan penyediaan cadangan pangan	Peningkatan penyediaan pangan secara adil dan merata
	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang	Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan nelayan serta penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap; intensifikasi perikanan budidaya dengan cara budidaya ikan yang benar (CBIB)	Peningkatan sarpas perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan kapasitas SDM perikanan tangkap dan budidaya.
		Peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberian bantuan peralatan bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif	Peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis masyarakat
		Penguatan jejaring pelaku industri melalui sistem kluster; Standarisasi mutu produk industri; Peningkatan akses informasi pasar bagi pelaku industri; serta fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku industri kecil dan menengah dalam hal produksi maupun pemasaran
		Fasilitasi permodalan diprioritaskan kepada pedagang kecil dan menengah	Peningkatan hasil perdagangan berbasis potensi lokal.

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada serta pembangunan destinasi wisata baru di wilayah Pemalang bagian selatan serta peningkatkan promosi melalui berbagai media	Peningkatan potensi pariwisata
		Pembangunan potensi wisata, khususnya wisata alam yang terdapat di wilayah Pemalang Selatan	Pembangunan sarana dan prasarana pada obyek wisata potensial
	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peluang pasar kerja	Peningkatan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja
	Menurunnya penduduk miskin	Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, pember-dayaan usaha produktif, dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan
Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan;	Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan
		Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku;	
		Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi, permukiman kumuh);	
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;	

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan RTH; Peningkatan jaringan energi dan pemanfaatan EBT;	
	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai	Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai melalui peningkatan peran masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menjaga dan mempertahankan kondusivitas daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan peningkatan jaringan dengan investor	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
		Peningkatan kemudahana pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana penunjang dan promosi peluang investasi	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengembangan kapasitas, kualitas, dan etos kerja Aparatur	

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengembangan dan penerapatan regulasi secara konsisten dan menyeluruh	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penerapan SPP, Maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan kepada SKPD yang melakukan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik
	meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Pembangunan titik hotspot di kawasan fasilitas umum kecamatan	Peningkatan akses TI kepada masyarakat
Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang	Pengintegrasian materi pembelajaran seni dan budaya asli Pemalang ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah;	Menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya asli Pemalang melalui jalur pendidikan dan mengembangkan kesenian daerah
		Penyelenggaraan event-event seni budaya daerah yang hampir punah;	
		Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni;	
		Inventarisasi, ekskavasi, dan pelestarian benda cagar budaya	

6.6 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Pentahapan pembangunan merupakan penekanan fokus perhatian berupa tema pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan arah pembangunan tiap tahun terhadap pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan multisektor/ urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang. Pentahapan Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (Tahun 2016)

Peningkatan **kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kawasan berbasis potensi lokal** merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi IV yaitu “Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah”. Tema ini sudah tercantum dalam tema RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2016.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar baik berupa jalan dan jembatan, akses jalan yang menghubungkan hingga tingkat pedesaan di wilayah Kabupaten Pemalang. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi, permukiman kumuh);

2. Memacu pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan wilayah (Tahun 2017)

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan wilayah infrastruktur dan konektivitas antar wilayah merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi III yaitu “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”. Tema ini sudah tercantum dalam tema RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2017.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada optimalisasi sektor pertanian dan perdagangan, pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat pertanian, serta peningkatan akses pasar. Pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peluang pasar kerja.

3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur Dasar dan Konektifitas antar wilayah menuju Pemalang Mandiri (Tahun 2018)

Ekonomi Kerakyatan, infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah menuju Pemalang Mandiri merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi III yaitu “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran” dan Misi IV yaitu “Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah”.

Pada tahap ini, pembangunan merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang difokuskan pada optimalisasi sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui peningkatan kapasitas, pembinaan kelembagaan maupun sumberdaya manusia koperasi dan pelaku UMKM yang produktif. Optomalisasi infrastruktur jalan dan jembatan serta transportasi darat yang menghubungkan hingga tingkat pedesaaan yang memudahkan perpindahan barang dan jasa.

4. Peningkatan daya saing daerah, Pelayanan Publik dan Partisipasi Pembangunan menuju Pemalang Berdaulat (Tahun 2019)

Peningkatan daya saing daerah, Pelayanan Publik dan Partisipasi Pembangunan menuju Pemalang Berdaulat merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi I yaitu “Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong dan Misi VI yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui sektor unggulan, yang didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip prinsip *good governance*, pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan pelayanan publik, kemudahanlayanan baik perijinan maupun non perijinan yang mendorong peningkatan investasi dan daya saing Kabupaten Pemalang. Optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterbukaan informasi publik dan optimalisasi teknologi informasi.

5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Asli berdasarkan Potensi Unggulan Daerah menuju Pemalang yang Berjatidiri (Tahun 2020)

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Asli berdasarkan Potensi Unggulan Daerah menuju Pemalang yang Berjatidiri merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati” serta Misi VII yaitu “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada perwujudan toleransi dan kondusifitas daerah dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga-lembaga keagamaan, pengembangan sektor pariwisata unggulan melalui pengembangan destinasi wisata baik yang sudah ada maupun destinasi wisata baru. Menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya asli Pemalang melalui jalur pendidikan dan mengembangkan kesenian dan event event budaya daerah.

6. Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera (Tahun 2021)

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi II yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat

kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan yang berkualitas melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pelayanan kesehatan yang prima dan merata melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas SDM Kesehatan. Peningkatan kualitas hidup serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara komprehensif, peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dirumuskan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

7.1 Kebijakan Umum

Rumusan kebijakan umum merupakan sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan *inherent*, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan antara lain diarahkan pada peningkatan pelayanan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan kualitas layanan pendidikan yang bermutu, jaminan kesehatan masyarakat yang prima dan merata, peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja yang handal dan mampu berdaya saing yang didukung dengan peningkatan kualitas dan dukungan infrastruktur serta konektivitas antara wilayah hingga ke tingkat desa di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal antara lain diarahkan pada penguatan sistem pelayanan publik yang cepat dan inovatif di jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang yang didukung

dengan sistem online dan penyelenggaraan mekanisme sistem pengaduan masyarakat serta sinergitas dan sinkronisasi antar perangkat daerah sebagai wujud pelayanan yang optimal bagi masyarakat Pemalang.

3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud dari reformasi birokrasi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan antara lain diarahkan pada peningkatan kapasitas keuangan daerah yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan untuk menghindari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan, serta kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah sebagai wujud kemandirian daerah yang dikelola dengan berbasis akrual dan amanat dalam standar akuntansi pemerintah.

7.2 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas.

Program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Pemalang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang terdiri dari:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan
2. Pendirian Rumah Sakit Pratama Di Comal dan Randudongkal

3. Pembangunan Kawasan Wisata
 - a. Mangrove di Mojo Ulujami
 - b. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal
 - c. Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung.
 - d. Pengembangan Desa Wisata
 - e. Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet
4. Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu
5. Pengembangan Agropolitan:
 - a. Agropolitan Durian
 - b. Agropolitan Mangga Istana
 - c. Nanas
6. Budidaya Padi Teknologi Salibu
7. Pengembangan Minapolitan
8. Pengembangan Kawasan Pedesaan
9. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik.
10. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo
11. RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan Hotspot area.
12. Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega
13. Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas.
14. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
15. Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark
16. Pembangunan Masjid Agung Pemalang
17. Revitalisasi Pasar-pasar daerah
18. Pembangunan jalan-jalan beton (*Rigid Pavement*)
19. Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
20. Penyiapan Pembangunan PLTU di Kabupaten Pemalang
21. Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
22. Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)
23. Penyiapan Pembangunan Bandara Perintis.
24. Pembangunan Gedung DPRD
25. Pembangunan Rumah Budaya
26. Penyediaan Air Bersih
27. Pembangunan *Sport Centre*

7.2.1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu *“Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong”*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

7.2.2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu *“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak”*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah sakit mata
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
9. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12. Program Keluarga Berencana
13. Program pelayanan kontrasepsi
14. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

17. Program Administrasi Kependudukan

7.2.3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu *“Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
2. Program Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
8. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif
9. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
10. Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi
11. Program pengembangan industri Kecil Dan menengah
12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
13. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
14. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
15. Program peningkatan Kesempatan Kerja
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

7.2.4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu *“Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah”*, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
2. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.

3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
4. Program pengembangan Perumahan
5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrik
7. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
8. Program peningkatan Pelayanan Angkutan
9. Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup

7.2.5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “Mewujudkan kehidupan *masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati*”, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7.2.6. Program Pembangunan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu “*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah*”, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Apatur
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program kerjasama informasi dan media massa

7.2.7. Program Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu “*Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat*”, maka program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

1. Program pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan sasaran dan indikatornya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Misi 1: Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Ungulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemrerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	70	90	Perencanaan Pembangunan
					Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	85	95	
					Nilai LKjJP	Skor	C	B	

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Ungulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat	%	9,15	4,05	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat	Peningkatan Infrastruktur Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	56,68	70,28	Pendidikan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan								
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	107,19	109,5	Pendidikan
					Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	81,63	90	Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu	Guru TK/RA yang memenuhi	%	36	80	Pendidikan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kualifikasi S1/DIV				
					Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	72	90,5	
					Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	89,08	98,5	
Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan perpustakaan masyarakat,	Peningkatan kualitas sarana perpustakaan daerah difokuskan pada pembangunan perpustakaan desa dan		Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	14,45	21,90	Perpustakaan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	penyediaan buku bacaan berkualitas, serta fasilitas penunjang perpustakaan	penggunaan TI							
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatkan perilaku hidup	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik promotif maupun preventif	Pendirian Rumah Sakit Pratama Di Comal dan Randudongkal	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah sakit mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.00 penduduk	0,543	0,968	Kesehatan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	bersih dan sehat								
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	100	100	Kesehatan
	Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, penanganan kesehatan ibu dan anak, dan penanganan			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi Puskesmas yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP)	%	100	100	Kesehatan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	manajemen kesehatan								
	Menurunkan kematian ibu, bayi dan balita melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; peningkatan sarana dan prasarana; penignaktan peran serta masyarakat dan keluarga dalam deteksi			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	90	96	Kesehatan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	resiko tinggi								
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	80	86	Kesehatan
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100	100	Kesehatan
	Menurunkan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan,peningkatan	Perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada kelangsungan hidup bayi usia 1000 hari,		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,025	Kesehatan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	pendapatan, pemanfaatan pekarangan, dan keanekaragaman pangan	penanganan gizi buruk, gizi kurang, balita stunting, dan gizi lebih							
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	100	100	Kesehatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui pemberdayaan PLKB dan kader di	Peningkatkan pelayanan KB terutama pada wilayah pedesaan dan wilayah dengan tingkat unmeet-need		Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	79,54	81,53	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	masyarakat	tinggi							
				Program pelayanan kontrasepsi	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Rasio	2,47	2,45	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Meningkatkan kapasitas, koordinasi dalam penguatan kelembagaan gender dan anak; Peningkatan perencanaan dan	Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif;		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	1,172	1,143	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	penganggaran responsif gender serta pengembangan Kabupaten Layak Anak								
					Rasio korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan berbanding dengan jumlah korban kekerasan yang terjadi	%	0,01	0,004	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya penanganan pemberian	Memberikan jaminan perlindungan	Peningkatan penanganan PMKS secara		Program Pemberdayaan Fakir Miskin,	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang	%	12,96	21,82	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
jaminan sosial bagi PMKS	dan rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, penyandang cacat dan anak terlantar.	komprehensif		Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				Anak
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan	%	7,66	51,80	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
					sosial				
Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	95	99,42	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	80	99,50	

Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas	Megoptimalkan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alsintan tepat guna; melakukan pengembangan pola dan sistem pertanian terutama pada jenis	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Pengembangan Agropolitan: <ul style="list-style-type: none"> • Agropolitan Durian (Warungpring), • Agropolitan Mangga Istana (Asem Doyong, Penggarit, Widuri, Danasari) • Nanas (Waliksarimadu) 	Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama	%	68,63	54,89	Pertanian

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	komoditas pertanian unggulan lokal								
			Budidaya Padi Teknologi Salibu (Ampelgading)	Program Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan utama	Ton	15.642,49	14.759	Pertanian
			Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Desa Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Komoditas Peternakan Utama	Ekor	12.836.438	12.995.831	Pertanian

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega di Kecamatan Petarukan.						
Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok masyarakat; penanganan	Peningkatan penyediaan pangan secara adil dan merata		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Ketersediaan cadangan Pangan utama	%	60	60	Pangan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	wilayah rawan pangan; dan penyediaan cadangan pangan								
Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang	Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan nelayan serta penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap; intensifikasi	Peningkatan sarpas perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan kapasitas SDM perikanan tangkap dan budidaya.	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Kg	26.882.859	17.194.460	Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	perikanan budidaya dengan cara budidaya ikan yang benar (CBIB)								
			Pengembangan Minapolitan (DKP) <ul style="list-style-type: none"> • Tasikrejo, Kaliprau, Ketapang, Mojo, Pesantren, Limbangan (Kec. Ulujami) • Lawangrejo, Sugihwaras (Kec. Pemalang) 	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kg	12.008.780	18.652.000	Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	Peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberian bantuan peralatan bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif	Peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis masyarakat	Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jhh	13.427	18.911	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	69,96	75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			Revitalisasi Pasar-pasar daerah						
	Penguatan jejaring pelaku industri melalui sistem kluster; Standarisasi mutu produk industri; Peningkatan akses informasi pasar bagi pelaku industri; serta fasilitasi	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku industri kecil dan menengah dalam hal produksi maupun pemasaran		Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi	Cakupan Bina UMKM	Orang	300	400	Perindustrian

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	penyediaan sarana dan prasarana produksi								
				Program pengembangan industri Kecil Dan menengah	Pertumbuhan IKM	%	5,47	7,3	Perindustrian
	Pembangunan potensi wisata, khususnya wisata alam yang terdapat di wilayah Pemalang Selatan	Pembangunan sarana dan prasarana pada obyek wisata potensial	Pembangunan Kawasan Wisata <ul style="list-style-type: none"> • Mangrove di Mojo Ulujami • Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal • Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung. 	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan	jlh	960.925	750.000	Pariwisata

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			<ul style="list-style-type: none"> • Desa Wisata • Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet 						
				Program pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan	jlh	1	3	Pariwisata
Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peluang pasar kerja	Peningkatan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja	Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	69,87	76,68	Tenaga Kerja
				Program	Prosentase jumlah	%	95,20	76,60	Tenaga Kerja

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				peningkatan Kesempatan Kerja	tenaga kerja yang terserap				
Menurunnya penduduk miskin	Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, pember-dayaan usaha produktif, dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan		Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin (non kuota) yang memperoleh jamkesda	%	100	100	DKK

Misi 4: Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan;	Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan	Pembangunan Masjid Agung Pemalang Pembangunan jalan-jalan beton Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan, Penyiapan Pembangunan PLTU Kabupaten Pemalang	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	%	86	93	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			Pembangunan Gedung DPRD						
	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku;			Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.	Panjang saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	55,22	76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi,		Penyediaan Air Bersih	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65	71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	permukiman kumuh);								
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;			Program pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92	98	Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Peningkatan RTH;			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah	%	80	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan jaringan energi dan pemanfaatan EBT;			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rumah tangga berlistrik	%	85	90	ESDM
Meningkatnya ketersediaan	Meningkatkan sarana dan	Peningkatan sarana dan		Program Pembangunan	Tersedianya terminal		6/6	6/6	Perhubungan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
sarana transportasi umum bagi masyarakat	prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi	prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas		Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				
			Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Penyiapan Pembangunan Bandara Perintis	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase ketersediaan angkutan kota		18,5	24,24	Perhubungan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	100	100	Lingkungan Hidup

Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai	Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), dan Forum Kerukunan Umat	Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai melalui peningkatan peran masyarakat dan lembaga- lembaga keagamaan dalam menjaga dan mempertahankan kondusivitas daerah		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/ Kota	%	20	21,54	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	Beragama (FKUB)								
					Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	89,95	89,98	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	100	100	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus konflik sosial	Jlh	3	1	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Ungulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Meningkatnya nilai realisasi investasi	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan peningkatan jaringan dengan investor	Peningkatan iklim investasi yang kondusif		Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Terselenggara nya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	Kali	1	3	Penanaman Modal

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	Peningkatan kemudahana pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana penunjang dan promosi peluang investasi			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		19	31	Penanaman Modal
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengembangan dan penerapatan SOP/SPP secara konsisten dan menyeluruh	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih		Program Penignkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	%	3,99	4,05	Fungsi Kepegawian dan Pelatihan
Meningkatnya	Penerapan SPP,	Peningkatan		Program Pembinaan	Rata Rata	Skor	80	90	Fungsi

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan kepada SKPD yang melakukan pelayanan publik	pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik		dan Pengembangan Apatur	Skor SKM				Kepegawian dan Pelatihan/ Setda
Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Pembangunan titik hotspot di kawasan fasilitas umum kecamatan	Peningkatan akses TI kepada masyarakat	Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Skor			Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan Hotspot area	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase RTH Kecamatan yang telah memiliki Titik Hotspot	%	0	100	Komunikasi dan INformatika

Misi 7: Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang	Pengintegrasian materi pembelajaran seni dan budaya asli Pemalang ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah;	Menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya asli Pemalang melalui jalur pendidikan dan mengembangkan kesenian daerah	Pembangunan Rumah Budaya	Program pengembangan Nilai Budaya	Jumlah tradisi kesenian yang telah mendapatkan sertifikasi HAKI		1	3	Kebudayaan
	Penyelenggaraan event-event seni budaya daerah yang hampir punah;			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya		2	2	Kebudayaan
	Penyediaan sarana dan				CaKupan kelompok		8,35	8,63	Kebudayaan

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Unggulan Bupati	Program Pembangunan Pendukung Misi	Indikator	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	prasarana penyelenggaraan seni;				kesenian yang difasilitasi/dibina				
	Inventarisasi, ekskavasi, dan pelestarian benda cagar budaya			Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cagar budaya yang dilestarikan	%	58	73	Kebudayaan
			Pembangunan Sport Centre	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana prasarana olahraga	Jlh	1	1	
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda	Org	23	28	

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan konkuren, sebagaimana dijelaskan diatas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi kedalam dua kategori, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terbagi kedalam 6 (enam) urusan, yaitu:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Adapun urusan wajib non pelayanan dasar terbagi kedalam 18 (delapan belas) jenis urusan, meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Pembagian urusan pilihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

8.1 Program Prioritas

8.1.1 Program Urusan Wajib yang Berhubungan dengan Pelayanan Dasar

1. PENDIDIKAN

- 1) Program PAUD
- 2) Program pendidikan Dasar 9 Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah
- 4) Program Pendidikan Non Formal
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. KESEHATAN

- 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah sakit mata.

- 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 4) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- 11) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 12) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- 13) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- 14) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 15) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD
- 16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
- 17) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
- 18) Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 19) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
- 2) Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- 3) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- 4) Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
- 5) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikian
- 6) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 7) Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- 8) Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
- 9) Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.
- 10) Program Penyediaan dan pengolahan air baku
- 11) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

- 12) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
- 13) Program Pemanfaatan Ruang
- 14) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 15) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- 16) Program peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan
- 17) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- 18) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- 19) Program Pengawasan Jasa Konstruksi

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

- 1) Program pengembangan Perumahan
- 2) Program Lingkungan Sehat perumahan

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 1) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) Program pemeliharaan ketentramandan pencegahan tindak kriminal
- 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 7) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- 8) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

6. SOSIAL

- 1) Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 2) Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
- 4) Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 5) Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)

- 6) Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 7) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 9) Program Darurat Bencana dan Logistik
- 10) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

8.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. TENAGA KERJA

- 1) Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
- 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 3) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

3. KETAHANAN PANGAN

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4. PERTANAHAN

- 1) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

5. LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Pengendalian pencemaran Dan kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
- 5) Peningkatan Pengendalian Polusi

- 6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1) Program Administrasi Kependudukan

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 2) Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- 3) Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
- 4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 5) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program pelayanan kontrasepsi
- 3) Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
- 4) Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 5) Program Reproduksi Kesehatan Remaja
- 6) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB
- 7) Program Peningkatan Pemamggulangan Narkoba, PMS, HIV AIDS
- 8) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

9. PERHUBUNGAN

- 1) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan
- 5) Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa
- 2) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- 3) Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi daerah
- 4) Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi
- 5) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

11. KOPERASI DAN UKM

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif
- 2) Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah
- 3) Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 4) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

12. PENANAMAN MODAL

- 1) Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- 4) Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 2) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 3) Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 4) Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga
- 5) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga

14. STATISTIK

- 1) Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah

15. PERSANDIAN

- 1) Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah

16. KEBUDAYAAN

- 1) Program pengembangan Nilai Budaya
- 2) Program pengelolaan kekayaan budaya
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

17. PERPUSTAKAAN

- 1) Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
- 3) Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

18. KEARSIPAN

- 1) Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
- 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
- 3) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- 4) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

8.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 3) Program Penyediaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
- 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
- 5) program optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 6) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- 7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2. PARIWISATA

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

3. PERTANIAN

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
- 3) Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/
Perkebunan Peternakan
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan
Peternakan
- 7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan

4. KEHUTANAN

- 1) Program rehabilitasi hutan dan lahan
- 2) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- 3) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- 4) Program perencanaan dan pengembangan hutan

5. PERDAGANGAN

- 1) Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan
- 2) Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3) Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
- 4) Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
- 5) Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan

6. ESDM

- 1) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan

7. PERINDUSTRIAN

- 1) Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam
Sistem Produksi
- 2) Program pengembangan industri Kecil Dan menengah
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) Program Penataan Struktur Industri
- 5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial

8. TRANSMIGRASI

- 1) Program Transmigrasi Umum
- 2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

URUSAN PENUNJANG

1. PERENCANAAN

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi
- 2) Program Kerjasama Pembangunan
- 3) Program Perencanaan Kota kota Menengah dan Besar
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 7) Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan
- 8) Program Perencanaan Tata Ruang
- 9) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dna
Cepat Tumbuh

2. KEUANGAN

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

- 1) Program Penignkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
- 2) Program Fasilitasi Pindah/ Purna PNS
- 3) Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
- 4) Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Apatur

4. SETWAN

- 1) Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
- 2) Program peningkatan Kualitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah

5. PENGAWASAN

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 2) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 3) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

6. SETDA

- 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- 5) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 6) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- 7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 10) Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan
- 11) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 12) Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi
- 13) Program Pelayanan Publik
- 14) Program pengendalian harga dan inflasi daerah
- 15) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 16) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7. PROGRAM RUTIN SKPD TEKNIS

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 5) Program Peningkatan Displin Aparatur
- 6) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

8. PROGRAM RUTIN KECAMATAN

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel 8.1

Matriks Program Prioritas dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan:	Nama Program Prioritas Bupati			
				2016		2017		2018		2019		2020					2021		
				Kinerja	.000	Kinerja	.000	Kinerja	.000	Kinerja	.000	Kinerja	.000				Kinerja	.000	
PENDIDIKAN					94.102.118		72.613.188		62.965.791		64.705.213		80.738.224		97.499.907				
Program PAUD					6.844.800		750.000		787.500		950.000		1.500.000		1.575.000		12.407.300		
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	Angka partisipasi murni PAUD adalah perbandingan jumlah siswa pada TK/RA/Penitipan Anak dibagi dengan jumlah penduduk berusia 4 hingga 6 tahun.	56,68	56,68		58,58		60,98		64,08		67,48		70,28		70,28			
Program pendidikan Dasar 9 Tahun					77.335.105		64.211.352		55.000.000		55.000.000		70.000.000		85.000.000		406.546.457	PD Pendidikan	Peningkatan Infrastruktur Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	Tahun	APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD SD/MI/Paket A/SDLB dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun	112,82	110,00		109,50		109,00		108,50		108,00		107,5		107,5			
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	Tahun	APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs/ Paket B/SMPLB dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun	100,9	100,00		100,10		100,20		100,30		100,40		100,5		100,5			
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	Tahun	Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A/SDLB dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun.	107,19	107,00		107,50		108,00		108,50		109,00		109,5		109,5			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	Tahun	APM adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs/ Paket B/SMPLB yang berusia 1315 tahun dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun	81,63	80,00		82,00		83,00		85,00		87,00		90		90			
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI adalah perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya.	0,0004	0,0008		7,00		6,00		5,00		3,00		0,0004		0,0004			
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya.	0,0025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0015		0,0015			
Angka partisipasi sekolah SD	%	APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (712 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		100			
Angka partisipasi sekolah SMP	%	APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (1315 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.	95,08	97,00		98,00		98,50		99,00		99,50		100		100			
Program Pendidikan Menengah					2.634.750											2.634.750			
Program Pendidikan Non Formal					999.175		1.049.134		1.101.590		1.156.670		1.214.503		2.500.000		8.021.073	PD Pendidikan	
Rasio penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C.		Merupakan perhitungan yang membandingkan antar penduduk yang tidak sekolah/tidak lulus sekolah yang mengikuti kegiatan pendidikan kejar Paket A/B/C	0,00048	0,00047		0,00046		0,00045		0,00044		0,00043		0,00042		0,00042			

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				5.919.656,50	6.215.639	5.670.285	7.171.807	7.575.647	7.954.430	40.507.465	PD Pendidikan					
Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/DIV menunjukkan persentase guru TK yang berijazah kualifikasi S1/DIV.	36	38,00	40,00	50,00	60,00	75,00	80	80						
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	menunjukkan persentase guru SD/MI yang berijazah kualifikasi S1/DIV.	72	72,99	75,49	80,00	82,00	86,00	90,5	90,5						
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV menunjukkan persentase guru SMP/MTs yang berijazah kualifikasi S1/DIV.	89	89,08	92,00	94,00	95,00	97,00	98,5	98,5						
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				368.631	387.063	406.416	426.736	448.073	470.477	2.507.396	PD Pendidikan					
Persentase Sekolah terakreditasi B dan A.	%	Persentase Sekolah terakreditasi A dan B.	90	90,64	91,54	93,54	95,54	96,04	96,94	96,94						
KESEHATAN				274.010.222	194.944.630	189.649.635	241.582.600	237.770.297	262.419.732	1.400.377.117						
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah sakit mata				10.000.000	19.000.000	16.700.000	53.924.593	40.000.000	53.000.000	192.624.593	RSUD	Rumah Sakit Pratama di Comal dan Randudongkal				
Rasio Rumah Sakit terhadap satuan penduduk	per 100.000 penduduk	Jumlah rumah sakit terhadap jumlah satuan penduduk	0,543	0,543	0,543	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698						
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				13.420.296	13.070.000	3.620.000	10.530.000	15.330.000	15.000.000	70.970.296	PD Kesehatan					
Persentase terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	%	Persentase puskesmas yang terdistribusi obat dan perbekalan kesehatan pada kurun waktu tertentu.	100	100	100	100	100	100	100	100						
persentase ketersediaan sarana dan prasarana di instalasi farmasi sesuai standar	%	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di Instalasi Farmasi sesuai standar yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	80	100	100	100	100	100	100	100						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat				18.391.330	18.866.330	18.939.647	20.800.130	14.156.251	14.864.064	106.017.752	PD Kesehatan					
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	Cakupan kunjungan pasien di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	100	100	100	100	100	100	100	100						
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	%	Cakupan kunjungan pasien di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.	100	100	100	100	100	100	100	100						
Persentase pemeriksaan laboratorium di Labkesda yang dilayani	%	Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilakukan/ditangani oleh Labkesda pada kurun waktu tertentu.	100	100	100	100	100	100	100	100						
Persentase tertanggulangnya krisis kesehatan akibat bencana	%	Persentase kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang tertanggulangi (mendapat pelayanan kesehatan) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100	100	100	100	100	100	100						
Program Pengawasan Obat dan Makanan				137.600	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000	832.600	PD Kesehatan					
Persentase pangan siap saji yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	Persentase pangan siap saji di suatu wilayah yang memenuhi syarat keamanan pangan pada kurun waktu tertentu.	70	100	100	100	100	100	100	100						
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.758.758	1.847.500	1.920.000	1.992.500	2.065.000	2.065.000	11.648.758	PD Kesehatan					
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	Cakupan murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut oleh tenaga kesehatan atau bersama tenaga terlatih (guru UKS dan dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	93,25	88	90	92	94	96	98	98						

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganjurkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SMP dan setingkat	%	Cakupan murid kelas 7 SMP dan setingkat yang diperiksa kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut oleh tenaga kesehatan atau bersama tenaga terlatih (guru UKS dan kader kesehatan sekolah) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	0	19,25	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	20,3		
Cakupan desa siaga aktif	%	Cakupan Desa dan kelurahan yang penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase desa/ kelurahan siaga aktif mandiri	%	Persentase Desa dan kelurahan Siaga aktif strata mandiri (memiliki forum Kesehatan desa/ kelurahan yang aktif, memiliki 9 orang atau lebih Kader Kesehatan, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar, memiliki Posyandu dan 4 UKBM lain yang aktif, memiliki dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari anggaran desa/ kelurahan, Swadaya masyarakat, dunia usaha dan sumber lainnya, ada peran aktif masyarakat di bidang kesehatan lebih dari 3 kegiatan dan peran lebih dari 2 ormas, memiliki Peraturan Kepala Desa/Kelurahan tentang Kesehatan dan sudah direalisasikan, serta pencapaian rumah tangga sehat lebih dari 40%) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	1,8	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4	4	4	
Persentase Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja	%	Persentase Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja (ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau) di tempat kerja pada kurun waktu tertentu.	0	47,00	52,00	57,00	62,00	67,00	72,05	72,05	72,05	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat				456.000	478.800	502.740	527.877	554.271	581.984	3.101.672	PD Kesehatan	
Persentase balita pendek (stunting)	%	Persentase balita dengan status gizi sangat pendek dan pendek berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1995/Menkes/SK/XII/2010 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	22,98	24,00	24,00	23,00	23,00	22,00	21,5	21,5	21,5	
Persentase balita gizi kurang	%	Persentase balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1995/Menkes/SK/XII/2010 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	16,74	17,00	17,00	16,00	16,00	15,00	14,5	14,5	14,5	

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganugerahi	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	%	Persentase rumah tangga/ keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium secara cukup yang pemantauannya dilakukan dengan menguji garam yang digunakan di rumah tangga tersebut dengan menggunakan iodina test melalui masyarakat di tiap desa/ kelurahan.	88,9	90,00	91,00	91,00	92,00	92,00	92,5	92,5		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat				1.431.908	1.019.000	1.481.000	1.623.000	1.769.000	1.769.000	9.092.908	PD Kesehatan	
Persentase Rumah Tangga Sehat (Utama dan Pripurna)	%	Jumlah Rumah tangga Sehat dibagi jumlah rumah tangga	56,69	57,70	59,30	60,00	62,50	64,50	65,00	65,00		
Persentase tempat pengelolaan makanan atau TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM yang memenuhi syarat kesehatan dibagi Pengelolaan Makanan atau TPM yang memenuhi syarat kesehatan	57,38	57,70	59,30	60,00	62,50	64,50	65,00	65,00		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				1.716.000	1.990.000	2.145.000	2.315.000	2.495.000	2.495.000	13.156.000	PD Kesehatan	
Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	Cakupan penderita DBD yang ditangani di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Cakupan Imunisasi DT Anak Sekolah	%	Persentase kematian akibat DBD terhadap jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.	99	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98	
Cakupan Imunisasi Td Anak Sekolah	%	Cakupan pemberian imunisasi DT pada anak SD/MI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	99	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98	
Cakupan Imunisasi Campak Anak Sekolah	%	Cakupan pemberian imunisasi Campak pada anak SD/MI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	98,6	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98	
Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	%	Angka kejadian kasus malaria positif diantara 1.000 penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Cakupan penderita filariasis yang ditangani	%	Cakupan penderita filariasis yang ditangani sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Cakupan penderita flu burung yang ditangani	%	Cakupan penderita flu burung yang ditangani sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate	per 100.000 penduduk	Angka kasus AFP Non Polio (yang bersifat layuh/flacid terjadi secara akut, mendadak dan bukan disebabkan ruda paksa) yang ditemukan diantara 100.000 penduduk berusia < 15 tahun di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	1,71	1,25	1,20	1,25	1,20	1,10	1,10	1		
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani/ ditanggulangi < 24 jam oleh kabupaten terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Persentase penderita KIPI ditangani	%	Persentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang ditangani sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Persentase Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya		Persentase calon jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Persentase Jamaah Haji yang diperiksa kesehatan setelah kedatangan		Persentase jamaah haji yang diperiksa kesehatan setelah kedatangan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganjurkan	Nama Program Prioritas Bupati	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	Cakupan bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi satu dosis imunisasi HB0, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT- HB/DPT-HB-Hib, empat dosis imunisasi polio, dan satu dosis imunisasi campak di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	96,69	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00		
Cakupan Imunisasi TT2+ Ibu Hamil	%	Cakupan pemberian imunisasi TT2-TT5 pada ibu hamil dengan interval tertentu yang berguna bagi kekebalan seumur hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	97,8	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB	%	Cakupan penderita baru TB BTA+ yang ditangani sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	Angka semua kasus TB yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu.	112	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	Proporsi kasus baru TB BTA+ yang menyelesaikan pengobatan lengkap dan sembuh dengan strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	93,6	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
Angka Kesembuhan TB Paru (CR)	%	Persentase pasien TB Paru BTA+ yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan apusan dahak ulang (follow-up) dengan hasil negatif pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaan sebelumnya di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	90,7	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		
Cakupan penemuan dan penanganan balita penderita ISPA (Pneumonia)	%	Cakupan balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Angka Prevalensi Kusta	per 10.000 penduduk	Angka kesakitan kusta yang tercatat (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	1,02	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	Cakupan penderita baru HIV AIDS yang ditangani sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	Persentase orang dengan HIV (ODHA) yang saat ini mendapat pengobatan ARV sesuai protokol pengobatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	%	Cakupan penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita hepatitis	%	Cakupan penderita Hepatitis yang ditangani sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				875.070	605.000	785.000	925.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.190.070	PD Kesehatan	
Proporsi puskesmas tersertifikasi	%	Persentase puskesmas yang tersertifikasi (akreditasi/ISO) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	0	24,00	52,00	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan tersertifikasi	%	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan swasta (Klinik, Praktek Mandiri) yang tersertifikasi (akreditasi) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	0	8,00	16,00	24,00	47,00	60,00	60,00	60,00	73		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganjurkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
Proporsi tenaga kesehatan teregistrasi	%	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi dan memenuhi standar kompetensi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya					25.656.362,63		7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.682.188		9.116.297	67.098.597	PD Kesehatan
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai dalam kurun waktu tertentu.	0	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		90	90		
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					17.500.000		7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.682.188		9.116.297	58.942.234	PD Kesehatan
Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%	Cakupan penduduk miskin (non kuota) yang memperoleh JPK dari pemerintah daerah pada kurun waktu tertentu.	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100		
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					30.000		60.000		70.000		80.000		90.000		90.000	420.000	PD Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	%	Cakupan lanjut usia (60 tahun ke atas) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	45	50,00		55,00		60,00		65,00		75,00		80	80		
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan lansia	%	Cakupan puskesmas yang telah melaksanakan dan memenuhi standar pelayanan puskesmas santu usia	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100	100		
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan					100.000		110.000		120.000		130.000		140.000		140.000	740.000	PD Kesehatan
Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan di suatu wilayah yang memenuhi syarat keamanan pangan pada kurun waktu tertentu.	75	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					8.459.743		1.670.000		1.790.000		1.910.000		2.030.000		2.030.000	17.889.743	PD Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	90	90,00		92,00		93,00		94,00		95,00		96	96		
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	80	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		86	86		
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	Cakupan ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi kebidanan (dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (penanganan definitif/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan) oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	111,08	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganalisa	Nama Program Prioritas Bupati		
				2016		2017		2018		2019		2020					2021	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD					83.732.427		64.900.000		71.390.000		78.529.000		86.381.900		95.020.090	479.953.417	RSUD	
BOR		Jumlah tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk	53,87	54,00		55,00		60		65,00		65		65,00		65		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional					89.640.727		55.500.000		53.500.000		50.750.000		53.287.500		55.000.000	357.678.227	PD Kesehatan	
Cakupan pelayanan peserta JKN di puskesmas	%	Cakupan kunjungan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas.	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja					253.000		278.000		326.248		338.000		372.000		372.000	1.939.248	PD Kesehatan	
Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	Persentase Bayi berat badan lahir rendah (<2500 gr) yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	45	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		75		
Persentase Bayi BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular					81.000		50.000		75.000		100.000		125.000		150.000	581.000	PD Kesehatan	
Cakupan kasus baru hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Persentase kasus baru hipertensi yang ditangani oleh fasilitas pelayanan terhadap kasus hipertensi yang ada pada periode/kurun waktu tertentu.	0,2	0,25		0,24		0,23		0,22		0,21		0,21		20		
Cakupan kasus baru diabetes mellitus di fasilitas pelayanan	%	Persentase kasus baru DM yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kasus DM yang ada pada periode/kurun waktu tertentu.	0,5	0,50		0,50		0,45		0,45		0,40		0,40		40		
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan					370.000		370.000		400.000		430.000		465.000		465.000	2.500.000	PD Kesehatan	
Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan		Persentase puskesmas yang mengirimkan laporan data kesehatan ke dinas kesehatan kab dalam kurun waktu tertentu.	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					275.985.233		213.902.043		176.136.369		193.515.202		209.027.595		222.389.579	1.290.956.022		
Program pembangunan Jalan Dan Jembatan					93.799.770		123.000.000		83.500.000		82.575.000		86.703.750		91.038.938	560.617.458	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan jalan-jalan beton (Rigid Pavement)
Persentase Jalan dalam kondisi baik	%		86	87,00		88		90		91		92		93		93		
Program tanggap darurat jalan dan jembatan					6.700.000		1.700.000				1.700.000		1.700.000		1.700.000	13.500.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Persentase Jalan dalam kondisi baik	%		86	87,00		88		90		91		92		93		93		
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan					103.670.552		50.000.000		52.018.622		55.956.705		58.024.974		61.653.913	381.324.767	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%		95,7	96,00		97		98		99		100		100		100		
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan					300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	1.800.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan.																

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganjurkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
- Kabupaten	%		86,05	87	88	90	91	92	93	93		
Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	Menunjukkan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar	41,9	42,9	43,9	44,9	44,9	46,9	47,9	47,9		
Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	%	Menunjukkan persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	50	60	61	62	63	64	65	65		
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikian				2.015.000	411.767	435.000	400.000	435.000	435.000	4.131.767	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyiapan Pembangunan PLTU Kabupaten Pemalang
Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik di luar jangkauan PLN	%	Menunjukkan rumah tangga yang menggunakan listrik dibagi jumlah rumah tangga		85	86	87	88	89	90	90		
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				13.640.000	12.652.529	12.125.000	12.731.250	13.367.813	16.000.000	80.516.592	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan (Trotoar, DPT, DRT dan PTHA)
Luas Wilayah Yang Tertata	Ha	Luas wilayah yang tertata	14	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00		
Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong				13.800.000	2.000.000	2.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	54.200.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Drainase dalam kondisi baik	%	Menunjukkan persentase panjang drainase wilayah kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	65	66	67	68	69	70	71	71		
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong				100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	7.100.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Cakupan pembangunan dinding penahan di wilayah rawan longsor	%	Menunjukkan persentase lokasi pembangunan dinding penahan di wilayah rawan longsor terhadap seluruh wilayah rawan longsor	55	60	65	68	70	75	75	75		
Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya				35.530.021	12.000.000	12.600.000	12.500.000	21.347.500	23.210.500	117.188.021	PD Pekerjaan Umum, PD Pertanian	Pengembangan Jaringan Air Bersih
Rasio Jaringan Irigasi	%	Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik terhadap luas lahan budidaya										
- Primer	%		55,22	60	63	67	70	75	76	76		
- Sekunder	%		54	60	61	65	70	72	75	75		
Panjang saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	Menunjukkan persentase panjang saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	55,22	60	63	65	70	73	75	75		
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	ketersediaan air irigasi adalah rasio ketersediaan air irigasi yang terdapat di petak-petak sawah (lt/det) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan		63	65	70	71	73	76	76		
Program Penyediaan dan pengolahan air baku				-	4.000.000	4.200.000	5.324.500	5.500.811	5.775.482	24.800.793	PD Pekerjaan Umum, PDAM, PD Pemberdayaan	
Pelayanan Air Bersih (sistem Perpipaan)	%	Menunjukkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan terhadap penduduk	30,02	31	34	37	40	42	45	45		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				275.000	1.450.000	1.600.000	2.500.000	1.600.000	2.208.000	9.633.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	Persentase penduduk berakses air minum layak adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.	87,12	90	90	92	93	95	95	95		
Cakupan pelayanan air limbah	%	Menunjukkan persentase kepala keluarga yang mendapatkan pelayanan Air Limbah	60	70	73	75	75	78	80	80		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Bupati		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021					
Program Pengaturan Jasa Konstruksi					89.400		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	589.400	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdan Setda		
Persentase jumlah Izin Usaha Jasa konstruksi adalah perbandingan jumlahRekomendasi IUJK terhadap jumlah seluruh Pemohon IUJK		Persentase jumlah Izin Usaha Jasa konstruksi adalah perbandingan jumlahRekomendasi IUJK terhadap jumlah seluruh Pemohon IUJK	90	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00			
Program Pemanfaatan Ruang					65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	390.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Persentase jumlah bangunan ber-IMB	%	Persentase jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada	2,5	10		11		12		13		14		15		15			
Persentase rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	% %	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan adalah kumulatif penerbitan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Perda Bangunan Gedung guna meningkatkan tertib pembangunan bangunan gedung.	2,5	10		11		12		13		14		15		15			
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							100.000		150.000		200.000		200.000		200.000	850.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	%	Jumlah pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dibagi dengan jumlah ruang dalam RTRW	80	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100			
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	%				300.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	1.300.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdan Setda		
Jumlah tempat penampungan air baku dalam kondisi baik	unit	Menunjukkan persentase bendungan dan embung yang dapat digunakan sebagai penampung air																	
Program peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan					3.690.000		3.392.257		3.392.257		3.392.257		3.392.257		3.392.257	20.651.285	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					1.730.000		1.730.000		1.730.000		1.730.000		1.730.000		1.730.000	10.380.000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Persentase sarana dan prsarana kebinmargaan dalam kondisi baik	%	Menunjukkan sarana dan prsarana kebinmargaan yang memiliki kondisi baik	70	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		78,00		78			
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi					90.590		100.590		110.590		120.590		130.590		140.590		Setda		
persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	Jumlah informasi 7 (tujuh) layanan informasi SIPJAKI		100		100		100		100		100		100		100			
Program Pengawasan Jasa Konstruksi					189.900		199.900		209.900		219.900		229.900		239.900	1.289.400	Setda		
Prosentase Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi secara efektif	%			100		100		100		100		100		100		100			
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN					8.385.000		11.020.000		5.610.000		6.700.000		6.700.000		8.700.000	47.115.000			
Program pengembangan Perumahan					7.385.000		9.020.000		3.610.000		4.500.000		4.500.000		6.500.000	35.515.000	PD Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Bappeda		
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah	65,33	70		73		75		78		80		83		83			

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganjurkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Persentase kawasan kumuh	%	Rasio jumlah kawasan kumuh menunjukkan perbandingan luas lingkungan permukiman kumuh terhadap luas wilayah.	4,70	4,50	4	3,5	3	2,5	2	2		
Program Lingkungan Sehat perumahan				1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	11.600.000	PD Umum, dan	Pekerjaan Bappeda, PD
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	92	93	94	95	96	97	98	98		
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.832.566	3.071.802	3.245.210	3.537.790	3.896.641	4.278.636	23.862.645		
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				829.425	260.956	208.500	225.000	245.000	245.000	2.013.881	PD Trantibumlinmas	
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	%	Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja	27	13,85	15,38	16,92	18,46	20,00	21,54	21,54		
Program pemeliharaan ketentramandan pencegahan tindak kriminal				642.766	803.458	1.004.322	1.255.402	1.569.253	1.961.566	7.236.767	PD Trantibumlinmas	
Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42,86	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29		
Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	Cakupan patroli petugas Satpol PP	576	1.095,0	1.095,0	1.095,0	1.095,0	1.095,0	1.095,0	1.095,0		
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	per 10.000	Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	106	103,00	105,00	110,00	115,00	125,00	125,00	130		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				1.694.089	96.775	101.775	106.775	111.775	101.457	2.212.646	PD Trantibumlinmas	
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	r	Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	89,83	89,83	89,86	89,89	89,92	89,95	89,95	89,98		
Program Pendidikan Politik Masyarakat				188.725	383.600	388.600	393.600	398.600	398.600			
Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum	%	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, baik bupati, gubernur, legislatif, maupun presiden	60,1			50,00	60,00			61		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Mengelola	Nama Program Prioritas Bupati	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					1.535.292		1.136.955		1.146.955		1.156.955		1.166.955		1.166.955	7.310.067	PD Trantibumlinmas, Setda	
Jumlah kasus konflik sosial		Jumlah konflik SARA yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun	0	3		3		2		2		1		1		1		
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					134.526		92.315		97.315		102.315		107.315		107.315	641.101	PD Trantibumlinmas	
Tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba	jml org	Menunjukkan Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba		575		600		625		650		660		675		675		
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					127.743		127.743		127.743		127.743		127.743		127.743	766.458	PD Trantibumlinmas	
Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	LSM, Ormas, OKP yang terdaftar	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					680.000		170.000		170.000		170.000		170.000		170.000	1.530.000	PD Trantibumlinmas, Setda	
Jumlah kasus konflik sosial	kasus	Jumlah konflik SARA yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun	0	3		3		2		2		1		1		1		
SOSIAL					4.737.700		4.593.735		5.046.297		5.356.112		5.770.917		5.930.963	31.435.724		
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					692.700		727.335		763.702		801.887		841.981		884.080	4.711.685	PD Sosial	
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial			13,03	18,75		24,46		30,17		35,89		41,60		47,32		47,32		
Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar skala kabupaten	12,96	14,37		15,95		17,71		19,66		21,82		21,82		21,82		
Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	Menunjukkan perbandingan PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan jumlah PMKS.	0,71	0,79		0,87		0,97		1,08		1,20		1,33		1,33		
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					810.000		430.500		452.025		474.626		498.358		523.275	3.188.784	PD Sosial	
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana	%	Menunjukkan perbandingan jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana	11,74	11,74		23,16		34,56		46		57,43		68,82		68,82		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma					105.000		270.000		385.000		395.000		420.000		420.000	1.995.000	PD Sosial	
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	Menunjukkan perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (program bantuan cacat permanent)	2,03	7,75		13,46		19,17		24,89		30,60		36,31		36,31		
Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo					162.000		270.000		280.000		280.000		280.000		280.000	1.552.000	PD Sosial	
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	Menunjukkan perbandingan jumlah panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah panti sosial (diluar panti milik pemerintah daerah dan provinsi)	100	100		100		100		100		100		100		100		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Bupati		
				2016		2017		2018		2019		2020					2021	
Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)					475.000		112.500		200.000		250.000		375.000		375.000	1.787.500	PD Sosial	
Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	Menunjukkan banyaknya Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina	11,47	19,33		27,63		35,92		44,22		52,52		60,81		60,81		
Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					708.000		743.400		780.570		819.599		860.578		903.607	4.815.754	PD Sosial	
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	Menunjukkan perbandingan jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah WKSBM	7,66	7,66		15,32		30,18		43,69		47,30		51,80		51,80		
Program Pembinaan Anak Terlantar					129.000		150.000		200.000		250.000		300.000		350.000		PD Sosial	
Persentase anak terlantar yang ditangani	%	Menunjukkan banyaknya anak jalanan dan anak terlantar yang telah terbina	2,27	15,50		28,84		42,17		55,50		68,83		82,17		82,17		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					396.000		500.000		550.000		600.000		600.000		600.000	3.246.000	PD Sosial	
Pengembangan Desa Tangguh		Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan	0	0		1		2		3		4		5		5		
Persentase desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi/resiko bencananya	%	Menunjukkan persentase desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi/resiko bencananya	19	42		65		73		82		94		100		100		
Program Darurat Bencana dan Logistik					860.000		850.000		850.000		850.000		900.000		900.000	5.210.000	PD Sosial	
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	Luas WMK yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah Luas potensi ancaman kebakaran di Kabupaten sesuai dengan SK Bupati tentang Luas WMK	30	30		30		30		43		43		43		43		
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	100	100		100		100		100		100		100		100		
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK		cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK	4	4		5		5		5		6		6		6		
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	Menunjukkan perbandingan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan jumlah korban bencana	90	90		90		90		90		90		90		90		
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	Menunjukkan perbandingan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana	75	75		80		85		90		90		90		90		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Bupati	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					400.000		540.000		585.000		635.000		695.000		695.000	3.550.000	PD Sosial	
Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam Lingkup Kabupaten	%	Menunjukkan prosentasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Lingkup Kewenangan Kabupaten Terhadap Seluruh Wilayah Pasca Bencana Alam	10	10		10		15		15		15		20		20		
Prosentase Peserta Rakor/Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten	%	Meningkatnya Pengetahuan Peserta tentang Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten	16,5	32,6		48,6		64,6		80,7		95		100		100		
TENAGA KERJA					4.593.000		7.857.000		10.400.000		10.940.250		11.477.763		12.012.751			
Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja					2.020.000		5.000.000		7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.682.188	39.345.938	PD Tenaga Kerja	BLK dan Technopark
Pencari kerja yang ditempatkan	%	Menunjukkan perbandingan jumlah Pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang mendaftar dalam persen	95,20	50,43		55,49		57,96		61,33		66,20		76,6		76,6		
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.	69,87	70,83		72,73		73,68		75,86		76,67		78,68		78,68		
Jumlah LPK yang terbina dan memiliki ijin	LPK	Jumlah LPK yang dibina dan memiliki ijin operasional	35,00	38,00		38,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh sosial produktifitas	org	jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sosialisasi untuk meningkatkan produktifitas kerjanya	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
Program peningkatan Kesempatan Kerja					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.315.250		2.431.013		2.552.563	13.603.826	PD Tenaga Kerja	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar	83,3	64,70		70,50		76,47		82,35		88,23		94,11		94,11		
Persentase jumlah tenaga kerja yang terserap	%	Menunjukkan prosentase jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang mendaftar	97,36	80		82		85		88		90		93		93		
Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan					573.000		757.000		695.000		750.000		778.000		778.000	4.331.000	PD Tenaga Kerja	
Persentase perusahaan yang menerapkan K3	%	Menunjukkan persentase perusahaan yang dilakukan uji lingkungan	3,8	5		10		15		20		25		30		30%		
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	56,28	50		52		54		56		58		60		60%		
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Menunjukkan persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibanding dengan jumlah perusahaan yang terdaftar	66,07	22		22		22		22		22		22		22		
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Menunjukkan persentase jumlah peralatan yang telah diuji dibanding dengan jumlah peralatan yang terdaftar	20	20		35		50		70		90		100		100		
Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang terfasilitasi	%	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan adalah jumlah sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja yang dimediasi oleh SKPD terkait	100	100		100		100		100		100		100		100		

Indikator Kinerja	Satuan	Definis Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganjurkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Rasio UMK terhadap KHL	%	Menunjukkan persentase jumlah upah minimum kabupaten dibandingkan dengan jumlah Kebutuhan Hidup Layak	102	100	100	100	100	100	100	100		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					804.000	725.000	780.000	780.000	805.000	805.000	4.699.000	
Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak				299.000	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	2.569.000	PD PPPA, Setda
Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	Jumlah kelembagaan PUG (pokja PUG, focalpoint, P2TP2A, PPT) yang melakukan aktivitas menuju pengarusutamaan gender termasuk desa/kelurahan	16,85	22,10	27,34	32,58	37,83	43,07	48,31	48,31		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				135.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	735.000	PD PPPA, Setda
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan	1,172	1,172	1,166	1,160	1,154	1,149	1,143	1,143		
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				370.000	175.000	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	1.395.000	PD PPPA, Setda
Rasio KDRT	Per 1.000	Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga	0,01	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,004		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	Persentase cakupan ketersediaan petugas bimbingan rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada korban kekerasan di daerah.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
KETAHANAN PANGAN				3.305.683	1.642.160	1.746.820	1.759.900	1.803.600	1.053.600	11.311.763		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan				3.305.683	1.642.160	1.746.820	1.759.900	1.803.600	1.053.600	11.311.763	PD Ketahanan Pangan, Setda	
Ketersediaan pangan utama												
Ketersediaan energi perkapita	% / (kkal/capita/hari)	Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi	119,92	119,94	119,96	119,98	120,00	120,02	120,04	120,04		
Ketersediaan protein perkapita	gr/capita/hari	Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein	64,140	64,14	64,15	64,15	64,15	64,15	64,157	64,157		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menerima	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten	ton	Persentase cadangan pangan kabupaten terhadap standar 100 ton untuk cadangan pangan Kabupaten	60	5,00	15,00	30,00	40,00	50,00	60	60		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.	72,10	75,20	78,30	81,40	84,50	87,60	88,00	88,00		
Konsumsi energi dan protein per kapita												
- energi (k.kal/hr)	k.kal/hr	Konsumsi bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi	1.830,40	1.849,20	1.868,10	1.886,90	1.905,80	1.924,60	1943,5	1943,5		
- protein (gr/hr)	gr/hr	Konsumsi bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein	50,2	50,60	51,10	51,50	51,90	52,30	52,7	52,7		
PERTANAHAN				350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.100.000	PD urusan Pertanahan
Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan		Menunjukkan perbandingan antara jumlah konflik pertanahan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah konflik yang ditangani dan diselesaikan	50	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	64	64		
LINGKUNGAN HIDUP				14.834.417	14.480.538	14.715.564	14.961.343	15.228.410	15.477.330	89.697.601		
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				9.477.876	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	59.477.876	PD Pekerjaan Umum, PD Lingkungan Hidup
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7	
Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup				439.000	460.950	483.998	508.197	533.607	560.288	2.986.040		PD Lingkungan Hidup
Pemantauan status mutu air	%	Prosentase antara sungai yang terpantau mutu airnya dengan sungai seluruhnya	66	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	44,44		
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	Perbandingan antara perusahaan wajib amdal yang diawasi dengan seluruh perusahaan wajib AMDAL dan UKL/UPL	39,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	Menunjukkan perbandingan jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dengan Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	Menunjukkan perbandingan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	Menunjukkan jumlah Laboratorium Penelitian Lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Penegakan hukum lingkungan	%	Prosentase antara kasus lingkungan yang sudah terselesaikan dengan kasus lingkungan yang ada.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				4.023.791	3.205.650	3.365.933	3.534.229	3.710.941	3.896.488	21.737.031		PD Lingkungan Hidup, PD Pertanian
Rasio Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	Prosentase perbandingan antara luas penghijauan yang rawan longsor dengan luas rawan longsor seluruhnya	34	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonitor	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup				260.000	120.000	130.000	140.000	150.000	150.000	950.000	PD Lingkungan Hidup						
Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	Menunjukkan perbandingan jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dengan luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100					
Peningkatan Pengendalian Polusi				30.000	60.000	70.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	PD Lingkungan Hidup				
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	Menunjukkan perbandingan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dengan Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100					
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				603.750	633.938	665.634	698.916	733.862	770.555	4.106.655	PD Lingkungan Hidup						
Luas RTH Publik kawasan Perkotaan	%	Menunjukkan persentase RTH Publik di kawasan perkotaan	70	75	80	85	90	95	100	100	100	100					
Luas RTH Privat kawasan Perkantoran	%	Menunjukkan persentase RTH Privat di kawasan perkantoran	60	20	30	40	60	80	100	100	100	100					
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.767.214	2.905.575	3.050.853	3.203.396	3.363.566	3.531.744	18.822.348							
Program Administrasi Kependudukan				2.767.214	2.905.575	3.050.853	3.203.396	3.363.566	3.531.744	18.822.348	PD Disdukcapil						
Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	Perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah	95	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,5	99,5	99,5	99,5					
Persentase anak berakta kelahiran	%	perbandingan jumlah anak (Usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk (Usia 0-18 tahun).	84,5	85,85	87,19	88,54	89,89	91,23	92,58	92,58	92,58	92,58					
Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk	70	70,52	73,26	76,00	78,74	81,48	84,24	84,24	84,24	84,24					
Persentase pasangan berakte nikah	%	perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah	4,3	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	10	10	10	10					
Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	perbandingan keluarga yang memiliki kartu keluarga terhadap jumlah keseluruhan keluarga yang telah menikah	95,5	95,82	96,14	96,47	96,80	97,13	97,41	97,41	97,41	97,41					
Persentase kepemilikan Akte Kematian	%	perbandingan jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 tahun yang berakte kematian terhadap jumlah penduduk yang meninggal pada tahun yang sama.	0,71	30,00	40,00	50	60	70	75	75	75	75					
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.663.837	7.122.811	7.173.813	5.537.033	4.629.134	4.694.433	35.821.061							
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				1.803.626	2.500.000	2.500.000	1.497.779	522.668	548.801	9.372.874	PD Permasdes, Setda	Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PINSINDES)					
Cakupan Bina PKK Desa	%	Menunjukkan prosentase PKK desa yang dibina	13,51	15,77	27,03	40,54	54,05	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57					
Posyandu aktif	unit/tahun	Menunjukkan jumlah posyandu strata pratama meningkat menjadi strata diatasnya	5,26	5,74	10,53	15,79	21,05	26,32	31,58	31,58	31,58	31,58					
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				255.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.035.000	PD permasdes						
Jumlah Bumdes yang dibentuk	unit	Menunjukkan jumlah Bumdes yang dibentuk	18	24	36	50	64	78	78	92	92	92					

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memasukkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa				3.507.296	3.330.000	3.440.000	2.990.000	3.040.000	3.040.000	19.347.296	PD permasdes						
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	Menunjukkan persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat	2,79	0,0047	0,0050	0,0054	0,0055	0,0057	0,0059	0,0059							
Prosentase profil desa/kelurahan yang terupdate terhadap jumlah desa	%	Menunjukkan persentase profil desa/kelurahan yang terupdate terhadap jumlah desa	59,46	60,81	69,37	72,07	81,98	91,89	100,00	100,00							
Persentase pembinaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD)	%	Menunjukkan persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD).	23,70	26,07	47,39	71,09	94,79	100	100	100							
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				642.915	675.061	708.813	744.254	781.467	820.540	4.373.050	PD permasdes, PD Penunjang Keuangan, Setda, Kecamatan						
Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan/aset desa	%	Menunjukkan persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan/aset Desa.	44,08	45,02	53,08	62,56	72,04	93,36	100,00	100,00							
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				455.000	477.750	365.000	145000	125000	125000	1.692.750	PD Permasdes						
Jumlah desa yang mendapatkan pemeriksaan akhir masa jabatan (AMJ)		Menunjukkan jumlah desa yang mendapatkan pemeriksaan akhir masa jabatan (AMJ)	9	5	5	170	21	9	0	0							
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan administrasi desa	%	Menunjukkan persentase desa yang mendapatkan pembinaan administrasi desa	25,00	29,17	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.191.533	3.290.165	3.447.173	3.612.032	3.785.133	3.966.890	21.292.926							
Program Keluarga Berencana				2.538.733	2.665.670	2.798.953	2.938.901	3.085.846	3.240.138	17.268.242	PD Pengend. Penduduk dan KB						
Cakupan peserta KB aktif	%	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu.	79,54	81,51	81,53	81,55	81,57	81,59	81,61	81,61							
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO)	%	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan Akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan	10,83	8,47	8,42	8,37	8,32	8,27	8,16	8,16							
Program pelayanan kontrasepsi				259.900	272.895	286.540	300.867	315.910	331.706	1.767.817	PD Pengend. Penduduk dan KB						
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		KeluargaPra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah perbandingan keluarga prasejahtera dan sejahtera I dengan jumlah keluarga dalam persen.	56,23	51,85	51,8	51,75	51,73	51,70	51,70	51,68	Capaian diubah						
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Rasio	Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS (PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB,	2,47	2,47	2,46	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45							
Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR				108.500	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	358.500	PD Pengend. Penduduk dan KB						
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja aktif	%	Menunjukkan perbandingan jumlah kec. memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja dengan jml seluruh kecamatan.	100	100	100	100	100	100	100	100	capaian diubah						

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menanggung	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				62.400	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	312.400	PD	Pengend. Penduduk dan KB		
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KSI untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan kepeleyanan KB swasta.	73,46	88,30	88,48	88,66	88,83	89,014	89,1924	89,1924	89,1924	89,1924	89,1924				
Program Reproduksi Kesehatan Remaja				40.000	42.000	44.100	46.305	48.620	51.051	272.077				PD	Pengend. Penduduk dan KB		
Presentase Kecamatan Yang Memiliki PIK KRR	%		100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100				
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB				80.000	84.000	88.200	92.610	97.241	102.103	544.153				PD	Pengend. Penduduk dan KB		
Angka Drop out KB	%	Drop out KB menunjukkan jumlah peserta KB yang keluar dari program atau tidak berKB lagi yang disebabkan oleh beberapa alasan (medis, sosial ekonomi, ingin punya anak lagi dan sebagainya)	13	12,51	12,03	11,55	11,07	10,59	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11				
Program Peningkatan Pemanggulan Narkoba, PMS, HIV AIDS				72.000	75.600	79.380	83.349	87.516	91.892	489.738				PD	Pengend. Penduduk dan KB		
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada pemuda	Kali	kegiatan atau "event" kepemudaan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada pemuda	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				30.000	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	280.000				PD	Pengend. Penduduk dan KB		
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.	0	84,91	84,98	85,048	85,115	85,182	85,249	85,249	85,249	85,249	85,249				
PERHUBUNGAN				3.450.477	9.322.100	11.890.750	9.487.288	9.604.652	4.622.884	48.378.151							
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan				235.350	7.500.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	2.500.000	35.235.350				PD	Perhubungan	Penyiapan Bandara Perintis	
Jumlah Terminal Bis	Unit	Jumlah Terminal Bis	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
Jumlah Terminal Barang	Unit	Jumlah Terminal Barang	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
Jumlah terminal yang beroperasi	Unit	Jumlah terminal yang beroperasi	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9				
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Klp	Memunjukkan persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang dibandingkan jumlah kebutuhan	8/8	8/8	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6				
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ				1.808.157	315.000	330.750	347.288	364.652	382.884	3.548.731				PD	Perhubungan		
Jumlah kasus pelanggaran angkutan barang dan angkutan penumpang	Kasus	Jumlah kasus pelanggaran angkutan barang dan angkutan penumpang	110	951	900	840	800	759	690	690	690	690	690				
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	Rasio jumlah sarana dan prasana perhubungan yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan sarana dan prasarana perhubungan yang ada	90	90	91	92	93	94	95	95	95	95	95				
Program peningkatan Pelayanan Angkutan				242.600	370.100	460.000	490.000	540.000	540.000	2.642.700				PD	Perhubungan		
Persentase ketersediaan angkutan kota	%	Perbandingan antara jumlah angkutan Kota dengan jumlah penumpang	18,5	25,538	25,261	24,928	24,743	24,502	24,244	24,244	24,244	24,244	24,244				

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menerima	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	Menunjukkan ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, jumlah angkutan umum 602 unit, jumlah jaringan trayek 33 jaringan.	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33	602/33		
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	%	prosentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek dalam suatu kabupaten/kota. Jumlah trayek yang sudah ada adl 33 jaringan trayek.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
Jumlah orang melalui/masuk terminal per tahun	Orang	Menunjukkan banyaknya orang melalui/masuk terminal per tahun	2.265.400	3.128.517	3.094.536	3.053.759	2.265.400	3.001.655	3.001.655	3.001.655	3.001.655	3.001.655	3.001.655	3.001.655		
Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	Merupakan perbandingan kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) dengan Jumlah kendaraan	35	40	45	50	55	60	65	65	65	65	65	65		
Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan				100.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000	2.850.000	PD Perhubungan
persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	Menunjukkan persentase jumlah halte pada trayek yang telah dilayani angkutan umum.	23,33	73,33	106,67	140,00	173,33	206,67	206,67	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%		0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas				1.064.370		587.000		550.000		600.000		650.000		650.000		PD Perhubungan
Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	Prosentase perbandingan antara jumlah rambu- rambu yang ada dengan jumlah rambu-rambu seharusnya	35	36	40	44	49	55	60	60	60	60	60	60		
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	Menunjukkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	35	36	40	44	49	55	60	60	60	60	60	60		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.923.704		5.802.019		6.310.870		6.639.663		7.068.896		7.299.091	39.044.244	
Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa				1.820.067		1.565.000		1.775.000		1.795.000		1.805.000		1.805.000	10.565.067	PD Informatika, Setda
Tersedianya DATA CENTER di Kabupaten Pemalang	%	Terpenuhinya pelayanan DATA CENTER di Kabupaten Pemalang	0,05	5	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100		
Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah pengawasan isi siaran Radio	Stasiun	Banyaknya penyiaran radio nasional maupun radio lokal yang masuk daerah, jumlah stasiun radio yang diawasi dilingkup kabupaten	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
Cakupan layanan BTS	%	Menunjukkan prosentase layanan BTS di Kab. Pemalang	70	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100		
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				316.000		260.000		360.000		460.000		660.000		660.000	2.716.000	PD Informatika, Setda
Persentase SKPD telah memiliki website (%)	%	Menunjukkan banyaknya SKPD yang telah memiliki website sebagai sarana informasi publik	10	20	40	56	72	84	100	100	100	100	100	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi daerah				184.000	193.200	202.860	213.003	223.653	234.836	1.251.552	PD Informatika, Setda					
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pemalang	Kelompok	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pemalang yang dilakukan Pemberdayaannya oleh Pemda Kab/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah	10	11	12	13	14	15	16	16						
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi				2.120.250	2.226.263	2.337.576	2.454.454	2.577.177	2.706.036	14.421.756	PD Informatika, Setda					
Persentase SKPD yang telah memiliki website	%	Prosentase jumlah website SKPD dibandingkan dengan jumlah SKPD	62	100	100	100	100	100	100	100	100					
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa				1.483.387	1.557.556	1.635.434	1.717.206	1.803.066	1.893.219	10.089.869	PD Informatika, Setda, Setwan					
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui :	Kali dalam setahun	Menunjukkan Jumlah kegiatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:														
- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;		- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	0	1	1	1	1	1	1	1	1					
- Media baru seperti website (media online);		- Media baru seperti website (media online);	2	4	4	4	4	4	4	4	4					
§ Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;		- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	0	1	1	1	1	1	1	1	1					
§ Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau		- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau	0	1	1	1	1	1	1	1	1					
§ Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.		- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
KOPERASI DAN UKM				3.415.000	5.693.750	5.467.688	5.486.822	456.163	460.721	20.980.143						
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif				100.000	110.000	120.000	125.000	130.000	130.000	715.000	PD Koperasi UMKM					
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	unit	Menunjukkan Usaha Mikro dan Kecil	13.427	14.098	14.874	15.766	16.744	17.790	18.911	18.911						
Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah				3.090.000	5.342.000	5.094.100	5.096.305	48.620	51.051	18.722.077	PD Koperasi UMKM	Pendirian Kawasan Pusat Layanan Usaha Terpadu (center ekpo, Rest Area dan PLUT)				
Jumlah LKM Koperasi dan UKM	unit	Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.	8	15	15	17	20	25	30	30						
Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	unit	Menunjukkan banyaknya UKM yang telah mengikuti pameran/ promosi produk.	5	10	20	20	20	20	20	20						
Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				190.000	205.000	215.000	225.000	235.000	235.000	1.305.000	PD Koperasi UMKM					
Persentase koperasi aktif	%	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha	69,96	70	71	72	73	74	75	75						
Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	Memunjukkan persentase koperasi simpan pinjam atau Unit simpan pinjam koperasi yang sehat	29,9	30	30	30	30	30	30	30						

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menanamkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				35.000	36.750	38.588	40.517	42.543	44.670	238.067	PD Koperasi UMKM						
Cakupan bina UMKM	Orang	Menunjukkan jumlah UMKM yang dibina	200	250	275	300	325	350	400	400							
PENANAMAN MODAL				935.685	719.813	724.813	730.063	735.575	741.363	4.587.311							
Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi				379.407	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551	931.970	PD Penanaman Modal, Setda						
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	724.604.689.677	724.604.689.677	729.604.689.677	734.604.689.677	739.604.689.677	744.604.689.677	749.604.689.677	749.604.689.677							
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				429.768	493.303	493.303	493.303	493.303	493.303	493.303	2.896.281	PD Penanaman Modal					
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Orang	Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya	19	21	23	25	27	29	31	31							
Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	%	Persentase pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat dilayani di PTSP	100	100	100	100	100	100	100	100							
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	PD Penanaman Modal						
Jumlah tenaga terserap tenaga kerja	Orang	daya serap tenaga kerja yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.	5.967	5.967	6.467	6.967	7.467	7.967	8.467	8.467							
Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan				26.510	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510	159.060	PD Penanaman Modal, Setda						
Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani.	%	Membandingkan antara jumlah pengaduan pelayanan perijinan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah pengaduan pelayanan perijinan yang masuk.	100	100	100	100	100	100	100	100							
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.400.000	1.851.750	2.171.838	2.545.429	2.722.701	2.803.836	13.495.554							
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				-	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	2.200.000	PD Pemuda dan Olahraga						
Jumlah kegiatan kepemudaan	Kali	Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau "event" kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.	27	28	30	32	34	36	38	38							
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				550.000	577.500	606.375	636.694	668.528	701.955	3.741.052	PD Pemuda dan Olahraga						
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kali	kegiatan atau "event" kepemudaan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada pemuda	7	7	7	7	7	7	7	7							

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan										200.000		200.000		200.000	600.000	PD Pemuda dan Olahraga	
Jumlah Organisasi Pemuda	Klp	Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.	23	23,00	-	24,00	-	25,00	-	26,00		27,00		28,00	28		
Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga						785.000	824.250	865.463	908.736	954.172	1.001.881	5.339.502	PD Pemuda dan Olahraga				
Jumlah klub olahraga	Klp	Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,258	0,26	-	0,26	-	0,26	0,26	0,27	0,27	0,266					
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga						65.000	50.000	300.000	400.000	400.000	400.000	1.615.000	PD Pemuda dan Olahraga				
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Rasio	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) adalah perbandingan antara gelanggang remaja per seribu penduduk di suatu kabupaten	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1					
Rasio Lapangan olahraga	Rasio	Rasio lapangan olahraga adalah perbandingan antara lapangan olahraga per seribu di suatu kabupaten (tidak termasuk lapangan olah raga sekolah)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22					
STATISTIK					232.370	243.989	256.188	268.997	282.447	296.570	1.580.560						
Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah					232.370	243.989	256.188	268.997	282.447	296.570	1.580.560	PD Statistik dan Setda					
Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang Dalam Angka	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Jumlah dokumen Kecamatan Dalam Angka	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Jumlah dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Jumlah dokumen Indikator Penting pembangunan daerah Kabupaten Pemalang	%	Prosentase jumlah dokumen yang disediakan dibandingkan jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
PERSANDIAN					199.305	644.665	709.132	675.000	692.549	591.803	3.512.454						
Program pengembangan data/informasi Persandian					199.305	644.665	709.132	675.000	692.549	591.803	3.512.454	PD Persandian					
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	Menunjukkan jumlah informasi rahasia yang tersampaikan kepada KDH	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100					
KEBUDAYAAN					982.550	26.839.000	24.884.950	14.927.948	6.039.308	6.087.206	79.760.961						
Program pengembangan Nilai Budaya					15.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	145.000	PD Kebudayaan					
Jumlah tradisi kesenian yang telah mendapatkan sertifikasi HAKI		Menunjukkan jumlah kesenian asli daerah yang telah mendapatkan sertifikat HAKI	1	1	1	2	2	2	2	3	3						
Program pengelolaan kekayaan budaya					103.550	20.055.650	20.058.433	10.061.354	5.064.422	5.067.643	60.411.051	PD Kebudayaan	Pembangunan Masjid Agung				
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Menunjukkan persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	58	61	64	67	70	73	73	76							

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				564.000	6.448.350	4.470.768	4.494.306	580.234	606.678	17.164.336	PD Kebudayaan	Pembangunan Rumah Budaya				
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi/dibina	%		7,18	7,47	7,77	8,06	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35					
Cakupan Kajian Seni	%	Kegiatan yang bersifat kajian adalah:	27	33	33	33	33	33	33	33	33					
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni	75	75	75	75	75	75	75	75	75					
Cakupan Organisasi seni	%	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk:	67	67	67	67	67	67	67	67	67					
Cakupan Tempat umum	%	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:	50	50	50	50	100	100	100	100	100					
Cakupan Gelar Seni	%	Wujud gelar seni antara lain:	75	75	75	75	75	75	75	75	75					
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				300.000	315.000	330.750	347.288	364.652	382.884	2.040.574	PD Kebudayaan					
Cakupan Fasilitasi Seni	%	Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah:	43	57	57	57	57	57	57	57	57					
PERPUSTAKAAN				996.600	1.181.099	1.264.536	1.355.610	1.423.167	1.457.244	7.678.257	3.813.833	PD Perpustakaan				
Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				560.700	588.735	618.172	649.080	681.534	715.611	3.813.833	PD Perpustakaan					
Jumlah perpustakaan			174	197	221	235	249	262	275	275	275					
Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	Menunjukkan jumlah gedung perpustakaan milik pemerintah, baik perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa.	14,45	15,31	15,91	17,09	18,15	19,16	21,90	21,90	21,90					
Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan				221.200	351.200	402.700	440.500	446.000	446.000	2.307.600	PD Perpustakaan					
Jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan pendidikan kepustakawanan	Orang	Peningkatan kualitas Pengelola perpustakaan umum dan khusus yang ditunjukkan oleh banyaknya Pengelola yang mengikuti Bimbingan Teknis dan sejenisnya	475	515	555	595	635	675	715	715	715					
Angka kunjungan perpustakaan per tahun	%	Pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun, Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.	3,36	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	4,75	4,75					
Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan				214.700	241.164	243.664	266.030	295.633	295.633	1.556.824	PD Perpustakaan					
Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	Banyaknya jenis (Aneka ragam) koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.	18.297	19.163	20.029	20.895	21.761	22.627	24.520	24.520	24.520					
	Eksemplar		30.952	31.818	32.684	33.550	34.416	35.282	38.398	38.398	38.398					
KEARSIPAN				255.520	245.150	276.383	333.702	350.112	352.117	1.812.983						
Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah				132.520	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	477.520	PD Kearsipan, Setda					
Persentase arsip yang dialihmediakan	%	Menunjukkan banyaknya dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk multimedia	15	15	15	20	15	15	15,00	15,00	15,00					
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan				65.000	115.000	135.000	180.000	190.000	190.000	875.000	PD Kearsipan					
Persentase arsiparis yang memiliki kompetensi	%	Menunjukkan jumlah pengelola arsip yang mampu melaksanakan tata laksana kearsipan dengan benar	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				33.000	34.650	36.383	38.202	40.112	42.117	224.463	PD Kearsipan					
Pengelolaan arsip secara baku	%	Perbandingan jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap jumlah SKPD	15,58	21,15	21,15	30,77	40,38	50,00	59,62	59,62	59,62					

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganugerahkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
Persentase Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%	Menunjukkan jumlah desa/kelurahan yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku	58,56	63,96	72,97	81,98	90,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.				25.000	30.500	35.000	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	236.000	PD Kearsipan		
Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dalam kondisi baik															
- Gedung	%		90,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00			
- Ruang	%		37,50	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
- Peralatan	%		33,33	35,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.274.733	39.346.367	36.700.956	19.051.640	11.736.396	12.193.396	130.303.489							
Program Pengembangan Perikanan Tangkap				3.273.376	18.086.077	17.825.077	8.324.076,50	2.241.076,00	2.431.076,00	52.180.759	PD Kelautan dan Perikanan	TPI dan Penyiapan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional					
Produksi Perikanan Tangkap	Kg	Produksi perikanan tangkap menunjukkan jumlah produksi perikanan tangkap	26.882.859	15.573.552	15.885.023	16.202.724	16.526.778	16.857.314	17.194.460	17.194.460							
Program Pengembangan Budidaya Perikanan				5.162.682	2.724.681	2.984.490	3.267.564	3.577.320	3.577.320	21.294.057	PD Kelautan dan Perikanan						
Produksi Perikanan Budidaya	Kg	Produksi perikanan budidaya menunjukkan jumlah produksi budidaya perikanan	12.008.780	13.081.112	14.459.000	15.529.000	16.698.000	17.638.000	18.652.000	18.652.000							
Program Penyediaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya				700.000	960.000	1.120.000	1.280.000	1.440.000	1.600.000	7.100.000	PD Kelautan dan Perikanan						
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar.					15.085.000	12.125.000	4.165.000	2.235.000	2.210.000	35.820.000	PD Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kawasan Minapolitan					
program optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan				1.538.675	1.615.609	1.696.389	980.000	1.078.000	1.185.000	8.093.673	PD Kelautan dan Perikanan						
Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina	%	Perbandingan antara jumlah kelompok pengolahan ikan yang dibina dibandingkan dengan jumlah kelompok pengolah ikan di Kabupaten Pemalang	265,00	265,00	270,00	275,00	280,00	285,00	290,00	290							
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir				395.000	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000	3.395.000	PD Kelautan dan Perikanan						
Cakupan Bina Masyarakat Pesisir (orang)	Orang	Menunjukkan banyaknya masyarakat pesisir yang dibina	375,00	375,00	425,00	475,00	525,00	575,00	625	625							
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut				205.000	325.000	375.000	435.000	540.000	540.000	2.420.000	PD Kelautan dan Perikanan						
Luas lahan mangrove	ha	luas lahan yang ditanami mangrove	136	136,00	137,00	138,00	139,00	140,00	141	141							
PARIWISATA				12.557.600	29.257.468	27.587.841	20.647.233	22.879.595	25.328.575	138.258.313							
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				741.160	3.328.218	3.494.629	3.519.360	5.395.328	7.865.095	24.343.790	PD Pariwisata						
Kunjungan wisata		Kunjungan wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun.															
- Wisnus	Org		660.925	665.000	690.000	705.000	720.000	735.000	750.000	750.000							
Rata-rata lama tinggal																	
- Wisnus	Malam	Rata-rata lama menginap oleh wisatawan dalam negeri selama melakukan kunjungan wisata	1	1	1	1	1	1	1	1							

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memasukkan	Nama Program		
				2016		2017		2018		2019		2020					2021	
Program pengembangan Destinasi Pariwisata					11.500.115		25.829.250		23.943.213		16.977.873		17.284.267		17.263.480	112.798.198	PD Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata
Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	Menunjukkan jumlah obyek wisata unggulan daerah	1	1		1		2		2		3		3		3		
Tingkat occupancy hotel	%	Tingkat hunian hotel	58	53		56		59		62		65		70		70		
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata					316.325		100.000		150.000		150.000		200.000		200.000	1.116.325	PD Pariwisata	
Persentase pramuwisata bersertifikat	%	Menunjukkan jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikat	19	23		26		29		30		32		35		35		
BERTANIAN					19.726.800		17.387.816		13.037.558		13.419.173		14.617.321		14.816.321	93.004.989		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					775.000		553.250		586.250		619.250		652.250		685.250	3.871.250	PD Pertanian	
Cakupan bina kelompok petani	Klp	Menunjukkan jumlah kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah																
- Gapoktan PUAP	Klp	Menunjukkan banyaknya Gapoktan PUAP yang mampu melaksanakan RAT dari hasil pembinaan dari pemerintah kabupaten	120	125		130		135		140		145		150		150		
- Kelompok Tani	Klp	Menunjukkan banyaknya kelompok tani tanaman pangan/perkebunan/peternakan yang mendapat bantuan/ pembinaan dari pemerintah kabupaten	1.302	1.302,00		1.312,00		1.322,00		1.332,00		1.342,00		1.352,00		1.352		
Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan					12.981.690		3.760.000		3.880.000		3.970.000		5.030.000		5.090.000	34.711.690	PD Pertanian	Pengembangan Budidaya Salibu
Produksi pertanian tanaman pangan utama	Ton	Menunjukkan banyaknya produksi pertanian tanaman pangan utama	649.707	449.491,00		452.876,00		456.291,00		459.739,00		463.215,00		466.702,00		466.702		
Produksi pertanian tanaman hortikultura utama	Ton	Menunjukkan banyaknya produksi pertanian tanaman hortikultura utama	57.181,70	57.181,70		58.015,00		59.206,00		60.434,10		61.699,20		63.003,90		63.003,9		
Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan Peternakan					3.060.000		10.665.000		5.725.000		5.780.000		5.835.000		5.900.000	36.965.000	PD Pertanian	Pengembangan Kawasan Agropolitan (Durian, Mangga dan Nanas)
Produksi komoditas perkebunan utama	Ton	Menunjukkan banyaknya produksi hasil pertanian	15.642,49	13.230,49		14.182,00		14.325,00		14.468,00		14.612,00		14.759,00		14.759		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					115.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	415.000	PD Pertanian	
Populasi komoditas peternakan utama	Ekor	Menunjukkan banyaknya populasi ternak	12.836.438	12.836.438		12.867.688		12.899.249		12.931.125		12.963.318		12.995.831		12.995.831		
Jumlah produksi peternakan	Kg	Menunjukkan banyaknya produksi daging	18.119.345	18.119.345		18.349.428		18.430.056		18.511.453		18.593.630		18.676.590		18.676.590		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					388.650		192.066		198.308		205.923		210.071		210.071	1.405.089	PD Pertanian	
Angka kesakitan / morbiditas ternak	%	Menunjukkan persentase ternak yang sakit		5,24		5,22		5,20		5,18		5,17		5,15		5,15		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan					940.400		614.000		634.000		654.000		674.000		694.000	4.210.400	PD Pertanian	
Promosi hasil produksi pertanian	Kali	Menunjukkan banyaknya kegiatan promosi pertanian	5	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan					1.073.060		1.543.500		1.954.000		2.130.000		2.156.000		2.177.000	11.033.560	PD Pertanian	Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Desa Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik
Pertumbuhan pematangan hewan di UPT RPH	Ekor	Menunjukkan jumlah hewan ternak yang dipotong di RPH	7.825,00	7.825,00		7.857,00		7.890,00		7.925,00		7.965,00		8.150,00		8.150		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menanggung Biaya	Nama Program Prioritas Bupati	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan					393.000											393.000	PD Pertanian	
Banyaknya penyuluh yang melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok dalam satu tahun	%	persentase penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat teknis dan inovasi pertanian	20	25		50		65		80		90		100		100		
KEHUTANAN					2.173.179											2.173.179		
Program rehabilitasi hutan dan lahan					890.380											890.380	PD Kehutanan	
persentase lahan kritis yang direhabilitasi		Menunjukkan jumlah lahan kritis yang direhabilitasi	88,42	90,00														
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan					948.000											948.000	PD Kehutanan	
Jumlah produksi hasil hutan non kayu	ton	Jumlah produksi hasil hutan selain kayu (pinus,dammar,kayu putih)	3.457	3.457														
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan					25.000											25.000	PD Kehutanan	
Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina	unit	jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina	36,00	36,00														
Program perencanaan dan pengembangan hutan					309.799											309.799	PD Kehutanan	
Jumlah produksi hasil hutan kayu	M ³	Jumlah produksi hasil hutan berupa kayu bersertifikat yang dinyatakan dalam hitungan meter kubik (m ³)	27.712	27.712														
PERDAGANGAN					46.484.000		51.451.950		110.699.548		80.852.025		32.259.626		24.372.607	346.119.756		
Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan					200.000		210.000		220.500		231.525		243.101		255.256	1.360.383	PD Perdagangan	
Jumlah sidang tera ulang (lokasi)	lokasi	Menunjukkan tera ulang Alat Ukur Takar dan Timbang (UTTP) dan perlengkapannya di wilayah Kabupaten Pemalang, meliputi pasar, Rumah Sakit, SPBU, PDAM, PLN.	32	32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32		
Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi	unit	Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi	72	72,00		72,00		72,00		72,00		72,00		72,00		72		
Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	Menunjukkan banyaknya pengaduan yang masuk ke BPSK dengan banyaknya kasus yang diselesaikan.	60	60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		80		80		
Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional					300.000		300.000		300.000		350.000		350.000		350.000	1.950.000	PD Perdagangan	
Jumlah pasar lelang dan promosi dagang yang diikuti	kali	Menunjukkan keikutsertaan dalam pasar lelang dan promosi dagang	8	8,00		8,00		8,00		9,00		9,00		10		10		
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor					75.000		100.000		150.000		150.000		150.000		150.000	775.000	PD Perdagangan	
Nilai Ekspor	ribu US\$	Menunjukkan nilai ekspor perdagangan	11.586	11.750,00		12.000,00		12.250,00		12.500,00		12.750,00		13.000		13.000		
Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri					45.859.000		50.741.950		109.829.048		79.920.500		30.016.525		22.117.351	338.484.373	PD Perdagangan	Pembangunan pasar pagi dan Pasar Unggas; Revitalisasi Pasar-pasar daerah (Randudongkal, Petarukan, Paduraksa, Banjardawa, Warungpring, Ulujami, Belik, Bantarbolang, Moga, Comal dan Pasar Anyar)
Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	kelompok	Menunjukkan banyaknya jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina oleh pemerintah daerah.	68	15,00		16,00		17,00		18,00		19,00		20		20		
Jumlah pasar daerah	unit	Menunjukkan jumlah pasar daerah yang dikelola (fisik maupun manajemen).	17	17,00		17,00		18,00		18,00		18,00		18		18		
Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	unit	Menunjukkan jumlah pasar daerah yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan nyaman.	0	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2		2		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menetapkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan				50.000	100.000	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	3.550.000	PD Perdagangan						
Lokasi PKL yang tertata	lokasi	Memunjukkan banyaknya lokasi PKL yang tertata (akumulasi)	3	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	2,00	2							
ESDM				150.000						150.000	PD ESDM						
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan				150.000						150.000							
Jumlah PETI	Orang/ Titik	Memunjukkan jumlah titik penambangan tanpa ijin yang terjadi di Kabupaten Pemalang															
PERINDUSTRIAN				1.560.991	1.838.541	1.931.468	2.179.791	1.788.531	1.797.707	11.097.028							
Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi				150.991	158.541	166.468	174.791	183.531	192.707	1.027.028	PD Perindustrian						
Cakupan kelompok IKM yang dibina	%	Cakupan kelompok IKM yang dbina merupakan persentase kelompok IKM yang mendapat pembinaan Pemda terhadap total kelompok IKM.	13	20% dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk	20 % dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk	20 % dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk	20 % dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk	20 % dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk	20 % dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk	20 % dari jumlah kelompok yg akan dibina sebanyak 150 klmprk							
Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan merupakan persentase kelompok IKM yang mendapat bantuan dari pemda terhadap jumlah kelompok IKM yang dibina.	IKAH 50 Aneka 96,60	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %	kelompok IKM yang dibantu 86,67 %							
Program pengembangan industri kecil Dan menengah				1.160.000	1.355.000	1.440.000	1.490.000	1.515.000	1.515.000	8.475.000	PD Perindustrian						
Pertumbuhan IKM	%	Pertumbuhan IKM merupakan rata-rata pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah.	5,47	5,80	6,10	6,40	6,70	7,00	7,3	7,3							
Persentase industri kecil dan menengah	%	Jumlah industri menunjukkan jumlah perusahaan industri mikro, kecil dan menengah	99,97	99,97	99,97	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98							
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				250.000	200.000	250.000	325.000	0	0	1.025.000	PD Perindustrian						
Jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	unit	Jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain)	0	1	2	1	2	-	-	-	IKAH 3 (Vitanas, garam, helm)						
Program Penataan Struktur Industri				-	50.000	-	#####	-	-	150.000	PD Perindustrian						
Jumlah klaster industri yang berkembang	klaster	Memunjukkan banyaknya klaster industri yang berkembang	2	2	3	3	4	4	4	4							
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial				-	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	420.000	PD Perindustrian						
Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	produk	Memunjukkan jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	27	27	27	27	27	27	27	27							
TRANSMIGRASI				450.000	520.000	520.000	540.000	540.000	540.000	3.110.000							
Program Transmigrasi Umum				345.000	405.000	405.000	425.000	425.000	425.000	2.430.000	PD Transmigrasi						
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	orang	Jumlah calon transmigran yang dilatih tentang kemampuan dasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan kompetensi.	25	25	25	25	25	25	25	25							
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	orang	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ke daerah transmigrasi	18	25	25	25	25	25	25	25							
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	680.000	PD Transmigrasi						
Jumlah MoU yang disusun bersama dengan wilayah transmigrasi	MoU	Jumlah kerjasama yang dibangun dengan pemerintah daerah wilayah tujuan transmigrasi		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2							
URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN				8.641.835	7.741.208	7.316.000	7.766.000	7.516.000	8.176.000	47.157.043							
Program Pengembangan Data/Informasi				500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	3.375.000	PD Penunjang Perencanaan						
dokumen data yang tersedia	%	Jenis data yang disusun untuk kepentingan penyusunan perencanaan daerah dibagi jumlah data yang harus disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100							

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Memonopoli Perencanaan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Program Kerjasama Pembangunan				1.563.228	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	8.163.228	PD Penunjang Perencanaan					
dokumen kerjasama	buah	Jumlah kerjasama yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	0	1	1	1	1	1	1	6						
Program Perencanaan Kota Kota Menengah dan Besar				339.847,5	325.000	350.000	375.000	400.000	425.000	2.214.848	PD Penunjang Perencanaan					
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perkotaan	%	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota kota besar dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	0	100	100	100	100	100	100	100						
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.728.905	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	7.728.905	PD Penunjang Perencanaan, Setda					
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasinya yang tersusun	%	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang disusun dibagi jumlah dokumen yang harus ada	100	100	100	100	100	100	100	100						
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				1.820.500	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	10.250.500	PD Penunjang Perencanaan					
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersedia	%	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	100	100	100	100	100	100	100	100						
Program Perencanaan Sosial dan Budaya				485.000	325.000	350.000	400.000	425.000	450.000	2.435.000	PD Penunjang Perencanaan					
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersedia	%	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	100	100	100	100	100	100	100	100						
Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan				749.147,5	325.000	350.000	400.000	425.000	450.000	2.699.148	PD Penunjang Perencanaan					
Tersedianya Dokumen kajian penelitian dan pengembangan	%	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	100	100	100	100	100	100	100	100						
Program Perencanaan Tata Ruang				1.455.208	1.455.208	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.390.000	8.440.415	PD Penunjang Perencanaan					
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun	%	dokumen tata ruang yang disusun dibagi jumlah dokumen penataan ruang yang harus disusun	100	100	100	100	100	100	100	100						
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dna Cepat Tumbuh					300.000	300.000	650.000	300.000	300.000	1.850.000	PD Penunjang Perencanaan					
Tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersusun	%	dokumen perencanaan Wilayah Strategis yang disusun dibagi jumlah dokumen yang harus disusun	100	100	100	100	100	100	100	100						
KEUANGAN				4.296.800	4.132.000	4.770.000	4.666.000	4.965.000	4.965.000	27.794.800						
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.296.800	4.132.000	4.770.000	4.666.000	4.965.000	4.965.000	27.794.800	PD Penunjang Keuangan					
Rasio realisasi PAD terhadap potensi/Target PAD	%	Menunjukkan prosentase Jumlah realisasi PAD dibagi terhadap potensi PAD	1,12	5,00	6,50	6,90	7,25	7,50	7,80	7,80						
Peningkatan (Pertumbuhan) PAD	%	Menunjukkan prosentase Kenaikan/penurunan PAD terhadap PAD tahun lalu	17,39	6,01	6,05	6,10	6,15	6,17	6,20	6,20						
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	-	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP						
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT				6.726.586	6.976.932	7.319.580	7.544.051	8.066.029	8.066.029	44.699.206						
Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur				1.723.192	3.995.000	4.024.250	4.057.888	4.096.571	4.096.571	21.993.471	PD Penunjang Kepegawaian					
Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	%	prosentase ASN yang mengikuti diklat dibandingkan dengan jumlah ASN	9,15	3,93	3,83	3,63	3,89	3,99	3,99	4,05						
Program Fasilitas Pindah/ Purna PNS				139.132	210.000	253.000	266.450,00	328.417,50	328.417,50	1.525.417	PD Penunjang Kepegawaian					
Persentase ASN yang difasilitasi purna tugasnya tepat waktu	%	Prosentase Jumlah ASN yang mendapat fasilitas Purna Tugas terhadap jumlah seluruh ASN yang pensiun	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100						

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menunjang	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur					611.543	703.274	808.765,08	930.079,88	930.079,88					3.983.741	PD Penunjang Kepegawaian	
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian					2.160.390	2.339.056	2.410.948,24	2.710.960,60	2.710.960,60					12.332.315	PD Penunjang Kepegawaian	
Persentase formasi ASN yang terpenuhi	%	Menunjukkan prosentase jumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi pegawai ASN sesuai formasi yang dibutuhkan berdasarkan anjab & ABK	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					4.864.262									4.864.262	PD Penunjang Kepegawaian	
Tingkat indisipliner pegawai		Jumlah kasus indisipliner yang ditangani kepada BKD	12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
SETWAN					34.930.840	13.611.500	14.112.000	14.362.108	14.864.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	106.744.448		
Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					17.465.420	12.411.500	12.912.000	13.162.108	13.664.000	13.664.000	13.664.000	13.664.000	13.664.000	83.279.028	PD Penunjang Sekwan	
PERDA yang ditetapkan	dok	Jumlah PERDA yang ditetapkan		29	27	28	28	27	27	27	27	27	27	28		
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	dok	Menunjukkan persentase Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibandingkan jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Program peningkatan Kualitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					17.465.420	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	23.465.420	PD Penunjang Sekwan	
RAPERDA yang disetujui DPRD	dok	Menunjukkan persentase RAPERDA yang disetujui DPRD tahun dibandingkan Jumlah RAPERDA yang diusulkan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00		
PENGAWASAN					3.727.239	3.875.000	4.262.500	4.688.750	5.157.575	5.673.387	5.673.387	5.673.387	5.673.387	27.384.451		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					3.508.249	3.530.000	3.883.000	4.271.300	4.698.430	5.168.273	5.168.273	5.168.273	5.168.273	25.059.252	PD Penunjang Pengawasan dan PD Penunjang Keuangan	
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP/R/E	Menunjukkan banyaknya Laporan Hasil Pemeriksaan	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224		
Implementasi Penyelenggaraan SPIP	Level	Menunjukkan Implementasi Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pemalang sesuai dengan standar nilai BPKP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	Menunjukkan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan hasil pemeriksaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					183.585	295.000	324.500	356.950	392.645	431.909	431.909	431.909	431.909	1.984.589	PD Penunjang Pengawasan	
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Menunjukkan kualitas APIP Kabupaten Pemalang sesuai dengan standar nilai BPKP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					35.405	50.000	55.000	60.500	66.500	73.205	73.205	73.205	73.205	340.610	PD Penunjang Pengawasan	
Jumlah dokumen program kerja pemeriksaan tahunan	dokumen	Menunjukkan banyaknya dokumen program kerja pemeriksaan tahunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
SETDA					9.086.503	9.251.078	10.474.316	9.168.295	10.356.276	10.146.400	10.146.400	10.146.400	10.146.400	58.482.866		
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah					1.799.626	1.273.411	1.465.155	1.584.171	1.703.087	1.842.895	1.842.895	1.842.895	1.842.895	9.668.345	PD Penunjang Setda	
Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kepala daerah	%	Kegiatan pemenuhan pelayanan kepala daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021 2.111.605	Perangkat Daerah yang Memonopoli	Nama Program Prioritas Rantai			
				2016		2017		2018		2019		2020					2021		
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					194.062		274.075		321.920		384.381		440.318		496.850		PD Penunjang Setda		
Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah	%	kegiatan pemenuhan pengelolaan keuangan daerah bagi setad	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota					394.804		322.194		372.194		422.194		427.194		477.194		2.415.774	PD Penunjang Setda	
Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah	%	kegiatan pemenuhan pengelolaan keuangan daerah bagi setad	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		600.000	PD Penunjang Setda	
Persentase pembinaan keuangan desa	%	Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi pengelolaan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					636.805		670.000		730.000		790.000		850.000		910.000		4.586.805	PD Penunjang Setda	
Persentase PD yang menggunakan IT dalam pembangunan	%	Jumlah PD yang menggunakan IT dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bagi jumlah IT	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					358.948,5		517.897		775.000		875.000		975.000		1.075.000		4.576.846	PD Penunjang Setda	
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					226.800,0		238.140		250.047		262.549		275.677		289.461		1.542.674	PD Penunjang Setda	
Jumlah MoU Kerjasama antardaerah	unit	Jumlah MoU Kerjasama antar daerah	2	3		3		3		3		3		3		20			
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					3.021.658		2.695.361		3.080.000		3.075.000		3.070.000		3.215.000		18.157.018	PD Penunjang Setda	
Jumlah Prolegda yang diajukan ke DPRD	unit	jumlah prolegda yang diajukan ke DPRD	15	15		15		15		15		15		15		105			
Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah					850.000		1.500.000		1.800.000				800.000				4.950.000	PD Penunjang Setda	
persentase desa yang difasilitasi PILKADES	%	Jumlah desa yang difasilitasi PILKADES dibagi dengan jumlah desa yang PILKADES saat itu	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan					110.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		610.000	PD Penunjang Setda	
Persentase kecamatan yang dibina	%	jumlah kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					513.700		460.000		520.000		580.000		590.000		595.000		3.258.700	PD Penunjang Setda	
Persentase Aparatur yang dibina	%	Jumlah aparatur yang dibina dalam periode waktu tertentu	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi					324.200		380.000		405.000		420.000		430.000		435.000		2.394.200	PD Penunjang Setda	
Jumlah regulasi birokrasi yang disusun	dok	Jumlah regulasi birokrasi yang disusun	5	2		2		2		2		2		2					
Program Pelayanan Publik					230.900		425.000		260.000		280.000		300.000		315.000		1.810.900	PD Penunjang Setda	
Persentase PD yang memiliki SPP	%	Jumlah PD pelayanan publik yang memiliki SPP	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program pengendalian harga dan inflasi daerah					200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.200.000	PD Penunjang Setda	
Prosentase tersedianya kebijakan pengendalian harga dan inflasi	%	Jumlah kebijakan daerah dalam rangka pengendalian harga dan inflasi dibagi jumlah kebijakan yang dibutuhkan	100	100		100		100		100		100		100		100			
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					95.000		95.000		95.000		95.000		95.000		95.000		570.000	PD Penunjang Setda	
Jumlah Aparatur desa yang dibina	%	Jumlah aparatur desa yang dibina dalam periode waktu tertentu	100	100		100		100		100		100		100					

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menunjang Setda	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan					30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	405.000		
Persentase ketersediaan informasi rupabumi dari masing masing wilayah perbatasan	%	Prosentase tersedianya dokumen informasi rupa bumi terhadap kebutuhan informasi rupa bumi di wilayah perbatasan	100	100		100		100		100		100		100			
PROGRAM RUTIN SKPD TEKNIS					55.750.000	58.537.500	62.512.500	65.638.125	68.920.031	72.366.033	383.724.189					Seluruh PD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					13.750.000	14.437.500	15.159.375	15.917.344	16.713.211	17.548.871	93.526.301						
Terperuhnya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	bln	Kebutuhan adminitrasi perkantoran setiap bulan	12	12		12		12		12		12		12			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran					37.500.000	39.375.000	41.343.750	43.410.938	45.581.484	47.860.559	255.071.730						
Terperuhnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bln	Kondisi perkantoran yang nyaman dalam menunjang pelayanan	12	12		12		12		12		12		12			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	1.519.383	1.595.352	8.502.391						
Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	%	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi (melalui pelatihan, diklat) dibagi dengan jumlah SDM yang ada	0%	20		40		60		80		100		100		100	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	1.519.383	1.595.352	8.502.391						
Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	Prosentase dokumen p capaian kinerja dan keuangan disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang harus disusun selama periode 5 tahun	0	20		40		60		80		100		100			
Program Peningkatan Displin Aparatur					1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	1.519.383	1.595.352	8.502.391						
Tingkat kedisiplinan ASN	%	prosentase jumlah ASN yang dinilai dibagi dengan jumlah seluruh ASN	100	100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					750.000	787.500	1.875.000	1.968.750	2.067.188	2.170.547	9.618.984						
Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	%	Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang harus disusun selama periode 5 tahun	0	20		40		60		80		100		100			
PROGRAM RUTIN KECAMATAN					8.090.000	15.554.500	13.332.225	8.623.836	8.930.028	9.251.529	63.782.119					PD Kecamatan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563	2.680.191	14.284.017						
Terperuhnya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	bln	Kebutuhan adminitrasi perkantoran setiap bulan	12	12		12		12		12		12		12			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.800.000	2.940.000	3.087.000	3.241.350	3.403.418	3.573.588							
Terperuhnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bln	Kondisi perkantoran yang nyaman dalam menunjang pelayanan	12	12		12		12		12		12		12			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					250.000	262.500	275.625	289.406	303.877	319.070							
Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	Prosentase dokumen Capaian Kinerja yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang harus disusun selama periode 5 tahun	0	20		40		60		80		100		100		100	
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					140.000	147.000	154.350	162.068	170.171	178.679	952.268						
Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%	Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang harus disusun selama periode 5 tahun	0	20		40		60		80		100		100		100	

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya										Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang Menganugerahkan	Nama Program Prioritas Bupati
				2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.800.000	10.000.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	27.800.000		
Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bln	Kondisi perkantoran yang nyaman dalam menunjang pelayanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Kebutuhan Pendanaan Indikatif				942.980.840	850.543.838	852.851.162	858.138.420	827.318.258	880.380.385	5.212.212.903						
Proyeksi Belanja Langsung (BAB 3)				942.980.840	850.543.838	852.851.162	858.138.420	827.318.258	880.380.385	5.212.212.903						
Surplus/Defisit				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja memiliki peran yang cukup krusial untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Penilaian terhadap kinerja tersebut adalah dengan cara mengukur capaian realisasi kinerja pemerintah daerah terhadap target yang telah ditetapkan pada masing-masing dokumen perencanaan daerah. Kewajiban melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah menuntut pemilihan indikator yang tepat dan baik, sehingga memudahkan dalam pengukuran kinerja pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikangambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini diperlihatkan melalui pencapaian indikator kinerja daerah baik yang dihitung secara mandiri dalam satu tahun atau yang bersifat akumulatif pada tahun terakhir. Penghintungan capaian kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator kinerja daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,43	5,43	5,44	5,45	5,46	5,47	5,48	5,48	Seluruh PD
2.	Laju Inflasi	%	3,52	6,53 - 7,38	6,32 - 7	6,1 - 6,9	5,9 - 6,5	5,8 - 6,3	5,6 - 6,0	5,6 - 6,0	Seluruh PD
3.	PDRB Per Kapita	Rp	11.367.993,38	11.926.161,85	12.511.736,40	13.126.062,66	13.770.552,34	14.446.686,46	15.156.018,76	15.156.018,76	Seluruh PD
4.	Indeks Gini		0,24 (Tahun 2014)	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	Seluruh PD
5.	Persentase penduduk miskin	%	18,44	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	15,4	15,4	Seluruh PD
6.	Indeks Pembangunan Manusia		63,7	64,2	64,7	65,2	65,7	66,2	66,7	66,7	Seluruh PD
	- Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,87 (Tahun 2014)	5,87	5,88	5,89	5,90	5,91	5,92	5,92	PD Urusan Pendidikan
	- Harapan lama sekolah	Tahun	11,26	11,66	12,06	12,46	12,86	13,66	14	14	PD Urusan Pendidikan
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	72,64 (Tahun 2014)	72,96	73,06	73,15	73,25	73,35	73,35	73,35	PD Urusan Kesehatan
	- Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp	7.177.000	7.453.315	7.740.267	8.038.267	8.347.741	8.669.129	9.002.890	9.002.890	Seluruh PD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7.	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	83,85 (Tahun 2014)	84,19	84,53	84,87	85,21	85,55	85,89	85,89	PD Urusan PP dan PA
8.	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	68,41 (Tahun 2014)	68,87	69,33	69,79	70,25	70,71	71,17	71,17	PD Urusan PP dan PA
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,13	7,11	7,03	7	6,93	6,87	6,87	6,87	PD Urusan Ketenagakerjaan
B.	Aspek Pelayanan Umum										
10.	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Pendidikan
11.	Angka Kelulusan SMP/Mts	%	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Pendidikan
12.	Angka Melanjutkan SD/MI	%	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	98,90	98,90	98,90	PD Urusan Pendidikan
13.	Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	87,6	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	88,10	88,10	PD Urusan Pendidikan
14.	Angka kunjungan ke perpustakaan	%	3,36	5,26	7,14	6,67	6,25	5,88	5,56	5,56	PD Urusan Perpustakaan
15.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,86	72,86	72,96	73,06	73,15	73,25	73,35	73,35	PD Urusan Kesehatan
16.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	120	120	116	112	108	104	100	100	PD Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
17.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	10	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7,5	PD Urusan Kesehatan
18.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	11	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8,5	PD Urusan Kesehatan
19.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,030	0,030	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,025	PD Urusan Kesehatan
20.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,49	2,48	2,47	2,46	2,45	2,44	2,43	2,43	PD Urusan Pengendalian Penduduk
21.	Persentase PMKS yang tertangani	%	13,03	18,75	24,46	30,17	35,89	41,60	47,32	47,32	PD Urusan Sosial
22.	Persentase kepemilikan KTP	%	95	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	99,50	PD Urusan Dukcapil
23.	Persentase Anak memiliki Akta Kelahiran	%	80	95,00	95,60	96,00	96,50	97,00	98,00	98,00	PD Urusan Dukcapil
24.	Produktivitas padi	kw/ha	57,00	57,00	52,33	52,96	53,59	54,24	54,89	54,89	PD Urusan Pertanian
25.	produktivitas jagung	kw/ha	54,72	57,61	57,63	57,65	57,67	57,69	57,91	57,91	PD Urusan Pertanian
26.	produktivitas Kedelai	kw/ha	15,00	15,00	15,56	16,00	16,60	17,20	17,80	17,80	PD Urusan Pertanian
27.	Produksi Komoditas peternakan utama	kg	18.119.345	18.119.345	18.349.428	18.430.056	18.511.453	18.593.630	18.676.590	18.676.590	PD Urusan Pertanian
28.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	72,10	75,20	78,30	81,40	84,50	87,60	87,60	87,60	PD Urusan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
29.	Ketersediaan cadangan pangan	%	60	5	15	30	40	50	60	60	PD Urusan Ketahanan Pangan
30.	produksi perikanan tangkap	kg	26.882.859	15.573.552	15.885.023	16.202.724	16.526.778	16.857.314	17.194.460	17.194.460	PD Urusan Kelautan dan Perikanan
31.	Produksi perikanan budidaya	kg	12.008.780	13.081.112	14.459.000	15.529.000	16.698.000	17.638.000	18.652.000	18.652.000	PD Urusan Kelautan dan Perikanan
32.	Persentase koperasi sehat	%	29,9	29,9	30	30	30	30	30	30	PD Urusan Koperasi
33.	Persentase pertumbuhan IKM	%	5,47	5,80	6,1	6,40	6,7	7	7,3	7,30	PD Urusan Industri
34.	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Na	4,43	4,45	4,5	4,55	4,60	4,65	4,65	PD Urusan Perdagangan
35.	Peningkatan wisatawan	%	2,04	2,04	2,04	2,08	2,13	2,15	2,17	2,17	PD Urusan Pariwisata
36.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	89,29	87,12	90	95	100	100	100	100	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
37.	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	65	66	67	68	69	70	71	71	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
38.	Persentase RTLH	%	Na	4,17	8,33	12,50	16,67	20,83	25	25	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
39.	Cakupan wilayah kumuh	%	4,70	4	3	2	0	0	0	0	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
40.	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Lingkungan Hidup
41.	Persentase penurunan konflik sosial	%	NA	5	5	5	5	5	5	5	PD Urusan Trantibumlin mas
42.	Skor Akuntabilitas	Nilai	15	15	30	40	60	70	80	80	PD Urusan Penunjang (Setda dan Perencanaan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
43.	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	PD Urusan Penunjang Keuangan
44.	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	Skor	80	80	80	85	85	90	90	90	PD Penunjang Lainnya (Setda)
45.	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hotspot	Na	3	6	9	12	14	14	14	PD Urusna Kominfo
46.	Cakupan kelompok seni yang aktif	%	30	40	50	55	60	65	70	70	PD Urusan
47.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	58	61	64	67	70	73	73	73	PD Urusan
48.	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	70	78	81	83	85	87	90	90	Seluruh PD
49.	Nilai LKjIP	Nilai	C	C	CC	CC	B	B	B	B	PD Perencanaan Pembangunan PD Setda
50.	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	85	90	90	90	90	95	95	95	PD Perencanaan Pembangunan
C.	Aspek Daya Saing Daerah										
51.	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	717.104.689.677	724.604.689.677	729.604.689.677	734.604.689.677	739.604.689.677	744.604.689.677	749.604.689.677	749.604.689.677	PD Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
52.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	35	36	40	44	49	55	60	60	PD Urusan Perhubungan
53.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	86,05	87	88	90	91	92	93	93	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
54.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95,70	96	97	98	99	100	100	100	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
55.	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	55,22	60	63	65	70	73	75	75	PD Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih memiliki masa Jabatan selama 5 (lima) tahun yang akan diemban sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan 16 Pebruari 2021. Dengan demikian *time frame* RPJMD dimaksud sama dengan masa jabatan pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk dokumen RKPD, meliputi Perubahan RKPD 2016, RKPD 2017, RKPD 2018, RKPD 2019 dan RKPD 2020 serta RKPD 2021.

10.2 Kaidah Pelaksanaan.

RPJMD ini merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan tata kala yang sama yaitu 2016-2021. Disamping itu RPJMD ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran. Penyusunan RPJMD ini mendapatkan masukan masyarakat melalui konsultasi publik dan forum musrenbang, dengan harapan program-program yang ada di dalam RPJMD ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJMD ini nantinya juga akan menjadi dasar bagi Kepala Daerah dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Kepala Daerah dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan penilaian. RPJMD ini merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap *stakeholder* di Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.

Mengingat dokumen RPJMD ini memiliki kurun waktu selama 5 tahun, ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid-term evaluation*) untuk mengetahui sejauhmana terjadi ketidaksesuaian atau distorsi. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dokumen RPJMD apabila dalam evaluasi tersebut ditemukan ketidak-cocokan, inkonsistensi, maupun disharmonisasi antara amanat Undang-Undang dengan substansi RPJMD.

Penyusunan dan perumusan program dan indikator kinerja dalam RPJMD ini mengacu sejumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah RTRW Kabupaten Pemalang.

Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran seluruh program-program yang mendukung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Pemalang untuk menjadi Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.

BAB XI

PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

RPJMD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD, Penyusunan Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian visi misi secara keseluruhan.

Selanjutnya melalui pelaksanaan program – program prioritas tahun 2016 – 2021 ini diharapkan mampu mendukung upaya tercapainya cita-cita untuk mewujudkan Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.

BUPATI PEMALANG

TTD

JUNAEDI